SUKSES SWASEMBADA

Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SUKSES SWASEMBADA

Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

SUKSES SWASEMBADA

Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

Diterbitkan oleh :

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Penulis :

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP
Prof. (Riset) Dr. Ir. Pantjar Simatupang, MS
Prof. (Riset) Dr. Ir. Irsal Las, MS
Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi
Dr. Ir. Hermanto, MP
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, MSi
Dr. Ir. Syahyuti, MSi
Dr. Ir. Sony Sumaryanto, MS
Dr. Ir. Suwandi, MSi
Dr. Ir. Kasdi Subagyono, MSc

Editor :

Prof. (Riset) Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MS
Hermanto, S.Sos

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Segala bentuk penggandaan, penerjemahan, atau reproduksi, baik melalui media cetak maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.

Cetakan Pertama :
Oktober 2017

ISBN : 978 979 15689 8 2

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN

Tugas besar dan berat bangsa ini adalah berdaulatnya pangan dan sejahteranya masyarakat khususnya petani. Bukan hanya sampai di situ, mimpi besar di saat seratus tahun kemerdekaan menjadi momentum tercapainya visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Visi ini sangat mulia dan sulit tapi bukan mustahil untuk dicapai. Sebagai Menteri Pertanian dalam kabinet Kerja, kami harus dapat mewujudkan swasembada pangan dengan prioritas awal swasembada beras.

Lumbung pangan dunia akan sulit terpenuhi jika kita salah dalam membangun fondasinya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat dalam penentuan kebijakan. *Pertama,* pengembangan kawasan perlu dijadikan dasar dalam mengembangkan komoditas-komoditas pertanian yang berdaya saing. *Kedua,* salah satu perwujudan membangun dari pinggiran adalah memperhatikan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan dan perdesaan menjadi lumbung pangan guna penyangga kota-kota besar dan ekspor ke negara tetangga. *Ketiga,* ketika swasembada sudah di depan mata maka kita harus berani mempromosikan ekspor dan mengendalikan impor. *Keempat,* jangan lupakan sejarah pernah swasembada, maka buatlah strategi dan wujudkan swasembada berkelanjutan. *Kelima,* atur tata niaga agar petani lebih sejahtera.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam mewujudkan kelima hal tersebut, tentunya kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, tanpa kerja keras mustahil akan terwujud. Ingatlah, populasi penduduk semakin bertambah dengan perkiraan mencapai 318 juta jiwa di tahun 2045 di Indonesia. Guna menghadapi permasalahan pangan dan mewujudkan fondasi yang kuat maka kita harus berani membuat terobosan dan akselerasi. Pencapaian peningkatan produksi pangan dalam dua tahun ini bisa kita raih dengan: 1). Perbaikan regulasi seperti merevisi Perpres pengadaan barang dan jasa yang semula melalui tender menjadi penunjukan langsung untuk penyediaan benih dan pupuk sehingga realisasinya tepat waktu menjelang masa tanam; 2). Refocusing anggaran 2015-2017 sebesar Rp 12,2 triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehab gedung menjadi rehab irigasi, alat mesin pertanian dan lainnya untuk petani langsung; 3). Bantuan benih yang disalurkan ke petani tidak di lahan existing untuk menambah luas tanam; 4) Pengawalan program Upaya Khusus (Upsus) dan evaluasi harian; 5) Deregulasi perizinan dan investasi serta penyaluran asuransi usaha pertanian.

Sebagai bentuk keseriusan membangun fondasi menuju lumbung pangan dunia, maka bisa dilihat dari kebijakan dan program yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir ini. Perbaikan irigasi untuk 3 juta hektare dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun. Pembangunan embung, *longstorage* dan dam parit mencapai 3.771 unit. Penyediaan alsintan 180 ribu unit (naik 2.000 persen), asuransi pertanian 674.650 hektare (naik 100 persen), dan pengembangan benih unggul untuk memenuhi 2 juta hektare penanaman padi. Selain itu, Pemerintah juga membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan negara, integrasi jagung-sawit 233 ribu ha, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan lahan rawa lebak dan sapi indukan wajib bunting. Program lainnya adalah membangun Toko Tani Indonesia sebanyak 1.218 unit atau naik 100 persen. Dengan fondasi pembangunan pertanian yang semakin kuat, Indonesia mampu melewati ancaman peristiwa El Nino 2015 dan La Nina 2016. Keberhasilan beradaptasi terhadap perubahan iklim, menjadikan tidak ada lagi musim paceklik karena produksi pangan bisa dipertahankan dan ditingkatkan sepanjang tahun. Hasilnya adalah kebutuhan pangan terpenuhi dan impor pangan menurun bahkan tidak ada impor pangan pada tahun 2016.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Selain tantangan yang cukup besar, Indonesia juga memiliki potensi sumberdaya pertanian yang melimpah. Indonesia termasuk daerah tropis dengan plasma nutfah (*biodiversity*) nomor dua terbesar di dunia setelah Brasil. Artinya, kita punya komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sangat beragam jenisnya. Indonesia juga mempunyai lahan cukup luas yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Penerapan inovasi dan teknologi mampu mengubah lahan sub-optimal menjadi lahan-lahan produktif. Total luas daratan Indonesia adalah sebesar 191,1 juta ha, terbagi atas 43,6 jta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luas tersebut yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 15,9 juta ha. Potensi ketersediaan sumberdaya lahan untuk pengembangan padi sawah 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, dan tanaman cabai dan merah dataran tinggi sekitar 154,1 ribu ha. Potensi tersebut bisa kita manfaatkan dengan program reformasi agrarian sebagai bagian dari Nawa Cita.

Selain itu, kita harus memanfaatkan daerah perbatasan kota yang memiliki sumberdaya dan lahan yang subur, untuk menyangga kebutuhan pangan masyarakat di kota besar. Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP) sebagai pengejewantahan konsep "Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045". Sebagai bukti pembangunan pertanian dan peluang pasar di daerah perbatasan maka dilakukan penandatanganan *Join Investment Agreement in Indonesia-Malaysia Border Area* dengan Malaysia. Perjanjian kerja sama ini dalam rangka ekspor komoditas pangan, terutama jagung dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ke Sabah, negara bagian Malaysia. Secara geopolitik, wilayah perbatasan sangat strategis karena di satu sisi sebagai wilayah "pinggir" dan di sisi lain merupakan beranda NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu filosofi Nawa Cita yang tepat dan bermakna. Tantangan membangun perbatasan adalah masih rendahnya produktivitas dan lambatnya penerapan inovasi pertanian serta terbatasnya SDM.

Pencapaian swasembada beras pada tahun 2016 mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk dari pejabat tinggi FAO. Asisten

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Direktur Jenderal FAO untuk Asia dan Pasifik Kundhavi Kadiresan mengatakan: "*FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 2016. Capaian ini merupakan hasil dari investasi Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur. Langkah selanjutnya adalah membangun sektor pertanian yang berdaya saing dan mendorong diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kehidupan petani dan memperbaiki gizi seluruh rakyat Indonesia*". Tidaklah salah apresiasi tersebut jika merujuk capaian dua tahun terakhir dalam produksi pertanian. Produksi padi meningkat dari 70,8 juta ton pada 2014 menjadi 79,1 juta ton pada 2016 atau meningkat rata-rata 5,86 persen per tahun yang biasanya rata-rata sekitar 3 persen per tahun. Peningkatan produksi yang demikian tinggi itu memungkinkan stok terendah Bulog pada bulan November meningkat dari hanya 545 ribu ton pada 2015 menjadi 1,761 juta ton pada 2016. Stok Bulog mencapai puncaknya sebesar 2,107 juta ton pada Juni 2017.

Prestasi kerja kedua terkait capaian program swasembada pangan dalam dua tahun terakhir ialah penurunan luar biasa impor jagung pakan ternak, dari 3,3 juta ton pada 2015 menjadi 1,1 juta ton pada 2016 atau menurun sebesar 62 persen. Uniknya, penurunan impor jagung tersebut utamanya dari hasil perpaduan antara keberhasilan dalam meningkatkan produksi jagung dalam negeri dan tindakan untuk membatasi pengeluaran surat Rekomendasi impor jagung. Dari ketentuan undang-undang kiranya jelas bahwa ekspor pangan pokok utamanya beras dan jagung harus dikelola pemerintah sebagai bagian dari instrumen mewujudkan kedaulatan pangan.

Ekspor beras jadi bukti kita bisa menaklukkan negara lain. Apabila sudah ekportir netto maka sudah pasti swasembada terwujud. Swasembada dan surplus, bahkan ekspor beras harus dilakukan Indonesia, dan untuk itu, semua daerah harus mengejar target swasembada. Dengan mengekspor beras, Indonesia akan makin dikenal dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Program ekspor beras diprioritaskan pada beras premium, organik dan/atau varietas khusus. Beras organik ini masa depan ekspor Indonesia untuk padi. Nilai jual beras organik per kilogram bisa mencapai Rp 90.000 atau enam euro di Eropa. Artinya, 15-20 kali lipat harga beras biasa. Dalam kurun waktu dua tahun, tercatat tiga kali acara

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pelepasan ekspor beras: (1) Beras organik ke Belgia sebanyak 40 ton 2 September 2016, (2) Beras premium ke Sri Lanka 5.000 ton pada 14 Februari 2017, (22) Beras premium satu truk ke Papua Nugini pada 13 Februari 2017.

Kita patut berbangga bahwa salah satu prestasi pemerintah tahun 2016 lalu adalah tidak adanya importasi beras. Tidak ada rekomendasi impor beras jenis medium atau beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak dapat disangkal, secara *de facto*, data menunjukkan bahwa Indonesia memang masih mengimpor beras. Namun impor beras itu adalah jenis beras khusus seperti beras premium Basmati dari India dan Hom Mali dari India, beras untuk kesehatan/dietary yang belum dihasilkan di dalam negeri serta beras pecah 100 % untuk keperluan industri. Berdasarkan data-data di atas, ekspor pangan adalah bagian dari langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Lumbung Pangan dunia 2045. Apa yang dilakukan selama ini merupakan cara bagaimana meletakkan fondasi yang kuat untuk perwujudan visi mulia tersebut. Keberhasilan tentunya ditentukan oleh konsistensi dalam melaksanakan peta jalan yang sudah disusun.

Terobosan lain yaitu adanya upaya memberikan perlindungi untuk mengatasi kerugian petani akibat adanya risiko gagal panen melalui program asuransi pertanian. Asuransi ini ditujukan khususnya untuk usahatani padi dengan tujuan untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usahatani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Dalam program ini, total premi asurani yang sebenarnya harus ditanggung petani adalah sebesar Rp 180.000/ha/musim. Agar tidak memberatkan petani, maka petani hanya cukup membayar sebesar Rp 36 ribu/ha, dan nilai ini sama dengan harga dua bungkus rokok. Sisa premi Rp 144 ribu dibantu oleh pemerintah. Sementara besarnya ganti rugi yang didapat petani kalau terjadi gagal panen sebesar Rp 6 juta, dan jumlah ini cukup sebagai modal kerja bagi petani untuk kembali menanam padi.

Perlindungan terhadap petani haruslah diimbangi dengan ketersediaan dan kemampuan akses modal. Sejak awal tahun 2015 Pemerintah pro-aktif meningkatkan investasi secara besar-besaran.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah bergerak cepat dan mengambil terobosan kebijakan dan deregulasi untuk mendorong minat investor. Pada tanggal 27 Oktober 2015 di Makassar telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara 11 investor industri gula, jagung dan sapi dengan Gubernur dan Bupati se-Sulawesi. Berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintah untuk mendorong investasi jagung, sapi dan tebu dengan merevisi Peraturan Pemerintah terkait regulasi komoditas tersebut. Pada tahun 2015 mulai bangkit investasi untuk mengembangkan bisnis tebu/gula, jagung dan sapi pada lahan total 2,2 juta ha dengan nilai investasi Rp 113,1 triliun. Realisasi investasi PG dan kebun tebu hingga Mei 2017 terdapat 23 perusahaan dalam proses perizinan, peletakan batu pertama pabrik dan sebagian sudah beroperasi dengan luas lahan 659 ribu ha dan total investasi Rp 40,8 triliun dan diperkirakan menyerap 1,3 juta tenaga kerja.

Begitulah sedikit penjelasan cara kami bekerja dan bekerja demi mewujudkan visi besar pada tahun 2045, Menjadi Lumbung Pangan Dunia. Secara lebih detail akan dibahas dalam bab-bab di buku ini. Dengan terbitnya buku ini, sebagai penanda terdokumennya ide-ide besar dan bagaimana pada periode ini membangun fondasi kuat agar bisa melanjutkan keberhasilan swasembada tanpa impor dan menjadi penyedia pangan dunia.

Jakarta, Oktober 2017

Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku **"Sukses Swasembada: Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045"** ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan ekspos atas pelaksanaan tugas Menteri Pertanian kepada publik sebagai pengelola pembangunan pangan dan pertanian.

Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prinsip utama dalam upaya pembangunan pangan dan pertanian ialah memuliakan petani. Hal ini bermakna bahwa paradigma yang harus dijadikan landasan dalam merumuskan sasaran dan strategi pembangunan pertanian adalah pembangunan pertanian berorientasi petani. Petani diposisikan sebagai pelaku utama dari setiap langkah pembangunan pertanian, bukan sebagai alat pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian hanya berhasil bila petani yang menjadi pelaku utamanya merasa terhormat, berkemampuan tinggi dan bekerja penuh semangat. Untuk itu keluarga tani haruslah sejahtera. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari seberapa besar pendapatan, seberapa nilai NTP, tapi lebih jauh dari itu, yaitu seberapa besar petani merasa dilindungi, merasa damai dan merasa bangga sebagai petani. Kesejahteraan petani merupakan tujuan yang sekaligus menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan pertanian. Dengan demikian, *kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani* dalam visi pembangunan pertanian adalah ibarat dua muka mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Indonesia mampu berswasembada atau bahkan menjadi lumbung pangan dunia. Hal itu bukanlah impian hampa. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prioritas pertama ialah mewujudkan swasembada pangan, utamanya swasembada beras sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Swasembada dan lumbung pangan dunia hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian kepada petani.

Buku ini menguraikan tinjauan kinerja pembangunan pangan dan pertanian lima dasawarsa untuk selanjutnya digunakan dalam mendiagnosis permasalahan dan *benchmarking* kinerja pada tahun 2014-2017. Hasil diagnosis dan *benchmarking* tersebut merupakan dasar untuk merumuskan Rencana Strategis Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. Dalam rencana strategis tersebut ditetapkan *road map* dan sasaran waktu pencapaian swasembada dan eksportasi menurut komoditas. Selain itu buku ini juga menguraikan kebijakan dan program inti pembangunan pertanian serta kebijakan dan program komplemen. Program komplemen adalah program inisitatif baru, yang terdiri dari Pengembangan Kawasan Pangan, Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan, Pengelolaan Impor dan Promosi Ekspor Pangan dan Program Khusus Menyejahterakan Keluarga Petani. Kinerja dampak dari keseluruhan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dan pembelajaran dan perspektif tentang implementasi visi dan misi swasembada dan lumbung pangan 2045 di tahun-tahun mendatang juga diuraikan secara komprehensif.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku **"Sukses Swasembada: Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045"** ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga buku ini memberikan pandangan yang utuh tentang pembangunan pertanian di era Kabinet Kerja.

Sekretaris Jenderal,
Kementerian Pertanian

Hari Priyono

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN ..... **III**
KATA PENGANTAR ..... **IX**
DAFTAR ISI ..... **XI**
DAFTAR GAMBAR ..... **XV**
DAFTAR TABEL ..... **XVIII**

PROLOG MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DENGAN DAN UNTUK MEMULIAKAN PETANI **1**
Visi Orisinal Kedaulatan Pangan Presiden Joko Widodo 3
Kesungguhan Komitmen Presiden Joko Widodo 7
Perilaku Senyap Menteri Pertanian: Kerja, Kerja, dan Kerja 13
Sekilas Capaian Kinerja Paruh Waktu 18
Daftar Bacaan 22

BAB I LIMA DASAWARSA MEMBANGUN PANGAN DAN PERTANIAN **25**
Warisan Pemerintah Kolonial 27
Retorika Pentingnya Pertanian Sampai Revitalisasi Pertanian ala SBY 31
Kebijakan Normatif Pembangunan Pangan dan Pertanian 40
Permasalahan Klasik Business as Usual 44
Pembelajaran untuk Pembangunan Pangan dan Pertanian ke Depan 45

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Penutup 48
Bahan Bacaan 50

BAB II RENCANA STRATEGIS LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 53
Konsep Dasar Lumbung Pangan Dunia 55
Potensi Sumber Daya Pertanian 61
Membangun Fondasi Lumbung Pangan Dunia 63
Target Swasembada dan Ekspor Pangan 66
Strategi Pencapaian Swasembada Pangan dan Ekspor 73
Penutup 76
Daftar Bacaan 78

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI 81
Strategi Operasional 82
Pengembangan Lahan Tadah Hujan 84
Modernisasi Pertanian Melalui Pengembangan Mekanisasi 87
Penguatan Ketahanan Pangan 96
Swasembada Pangan 99
Kedaulatan Pangan 101
Kesejahteraan Keluarga Petani 103
Penutup 105
Daftar Bacaan 106

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PANGAN 107
Keunggulan Komparatif Wilayah Pangan 109
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Produksi Pangan 113
Pengembangan Kawasan Pangan 116
Optimalisasi Sumber Daya dalam Kegiatan Inti (Core Business) 118
Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Pangan 121
Penutup 129
Daftar Bacaan 132

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR DI WILAYAH PERBATASAN 133
Paradigma Pengelolaan Wilayah Perbatasan 136
Konsep dan Landasan Strategis LPBE-WP 138
Rancangan dan Prospek Pengembangan 143
Penutup 154
Bahan Bacaan 156

BAB VI PENGELOLAAN IMPOR DAN PROMOSI EKSPOR PANGAN 159
Kewenangan Menteri Pertanian Menurut Aturan Perundangan 160
Penghentian Impor 165
Drama Penghentian Impor Beras 168
Kisah Penghentian Impor Jagung 173
Promosi Ekspor Pangan 179
Penutup 188
Daftar Bacaan 190

BAB VII MENYEJAHTERAKAN KELUARGA PETANI 195
Program Pengembangan Pertanian Modern 197
Program Asuransi Pertanian 200
Kebijakan Subsidi Pupuk 201
Program Jaminan Harga dan Pasar bagi Produk Pertanian 204
Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan 205
Penutup 212
Daftar Bacaan 213

BAB VIII SUKSES SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN 215
Revisi Regulasi yang Menghambat 217
Revisi Regulasi Tender: dari Konvensional ke e-Katalog 218
Regulasi Harga untuk Melindungi Petani 221
Regulasi Perlindungan Lahan 223
Regulasi Investasi, Perizinan, dan Kawasan 224
Pengembangan Investasi 227
Pengembangan Infrastruktur 232
Mekanisasi Pertanian 233

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Optimalisasi Penyaluran Sarana Produksi 236
Peningkatan Kapasitas Serap Gabah Petani 244
Pengendalian Perilaku Pasar 245
Kebijakan Pengendalian Impor dan Mendorong Ekspor 246
Penutup 247
Bahan Bacaan 248

EPILOG LANGKAH AWAL MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 251
Tantangan Penyediaan Pangan bagi Penduduk Dunia 252
Pembangunan Fondasi Pertanian Berkelanjutan 255
Posisi Pangan Indonesia pada Tahun 2045 259
Apa yang Dibutuhkan ke Depan? 265
Dukungan Politik dan Integritas 269
Daftar Bacaan 270

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka kerja program strategis mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis memuliaan petani.....16
Gambar 2. Sistematika isi buku.....21
Gambar 3. Target waktu swasembada pangan strategis.....66
Gambar 4. Target waktu ekspor komoditas pangan strategis.....67
Gambar 5. Sapi-sapi pejantan yang akan dikawinkan dengan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).....70
Gambar 6. Strategi operasional sebagai solusi permanen menyejahterakan petani.....83
Gambar 7. Lahan baku pertanian di Indonesia.....84
Gambar 8. Surplus dan defisit ketersediaan air di sebagian besar wilayah Indonesia.....85
Gambar 9. Sebaran potensi pengembangan embung, dam parit, long storage, pemanfaatan air sungai dan sumur dangkal.....87
Gambar 10. Distribusi alat-mesin pertanian kepada kelompok tani dalam periode 2012-2017.....88
Gambar 11. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan penguatan kemampuan industri nasional pada Agenda Nawa Cita termasuk industri mesin pertanian.....89
Gambar 12. Pengembangan infrastruktur pertanian 2010-2017.....91
Gambar 13. Kemitraan GPMT dengan petani jagung di beberapa daerah di Indonesia.....93
Gambar 14. Capaian ketahanan pangan Indonesia tahun 2016.....98
Gambar 15. Peningkatan produksi beberapa komoditas pangan strategis.....99

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 16. Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan.....100
Gambar 17. Peningkatan produksi komoditas peternakan sumber protein hewani.....100
Gambar 18. Ekspor-Impor dan kesejahteraan petani.....101
Gambar 19. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan kepada tokoh-tokoh yang berprestasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan.....102
Gambar 20. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan sebagai salah satu strategi optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan pertanian.....119
Gambar 21. Konsepsi rancangan umum pengembangan LPBE-WP.....145
Gambar 22. Peta potensi pengembangan ekspor pangan ke negara tetangga.....150
Gambar 23. Kerangka pengembangan LPBE-WP di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.....150
Gambar 24. Strategi pengembangan LPBE-WP di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.....151
Gambar 25. Pola penguatan kelembagaan ekonomi dalam rancangan Pengembangan LPBE-WP di Kabuaten Sanggau, Kalimantan Barat.....152
Gambar 26. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian menghadiri panen jagung di Ponorogo, Jawa Timur.....174
Gambar 27. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian mencoba alat transplanter yang akan diberikan kepada petani.....198
Gambar 28. Perkembangan subsidi pupuk di Indonesia, periode 2012-2017.....202
Gambar 29. Pencanangan Gertam Cabai oleh Menteri Pertanian di Depok, Jawa Barat, 22 November 2016, dan penandatanganan MoU antara BKP Kementan dengan TPP PKK, 30 Nop 2016.....207
Gambar 30. Telekonferensi Gerakan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Wonogiri, Jawa Tengah, 10 April 2017.....208
Gambar 32. Budi daya ikan, ternak kelinci, dan ayam pada lahan pekarangan.....211

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 31. Budi daya berbagai jenis sayuran dan umbi-umbian pada lahan pekarangan.....211
Gambar 33. Program terobosan mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.....216
Gambar 34. Proses pengadaan alat-mesin pertanian melalui aplikasi e-Purchasing dan e-Katalog.....220
Gambar 35. Kunjungan Wakil PResiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian ke PTPN X yang menghasilkan gula.....226
Gambar 36. PG di Lamongan, Jawa Timur, tes giling pada 28 September 2015.....227
Gambar 37. Usaha ternak sapi skala komersial.....229
Gambar 38. Usahatani jagung skala luas (corn estate).....230
Gambar 39. Traktor roda dua (kiri) dan mesin tanam padi (kanan).....233
Gambar 40. Aksesibilitas dan transportasi yang belum lancar sering menjadi kendala bagi petani.....242
Gambar 41. Total pertambahan penduduk dunia pada tahun 2050 diperkirakan 2,38 miliar jiwa, dan di Indonesia 64,67 juta jiwa.....253
Gambar 42. Panen raya padi hibrida di lahan rawa Kalimantan Selatan.....256
Gambar 43. Kerangka desain Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045.....264
Gambar 44. Target waktu swasembada komoditas pangan strategis.....264

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan kemiskinan relatif dan absolut serta Gini Rasio dalam periode 2008-2016.....29

Tabel 1.2. Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan dan pertanian tahun 1952-2015.....33

Tabel 1.3. Pencapaian pembangunan pertanian dalam periode 1971-2016 ditinjau dari kemampuan penyediaan padi, jagung, dan kedelai.....37

Tabel 1.4. Rata-rata luas panen dan produktivitas komoditas pangan utama dalam periode 1971-2016. 38

Tabel 1.5. Anggaran Kementerian Pertanian, APBN, dan rasio anggaran terhadap APBN dalam periode 1971-2016.....39

Tabel 3.1. Dampak Perpres Harga Dasar Jagung terhadap peningkatan kapasitas serap produksi jagung.....93

Tabel 3.2. Kabupaten surplus dan defisit beras di Indonesia. 97

Tabel 3.3. Indikator kesejahteraan petani pada tahun 2014-2016. 104

Tabel 4.1. Reorientasi manajemen pengembangan kawasan pertanian.....128

Tabel 5.1. Komoditas ekspor eksisting dan potensial/prospektif dari lima provinsi prioritas Pengembangan LPBE-WP.....140

Tabel 5.2. Luas lahan potensial untuk intensifikasi di 13 kabupaten wilayah perbatasan. 148

Tabel 5.3. Luas lahan potensial untuk ekstensifikasi produksi pangan di wilayah perbatasan.....149

Tabel 7.1. Dampak pengembangan komoditas sumber karbohidrat, protein, dan vitamin pada lahan pekarangan terhadap peningkatan ketersediaan pangan (Kg/RT/th).....209

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 7.2. Dampak optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terhadap pola konsumsi, PPH, dan pengeluaran biaya pangan rumah tangga petani, 2016. ..... *209*
Tabel 8.1. Rencana investasi tebu, sapi dan jagung hingga tahun 2019 dan perkiraan realisasi tahun 2015. ..... *226*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PROLOG

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DENGAN DAN UNTUK MEMULIAKAN PETANI

"Ini Tarsan dari hutan, begitu naik (pohon pengabdian) lupa turun sebelum selesaikan persoalan pangan. Ikhlaskan kami bekerja untuk republik ini."
(Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman, Oktober 2016)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kutipan di atas mencerminkan motivasi dan budaya kerja Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman. Buku yang disusun atas inisiatif dan arahan Menteri Pertanian ini menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, untuk apa, dan sejauh mana capaian paruh waktu Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan, program prioritas pembangunan pertanian nasional Kabinet Kerja periode 2015-2019.

Mungkin ada pihak yang mempertanyakan mengapa buku ini diterbitkan pada pertengahan 2017, apakah bagian dari upaya pencitraan? Menteri Pertanian menampik tudingan itu dengan menegaskan buku ini harus disusun secara objektif dan berdasarkan data resmi. Buku semata-mata disusun untuk tujuan pertanggungjawaban kepada publik dan bagian dari perbaikan pengelolaan pembangunan pertanian. Pertengahan tahun 2017 bertepatan dengan paruh waktu masa kerja kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Buku ini menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban paruh waktu pelaksanaan tugas Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Menteri Pertanian menjelaskan bangsa Indonesia perlu dan berhak memperoleh penjelasan rinci tentang percepatan pembangunan pertanian, yang melibatkan banyak aparatur negara, dan menghabiskan uang rakyat dalam jumlah cukup besar. Sebagian pihak mungkin mempertanyakan mengapa Indonesia harus berswasembada pangan? Untuk apa swasembada beras jika harganya di dalam negeri lebih mahal dari beras impor? Dalam kondisi demikian, bukankah lebih menguntungkan mengimpor daripada berswasembada beras? Menurut Menteri Pertanian, pertanyaan demikian dinilai logis dan mendasar, berkaitan dengan justifikasi program swasembada pangan dan visi lumbung pangan dunia 2045. Rakyat perlu dan berhak mengetahui uang negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pengelolaan pembangunan pertanian, buku ini menginventarisasi dan menganalisis kemajuan pelaksanaan program kedaulatan pangan yang menjadi kunci kinerja Kementerian Pertanian. Hasil monitoring dan evaluasi bermanfaat untuk dijadikan acuan pembenahan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pelaksanaan program

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dalam mewujudkan visi swasembada pangan 2019 dan lumbung pangan dunia 2045.

Dr. Andi Amran Sulaiman dengan tegas menyatakan bahwa, sesuai konstitusi, Menteri adalah pembantu Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tugas Menteri Pertanian adalah melaksanakan visi dan misi Presiden. Mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan dunia adalah visi Presiden. Pada berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan secara terbuka dan gamblang bahwa Menteri Pertanian harus dapat mewujudkan swasembada pangan dalam waktu tiga tahun awal Pemerintahan Kabinet Kerja, yang didahului oleh swasembada beras paling lambat dua tahun setelah dilantik jadi nakhoda Kementerian Pertanian.

Buku ini dapat pula menjadi bagian dari laporan pertanggung-jawaban penugasan Presiden. Kalau ingin memahami mengapa, bagaimana, dan untuk apa Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian, perlu dipelajari secara saksama visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang pembangunan pertanian nasional. "Saya minta penyusunan buku ini didasarkan pada kerangka pikir visi dan misi Presiden Joko Widodo", arahan Menteri Pertanian di depan tim penyusun buku. Dengan demikian, para pembaca yang sudah mengenal visi dan misi kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo mestinya lebih cepat memahami substansi buku ini.

Visi Orisinal Kedaulatan Pangan Presiden Joko Widodo

Mewujudkan kedaulatan pangan adalah visi semua Presiden RI dari era ke era. Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Institut Pertanian Bogor, 27 April 1952, mengatakan penyediaan makanan rakyat adalah soal hidup atau matinya bangsa, kedaulatan politik, serta kesehatan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Beliau dengan tegas menyatakan Indonesia harus berswasembada pangan agar memiliki

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kedaulatan pangan. ***"Buat apa kita bicara "politik bebas" kalau kita tidak bebas dalam urusan beras. Politik bebas, prijstop, keamanan, masyarakat adil makmur,*** **mens sana in corpore sano,** ***semua itu menjadi omong kosong belaka selama kita kekurangan bahan makanan, selama tekort kita ini makin lama makin meningkat"*** (Republik Indonesia, 1952).

Sepanjang sejarah Indonesia, baru Presiden Soeharto yang diakui masyarakat dunia berhasil meraih swasembada beras pada tahun 1984. Capaian itu dianggap luar biasa karena sekitar 10 tahun sebelumnya Indonesia merupakan importir beras terbesar dunia. Atas pencapaian tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto. Sayang, swasembada beras yang telah diraih tidak berumur panjang. Sejak awal 1990an Indonesia kembali menjadi importir utama beras di dunia. Berdasarkan pengalaman itu, Presiden Joko Widodo merasa terpanggil mewujudkan kembali swasembada beras dan bahkan swasembada pangan dalam arti luas. Visi kedaulatan pangan Pemerintahan Joko Widodo Widodo-Jusuf Kalla tertuang dalam buku *Nawa Cita,* dokumen visi dan misi calon Presiden-Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2014, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPMN) 2015-2019. Visi dan misi kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo dapat dipahami dari kutipan pernyataannya pada kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden di Cianjur, Jawa Barat, 2 Juli 2014:

> ***"Kalau ke depan Joko Widodo-JK yang jadi, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya. Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras. Ini karena semua ada mafianya, ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor, lalu bocor-bocor. Bayangkan, kita sudah berproduksi susah payah, pas panen impor datang, harga jatuh, kan bikin malas produksi. Kalau semua pangan diimpor, petani stop produksi, mati semua kita, maka petani harus dimuliakan"*** (Antaranews.com., 2 Juli 2014).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Joko Widodo mengkritik pemerintah sebelumnya yang tidak memiliki keinginan kuat merealisasikan ketahanan pangan. Sebenarnya banyak komoditas yang dapat diproduksi petani Indonesia, tapi pemerintah memilih mengimpor dari negara lain. "***Saya yakin petani Indonesia bisa produksi ini semua sendiri, asalkan diberi subsidi, diberi perhatian pemerintah. Pokoknya jangan impor. Tanah kita ini masih sangat luas. Kita bisa sendiri***," ujar Joko Widodo (Kompas.com., 28 Juni 2014).

Jika ditelaah lebih jauh, pemikiran Presiden Joko Widodo sungguh komprehensif. Pernyataan yang sekilas tampak sederhana, sesungguhnya mengandung pemikiran orisinal, baru, dan khas tentang visi dan misi pembangunan kedaulatan pangan dan pertanian.

Prinsip utama pembangunan pangan dan pertanian ialah memuliakan petani. Memuliakan petani adalah cara dan tujuan pembangunan pangan dan pertanian. Paradigma yang harus dijadikan landasan dalam merumuskan sasaran dan strategi pembangunan pertanian ialah pembangunan pertanian berorientasi petani (*farmers-led agricultural development*). Petani adalah pelaku utama, bukan alat pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian akan berhasil bila petani sebagai pelaku utama merasa terhormat, berkemampuan tinggi, dan bekerja penuh semangat. Oleh sebab itu, keluarga tani harus sejahtera. Kesejahteraan petani merupakan tujuan yang sekaligus menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan pertanian. Dengan demikian, *kedaulatan pangan* dan *kesejahteraan petani* dalam visi pembangunan pertanian harus seiring sejalan.

Indonesia mampu berswasembada atau bahkan menjadi eksportir atau lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prioritas pertama ialah mewujudkan swasembada pangan, terutama beras, sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Namun obsesi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Indonesia harus bisa menjadi negara eksportir pangan, atau lumbung pangan dunia, karena berpotensi mampu untuk itu. Presiden Joko Widodo berpandangan Indonesia berpotensi besar sebagai lumbung pangan dunia karena lahan yang tersedia masih luas dan terletak di kawasan khatulistiwa. Hal ini disampaikan Presiden pada pembukaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Jakarta pada 31 Juli 2015.

> "***Masa depan dunia ada di sekitar khatulistiwa, karena sinar matahari yang terus-menerus akan membuat produksi pangan dan energi tetap melimpah. Jika perbaikan manajemen pangan bisa dipercepat, Indonesia akan menjadi pemasok pangan dunia***" (Viva.co.id., 31 Juli 2015).

Swasembada dan lumbung pangan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah dalam memberikan perhatian dan bantuan bagi petani. Komitmen yang kuat direfleksikan oleh besaran dan kesinambungan perhatian dan bantuan yang diberikan untuk memuliakan petani. Termasuk dalam hal ini ialah subsidi, kebijakan harga, menghentikan impor, memberikan bantuan peralatan, pembangunan infrastruktur, dan perluasan lahan pertanian.

Pembangunan pangan dan pertanian membutuhkan integritas dan keberanian. Kebijakan dan program pembangunan pangan dan pertanian dapat menciptakan peluang KKN. Pemberian izin impor pangan, misalnya, memberikan rente yang besar. Bahkan dalam dokumen *Nawa Cita* dinyatakan ada mafia pangan yang selama ini menguasai perdagangan pangan. Tantangan terhadap kebijakan penghentian impor pangan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Penghentian impor pangan membutuhkan keberanian dan integritas yang tinggi.

Sejak masa kampanye pemilihan umum, Calon Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kesungguhannya mewujudkan visi kedaulatan pangan dengan menetapkan persyaratan khusus bagi calon Menteri Pertanian dalam kabinetnya dan mengumumkan secara terbuka. Presiden terpilih Joko Widodo mengaku ingin memiliki Menteri yang paham dengan manajemen lapangan, pengetahuan lapangan, dan persoalan pertanian, bukan hanya pintar teori. Selain menetapkan kualifikasi para pembantunya di kabinet, Joko Widodo juga memastikan perlunya kontrak kinerja dengan calon Menteri Pertanian. "***Akan saya target, yang jadi Menteri nanti, swasembada pangan harus bisa 2 sampai 3 tahun. Kalau gak bisa, copot ganti. Jadi Presiden gak usah sulit-sulit. Banyak yang antre jadi***

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Menteri,"ujar Joko Widodo saat memberi pembekalan di Muktamar PKB di Surabaya, 31 Agustus 2014 (Merdeka.com. 1 September 2014).

Kesungguhan Komitmen Presiden Joko Widodo

Visi dan misi kedaulatan pangan yang dikampanyekan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla diakui unggul secara konseptual oleh sejumlah pihak. Rancangan visi dan misi kedaulatan pangan yang digagas sesuai dengan konteks lingkungan strategis global dalam jangka panjang maupun konten permasalahan pangan dan pertanian nasional dalam jangka menengah.

Dalam konteks lingkungan strategis global dalam jangka panjang, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, sekitar 263 juta orang pada tahun 2017 yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 318 juta orang pada tahun 2045. Penduduk dunia juga terus meningkat dari 7,5 miliar orang pada tahun 2017 menjadi sekitar 9,5 miliar pada tahun 2045. Hal ini berarti kebutuhan pangan Indonesia dan dunia akan terus meningkat. Sementara itu, kapasitas Indonesia maupun dunia dalam memproduksi pangan cenderung menurun seiring dengan keterbatasan lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim global. Dampaknya, pasokan pangan di pasar dunia diperkirakan semakin terbatas. Kelangkaan pangan juga merupakan konsekuensi dari pasar pangan dunia yang bersifat residual. Pasokan ke pasar dunia adalah penyaluran kelebihan kebutuhan (surplus) dari negara-negara eksportir, sedangkan permintaan adalah pengisi kekurangan pasok (defisit) dari negara-negara importir. Pasar dunia yang bersifat residual sangat rentan terhadap perubahan kebijakan negara utama eksportir maupun importir. Sifat pasar residual berkomplikasi pula dengan fenomena peningkatan instabilitas produksi pangan akibat perubahan iklim dan konektivitas pasar pangan dengan pasar energi dan pasar keuangan global. Hal ini menjadi penyebab pasar pangan dunia sering mengalami guncangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Indonesia yang membutuhkan pangan dalam jumlah besar jelas berisiko besar bila bergantung pada pasokan pangan dari pasar dunia. Tidak hanya mengancam ketahanan pangan, ketergantungan pangan pada pasar dunia membuat Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi maupun politik di mata dunia internasional. Sejarah menunjukkan pangan adakalanya digunakan sebagai "senjata" dalam hubungan politik internasional. Kalau pada masa lalu perang pangan (*food war*) terjadi secara kasat mata, belakangan ini menjadi terselubung (*proxy food war*). Medan tempur *proxy food war* terutama ialah penguasaan lahan dan air melalui investasi asing. Oleh karena itu semua negara yang berpenduduk besar selalu berupaya untuk berswasembada pangan dan bahkan surplus pangan.

Presiden Soekarno menyadari benar pentingnya swasembada pangan, yang merupakan perkara hidup atau matinya bangsa Indonesia. Kemampuan Indonesia mewujudkan swasembada pangan, apalagi menjadi lumbung pangan dunia (eksportir pangan), tidak hanya penting bagi kedaulatan pangan Indonesia tetapi juga turut memperkuat ketahanan pangan, yang juga berarti memajukan kesejahteraan dan menjaga perdamaian dunia. Itulah sebabnya semua Presiden Indonesia berusaha mencapai swasembada pangan. Presiden Soeharto, misalnya, berhasil mewujudkan swasembada beras pada tahun 1984, walaupun tidak bertahan lama. Presiden Joko Widodo berupaya pula meraih kembali swasembada pangan pada tahun 2016/2017. Oleh karena itu, dapat dimaklumi mengapa Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggagas visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045 walaupun target yang diminta Presiden Joko Widodo cukup swasembada pangan pada tahun 2019.

Dari segi konten permasalahan pangan dan pertanian nasional dalam jangka menengah (2015-2019), Indonesia bergantung pada pangan impor. Pangan impor yang lebih murah bermanfaat untuk menekan harga di dalam negeri. Harga pangan murah selain diharapkan oleh konsumen dalam negeri juga diperlukan untuk pengendalian inflasi. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pasar pangan luar negeri membuat ketahanan pangan nasional rentan terhadap gejolak pasar global dan riskan terhadap tudingan negatif negara asing yang menyudutkan Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKJENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dampak yang lebih serius dari pangan murah ialah ancaman terhadap kehidupan petani dan eksistensi usahatani tanaman pangan dalam negeri. Impor pangan murah akan terus menekan harga di tingkat petani. Harga jual produk yang rendah akan membuat petani makin terjerat oleh kemiskinan, sehingga tidak bergairah berusahatani tanaman pangan. Dalam konteks nasionalisme, impor pangan merendahkan harkat martabat petani Indonesia.

Persoalan semakin parah jika kapasitas produksi pangan dalam negeri tidak mengalami peningkatan. Luas areal tanaman pangan cenderung turun akibat konversi lahan untuk pembangunan nonpertanian, infrastruktur irigasi terdegradasi, dan kesuburan tanah menurun. Usahatani tanaman pangan, khususnya padi, membutuhkan input eksternal dengan intensitas yang semakin tinggi hanya untuk mempertahankan produktivitas yang sama dari musim ke musim, atau tidak efisien secara teknis. Perpaduan antara inefisiensi teknis dan kecenderungan peningkatan harga input usahatani telah menyebabkan biaya produksi semakin mahal, daya saing menurun, tekanan pangan impor meningkat, dan pendapatan petani menurun. Fenomena ini akan terus berlangsung jika tidak ada upaya khusus untuk mewujudkan swasembada pangan melalui restorasi efisiensi dan peningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Kondisi ketahanan pangan nasional makin ironis jika impor bahan pangan dikuasai oleh kelompok mafia tertentu. Mafia pangan terbukti telah merongrong kedaulatan pangan negara. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mencanangkan pemberantasan mafia pangan, yang merupakan bagian dari program kerja kabinetnya. Swasembada pangan merupakan cara terbaik pemberantasan mafia pangan impor. Artinya tidak ada lagi impor pangan. Hal ini dengan sendirinya meredam dan menghapus praktik curang mafia impor pangan.

Skeptisme sebagian kelompok masyarakat mungkin pada ambisi pencapaian target dan kesungguhan dalam melaksanakan komitmen, bukan pada konsep visi dan misi kedaulatan pangan. Sebagian pihak menilai visi kedaulatan pangan terlalu ambisius dan pihak lainnya bahkan merasa pesimistik. Mereka tidak yakin swasembada beras dapat diraih dalam tempo tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Keinginan dan keseriusan Joko Widodo merealisasikan kembali swasembada beras sudah terlihat setelah dilantik menjadi Presiden RI. Hal ini antara lain tercermin dari pemilihan Menteri Pertanian yang mampu bekerja keras dengan dukungan politik kebijakan pangan dan pertanian. Hal yang tidak kalah penting ialah Menteri Pertanian pilihan Presiden Joko Widodo mampu berperan sebagai penentu kebijakan dan program pembangunan pangan dan pertanian.

Tidak banyak pihak yang menyangka Presiden Joko Widodo memilih Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja, karena bukan elit partai politik dan bukan pula ilmuwan yang dikenal luas. Amran Sulaiman adalah seorang pengusaha berkualifikasi akademisi dari Sulawesi Selatan. Tidak heran jika pengangkatan Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian mendapat kritik dari sebagian masyarakat. Salah satu kelompok penentang dan mungkin paling keras ialah Aliansi untuk Kedaulatan Pangan, yang mengeluarkan pernyataan seminggu setelah Dr. Andi Amran Sulaiman dilantik menjadi Menteri Pertanian. Menurut mereka, ***Penunjukan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan dari kalangan korporasi dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-JK telah memunggungi bahkan mengkhianati petani dan nelayan. Selain itu, mereka juga menilai Joko Widodo-JK telah meninggalkan petani yang menjadi kelompok terbesar yang memilihnya dalam pemilu Presiden. Aliansi untuk Kedaulatan Pangan mengharapkan agar Joko Widodo-JK memilih pemimpin di sektor pertanian yang mampu memuliakan, mengerti keinginan dan budaya petani, sensitif dan responsif gender karena perempuan merupakan penopang kedaulatan pangan. Pemimpin yang mereka inginkan adalah yang sakti budi bhakti, kuat, cerdas dan berilmu. Budi berarti jujur, berkepribadian, bijaksana, mau berkorban untuk kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi dan kelompok*** (Binadesa.org., 28 Oktober 2014).

Keraguan Aliansi untuk Kedaulatan Pangan terhadap Menteri Pertanian pilihan Presiden Joko Widodo terutama integritas Dr. Andi Amran Sulaiman yang berlatar belakang pengusaha. Mereka beranggapan semua pengusaha berideologi kapitalis, pasar bebas, dan berorientasi pada akumulasai kepemilikan kekayaan pribadi dan kelompoknya, sehingga tidak peduli dengan nasib petani kecil, apalagi cita-cita memuliakan petani sebagaimana dijanjikan Joko Widodo pada saat kampanye pemilihan Presiden.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Namun perlu dicatat, jauh sebelum terpilih sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan kualifikasi Menteri Pertanian yang duduk di kabinetnya: ***tahu soal manajemen lapangan, pengetahuan lapangan dan persoalan pertanian, bukan hanya pintar secara teori*** (Viva.co.id., 31 Juli 2015).

Selain menetapkan kualifikasi yang diperlukan, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya kontrak kinerja dengan calon Menteri. Pemilihan Menteri Pertanian oleh Presiden melalui proses yang obyektif. Akankah Dr. Andi Amran Sulaiman mampu mewujudkan visi dan misi kedaulatan pangan Presiden Joko Widodo?

Target kinerja Menteri Pertanian ditegaskan hingga beberapa kali oleh Presiden Joko Widodo, tidak lama setelah Dr. Andi Amran Sulaiman dilantik. Pada acara "Kompas 100CEO Forum" pada 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menargetkan Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman untuk mencapai swasembada pertanian dalam waktu tiga tahun. "***Ya yang namanya Menteri ya harus dikasih target. Kalau tidak ada targetnya enak, yang mau jadi Menteri ribuan. Kalau tidak bisa ya maaf, masih ada yang mau***", ujar Joko Widodo. Lebih lanjut Joko Widodo menjelaskan, target swasembada pertanian untuk tiga tahun mendatang baru untuk tiga komoditas, yakni padi, kedelai, dan jagung. Untuk komoditas lainnya bisa diupayakan dalam lima tahun mendatang (Kompas.com., 7 November 2014).

Pada bulan berikutnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan target tersebut. "***Sudah hitung-hitungan, tiga tahun nggak swasembada, saya ganti Menterinya, yang dari Fakultas Pertanian bisa antre. Tapi saya yakin bisa, hitung-hitungannya ada. Jelas sekali. Konsentrasi 11 provinsi, rampung, sudah ada perhitungan***," kata Joko Widodo dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 9 Desember 2014. (Detik.com., 9 Desember 2014).

Penegasan terbuka target kinerja Menteri Pertanian merupakan salah satu bukti kuat kesungguhan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi dan misi kedaulatan pangan yang dijanjikan. Menurut Presiden, target kinerja Menteri Pertanian didasarkan pada perhitungan realistis yang mestinya dapat dicapai. Peta jalan pencapaian swasembada

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pangan pun sudah disusun dengan kerangka kerja yang logis. Target kinerja merupakan pendorong bagi Menteri Pertanian untuk berbuat yang terbaik dan bisa dilakukan.

Dukungan kebijakan, program, dan komitmen politik pelaksanaan visi dan misi swasembada dan lumbung pangan dunia terbukti dari penyediaan anggaran pembangunan pertanian. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pertanian sekitar 100%, peningkatan tertinggi anggaran Kementerian Pertanian sepanjang sejarah. Selain di Kementerian Pertanian, Presiden Joko Widodo juga menyediakan anggaran pendukung pembangunan pangan dan pertanian yang cukup besar di Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Alokasi anggaran ini ditetapkan dengan arahan langsung Presiden Joko Widodo.

Selain mengalokasikan anggaran pembangunan yang cukup besar, Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk bersatu padu mendukung Kementerian Pertanian dalam meraih swasembada dan mewujudkan lumbung pangan. Kementerian PUPR dan Kementerian Desa membantu pembangunan jaringan irigasi dan pembukaan lahan pertanian. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup membantu perluasan lahan pertanian dan memfasilitasi penanaman tanaman pangan dan pemeliharaan ternak di lahan perhutanan (sistem wanatani), Kementerian Perdagangan membantu penetapan harga yang layak bagi produksi petani dan stabilisasi harga konsumen, pengendalian impor dan promosi ekspor bahan pangan. Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawalan dan pendampingan operasionalisasi program serta dengan lembaga penegak hukum dalam supervisi dan pengawasan pelaksanaan program.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Perilaku Senyap Menteri Pertanian: Kerja, Kerja, dan Kerja

Dr. Andi Amran Sulaiman tentu paham betul kalau Menteri adalah pembantu Presiden, pengangkatan dan pemberhentiannya hak prerogatif Presiden. Tugas prioritas yang perlu segera dilaksanakan Menteri Pertanian, sebagaimana yang diminta Presiden Joko Widodo, adalah mewujudkan swasembada pangan, dengan prioritas swasembada beras paling lambat dalam waktu tiga tahun atau pada bulan Oktober 2017. Bila gagal, konsekuensinya Menteri Pertanian diganti. Selain kontrak kinerja, sasaran untuk mewujudkan swasembada pangan juga ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Dengan demikian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan kewajibannya mewujudkan visi, misi, dan melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo. Kewajiban ini sudah diketahui sejak masa kampanye Presiden, sebelum Amran Sulaiman diangkat menjadi Menteri Pertanian.

Perlu pula dicatat bahwa visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia adalah implementasi arahan dan kebijakan Presiden Joko Widodo. Misi itu memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Nawa Cita atau RPJMN, tetapi muncul sesudah Joko Widodo dilantik menjadi Presiden, dengan obsesi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Hal itu terungkap pada saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, 31 Juli 2015 (Viva.co.id., 31 Juli 2015).

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyatakan tidak hanya mengacu sepenuhnya pada visi, misi, dan program Kementerian Pertanian, tetapi juga mengikuti arahan dan gaya kerja Presiden Joko Widodo. Kabinet Kerja yang diinisiasi Sang Presiden memiliki motto "*Kerja, Kerja, dan Kerja*". Hal ini menegaskan Presiden lebih mengutamakan program aksi di lapangan daripada perumusan konsep atau rapat-rapat di kantor. Oleh karena itu, Presiden dengan tegas mengarahkan para Menteri dalam Kabinet Kerja beserta jajarannya lebih banyak bekerja di lapangan untuk memastikan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kelancaran pelaksanaan program kementerian. Itulah sebabnya Menteri Pertanian lebih banyak bekerja di lapangan daripada di kantor. Hal ini tentu perlu dipatuhi oleh jajaran Kementerian Pertanian dalam merealisasikan program kerja sesuai arahan dan kebijakan Sang Menteri.

Pada hari-hari pertama setelah dilantik menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman secara diam-diam dan acak mendatangi Unit-unit Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian untuk konsolidasi organisasi. Pada setiap kunjungan, Amran Sulaiman memperkenalkan diri, menyampaikan arahan kebijakan, dan menjelaskan gaya kepemimpinannya. Anak tentara yang dilahirkan dan dibesarkan di salah satu sentra pertanian di Sulawesi Selatan ini memperoreh gelar akademik S1 di bidang Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin. Kualifikasi S2 di bidang Manajemen Pertanian dan S3 di bidang Ilmu Pertanian juga diperoleh Amran Sulaiman dari perguruan tinggi yang sama, masing-masing dengan lulusan *cumlaude*. Kariernya berawal dari pegawai biasa di sebuah BUMN yang kemudian menjadi praktisi pengusaha di bidang pertanian yang cukup berhasil. Hal ini ditandai oleh perkembangan beberapa perusahaan milik sendiri.

Selain sebagai pengusaha, Amran Sulaiman juga merupakan praktisi akademisi pertanian. Sebelum dilantik menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengajar di beberapa perguruan tinggi dan aktif di sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan. Tidak hanya itu, pemuda yang mendapat didikan disiplin militer dari sang ayah ini juga tercatat sebagai peneliti penemu beberapa teknologi pertanian yang kemudian dipatenkan.

Bagi Presiden Joko Widodo, perjalanan karier Amran Sulaiman dinilai sudah memenuhi syarat objektif Menteri Pertanian Kabinet Kerja, yaitu *tahu manajemen lapangan, memiliki pengetahuan lapangan dan persoalan pertanian, bukan hanya pintar teori* (5). Objektivitas pemilihan Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian tercermin dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat pengumuman penetapan Menteri Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014:

> ***"Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sosok petani muda di desa yang sukses membangun model wirausaha pertanian"***
> (CNN-Indonesia.com., 26 Oktober 2014).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Sebelum terpilih menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sudah menerima Anugerah Satyalencana Pembangunan Bidang Wirausaha Pertanian pada tahun 2007, tanda kehormatan yang bergengsi di bidang pertanian.

Bagi Amran Sulaiman, dipercaya menjadi Menteri Pertanian adalah amanah pengabdian kepada bangsa dan negara. Ia bersyukur dirinya secara duniawi sudah "selesai", sehingga tidak lagi berorientasi pada materi dalam menjalankan kewajiban sebagai Menteri Pertanian. Kerugian finansial pada saat mengemban tugas negara untuk menyejahterakan petani dilakoni secara ikhlas dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertanian. Janji profesionalisme, bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menjadi prinsip tata kelola Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman. Pesan ini disampaikan berulang-ulang di banyak kesempatan, untuk menegaskan dirinya akan bekerja dengan integritas tinggi dengan menerapkan tata kelola yang bersih (*good governance*) di Kementerian Pertanian. Pernyataan ini juga sekaligus menepis kekhawatiran sebagian pihak akan integritas Amran Sulaiman pada awal pengangkatannya sebagai Menteri Pertanian (lihat pernyataan ***Aliansi untuk Kedaulatan Pangan)*** (Binadesa.org., 28 Oktober 2014).

Pada hari pertama dilantik menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjelaskan kepada pers bahwa prioritas utamanya ialah mempercepat peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan. Program utama untuk mewujudkan keinginan itu ialah pembangunan irigasi dan pengembangan mekanisasi pertanian. Program penting lainnya ialah perluasan lahan pertanian, mendorong investasi, percepatan inovasi, penyediaan dan fasilitasi benih dan pupuk, penyediaan insentif dan perlindungan usaha, pemerataan pembangunan, dan penataan institusi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sekilas, program pembangunan pangan dan pertanian seakan dibuat tanpa perencanaan dan kerangka kerja yang konseptual. Program aksi di lapangan yang bersifat kolosal seolah tidak mencerminkan sinergitas antarprogram dalam meraih swasembada dan mewujudkan lumbung pangan dunia. Sebagian pihak berpandangan Kementerian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pertanian lebih mengutamakan pencitraan, super sibuk, dan bekerja dengan mengandalkan otot dan dana besar. Pandangan demikian dapat dimaklumi karena Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman lebih mendahulukan implementasi program aksi daripada penjelasan teoritis. Itulah bagian dari prilaku senyap "*Kerja, Kerja, dan Kerja*" Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman.

Sesungguhnya, program aksi dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja logis dan disusun secara teoritis. Secara konseptual teoritis, keseluruhan program aksi Kementerian Pertanian bermuara pada pembangunan faktor kunci penopang atau Tujuh Pilar pembangunan pangan dan pertanian:

1. Infrastruktur: Irigasi, pasar pertanian, jalan usahatani;
2. Investasi: Lahan pertanian, populasi ternak, alat dan mesin pertanian, modal kerja;
3. Inovasi: Benih/bibit unggul, teknologi budi daya (Paket Teknologi Terpadu), pola pertanaman;

Gambar 1. Kerangka kerja program strategis mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis memuliaan petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Input: Penyediaan dan jaminan akses input, terutama pupuk;
5. Insentif: Harga input, harga output, perlindungan risiko usaha (asuransi);
6. Inklusi: Pemerataan penerima bantuan, lumbung pangan di wilayah perbatasan NKRI;
7. Institusi: Penguatan kelembagaan petani, pembangunan klaster, tata kelola pembangunan;

Kerangka kerja strategi pembangunan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis memuliaan petani dirumuskan seperti pada Gambar 1. Politik pangan dan pertanian direfleksikan oleh kebijakan dan program aksi melalui Tujuh Pilar pembangunan pangan dan pertanian. Ketujuh pilar ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kesehatan petani, kenyamanan kerja, peningkatan pendapatan, ketahanan pangan dan gizi. Perpaduan keempatnya akan mewujudkan kemuliaan petani. Pilar-pilar tersebut dibangun melalui kebijakan dan program strategis yang dimungkinkan mendapatkan dukungan politik. Sumber daya pertanian yang melimpah menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan nasional dan lumbung pangan dunia.

Kebijakan dan program inti swasembada dan lumbung pangan dipopulerkan dengan tema *Upaya Khusus Percepatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai* atau disingkat UPSUS Pajale. Program serupa juga menjadi program Kementerian Peretanian sejak zaman Orde Baru dengan pasang surut realitasnya. Pendekatan yang ditempuh dalam operasionalisasi program mirip sejak 50 tahun terakhir, yaitu peningkatan produktivitas melalui peningkatan intensitas penggunaan input, peningkatan luas panen melalui peningkatan intensitas tanam dan perluasan lahan baku (ekstensifikasi). Walaupun nama dan program aksinya serupa, namun struktur operasionalisasi dan tata kelola UPSUS Pajale di era kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman berbeda nyata dengan era-era sebelumnya, sebagaimana diuraikan pada bab-bab berikut buku ini.

Selain melakukan sejumlah terobosan dalam program UPSUS Pajale, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menginisiasi kebijakan dan program baru yang menjadi komplemen program inti UPSUS Pajale, termasuk program Pembangunan Kawasan, Pembangunan Lumbung

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pangan Perbatasan dan Penyangga Kota Besar, Pengelolaan Ekspor-Impor, Program Khusus Kesejahteraan Keluarga Petani. Walaupun tidak ditulis secara gamblang dalam dokumen Nawa Cita, rancangan Kebijakan dan Program Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia disusun dengan kerangka pemikiran yang logis, lengkap, dan sinergis, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Sekilas Capaian Kinerja Paruh Waktu

Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman mengklaim telah meraih kembali swasembada beras pada tahun 2016: "***Ini prestasi besar, setelah 32 tahun kita bisa meraih kembali prestasi yang pernah dicapai tahun 1984. Tahun ini tidak ada rekomendasi dan izin impor, termasuk beras premium***" (Rakyat Merdeka Online, 28 Desember 2016). Klaim Menteri Pertanian ini adalah "*swasembada administratif*", bukan swasembada absolut. Landasan swasembada yang dimaksud ialah Pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras sepanjang tahun 2016. Dalam praktiknya, izin impor beras baru diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi Menteri Pertanian. Dengan demikian, secara administratif impor beras tidak terjadi pada tahun 2016.

Pencapaian swasembada beras pada tahun 2016 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo, Ketua MPR, dan petinggi FAO. "***Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,03 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,98 juta ton***" tegas Presiden Joko Widodo (Presidenri.go.id., 31 Oktober 2016).

Asisten Direktur Jenderal FAO untuk Asia dan Pasifik, Kundhavi Kadiresan: "***FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 2016. Capaian ini merupakan hasil dari investasi Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur. Langkah selanjutnya adalah membangun sektor pertanian yang berdaya saing dan mendorong diversifikasi pertanian untuk***

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

meningkatkan kehidupan petani dan memperbaiki gizi seluruh rakyat Indonesia" (Antaranews.com., 13 Maret 2017).

Ketua MPR Zulkifli Hasan pada panen raya padi di Desa Bakti Rasa, Seragi, Lampung Selatan, 29 Desember 2016:

> ***"Ini harus diakui, saya berterima kasih atas kinerja Pak Amran, yang telah memberikan bukti nyata produksi kita naik, dan ini kenyataan kita tahun ini tidak melakukan impor beras setelah 32 tahun"*** (Rakyat Merdeka Online, 29 Desember 2016).

Selain mendapatkan pengakuan dan apresiasi, klaim keberhasilan mewujudkan swasembada beras juga mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. Sanggahan terutama datang dari pengamat yang mengatakan klaim swasembada beras tidak benar. Mereka menunjukkan data yang diterbitkan BPS maupun lembaga internasional bahwa impor beras Indonesia pada tahun 2016 masih cukup besar. Kritikan antara lain dilontarkan oleh mantan Menteri Perdagangan yang menganggap pemerintah salah kaprah mengklaim swasembada pangan:

> ***"Saat ini Pemerintah Indonesia memandang swasembada pangan sebatas menghilangkan impor bahan pangan. Pemerintah hanya memfokuskan agenda swasembada pangan dengan target meniadakan impor. Swasembada pangan bukan hanya karena tidak ada impor, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen pangan"*** (Kompas.com., 14 Mei 2016).

Selain swasembada beras (administratif), Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengklaim sejumlah keberhasilan lain. Tidak hanya swasembada, Indonesia juga sudah mulai mengekspor beras. Impor jagung telah turun drastis dan Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk mengekspor jagung. Masyarakat tentu berhak mengetahui terobosan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan pertanian pangan. Buku ini disusun untuk menjawab tuntas berbagai pertanyaan masyarakat tentang program Swasembada Pangan dan Visi Indonesia Menjadi Lumbung Pangan 2045 yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

PERPUSTAKAAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Uraian di atas telah menjawab kritikan dan pertanyaan masyarakat mengapa Menteri Pertanian Amran Sulaiman terlalu bersemangat mewujudkan swasembada pangan. Pertanyaan lain yang kerap muncul di masyarakat ialah apakah benar Indonesia sudah kembali berswasembada beras pada tahun 2016 atau 2017? Apakah realistis merencanakan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045? Pertanyaan-pertanyaan itu dinilai wajar karena menyangkut hajat hidup rakyat, kinerja, dan reputasi pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan itu wajib dijawab tuntas dan meyakinkan.

Buku ini disusun dengan memperhatikan kerangka kerja, kebijakan, dan program seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Buku memuat Bab Prolog, beberapa Bab Utama, dan Bab Epilog. Sistematika interrelasi antarbab ditampilkan pada Gambar 2. Prolog memuat latar belakang dan buti-butir pemikiran yang melandasi isi utama buku (Bab 2-9). Bab 2 menguraikan tinjauan kinerja pembangunan pangan dan pertanian dalam lima dasawarsa terakhir untuk selanjutnya digunakan dalam mendiagnosis permasalahan dan *benchmarking* kinerja pada tahun 2014-2017. Hasil diagnosis dan *benchmarking* merupakan dasar dalam merumuskan rencana strategis swasembada pangan dan lumbung pangan dunia yang dipresentasikan pada Bab 3. Dalam rencana strategis tersebut ditetapkan *road map* dan sasaran waktu pencapaian swasembada dan eksportasi menurut komoditas. Rencana strategis ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program strategis yang diuraikan pada Bab 4-8.

Bab 4 menguraikan kebijakan dan program inti, sementara Bab 5-8 memuat kebijakan dan program komplemen yang merupakan kebijakan dan program inisitatif baru, yang terdiri atas Pengembangan Kawasan Pangan (Bab 5), Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (Bab 6), Pengelolaan Impor dan Promosi Ekspor Pangan (Bab 7), dan program khusus Menyejahterakan Keluarga Petani (Bab 8). Bab 9 memuat kinerja dan dampak kebijakan dan program. Bab Epilog memuat kesimpulan, pembelajaran, dan perspektif implementasi visi dan misi swasembada dan lumbung pangan 2045 pada tahun-tahun mendatang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

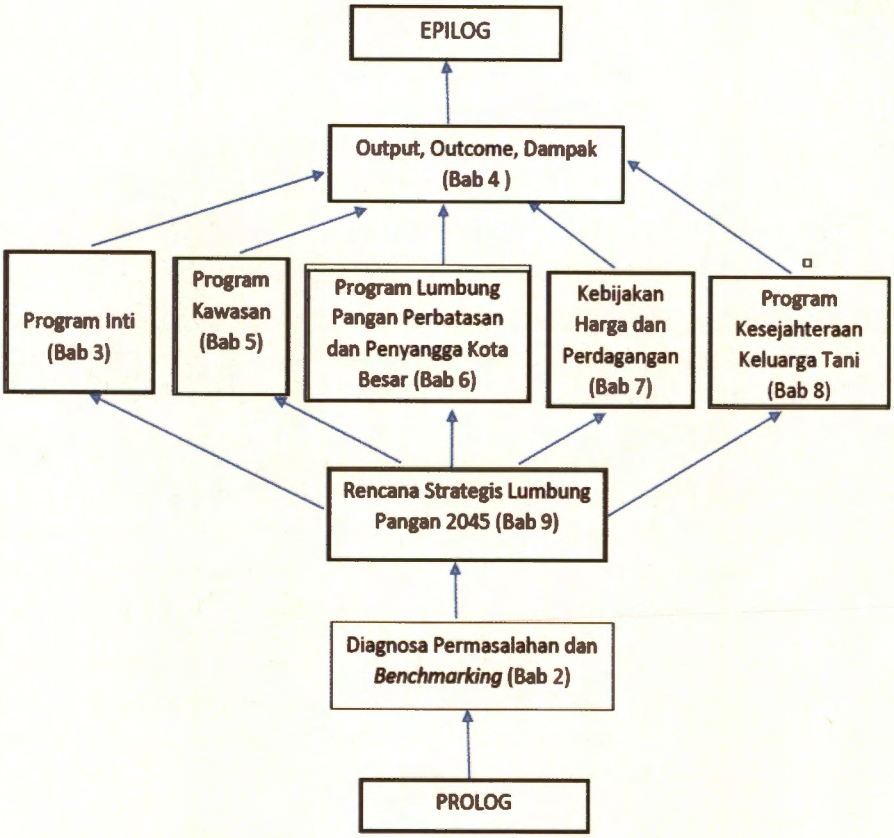

Gambar 2. Sistematika isi buku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Antaranews.com., 13 Maret 2017. FAO apresiasi upaya Indonesia wujudkan swasembada beras. http://www.antaranews.com/berita/617821/fao-apresiasi-upaya-indonesia-wujudkan-swasembada-beras. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Antaranews.com., 2 Juli 2014. Joko Widodo: kita harus berani setop impor pangan. http://www.antaranews.com/berita/442137/Joko Widodo--kita-harus-berani-setop-impor-pangan,. Diunduh pada [Diunduh 26 Mei 2017].

Binadesa.org., 28 Oktober 2014. Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Joko Widodo diragukan konsistensinya. http://binadesa.org/nawa-cita-kedaulatan-pangan-dan-visi-kemaritiman-Joko Widodo-diragukan-konsistensinya/. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

CNN-Indonesia.com., 26 Oktober 2014. Amran Sulaiman: Dari racun tikus ke Menteri. http://www.cnnindonesia.com/politik/20141026152258-32-8073/amran-sulaiman-dari-racun-tikus-ke-menteri/ [Diunduh pada 6 Juni 2017].

Detik.com., 9 Desember 2014. 3 Tahun tak Capai Swasembada Pangan, Joko Widodo: Saya Ganti Menterinya. https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2772295/3-tahun-tak-capai-swasembada-pangan-Joko Widodo-saya-ganti-menterinya. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Kompas.com., 28 Juni 2014. Joko Widodo: Senengnya Impar Impor. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/28/1307563/Joko Widodo.Senengnya.Impar.Impor. Diunduh pada 26 Mei 2017.

Kompas.com., 7 November 2014. Presiden: Namanya Menteri ya Harus Diberi Target. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/07/103555326/Presiden.Namanya.Menteri.Ya.Harus.Diberi.Target. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Kompas.com., 14 Mei 2016. Memandang Swasembada Pangan. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/14/134500626/Pemerintah.Dinilai.Salah.Kaprah.Memandang.Swasembada.Pangan. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Merdeka.com., 1 September 2014. Joko Widodo: Menteri pertanian tak bisa swasembada pangan saya pecat. https://www.merdeka.com/politik/Joko Widodo-menteri-pertanian-tak-bisa-swasembada-pangan-saya-pecat.html. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Presid.enri.go.id., 31 Oktober 2016. Presiden Joko Widodo: Kita Tidak Akan Impor Beras. http://presid,enri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-Joko Widodo-kita-tidak-akan-impor-beras.html; [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Rakyat Merdeka Online, 28 Desember 2016. Setelah 32 Tahun Merdeka, Indonesia Kembali Swasembada Beras. http://ekbis.rmol.co/read/2016/12/28/274258/Setelah-32-Tahun,-Indonesia-Kembali-Swasembada-Beras- [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Rakyat Merdeka Online, 29 Desember 2016. Ketua MPR Puji Kinerja Menteri Amran Jaga Stabilitas Produksi Pangan. http://m.rmol.co/read/2016/12/29/274413/Ketua-MPR-Puji-Kinerja-Menteri-Amran-Jaga-Stabilitas-Produksi-Pangan- [Diunduh pada 9 Juni 2017].

Republik Indonesia. 1952. Pidato Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 27 April 1952. seafast.ipb.ac.id/.../Pidato-Bung-Karno_Peletakan-Batu-Pertama [Diunduh 26 Mei 2017].

Viva.co.id., 31 Juli 2015. Joko Widodo: RI Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia. http://m.viva.co.id/berita/bisnis/655607-Joko Widodo-kepada-petani-ri-bisa-jadi-lumbung-pangan-dunia [Diunduh pada 14 Juni 1917].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I

LIMA DASAWARSA MEMBANGUN PANGAN DAN PERTANIAN

Pembangunan pangan dan pertanian dalam 50 tahun terakhir dinilai berhasil, kenyataan yang sulit dipungkiri. Namun pelaksanaannya terjebak pada rutinitas lima tahunan tanpa terobosan yang berarti. Dalam tiga tahun terakhir, perubahan pola pembangunan pertanian dimulai dengan alokasi anggaran yang memadai, lebih besar 1% dari total APBN, dengan proporsi yang lebih besar untuk kepentingan petani. Hal ini diharapkan akan mengubah wajah pembangunan pertanian Indonesia ke depan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Semua sepakat perlunya pembangunan pangan dan pertanian karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber beragam kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah. Bagaimana pentingnya pertanian dapat disimak pernyataan *Xenophon*, filsuf dan sejarawan Yunani (425-355 SM), yang mengatakan *Agriculture is the mother and nourishes of all other arts.* Artinya, pertanian adalah ibu dari segala budaya. Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya-budaya lainnya akan tumbuh dengan baik, tetapi manakala sektor pertanian ditelantarkan maka semua budaya lainnya akan rusak.

Bahasan klasik pentingnya pangan dan pertanian dalam pembangunan nasional umumnya dikaitkan dengan kontribusi terhadap perekonomian, yang biasanya tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Merujuk pada pengalaman banyak negara, kontribusi pertanian terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja idealnya dominan pada tahap awal pembangunan. Peran itu semakin berkurang sejalan dengan berkembangnya ragam kegiatan, yang kemudian kontribusinya sangat kecil dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Salah satu bahasan menarik tentang hal ini diungkapkan oleh Pakpahan (2007), yang membandingkan data PDB dan penyerapan tenaga kerja pertanian antarwaktu di Indonesia dan beberapa negara. Sebagai gambaran pada tahun 1957, kondisi Indonesia dan Korea relatif sama dalam hal kontribusi pertanian dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. PDB pertanian Indonesia saat itu sekitar 56% dan Korea 41%, sementara tenaga kerja yang bekerja di pertanian Indonesia sekitar 61% dan Korea 70%. Setelah hampir 50 tahun (2002), kontribusi pertanian dalam PDB Korea turun menjadi hanya 4% dan tenaga kerja yang bekerja di pertanian sekitar 12%. Di Indonesia, kontribusi PDB turun menjadi 17% sementara tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian masih sekitar 44%. Dalam analisis Pakpahan (2007), setiap penurunan 1% PDB pertanian dalam PDB nasional Indonesia hanya dikuti oleh 0,43% penurunan tenaga kerja pertanian. Sementara itu, perubahan nilai PDB pertanian dalam PDB nasional yang sama, penurunan tenaga kerja pertanian di Korea Selatan mencapai lebih dari 1,5%.

Walaupun kontribusi pertanian dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan saat ini kecil, bukan berarti pertanian tidak penting,

PERPUSTAKAAN SEKJEN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

karena dalam berbagai kebijakan pemerintah, pertanian tetap mendapat prioritas utama. Mengapa hal ini berbeda antara di Indonesia dengan Korea Selatan? Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya terkait dengan kebijakan pemerintah, terutama dalam lima dasawarsa terakhir.

Warisan Pemerintah Kolonial

Lima dasawarsa dalam bahasan ini merujuk pada masa sejak pemerintahan Orde Lama memimpin Indonesia, yang dimulai pada tahun 1967/68. Walaupun demikian, beberapa bahasan akan berkaitan dengan masa-masa sebelumnya, karena pembangunan dalam satu masa terkait erat dengan masa-masa sebelumnya. Periodisasi pembangunan pertanian di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa siklus yang berbeda oleh beberapa penulis. Pasandaran *et al.* (2014), misalnya, mengelompokkan mulai dari zaman VOC sampai diberlakukannya *Agrarische wet*, politik etika Belanda, pascakolonial yang dibagi ke dalam kelompok Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Tulisan lain membagi masa Orde Lama dalam tiga kelompok, yaitu masa peralihan (1945-1949), masa demokrasi liberal (1950-1958), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1967).

Dari sisi kebijakan pertanian, secara umum ada tiga hal menonjol sejak zaman kekuasaan Belanda yang pengaruhnya masih dirasakan sampai saat ini. Hal itu antara lain terkait dengan **politik penguasaan lahan dan pendidikan pertanian**. Terkait dengan politik penguasaan lahan, masuknya Belanda ke Indonesia yang pada awalnya bermotifkan perdagangan, berlanjut pada penguasaan dan ekploitasi tanah jajahan, dengan menerapkan sistem tanam paksa untuk beberapa tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini telah menempatkan petani sejak awal sebagai objek pembangunan atau sebatas faktor produksi dalam suatu proses produksi.

Pemberlakuan *Agrarische wet* pada tahun 1870, yang oleh banyak kalangan juga disebut sebagai undang-undang agraria, pada awalnya disambut baik karena merupakan koreksi terhadap kebijakan tanam

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

paksa dan perampasan tanah masyarakat. Kebijakan ini menyengsarakan penduduk, terutama petani. Melalui pemberlakuan *Agrarische wet* maka pemerintah memastikan legalitas kepemilikan tanah dan tanah penduduk dijamin oleh negara. Namun di balik maksud baik ini, ada niat terselubung dari Pemerintahan Belanda yang ingin memberi kesempatan kepada swasta untuk menguasai tanah dalam skala luas. Pemberian hak *erfpacht*, atau semacam Hak Guna Usaha, memungkinkan bagi seseorang menyewa tanah telantar yang telah menjadi milik negara, selama maksimum 75 tahun, sesuai dengan kewenangan yang diberikan berupa hak *eigendom* atau hak kepemilikan yang dapat diwariskan dan menjadikan agunan. Hak *erfpacht* dibagi untuk perkebunan dan pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil, rumah tetirah dan pekarangannya.

Politik penguasaan lahan ini menjadi cikal bakal dualisme ekonomi akibat pembangunan perkebunan besar di Indonesia (Boeke, 1966). Perkebunan besar menjadi *enclave* yang menghasilkan keuntungan besar, sementara masyarakat petani di sekitarnya tetap miskin dan hanya menjadi buruh pada perusahaan tersebut. Kondisi dualistik ini terus terjadi pascakemerdekaan, yang ditandai oleh nasionalisasi beberapa perkebunan besar Belanda. Bahkan pada pemerintahan Orde Baru melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970), telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi perusahaan swasta dalam negeri dan asing untuk menguasai lahan dalam skala luas. Pada era Orde Baru dan reformasi, perkembangan pesat ekonomi kelapa sawit berdampak terhadap dominasi swasta dalam negeri dan asing.

Sementara itu, petani yang umumnya mengusahakan tanaman pangan dan hortikultura dihadapkan kepada masalah penguasaan lahan yang sempit dan terbatas. Petani yang mengusahakan lahan kurang 0,5 hektare, menurut data Sensus Pertanian tahun 2013 (BPS, 2014), berjumlah 55,9% dari total rumah tangga pertanian. Data sensus tersebut menunjukkan pula bahwa selama 10 tahun terakhir rumah tangga petani yang mengusahakan lahan sekitar 0,1 hektare berkurang hampir 5 juta rumah tangga, dari 9,38 juta menjadi 4,34 juta rumah tangga. Akibat timpangnya penguasaan aset utama dalam kegiatan pertanian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

menyebabkan angka Gini Rasio penguasaan lahan mendekati 0,72 pada tahun 2014 (Kompas, 2014). Artinya, 1% pendududuk menguasai hampir 72% lahan yang tersedia. Dampak lanjutan dari ketimpangan penguasaan lahan adalah ketimpangan pendapatan atau Gini Rasio cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Data menunjukkan Gini Rasio pendapatan meningkat dari 0,38 menjadi 0,41 dan dalam dua tahun terakhir mulai terkoreksi menjadi 0,40 dan 0,39. Sementara jumlah penduduk miskin absolut cenderung menurun dari sekitar 35 juta menjadi 27-28 juta orang dan secara relatif juga menurun dari 35% menjadi 28% (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Perkembangan kemiskinan relatif dan absolut serta Gini Rasio dalam periode 2008-2016.

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kemiskinan relatif (%)	15,4	14,2	13,3	12,5	11,7	11,5	11,0	11,1	10,9
Kemiskinan absolut (juta orang)	35	33	31	30	29	29	28	29	28
Gini Rasio	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

Sumber: Pusdatin (2017).

Terkait dengan penguasaan lahan, data PATANAS tahun 1995 dan 2007 menunjukkan rata-rata luas penguasaan lahan sawah di Jawa menurun dari 0,49 hektare menjadi 0,36 hektare. Peningkatan jumlah petani gurem rata-rata 2,4% per tahun. Kasus di tiga desa di Jawa menunjukkan 64-76% petani tidak memiliki lahan, sementara 1-3% rumah tangga petani menguasai 36-54% lahan (Sumaryanto, 2010; Tjondronegoro *et al.*, 2008; Sumaryanto dan Sudaryanto, 2009; Nurmanaf dan Irawan, 2009).

Kebijakan pemerintah jajahan lainnya yang pengaruhnya masih dirasakan sampai saat ini adalah **pendidikan pertanian**. Kebijakan tanam paksa yang diterapkan pemerintah Belanda telah menyebabkan kesengsaraan dan kelaparan di tanah jajahan. Menurut Pasandaran *et al.* (2014), tersedotnya waktu para petani untuk mengurus komoditas yang diwajibkan menyebabkan terjadinya kelaparan di Cirebon pada tahun 1843. Kelaparan paling parah terjadi pada tahun 1848 di Demak akibat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

musim kemarau yang panjang. Bencana kemanusiaan ini menyebabkan kematian sekitar 200 ribu orang (Vlughter, 1949 *dalam* Pasandaran *et al.*, 2014). Akibatnya, muncul gelombang protes kaum humanis di Belanda yang mendorong Pemerintah Belanda menyelidiki bencana kemanusiaan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan ini, pada tahun 1902 Pemerintah Belanda menyepakati upaya perbaikan produksi pertanian di tanah jajahan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diputuskan mendirikan suatu departemen baru, yaitu *Departement van Landbouw*. Keputusan tersebut didukung oleh M. Treub, Direktur *Lands Plantentuin* atau Kebun Raya Bogor. Kemudian M. Treub diberi kesempatan mempersiapkan langkah untuk mewujudkan departemen tersebut.

Menurut Prince (1999 *dalam* Pasandaran *et al.*, 2014), Treub saat itu hanya memikirkan masalah teknis, sehingga yang diusulkan terlebih dahulu adalah upaya membangun lembaga penelitian. Pada tahun 1902 didirikan lembaga yang menangani penelitian padi dan palawija. Pada tahun 1905 dibangun delapan lembaga di bawah naungan Departemen Pertanian, antara lain menangani penelitian tanah, peternakan, mikrobiologi, kebun raya, inspeksi pertanian, dan pendidikan pertanian (Toxopeus, 1999 *dalam* Pasandaran 2014).

Pada tahun 1907 mulai dipikirkan pemanfaatan dan pengembangan hasil penelitian dalam skala luas. Pada waktu itu diusulkan mengembangkan petak demonstrasi untuk memverifikasi hasil penelitian dengan menggunakan benih yang baik dalam skala pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan produksi pertanian. Melalui petak demonstrasi, pejabat pertanian seperti mantri tani, guru yang berasal dari Sekolah Pertanian di Bogor, dan petani dapat belajar bersama di lapangan. Dengan cara demikian, minat para petani untuk berusahatani dapat ditingkatkan.

Penyuluhan pertanian semakin mendapat perhatian setelah Treub diganti dengan H.J. Lovink pada tahun 1909. Ia memberikan penekanan pada penelitian penyuluhan pertanian yang memungkinkan kontak langsung antara penerapan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan oleh petani. Dinas Penyuluhan Pertanian (*Landbouw Voorlichtingdienst*) yang didirikan pada tahun 1910 merupakan tonggak sejarah dimulainya pendekatan penyuluhan pertanian secara sistematik.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Retorika Pentingnya Pertanian Sampai Revitalisasi Pertanian ala SBY

Pascakemerdekaan terdapat dua hal penting yang dilakukan pemerintah terkait dengan pertanian, yaitu: (a) upaya perbaikan distribusi lahan; dan (b) mencoba mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri melalui berbagai upaya. Upaya perbaikan penguasaan lahan di tingkat petani diawali dengan disahkannya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada 24 September 1960. Undang Undang ini dimaksudkan untuk mengganti *Agrarische Wet 1870*. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno ada beberapa upaya untuk menerapkan undang-undang ini, namun belum banyak mendatangkan hasil. Pascapemerintahan Soekarno, undang-undang ini banyak dikaitkan dengan gerakan PKI, sehingga selama pemerintahan Orde Baru praktis dibekukan.

Pada masa reformasi, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, upaya perbaikan distribusi lahan kembali dicanangkan dengan jargon Reforma Agraria. Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) atau sumber-sumber agraria menuju struktur P4T yang berkeadilan dengan langsung mengatasi pokok persoalan. Reforma Agraria tidak sama maknanya dengan program pendistribusian atau pembagian tanah (*landreform*). Justru esensinya yang perlu terus dijaga adalah bagaimana agar masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan lahanya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya (Winoto, 2007; BPN, 2007). Sayangnya upaya ini juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Pentingnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri telah diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam beberapa kesempatan. Salah satu pernyataan yang melegenda adalah pidato Presiden Soekarno pada 27 April 1952 pada saat peletakan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB). Beberapa kutipan dari pidato tersebut adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN SEKJEN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Saya diminta untuk meletakkan batu-pertama daripada Gedung Fakultas Pertanian, Universitet Indonesia. Permintaan itu, saya hendak menyampaikan beberapa kata lebih dahulu. Dengan sengaja pidato saya ini saya tuliskan, agar supaya merupakan risalah yang nanti dapat dibaca dan dibaca lagi dan dibaca lagi oleh pemuda-pemudi kita bukan saja dari sekolah tinggi ini, tetapi dari seluruh tanah-air kita. Malah, sekarang pun saya mengarahkan kata kepada pemuda-pemudi di seluruh Indonesia itulah.

Sebab, apa yang hendak saya katakan itu, adalah amanat penting bagi kita, amat penting - bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari. Karena itu, pidato saya ini agak panjang, dan peletakan batu-pertama daripada Gedung Fakultet Pertanian tak dapat kulakukan pada saat yang dirancangkan.

Ya, pidato saya mengenai mati-hidup bangsa kita di kemudian hari, oleh karena soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat. Cukupkah persediaan makan rakyat kita dikemudian hari? Kalau tidak, bagaimana caranya menambah persediaan makanan rakyat itu? Peristiwa sebagai yang kita hadiri sekarang ini ialah: perletakan batu-pertama daripada suatu sekolah tinggi pertanian, adalah satu kesempatan yang baik untuk menyampaikan kata-kata langsung kepada pemuda-pemudi kita berkenaan dengan soal yang amat penting itu, kepada pemuda-pemudi, yang dalam tangan merekalah mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.

Selain dengan retorika di atas, perhatian pemerintah Orde Lama untuk mewujudkan kecukupan pangan ditandai oleh beberapa upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui gerakan swasembada beras melalui Program Kesejahteraan Kasimo dan Pengembangan Program Padi Sentra. Program Kesejahteraan Kasimo disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Rencana Kasimo adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan yang terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 hektare.
2. Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul.
3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit.
5. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Pada tahun 1959, muncul Program Padi Sentra, yang bertujuan agar pada tahun 1963 tercapai swasembada beras di Indonesia. Kedua program tersebut tidak berhasil karena ketidakstabilan pemerintah saat itu, sehingga upaya ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Impor pangan semakin tinggi dan untuk mengelola impor dibentuk Komando Logistik Nasional pada tahun 1965 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2. Kebijakan pemerintah dalam bidang pangan dan pertanian tahun 1952-2015.

Pemerintahan	Kebijakan	Upaya riil
Orde Lama (1952-1964)	1. Swasembada Beras melalui Program Kesejahteraan Kasimo 2. Pengembangan Program Padi Sentra	1. Pengembangan usaha pertanian padi skala luas di luar Jawa 2. Intensifikasi di Jawa 3. Usaha pembibitan dan pengaturan ternak
Pemerintahan transisi (1965-67)	Pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui impor.	Pembentukan Komando Logistik Nasional (1965) dan Badan Urusan Logistik (1967)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintahan	Kebijakan	Upaya riil
Orde Baru (1968-1998)	1. Pencapaian swasembada pangan melalui pelaksanaan pembangunan terencana lima tahunan (Pelita I-VI). 2. Kebijakan pangan murah (jangka pendek) dan swasembada mutlak (jangka panjang)	1. Pengembangan Bimas dan Bimas yang disempurnakan. 2. Upaya komando langsung dari Presiden dalam penerapan panca usahatani secara penuh. 3. Swasembada berkelanjutan
Orde reformasi		
1. Era Habibie	Swasembada *on trend*	Gerakan Mandiri Padi Jagung dan Kedelai (Gema Palagung)
2. Era Gus Dur	Kecukupan pangan dan kesejahteraan petani	*Corporate Farming*
3. Era Megawati	Pencapaian swasembada	Sistem agribisnis
4. Era SBY	Ketahanan pangan dan swasembada	Diawali dengan Revitalisasi Pertanian sampai Tujuh Gema Revitalisasi

Sumber: Repelita beberapa tahun dan Badan Bimas Ketahanan Pangan (2007)

Pemerintahan Orde Baru terinspirasi oleh zaman sebelumnya, bahwa tersedianya pangan murah dan terjangkau merupakan hal yang harus dicapai dalam jangka pendek. Selain itu, pencapaian swasembada juga dicanangkan sebagai target jangka panjang. Rezim orde baru terbantu dengan semakin masifnya gerakan revolusi hijau dengan basis penerapan pancausahatani dan dukungan inovasi pertanian.

Pada tahun 1969 pemerintahan orde baru menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program ini mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun untuk jangka waktu 25 tahun. Repelita I (1969-1974) merupakan landasan awal pembangunan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian era orde baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran utama cukup pangan, cukup sandang, dan perbaikan prasarana penunjang pembangunan pertanian. Hal ini berperan penting mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan bidang pertanian, karena perekonomian mayoritas penduduk Indonesia masih mengandalkan hasil pertanian.

Repelita II (1974-1979) masih memberikan perhatian yang besar pada sektor pertanian yang merupakan dasar dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan menggerakkan industri berbasis bahan mentah pertanian menjadi bahan baku. Pada masa ini dilakukan perbaikan besar-besaran sarana produksi pertanian. Berbagai upaya selama dua Repelita sebelumnya memberikan hasil yang gemilang pada akhir periode Pelita III atau awal Pelita IV berupa swasembada pangan. Keberhasilan ini mengubah status Indonesia yang semula sebagai negara pengimpor bahan pangan dalam jumlah besar menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984 dari 15,3 juta ton pada tahun 1974. Atas keberhasilan itu, Indonesia mendapat pengakuan dan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pada tahun 1984.

Repelita V (1989-1994) lebih menitikberatkan pada upaya pemantapan swasembada pangan dan meningkatkan produksi komoditas pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Selanjutnya, pada pembangunan jangka panjang kedua, Indonesia memasuki proses tinggal landas. Tahap akhir pemerintahan orde baru adalah pelaksanaan PELITA VI.

Repelita VI (1989-1994) masih menitik beratkan pada pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang menjadi pemicu tumbangnya pemerintahan Orde Baru.

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, pembangunan pangan dan pertanian mengalami pasang surut. Pemerintahan Presiden Habibie

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pada tahun 1998 mencanangkan upaya kemandirian pangan dan produk pertanian melalui Gerakan Mandiri Padi Jagung dan Kedelai (Gema Palagung). Berbagai program terobosan diimplementasikan, namun tidak tuntas sehingga belum terlihat hasilnya. Pada era Presiden Gus Dur, pemerintah pada tahun 2000 mencanangkan upaya konsolidasi lahan melalui *Corporate Farming*. Sayangnya program pembangunan pangan dan pertanian ini tidak berlanjut karena Pemerintahan Gus Dur juga berakhir sebelum waktunya.

Menggantikan Gus Dur, Presiden Megawati mencanangkan upaya pencapaian swasembada pangan. Sayangnya, implementasi program sistem agribisnis yang akan dikembangkan terjebak pada tataran konsep dan pemikiran, sehingga tidak terlihat kemajuan khusus yang dapat dicatat pada era ini. Meski demikian, Presiden Megawati telah berupaya mengurangi subsidi produksi pangan untuk menekan beban keuangan negara.

Era Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II, mengawali kiprahnya dengan mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada 11 Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat. Revitalisasi pertanian diartikan sebagai kesadaran menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan proporsi kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional tanpa mengabaikan sektor lain. Revitalisasi pertanian dimaksudkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh *stakeholder* dan mengubah paradigma pertanian yang tidak hanya sekadar penghasil komoditas untuk dikonsumsi tetapi juga sebagai sektor multifungsi dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Revitalisasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Terkait dengan aspek keagrariaan dalam RPPK, pemerintah berencana mewujudkan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektare di seluruh Indonesia. Sayangnya inisiasi Presiden SBY tidak didukung oleh payung hukum yang kuat, dan pemerintahan juga tidak serius mewujudkan apa yang telah dicanangkan tersebut. Selama dua periode Pemerintahan SBY tidak banyak kemajuan sektor pertanian yang dapat diungkap.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada akhir masa Pemerintahan SBY pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan empat target utama, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang dirumuskan, strategi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui "Tujuh Gema Revitalisasi", yaitu: (a) lahan; (b) perbenihan dan perbibitan; (c) infrastruktur dan sarana; (d) sumber daya manusia; (e) pembiayaan petani; (f) kelembagaan petani, dan (g) teknologi dan industri hilir.

Berbagai program dan kegiatan selama 50 tahun terakhir telah mengantarkan Indonesia sebagai negara yang telah berhasil meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Setelah itu, pembangunan pangan dan pertanian mengalami pasang surut. Secara keseluruhan, negara berhasil meningkatkan produksi padi dan menyediakan beras bagi penduduk sebesar dua kali lipat, dari 169,4 kg per kapita pada tahun 1971 menjadi 304,5 kg per kapita pada tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada jagung. Bahkan selama 50 tahun terakhir negara mampu menyediakan jagung hampir lima kali lipat, dari 21,8 kg per kapita pada tahun 1971 menjadi 89,2 kg per kapita pada tahun 2016. Sementara untuk kedelai justru sebaliknya, kemampuan negara menyediakan kedelai menurun, dari 4,3 kg per kapita menjadi 3,3 kg per kapita dalam periode yang sama (Tabel 1.3).

Tabel 1.3. Pencapaian pembangunan pertanian dalam periode 1971-2016 ditinjau dari kemampuan penyediaan padi, jagung, dan kedelai.

Tahun	Penyediaan (kg/kapita)		
	Padi	Jagung	Kedelai
1971	169,4	21,8	4,3
1980	201,0	27,0	4,4
1990	251,6	37,5	8,3
2000	251,6	46,9	4,9
2010	279,7	77,1	3,8
2015	294,9	76,7	3,8
2016	304,5	89,2	3,3

Sumber: Pusdatin (2017).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Satu hal yang menarik dari data produksi bahan pangan utama ini adalah proporsi peningkatan kemampuan negara dalam menyediakan pangan bagi masyarakat, terutama ditopang oleh peningkatan produktivitas lahan dari waktu ke waktu. Sementara luas lahan yang tersedia per kapita penduduk untuk budi daya padi, jagung, dan kedelai terus menurun dari tahun ke tahun. Luas panen padi, misalnya, dari sekitar 700 m^2 per kapita pada awal tahun 1970-an menjadi 578 m^2 pada tahun 2016. Demikian juga untuk jagung dari sekitar 220 m^2 menurun menjadi 168 m^2 per kapita. Kondisi serupa juga terjadi pada luas panen kedelai, dari 57 m^2 menjadi sekitar 22 m^2 per kapita dalam periode yang sama.

Di sisi lain, produktivitas padi meningkat dari 2,40 ton pada awal tahun 1970an menjadi 5,26 ton per hektare pada tahun 2016. Produktivitas jagung juga meningkat dari 0,99 ton menjadi 5,29 ton per hektare dalam periode yang sama. Produktivitas kedelai meningkat pula dari 0,76 ton pada tahun 1970an menjadi 1,52 ton per hektare pada tahun 2016. Data ini mengindikasikan penggunaan teknologi produksi semakin intensif sehingga produktivitas terus meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 1.4).

Tabel 1.4. Rata-rata luas panen dan produktivitas komoditas pangan utama dalam periode 1971-2016.

Tahun	Padi		Jagung		Kedelai	
	Luas panen (m^2/kapita)	Produktivitas (ton/ha)	Luas panen (m^2/kapita)	Produktivitas (ton/ha)	Luas panen (m^2/kapita)	Produktivitas (ton/ha)
1971	700	2,40	220	0,99	57	0,76
1980	610	3,29	185	1,46	50	0,89
1990	580	4,31	176	2,13	74	1,12
2000	571	4,40	169	2,77	40	1,23
2010	557	5,02	174	4,44	28	1,37
2015	552	5,34	148	5,18	24	1,57
2016	578	5,26	168	5,29	22	1,52

Sumber: Pusdatin (2017).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pencapaian pembangunan pertanian selama 50 tahun terakhir, selain ditentukan oleh kepiawaian para perencana pembangunan dan manajemen pelaksanaan di lapangan juga tidak dapat dipisahkan dari alokasi anggaran yang digelontorkan kepada Kementerian Pertanian. Proporsi anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Departemen Pertanian (sekarang Kementerian Pertanian) umumnya di bawah 1% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2004 hingga 2014, alokasi anggaran Kementerian Pertanian hanya berkisar antara 0,71-0,84% dari total APBN. Baru pada tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian meningkat mencapai 1,65%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 1,33% dan 1,06% (Tabel 1.5). Penggunaan anggaran yang meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2015 sebagian besar untuk pengembangan infrastruktur pertanian. Hal ini dinilai realistis karena pengembangan infrastruktur pertanian sejak krisis moneter pada tahun 1997/98 terbaikan dan alokasi anggaran lebih dominan pada upaya pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 1.5. Anggaran Kementerian Pertanian, APBN, dan rasio anggaran terhadap APBN dalam periode 1971-2016.

Tahun	Anggaran Kementan (miliar Rp)	APBN (miliar Rp)	Proporsi anggaran Kementan terhadap APBN (%)
2004	3.528	427.226	0,83
2008	8.305	989.493	0,84
2010	8.038	1.126.146	0,71
2014	15.470	1.876.872	0,82
2015	32.813	1.984.149	1,65
2016	27.630	2.082.948	1,33
2017	22.107	2.080.451	1,06

Sumber: Pusdatin (2018), Kemenkeu (2017).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan Normatif Pembangunan Pangan dan Pertanian

Apa hasil pembangunan pertanian selama ini? Peningkatan produksi pangan dan beberapa komoditas pertanian lainnya sudah menjadi kenyataan yang sulit dipungkiri. Revolusi hijau yang mendasari penerapan inovasi pertanian dan kebijakan pencapaian swasembada *at all cost* yang dijalankan pemerintah sebelumnya harus diakui berdampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian, terutama padi yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia.

Kebijakan pembangunan pertanian sejak awal orde baru didasari oleh pemikiran untuk memacu peningkatan produksi pangan, dengan basis utama penerapan teknologi. Ketertinggalan dan kemiskinan petani pangan saat itu disebabkan oleh minimnya penerapan teknologi (Winarno, 2003). Oleh karena itu, upaya utama yang dilakukan adalah mengintensifkan penerapan teknologi di tingkat petani, namun kurang memperhatikan berbagai ketimpangan di masyarakat, terutama akses petani terhadap sumber daya lahan.

Pembangunan nasional berjangka yang dimulai pada Pelita I sejak tahun 1969 memprioritaskan sektor pertanian melalui definisi ulang kebijakan pertanian dan penekanan pada usaha pemenuhan sendiri produksi beras (Hansen, 1973). Hampir setengah abad kemudian, pembangunan pertanian masih berkutat pada upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi di tingkat petani. Ironisnya, upaya pemenuhan kebutuhan beras sendiri tetap jadi andalan utama program, ditambah beberapa komoditas lainnya. Sementara persoalan ketimpangan penguasaan lahan dan kemiskinan petani pangan belum banyak mendapat penanganan yang memadai.

Terabaikannya upaya perbaikan distribusi lahan selama ini makin memperparah ketimpangan penguasaan lahan di masyarakat. Data *Kompas* (2014) menunjukkan Gini Rasio lahan secara nasional berkisar pada angka 0,72. Artinya, telah terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang sangat tinggi. Angka ketimpangan penguasaan lahan jauh lebih buruk dibanding ketimpangan pendapatan, dengan Gini Rasio pada tahun 2016 membaik menjadi 0,39 atau turun 0,02 dari tahun-tahun sebelumnya.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam kondisi yang timpang tersebut, upaya pemerintah yang masih terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan akses terhadap input usahatani dan keterampilan berusahatani lebih banyak menguntungkan petani yang memiliki lahan luas. Mereka dapat memacu peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi dan mengakumulasi modal untuk pengembangan usaha. Sementara itu, petani berlahan sempit yang dominan *part time farmer*, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, sulit mengembangkan usaha dan terpaksa bertahan dengan keterbatasan yang membelit. Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa melepaskan lahannya kepada petani lain yang berlahan luas. Data Sensus Pertanian 2013 (BPS, 2014) menunjukkan, selama 10 tahun terakhir jumlah petani yang mengusahakan lahan sekitar 0,1 hektare berkurang hampir 5 juta. Bila kondisi ini berlanjut maka salah satu ekses negatif pembangunan pertanian adalah meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 merupakan hasil kerja keras selama lebih dari 15 tahun, yang ditunjang oleh penerapan teknologi pertanian secara masif. Selain itu, upaya ini ditunjang pula oleh dukungan penuh semua jajaran pelaksana di tingkat pusat sampai pada wilayah kerja penyuluhan pertanian. Dengan demikian, semua wilayah dapat terpetakan dengan baik dan mendapat pengawalan yang maksimal secara berjenjang. Semua aparat mendapat porsi tanggung jawab tersediri dalam menyukseskan program swasembada pangan, mulai dari Gubernur, Bupati, Camat sampai aparat penyuluhan di lapangan. Semua tanggung jawab terukur dan dapat dinilai, dengan penerapan sistem *reward* dan *punishment* berjenjang. Intervensi "tangan besi" petugas untuk mewujudkan mimpi swasembada pangan antara lain tercermin dari pencabutan tanaman petani karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perpaduan perencanaan jangka panjang yang sistematis, diikuti oleh proses evaluasi perencanaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahun, dan pembagian tugas yang jelas untuk setiap hamparan lahan bagi tugas pendampingan di lapangan, menjadi kunci keberhasilan pencapaian swasembada beras. Di sisi lain, mulai dari orde lama sampai era SBY, salah satu kekuatan dalam perencanaan pembangunan pertanian di Indonesia terletak pada tataran konsepsi. Bila disimak secara saksama,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mulai dari program Kasimo, Padi Sentra, dan rangkaian perencanaan dalam GBHN dan Repelita, sampai pada program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka kekuatan pada tataran konsep sangat dominan.

Sebagai gambaran, kutipan dari bagian Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/75-1978/79), pada halaman 33, tentang Kebijaksanaan-Kebijaksanaan dan Langkah-Langkah dapat disimak sebagai berikut:

> *Seperti halnya dengan Repelita I, tugas pokok sektor pertanian dalam Repelita II adalah berusaha membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, baik lapangan kerja baru maupun dalam pekerjaan yang sudah dikenal dan membantu meratakan pembagian pendapatan ... Dalam rangka itu segala kegiatan pembangunan sektor pertanian diusahakan agar dapat memenuhi fungsinya untuk:*
>
> 1. *Meningkatkan kemampuan berproduksi para petani agar dapat turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan.*
> 2. *Memelihara kelangsungan peningkatan produksi pangan terutama beras.*
> 3. *Meningkatkan hasil pertanian untuk tujuan ekspor.*
> 4. *Mengurangi pengangguran di perdesaan.*
> 5. *Meningkatkan bahan pertanian untuk bahan baku industri, dan*
> 6. *Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal.*

Sebagai perbandingan, dikemukakan pokok pikiran tentang Pelaksanaan Program Kerja Kementerian Pertanian tahun 2012 dan Target tahun 2014, yang disampaikan Menteri Pertanian dalam sidang Kabinet Terbatas di Jakarta pada 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Langkah Strategis Pencapaian Surplus 10 Juta Ton Beras Tahun 2014:

1. *Dibutuhkan penambahan luas lahan sawah minimal 100.000 ha/tahun (untuk mengganti alih fungsi lahan rata rata 65.000 ha/tahun)*
2. *Guna meningkatkan produktivitas padi dari rata-rata 5,12 ton/ha menjadi 5,7 ton/ha dan Indeks Pertanaman dari 1,52 menjadi 1,68 diperlukan:*
   a. *Perbaikan jaringan irigasi 18,8% per tahun dari total jaringan irigasi.*
   b. *Penggunaan pupuk berimbang mencapai 70% dari total areal pertanaman.*
   c. *Penggunaan benih varietas unggul bermutu minimal 60%.*
   d. *Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dengan Pestisida dan Light Trap mencapai 70%.*
   e. *Peningkatan intensitas penyuluhan mencapai 50% dari total jumlah desa.*
   f. *Penurunan konsumsi beras 1,5% per kapita per tahun.*

Dari dua kutipan di atas terlihat apa yang diungkapkan adalah sesuatu yang normatif dan lebih banyak berdasarkan hasil simulasi makro dengan tingkat kedetailan yang rendah. Dengan demikian, agak sulit memahami bagaimana melaksanakan semua upaya itu dan siapa yang melaksanakan.

Dari pembelajaran di atas tercermin bahwa keberhasilan pembangunan pertanian merupakan perpaduan antara proses perencanaan jangka panjang yang sistematis, dan didukung oleh kedetailan implementasi program, serta pendampingan secara berjenjang. Hal ini juga menjadi basis keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Sementara pada era lainnya, sulit mengukur pencapaian program karena basis perencanaan yang terlalu umum, normatif, kuat dalam tataran konsep dan sangat lemah dalam hal detail pelaksanaannya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Permasalahan Klasik *Business as Usual*

Memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan pertanian mulai dari era Orde Lama sampai era Kabinet Pembangunan, tanpa disadari ada beberapa hal yang menjebak para pelaku pembangunan dari segi perilaku *business as usual*, antara lain:

a. Sistem perencanaan berbasis dokumen yang sama dari waktu ke waktu seringkali membuat para perencana menjadi tidak sensitif terhadap hal-hal baru. Memperhatikan dokumen perencanaan dalam Repelita I-VI, basis data yang digunakan relatif sama, dengan sedikit penambahan unsur baru dari waktu ke waktu. Kondisi ini membuat para perencana tidak sensitif terhadap hal-hal yang tidak biasa, apalagi upaya untuk berpikir *out of the box*. Hampir semua dokumen dibukukan dalam bentuk buku yang relatif tebal, dengan data yang relatif sama pola penyampaiannya dari waktu ke waktu.

b. Beberapa kondisi sudah menjadi *given* yang memang harus diterima dan program yang direncanakan harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Salah satu di antaranya terkait dengan siklus pertanaman beberapa komoditas, utamanya padi, sudah dipetakan dan ditetapkan luasan areal produksinya yang berbeda antarwaktu, dan sepertinya tidak mungkin diubah. Pola deskripsi semacam ini tidak merangsang pemikiran lain, yang mencoba menggugat kebijakan yang ada.

c. Penetapan instrumen kebijakan dianggap sebagai jawaban terhadap masalah yang ada, tanpa upaya perbaikan efektivitas kebijakan. Salah satunya terkait dengan anggapan bahwa naiknya harga pada saat panceklik dan menurunnya harga pada saat panen raya adalah situasi biasa dan rutin untuk komoditas pertanian. Penyediaan istrumen harga pokok pembelian pemerintah diharapkan dapat memecahkan masalah ini. Seberapa jauh kebijakan ini efektif di lapangan, sangat sedikit yang jadi perhatian banyak pihak, sehingga setiap tahun siklus tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah.

d. Para perencana umumnya kurang memahami kondisi lapang, sehingga basis penyusunan rencana lebih dominan data sekunder

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dari berbagai sumber. Kondisi ini menyebabkan sensitivitas para perencana terhadap aspek yang direncanakan menjadi rendah. Pola perguliran perencanaan tahunan yang baku dan harus diikuti makin mengurangi peluang para perencana untuk berpikir di luar hal yang rutin dan biasa. Para perencana dan pelaksana pembangunan merupakan dua kutub yang berbeda dan jarang berinteraksi secara intensif.

e. Alokasi anggaran mengikuti status institusi, bukan program, sehingga alokasi anggaran lebih berorientasi pada bagaimana cara menghabiskan menurut *time schedule*, tanpa pemikiran seberapa jauh setiap dana yang dikeluarkan dapat memberikan output, apalagi sampai pada taraf *outcome*. Penggunaan konsep *return on investment (ROI)* tidak banyak dikenal dan diadaptasikan dalam perencanaan.

Beberapa hal di atas membuat para pelaksana terjebak pada kegiatan rutin dalam berbagai jangka waktu. Perhatian pimpinan yang lebih dominan pada bagaimana agar dana yang dialokasikan bisa "dihabiskan" sesuai jadwal perencanaan, membuat para perencana tidak sempat memikirkan bagaimana merencanakan sesuatu yang lebih efektif dan efisien menghasilkan output, outcome, dan bahkan impact.

Pembelajaran untuk Pembangunan Pangan dan Pertanian ke Depan

Belajar dari keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun 1984, ada dua hal pokok yang harus jadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan pertanian ke depan, yaitu:

a. Pertanian adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan alam dan banyak komponennya yang sulit dikontrol. Oleh karena itu, proses pelaksanaannya tidak dapat dibuat sebagai suatu siklus rutin dalam jangka sangat pendek. Agar berhasil, pembangunan pangan dan pertanian memerlukan basis

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

perencanaan jangka menengah dan panjang, dengan penetapan target yang jelas setiap tahun, bersifat akumulasi dari periode sebelumnya.

b. Pembangunan pangan dan pertanian memerlukan keterpaduan banyak pihak, sehingga kemampuan dalam memainkan orkestra pembangunan lintas sektor sangat dibutuhkan. Orkestra di sini tidak saja agar para pihak mendukung pembangunan pertanian, namun yang lebih penting bagaimana membuat para pihak merasakan keberhasilan pembangunan pertanian sebagai bagian dari keberhasilan mereka dalam program-programnya.

c. Pengawalan yang berlapis dari pusat sampai ke tingkat lapangan merupakan suatu keharusan, di tengah makin menguatnya era desentralisasi pembangunan. Setiap satuan wilayah terkontrol dan dapat dimonitor perkembangannya.

d. Pelaksanaan program swasembada pangan tidak cukup hanya menargetkan peningkatan produksi, namun harus membuat beberapa indikator yang terkait dengan kesejahteraan petani. Ukuran yang terkait dengan peningkatan pendapatan petani, peningkatan kapasitas produksi (rata-rata luas lahan yang diusahakan dan peningkatan nilai tambah) akan lebih mudah diterjemahkan ke dalam bentuk dukungan pihak terkait.

e. Indikator keberhasilan suatu wilayah dalam pembangunan pangan dan pertanian dicirikan oleh terjadinya peningkatan produksi yang diiringi oleh peningkatan pendapatan petani yang mengusahakannya, dan terjadinya peningkatan rata-rata luas lahan yang diusahakan atau berkembangnya ragam usaha yang terkait dengan peningkatan nilai tambah. Kompetisi antardaerah perlu ditumbuhkan dan alokasi anggaran akan terkait dengan pencapaian indikator ini. Daerah diberi keleluasaan dalam pelaksanaan program, termasuk upaya pencetakan lahan pertanian baru, serta menggerakkan semua potensi yang ada di wilayah tersebut.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

f. Perlu dikembangkan kelembagaan yang memungkinkan petani gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare) dapat mengembangkan kegiatan bersama untuk optimalisasi pemanfaatan lahan melalui usaha terpadu dan peningkatan nilai tambah. Pengelolaan lahan bersama pada satu hamparan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan teknologi baru perlu terus diupayakan. Sementara itu kerja sama petani berlahan luas dengan petani berlahan sempit diarahkan untuk meningkatkan daya saing dalam mengoptimalkan nilai tambah dari lahan yang diusahakan, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pengembangan kerja sama spesifik lokasi.

Perbaikan dalam proses perencanaan pembangunan pertanian difokuskan pada upaya berpikir *out of the box*. Apresiasi yang tinggi kepada semua pihak terkait diperlukan jika dapat mengembangkan pola perencanaan dan pelaksanaan yang tidak biasa. Beberapa hal yang menjebak para perencana dan pelaksana pada pola yang rutinitas harus dipangkas, dan untuk itu perlu perbaikan dalam beberapa hal berikut:

a. Sistem perencanaan dibuat sederhana dan mudah dipahami dengan target yang terukur dalam berbagai jangka waktu, basis perencanaan adalah setiap rupiah yang dikeluarkan jelas output dan outcome-nya.

b. Semua perencana dan pelaksana diminta melihat berbagai fenomena maupun siklus kegiatan pertanian tidak dalam keadaan normal, sehingga perlu upaya untuk menyiasati.

c. Kebijakan tidak hanya dilihat dari tataran konsep, namun lebih konkret bagaimana penerapannya di lapang.

d. Proses pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang bertugas di tingkat pusat diperlukan lebih banyak, dalam bentuk magang di daerah, sehingga dapat memahami situasi lapangan. Sebaliknya,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pejabat di daerah perlu ditugaskan dalam kegaiatan keseharian di pusat, sehingga dapat memahami proses perencanaan yang akan diimplementasikan di lapangan.

e. Alokasi anggaran mengikuti program, penggunaan konsep *return on investment (ROI)* menjadi basis dalam perencanaan anggaran.

Penutup

Setelah berlangsung selama 50 tahun, pelaksanaan pembangunan pertanian seakan berjalan di tempat, jika dilihat dari penetapan target dan pencapaiannya. Perencanaan lima tahunan yang fokus pada upaya peningkatan produksi beberapa bahan pangan utama, menjadi lagu wajib di setiap rezim pemerintahan. Berbagai program diluncurkan dengan beragam kegiatan, namun pada tetap terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas strategis. Pada awal pemerintahan Soeharto, dengan dukungan para perencana yang handal, program pembangunan pertanian disusun sangat baik. Upaya pencapaian swasembada pangan dengan pendekatan menyeluruh dari sisi anggaran (*at all cost*) berhasil mengantarkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984. Sayangnya upaya ini tidak berkelanjutan, sehingga ketergantungan terhadap pangan impor meningkat kembali.

Tanpa disadari, pelaksanaan pembangunan pertanian telah terjebak pada beberapa situasi yang dianggap biasa, termasuk pencapaian target yang naik turun. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pertanian terjebak dalam rutinitas lima tahunan tanpa terobosan yang berarti. Perencanaan yang sudah baik dalam tataran konsep, namun kedodoran dalam pelaksanaannya karena terbatasnya alokasi anggaran melalui APBN. Selain itu, postur anggaran yang terbatas banyak dihabiskan untuk kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan petani.

Dalam tiga tahun terakhir, perubahan pola pembangunan pertanian dimulai dengan alokasi anggaran yang memadai, lebih besar

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

1% dari total APBN, dengan proporsi yang lebih besar untuk petani, telah mengubah wajah pembangunan pertanian di Indonesia. Kemauan untuk berpikir *out of the box* melahirkan beberapa terobosan cerdas, yang tidak hanya dapat memacu peningkatan produksi secara berkelanjutan, namun juga mulai menyentuh hal-hal pokok terkait dengan kesejahteraan petani dan isu keadilan dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bahan Bacaan

Badan Bimas Ketahanan Pangan. 2007. *Profil 60 Tahun Kelembagaan Ketahanan Pangan Indonesia*. Badan Bimas Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. BPN RI. Jakarta.

BPS (Badan Pusat Statistik). 2014. Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. BPS. Jakarta.

BPS (Badan Pusat Statistik). 2014a. Hasil pencacahan Survey Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian. BPS. Jakarta.

Boeke, J.H. 1966. *Objective and Personal Elements in Colonial Welfare Policy in Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Practice*. The Hague, Van Hoeve.

Departemen Penerangan R. I. 1974. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/75-1978/79. Deppen RI. Jakarta.

Kementerian Keuangan R.I. 2017. Ringkasan APBN 2010-2017. http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011.

Mears, L. 1984. Rice and Food Self-Sufficiency in Indonesia. BIES XX (2): 122-138.

Nurmanaf, A.R. and B. Irawan. 2009. Land and Household Economy: Analysis of National Panel Survey. Proceeding of National Seminar Land and Household Economy 1970-2005 (Editors Rusastra et. al. 2009) Indonesian Center for Agriculture Socio-Economic and Policy Studies (ICASEPS) and United Nations ESCAP. Bogor.

Pakpahan, A. 2007. Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Persoalan Pertanian Tetapi Soal Hidup Atau Mati. *Keynote Speech* yang disampaikan pada acara Studium Generale, Dies Natalis Ke-50 Tahun Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 September 2007.

Pasandaran, E. 2014. Reformasi Kebijakan Dalam Perspektif Sejarah Politik Pertanian Indonesia. *Dalam* Buku Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Haryono, E. Pasandaran, M.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem dan A. Hendriadi (Eds). Balitbangtan. Jakarta.

Sumaryanto. 2010. Eksistensi Pertanian Skala Kecil dalam Era Persaingan Pasar Global. Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis berorientasi Kesejahteraan Petani. Rusastra *et al.* (Eds). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Sumaryanto dan T. Sudaryanto. 2009. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan: Analisis Data Patanas Tahun 1995 dan 2007. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. Suradisastra et al. (Eds). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 2008. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, edisi revisi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Winoto, J. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. Orasi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 1 September 2007. Dies Natalis ke-44 Institut Pertanian Bogor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

BAB II

RENCANA STRATEGIS LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045

Visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka, dijabarkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ke dalam Rencana Strategis Lumbung Pangan Dunia 2045. Implementasi rencana strategis ini memerlukan dukungan dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jumlah penduduk dunia saat ini sudah lebih dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050. Menurut perkiraan FAO (2012), bertambahnya jumlah penduduk 2 miliar orang pada tahun 2050, maka produksi pangan harus ditingkatkan sebanyak 70% untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Bahkan negara berkembang seperti di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia harus mampu meningkatkan produksi pangan hingga 100%. Menurut perkirakan FAO (2012), pada tahun 2050 setiap individu akan mengonsumsi sekitar 14% lebih banyak kalori. Hal ini berimplikasi pada permintaan pangan dunia akan meningkat drastis. Akibatnya, permintaan untuk lahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk produksi pangan akan semakin meningkat. Demikian juga halnya kebutuhan air yang juga akan meningkat sekitar dua kali lebih tinggi dari jumlah penduduk.

Kondisi pangan di masa depan diperkirakan penuh dengan ketidakpastian karena berbagai tantangan, di antaranya menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi pangan yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budi daya, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, serta degradasi dan erosi tanah yang terjadi di hampir semua negara di dunia (1). Dengan semakin kompleknya tantangan pangan di masa depan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya ketidakseimbangan pangan global jika persoalan pangan tidak ditangani dengan baik dari sekarang.

Di Indonesia, permasalahan pangan tidak kalah pelik dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2050, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan mencapai 321,4 juta jiwa pada tahun 2050, kelima terbesar di dunia di setelah Tiongkok, India, Nigeria, dan AS. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam penyediaan pangan ke depan karena berkejaran dengan laju pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat. Keputusan yang dibuat saat ini sangat menentukan apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menyikapi tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo memiliki visi jauh ke depan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka. Ketajaman visi Presiden Joko Widodo telah dijabarkan oleh Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dengan menyiapkan rencana strategis dan program aksi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD 45), yang mencakup delapan komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, cabai, dan bawang putih.

Rencana strategis tersebut disusun mengacu kepada: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; (4) Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045; dan (5) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Hasil pembangunan pertanian kabinet kerja selama lebih dari dua tahun (2015-2017) digunakan oleh Dr. Andi Amran Sulaiman sebagai awal (*baseline*) pengembangan komoditas pertanian strategis menuju lumbung pangan dunia 2045. Tulisan ini menguraikan rencana strategis lumbung pangan dunia 2045, yang diawali dengan konsep dasar lumbung pangan dunia, potensi sumber daya yang dimiliki, dan upaya membangun fondasi pertanian menuju lumbung pangan dunia. Pada akhir tulisan ini diuraikan target dan strategi Menteri Pertanian dalam upaya menuju lumbung pangan dunia 2045.

Konsep Dasar Lumbung Pangan Dunia

Pada mulanya lumbung pangan dipahami sebagai penyimpan (*buffer stock*) hasil panen padi. Namun dewasa ini konsep lumbung pangan berkembang seiring dengan dinamika permasalahan pangan dan berbagai kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, konsep lumbung pangan merupakan pengembangan dari konsep swasembada pangan yang selama ini dipahami oleh banyak praktisi dan birokrat.

Swasembada pangan umumnya dipahami sebagai ketersediaan pangan secara nasional dengan sasaran utama subtitusi impor. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan swasembada sebagai usaha

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mencukupi kebutuhan sendiri. Dalam kaitannya dengan urusan pangan, swasembada pangan lebih diartikan sebagai usaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Swasembada juga diidentikkan dengan sikap bebas, mandiri, otonom, atau independen. Artinya, negara harus mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional secara mandiri tanpa pasokan dari luar.

Kemampuan swasembada pangan suatu negara direfleksikan dari tiga kategori, yaitu: (1) Kemampuan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem produksi pada berbagai jenjang; (2) Kemampuan swasembada yang bersifat responsif, yaitu kemampuan pemulihan yang cepat setelah terjadinya goncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; dan (3) Kemampuan swasembada yang bersifat antisipatif, yaitu kemampuan mengantisipasi terjadinya goncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi dan kemampuan antisipatif dalam pengadaan stok untuk mengatasi kekurangan konsumsi.

Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Pada saat itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization,* FAO) memberikan penghargaan istimewa kepada Pemerintah Indonesia atas prestasi yang luar biasa ini. Namun, sesudah itu, prestasi swasembada beras tampaknya sulit terulang, bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Hal ini terjadi karena perspektif swasembada pangan hanya difokuskan pada pencapaian swasembada beras. Meskipun produksi padi meningkat namun dengan laju yang semakin melandai. Sampai tahun 2014 swasembada pangan belum dapat diraih kembali.

Keterbatasan pemahaman konsep swasembada pangan selama ini menjadikan upaya peningkatan produksi pangan membuat Indonesia kembali menyandang status sebagai negara pengimpor beras dan pangan lainnya. Tidak tercapainya swasembada pangan di masa lalu juga disebabkan oleh beberapa kendala, seperti tingginya laju alih fungsi lahan, perubahan iklim, harga pupuk yang semakin mahal, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan masih faktor lainnya yang berdampak

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

terhadap tata kelola bidang pertanian secara keseluruhan. Di samping itu, program swasembada pangan masih bergantung pada luasan lahan yang tersedia.

Berdasarkan perspektif waktu 30 tahun ke masa lalu dapat disimpulkan pendekatan pembangunan pertanian selama ini belum mampu mengembangkan kemampuan produksi dengan dukungan sistem kelembagaan pangan berkelanjutan. Berbeda dengan era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, konsep swasembada pangan direfleksikan sebagai upaya penyediaan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan pangan dan daya saing pangan dalam rangka mencapai kedaulatan pangan. Konsep ini selanjutnya dimaknai sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Artinya, dalam konsep swasembada pangan, menurut Presiden Joko Widodo, di samping upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri (swasembada pangan) secara berkelanjutan, juga ditujukan untuk memperkuat daya saing pangan nasional sehingga mampu memanfaatkan peluang ekspor pangan ke pasar global.

Skenario menuju lumbung pangan dunia adalah melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan membutuhkan *political will* dan *political action* yang serius, termasuk dukungan infrastruktur, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan kekuatan kelembagaan pertanian dari seluruh lini, baik di pusat maupun daerah. Keterkaitan dan peran unsur-unsur lain tidak hanya dalam aspek nonteknis namun juga teknis. Terkait hal ini terdapat lima tahapan menuju lumbung pangan dunia sebagai berikut:

1. Pencapaian swasembada pangan yang mampu memenuhi minimal 90% dari kebutuhan domestik, terutama pangan strategis;
2. Penciptaan daya saing produk/komoditas, terutama terkait kualitas dan spesifikasi produk, harga, efisiensi hulu-hilir, dan profit;
3. Maksimalisasi produksi pangan strategis (produksi melimpah dan stabil) untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih dari 100%, terciptanya rantai pasok, dan tersedianya komoditas sebagai cadangan untuk kebutuhan intervensi dan bencana;
4. Melakukan ekspor setelah terpenuhinya kebutuhan domestik dan selebihnya menjadi target ekspor melalui pengembangan pangsa pasar dunia. Dalam konteks ini, nilai tambah ekspor sebagai akumulasi keberhasilan tahapan sebelumnya; dan

5. Terciptanya lumbung pangan dunia dengan mempertahankan ekspor secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya kesejahteraan petani.

Tahapan-tahapan tersebut tidak mudah direalisasikan karena pada saat bersamaan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan internal dan dinamika lingkungan yang berpotensi menggeser sumber daya pertanian, baik dari aspek tenaga kerja dan lahan maupun input produksi primer lainnya. Oleh karena itu, upaya mewujudkan lumbung pangan dunia, pengembangan sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan dalam skala luas, penerapan teknologi maju ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global merupakan suatu keharusan (*necessary condition*). Model pertanian dengan skala luas, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti irigasi, peralatan untuk pengolahan dan penyimpanan hasil akan memberikan keuntungan yang optimal secara berkelanjutan.

Pertanian modern lebih menekankan pada usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, efisien, dan menguntungkan petani itu sendiri. Penggunaan benih varietas unggul, pupuk, pestisida, herbisida, pengaturan pengairan, penggunaan alat mesin pertanian pada berbagai tahap proses produksi hingga pengolahan hasil panen merupakan ciri pertanian modern dalam subsistem produksi. Pertanian modern diyakini mampu menyediakan pangan dari luasan lahan yang terbatas. Meskipun demikian, penerapan teknologi modern juga tidak terlepas dari banyaknya kritik karena sering tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pertanian.

Pertanian terpadu lebih menekankan pada tata laksana yang memadukan komoditas (tunggal atau campuran spesies) tanaman dengan tanaman lainnya atau tanaman dengan ternak pada luasan lahan tertentu, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi petani, lingkungan, dan konsumen. Di Indonesia, sistem pertanian terpadu sebenarnya sudah lama dipraktikkan masyarakat, sebagai ekspresi dari usaha mereka menghadapi tantangan lingkungan untuk bertahan hidup. Namun, pengembangannya masih parsial dan tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan masih pada tataran konsep dan belum

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

terimplementasikan dengan baik. Secara konsepsi, pertanian berkelanjutan menekankan pada sistem pengelolaan komoditas pertanian dan sumber daya alam (*input*) agar terjadi keberlanjutan budi daya yang tidak merusak lingkungan dan kesehatan petani maupun konsumen hasil pertanian.

Dalam konteks menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, Dr. Andi Amran Sulaiman sejak dilantik menjadi Menteri Pertanian mulai mengimplementasikan berbagai program pembangunan pertanian dengan memadukan konsep pertanian modern, pertanian terpadu, dan pertanian berkelanjutan atau dikenal dengan konsep pertanian modern terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian dengan konsep ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan peningkatan produksi dan memelihara mutu lingkungan dan sumber daya lahan pertanian menuju usaha produksi berkelanjutan. Selama ini penerapan teknologi modern yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan sumber daya lahan belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu, untuk memperoleh kelestarian lingkungan dan sistem produksi berkelanjutan, pertanian modern yang dikembangkan Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman dilengkapi dengan upaya pelestarian lingkungan dan mutu lahan.

Secara konsepsi, pengembangan pertanian modern terpadu dan berkelanjutan merupakan upaya dalam mewujudkan keseimbangan di alam dengan membangun pola hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di antara setiap komponen ekosistem pertanian yang terlibat, dengan meningkatkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan limbah organik. Artinya, pengembangan pertanian modern terpadu dan berkelanjutan ditujukan untuk memanfaatkan lahan seoptimal mungkin guna menghasilkan produk pertanian yang beraneka ragam dengan kualitas tinggi. Hasil yang beragam dari tiap komoditas pertanian diolah kembali menjadi sumber energi yang dapat digunakan bagi aktivitas pertanian lainnya.

Dengan demikian, sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan yang dikembangkan Dr. Andi Amran Sulaiman berisi komponen teknologi modern yang digabungkan dengan upaya pelestarian sumber daya dan lingkungan berupa:

1. Pengembalian limbah panen dan penambahan pupuk organik ke dalam tanah sawah;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2 Rotasi tanaman dengan menyertakan komoditas kacang-kacangan dan atau tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, seperti tebu, tembakau, ubi jalar, sayuran, dan melon;
3 Penyehatan lingkungan dan sanitasi tanaman inang hama penyakit;
4 Penanaman varietas unggul adaptif lokalita spesifik yang berbeda antarblok persawahan, guna meningkatkan keragaman varietas;
5 Pola tanam multikomoditas pada satu wilayah hamparan sawah, menggunakan pola tanam surjan, penanaman palawija pada pematang, penanaman sayuran pada 10-20% areal secara tersebar dan terpencar, sehingga membentuk pola tanam komoditas mozaik;
6 Pemupukan anorganik untuk penyediaan hara secara optimal bagi tanaman;
7 Pengelolaan keseimbangan ekologi biota dan pengendalian hama penyakit secara terpadu;
8 Mencegah pencemaran limbah kimiawi maupun fisik yang berasal dari luar ekologi lahan;
9 Penyiapan lahan secara optimal bagi pertumbuhan tanaman;
10 Penanaman pada musim tanam yang tepat secara serempak pada satu hamparan;
11 Pemeliharaan sumber pengairan dan prasarana irigasi, agar air tersedia bagi tanaman;
12 Pemanenan dan penyimpanan air hujan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau.

Komponen teknologi modern tersebut bersifat komplementer dan serasi (*compatible*) dengan sarana-prasarana serta peralatan mesin modern, sehingga usahatani akan menghasilkan produktivitas tinggi dan sekaligus konservasi sumber daya dan lingkungan. Agar pemanfaatan komponen teknologi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya menjadi lebih efektif dan efisien, maka pengembangan pertanian modern terpadu dan berkelanjutan berada dalam suatu kawasan. Pada kawasan tersebut terdapat sektor produksi tanaman, peternakan, maupun perikanan. Hal ini akan menjadikan kawasan pengembangan memiliki ekosistem yang lengkap dan masing-masing sektor produksi tidak mencemari lingkungan karena limbah dari satu sektor dimanfaatkan oleh sektor produksi lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Manfaat pengembangan sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan di antaranya: (1) Membentuk proses produksi yang relatif stabil dari waktu ke waktu, sehingga perencanaan dan pengawasan produksi relatif mudah; (2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi berupa peningkatan hasil dan penurunan biaya produksi; (3) Sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan energi, terutama kebutuhan energi baru terbarukan; dan (4) Siklus dan keseimbangan nutrisi dan energi akan membentuk ekosistem yang alamiah.

Implementasi konsep sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan perlu didukung oleh berbagai kebijakan yang komprehensif dengan langkah-langkah strategis, terpadu, dan prioritas dengan tahapan pengembangan yang jelas dan konsisten dalam upaya mewujudkan Lumbung Pangan Dunia. Selain itu, pengembangan institusi atau organisasi yang selain efisien juga mampu menggerakkan komunitas, termasuk pasar. Demikian juga ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, baik jumlah maupun keahlian, serta modal yang murah dan tersedia bagi pembangunan pertanian dalam arti luas, sangat menentukan keberhasilan pengembangan sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, sinergisitas lintas sektoral menjadi syarat mutlak untuk mencapai target Lumbung Pangan Dunia.

Potensi Sumber Daya Pertanian

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam wilayah tropis, yang memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (*mega biodiversity*). *Biodiversity* darat Indonesia adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jika termasuk *biodiversity* laut, Indonesia menjadi negara terbesar pertama di dunia. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, dan komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

Indonesia juga memiliki potensi lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan tersebut merupakan lahan suboptimal, seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang produktivitasnya relatif rendah karena berbagai kendala, seperti kekurangan dan/atau kelebihan air, tingginya kemasaman tanah dan salinitas, keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal dapat direkayasa dengan penerapan inovasi teknologi budi daya dan dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut dapat diubah menjadi lahan-lahan produktif untuk pengembangan budi daya berbagai komoditas pertanian.

Data akademis dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan (2016) menunjukkan total luas daratan Indonesia sekitar 191,1 juta ha, yang terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luasan tersebut, 15,9 juta ha di antarannya berpotensi untuk areal pertanian, yang terdiri atas 3,4 juta ha lahan APL (Areal Penggunaan Lain), 3,7 juta ha lahan HP (Hutan Produksi), dan 8,9 juta ha lahan HPK (Hutan Produksi dapat Dikonversi). Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah seluas 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, dan tanaman cabai dan bawang merah dataran tinggi 154,1 ribu ha.

Luas dan sebaran hutan, sungai, rawa, dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya juga merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung, air tanah dan air permukaan potensial mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi lainnya adalah penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, juga merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Saat ini lebih dari 43 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan penduduk di suatu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

wilayah dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global.

Sumber daya pertanian yang ada perlu dimanfaatkan secara optimal dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Saat ini sudah tersedia berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menggali potensi sumber daya pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi. Berbagai varietas dan klon tanaman dan ternak unggul, teknologi pupuk, alat dan mesin pertanian, bioteknologi, nanoteknologi, aneka teknologi budi daya, pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya juga telah menghasilkan inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun demikian, aneka paket teknologi yang telah dihasilkan belum semuanya dapat diadopsi petani karena berbagai kendala, seperti terbatasnya permodalan, lemahnya kelembagaan, skala usaha yang relatif kecil, terbatasnya keterampilan, dan belum meratanya kegiatan diseminasi teknologi di tingkat petani.

Membangun Fondasi Lumbung Pangan Dunia

Tidak lama setelah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984, Indonesia kembali mengandalkan pangan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 2014. Namun, di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil kembali meningkatkan produksi pangan strategis sehingga berhasil pula mengendalikan impor pangan, bahkan tidak ada impor untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah.

Peningkatan produksi pangan dalam dua tahun terakhir merupakan hasil kerja keras melalui berbagai program dan penyempurnaan regulasi di sektor pertanian sebagai berikut. *Pertama*, merevisi Perpres Nomor 172/2014 tentang tender penyediaan benih dan pupuk menjadi

penunjukan langsung atau e-katalog, sehingga realisasinya tepat waktu menjelang masa tanam. *Kedua, refocusing* anggaran tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp 12,2 triliun dari perjalanan dinas, rapat, rehabilitasi gedung direvisi menjadi rehabilitasi irigasi, alat mesin pertanian, cetak sawah dan lainnya untuk petani. *Ketiga,* bantuan benih yang disalurkan ke petani tidak di lahan eksisting, sehingga bantuan berdampak pada luas tambah tanam. *Keempat,* pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian. *Kelima,* kebijakan pengendalian impor dan mendorong ekspor dan deregulasi perizinan dan investasi serta penyaluran asuransi usaha pertanian.

Berbagai program peningkatan produksi pertanian juga diimplementasikan, antara lain perbaikan irigasi seluas 3,05 juta ha yang dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun, penyediaan alsintan 180 ribu unit (naik 2.000%), asuransi pertanian untuk areal pertanaman seluas 674.650 ha (naik 100%), pembangunan embung, *longstorage*, dan dam-parit sebanyak 3.771 unit, dan penyediaan pengembangan benih unggul untuk 2 juta ha. Di samping itu, pemerintah juga membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan negara, integrasi jagung-sawit 233 ribu ha, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan lahan rawa lebak dan sapi indukan wajib bunting. Program lainnya adalah membangun Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.218 unit (naik 100%). Dalam upaya peningkatan efisiensi birokrasi di Kementerian Pertanian, telah diberlakukan lelang jabatan termasuk demosi, mutasi, dan promosi masing-masing untuk 599 dan 238 jabatan.

Kebijakan dan program selama dua tahun terakhir merupakan terobosan baru dalam membangun fondasi pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Penguatan fondasi pembangunan pertanian berdampak terhadap bebasnya Indonesia dari ancaman fenomena iklim El Nino pada tahun 2015 dan La Nina tahun 2016, sebagimana tercermin dari tidak adanya masa paceklik dan produksi pangan terus meningkat. Produksi padi pada tahun 2015-2016 meningkat 11%, jagung 21,8%, cabai 2,3%, dan bawang merah 11,3%. Produksi komoditas unggulan peternakan seperti daging sapi meningkatan 5,31%, telur ayam 13,6%, daging ayam 9,4%, dan daging kambing 2,47%. Produksi komoditas andalan perkebunan juga meningkat, antara lain tebu 14,42%, kopi 2,47%, karet 0,14%, dan kakao 13,6%.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kinerja ekspor impor juga terus meningkat yang ditunjukkan oleh tidak adanya impor beras, bahkan ekspor beras naik 43,7% sementara impor jagung dan bawang merah masing-masing turun 66,6% dan 93%. Capaian lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan petani yang diukur dari penurunan tingkat kemiskinan di desa sebesar 0,01 persen, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 101,7 dan peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 109,8. Data *Global Food Security Index* (GFSI) yang dirilis *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada 9 Juni 2016 juga menunjukkan ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2016 nyata meningkat dari peringkat 74 pada tahun 2015 menjadi 71 pada tahun 2016 di antara 113 negara .

Pada tahun 2016, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar di antara negara yang diobservasi. Peningkatan ketahanan pangan tersebut dilihat dari tiga aspek, yakni keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*), kualitas dan keamanan (*quality and safety*). Dari aspek ketersediaan pangan, Indonesia menduduki peringkat 66, di atas peringkat keseluruhan ketahanan pangan. Dari aspek keterjangkauan, Indonesia memperoleh nilai 50,3, naik dari sebelumnya 46,8. Ketersediaan pangan juga meningkat menjadi 54,1 dari sebelumnya 51,2. Sementara kualitas dan keamanan pangan naik tipis ke angka 42 dari sebelumnya 41,9. Selain itu, hasil penelitian *Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2017 menunjukkan *food system sustainability* Indonesia saat ini berada pada peringkat 21 dari 25 negara yang mewakili 133 negara. Peringkat tersebut dilihat dari tiga indikator, yaitu *food loss and waste*; *sustainable agriculture*; dan *nutritional challenge*.

Peran sektor pertanian di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II tahun 2016, misalnya, kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional mencapai 14,3%, termasuk kehutanan dan perikanan. Dalam periode tersebut, industri bergerak positif, baik migas maupun nonmigas. Secara keseluruhan, industri menyumbang 21% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertanian tumbuh pesat, industri juga tumbuh pesat, dan barang yang diperdagangkan menjadi lebih banyak. Kontribusi ini bisa dijadikan pemantik untuk mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan yang umumnya terjadi di daerah.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Target Swasembada dan Ekspor Pangan

Presiden Presiden Joko Widodo telah memasang target menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Untuk itu Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, telah menetapkan target swasembada untuk beberapa komoditas pangan sebelum tahun 2045. Swasembada beras, bawang merah, dan cabai telah berhasil dicapai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Pada tahun 2019, Indonesia ditargetkan berswasembada gula konsumsi dan kedelai. Sementara swasembada gula industri ditargetkan pada tahun 2025. Pada tahun 2026 diharapkan sudah terealisasi swasembada daging sapi. Swasembada bawang putih ditargetkan pada tahun 2020 (Gambar 3). Pencapaian swasembada beberapa komoditas pangan ini, menurut Dr. Andi Amran Sulaiman, merupakan kunci perwujudan Lumbung Pangan Dunia 2045. Upaya pencapaian swasembada pangan disertai dengan upaya penguatan daya saing produk pangan strategis nasional di pasar ekspor negara-negara Asean dan dunia (Gambar 4).

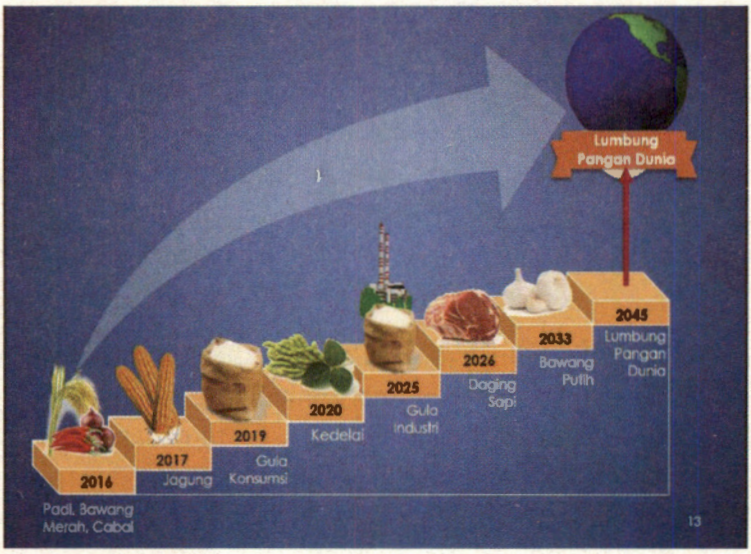

Gambar 3. Target waktu swasembada pangan strategis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

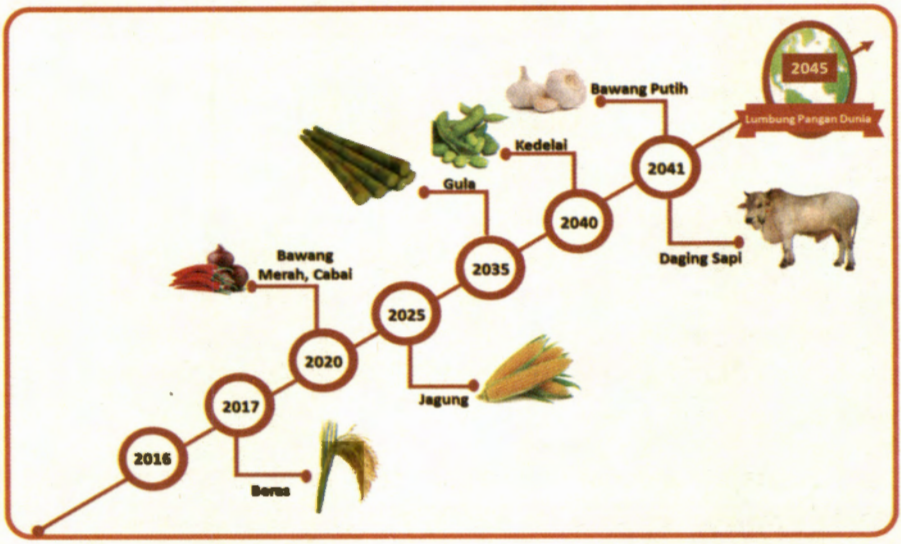

Gambar 4. Target waktu ekspor komoditas pangan strategis.

Padi

Berdasarkan data BPS tahun 2010-2015, produksi padi meningkat rata-rata 2,60% per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015, mencapai 6,42%. Produksi padi pada tahun 2015 telah mencapai 75,40 juta ton GKG atau 43,85 juta ton setara beras. Pada tahun 2016, produksi padi meningkat menjadi 79,1 juta ton GKG atau 45,9 juta ton setara beras. Sementara tingkat konsumsi beras 33,3 juta ton pada tahun 2015 dan 37,7 juta ton pada tahun 2016.

Data tersebut membuktikan swasembada beras telah tercapai pada tahun 2015 dengan surplus produksi 10,5 juta ton pada tahun 2015 dan 8,3 juta ton tahun 2016. Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia, produksi padi pada tahun 2045 ditargetkan 100,03 juta ton GKG atau setara dengan 61,06 juta ton beras, dengan luas tanam 17,83 juta ha dan produktivitas 5,90 ton/ha. Tercapainya target produksi diharapkan Indonesia menguasai 20% pangsa pasar beras dunia pada tahun 2045 (16).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jagung

Diperkirakan lebih dari 60% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 24%, sisanya untuk kebutuhan industri lainnya dan benih (14%). Pada tahun 2016 produksi jagung mencapai 23,2 juta ton, sementara kebutuhan domestik 23,4 juta ton. Tingginya produksi jagung pada 2016 dapat menekan impor secara signifikan. Impor jagung yang biasanya lebih dari 3 juta ton per tahun turun menjadi 884 ribu ton pada tahun 2016. Pada tahun 2017 ditargetkan pencapaian swasembada jagung sehingga tidak diperlukan lagi impor.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2045 adalah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor jagung terbesar ke-7 di dunia. Artinya, produksi jagung Nasional sudah dapat memengaruhi pasar jagung dunia dan memperkokoh sistem produksi jagung dakam negeri. Pada tahun 2045 produksi jagung ditargetkan 63,16 juta ton, sehingga 1,20 juta ton di antaranya dapat diekspor ke pasar global. Jika target tersebut tercapai maka produksi jagung Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 12, akan bergeser ke peringkat lima terbesar dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Uni Eropa. Dengan demikian pangsa pasar jagung Indonesia di pasar global meningkat dari 1,0% pada tahun 2016 menjadi 7,0% pada tahun 2045.

Kedelai

Kebutuhan kedelai di dalam negeri rata-rata 2,3 juta ton biji kering per tahun, sedangkan produksi selama 5 tahun terakhir rata-rata 982.467 ton biji kering per tahun atau 43% dari kebutuhan domestik. Untuk menutup kekurangan produksi kedelai sebesar 57% per tahun dipenuhi dari impor. Rata-rata produktivitas kedelai nasional masih rendah, rata-rata 1,54 ton/ha, sehingga mengurangi minat petani mengembangkan komoditas ini.

Meskipun demikian, pada tahun 2015 produktivitas kedelai di beberapa daerah, seperti di Jawa Tengah dan sebagian di Sulawesi Tengah sudah mencapai lebih dari 2 ton/ha, namun diusahakan dalam

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

skala kecil. Beberapa varietas unggul baru mampu berproduksi 3 ton/ha. Pengembangan kedelai dalam skala yang lebih luas diharapkan berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi nasional. Oleh karena itu, pengembangan kedelai dalam 30 tahun ke depan diarahkan pada pemanfaatan seluruh potensi dan peluang yang ada guna meningkatkan produksi menuju swasembada. Pada tahun 2019 swasembada kedelai ditargetkan sudah terealisasi dengan produksi 2,96 juta ton. Pada tahun 2045 produksi nasional kedelai diharapkan mencapai 7,7 juta ton dengan target ekspor 2,9 juta ton.

Bawang merah

Produksi bawang merah cenderung terus meningkat. Pada tahun 2015 produksi bawang merah 1,23 juta ton dengan tren peningkatan 3%. Konsumsi bawang merah untuk rumah tangga juga menunjukkan tren meningkat dari 2,49 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 2,71 kg per kapita pada tahun 2015. Data menunjukkan terdapat surplus produksi bawang merah 59,6 ribu ton pada tahun 2015.

Berdasarkan perkembangan produksi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diharapkan menjadi eksportir utama bawang merah di kawasan ASEAN (19). Oleh karena itu, produksi bawang merah pada akhir tahun 2020 ditargetkan 1,24 juta ton dengan perkiraan ekspor 17,5 ribu ton. Pada tahun 2045 produksi bawang merah dalam bentuk rogol ditargetkan sudah mencapai 2,2 juta dengan target ekspor 40 ribu ton.

Gula

Dalam lima tahun terakhir (2011-2015) rata-rata konsumsi gula 5,54 juta ton per tahun, tidak termasuk untuk keperluan *Mono Sodium Glutamat* dan pakan ternak. Sementara pada periode yang sama rata-rata produksi gula nasional 2,49 juta ton per tahun atau defisit sekitar 3,05 juta ton per tahun. Indonesia ditargetkan berswasembada gula pada tahun 2025 dengan produksi 6,19 juta ton. Pencapaian swasembada merefleksikan produksi Gula Kristal Putih (GKP) mampu memenuhi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kebutuhan nasional, baik konsumsi langsung maupun industri, dengan volume 6,34 juta ton.

Dalam mencapai target swasembada gula diperlukan tambahan areal tanam tebu seluas 705 ribu ha dengan pembangunan 16 pabrik gula (PG) pada tahun 2023. Produktivitas gula diisyaratkan minimal rata-rata 6,4 ton per hektare dan *overall recovery* (OR) pabrik ≥ 80%. Melalui upaya tersebut diharapkan Indonesia pada tahun 2035 sudah menjadi salah satu negara pengekspor utama gula di kawasan ASEAN (20).

Gambar 5. Sapi-sapi pejantan yang akan dikawinkan dengan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB).

Daging sapi

Penyediaan daging sapi dalam negeri saat ini 436 ribu ton atau 57% dari total kebutuhan. Melalui berbagai upaya, seperti perbaikan bibit, pakan, peningkatan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengelolaan pemasaran, dan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), Indonesia pada akhir tahun 2022 ditargetkan sudah berswasembada daging sapi. Pada periode ini, produksi daging sapi lokal diharapkan sudah mencapai 688,9 ribu ton dengan kebutuhan konsumsi 769,6 ribu ton, atau ketersediaan daging sapi lokal sudah lebih dari 90%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam periode 2027-2035 ekspor daging sapi sudah dapat diwujudkan. Produksi daging sapi nasional pada akhir tahun 2045 diharapkan mencapai 1,12 juta ton, sehingga Indonesia akan menjadi salah satu negara pengekspor utama daging sapi di kawasan Asia Tenggara.

Cabai

Berdasarkan data SUSENAS, konsumsi cabai rumah tangga dalam periode 2006-2015 meningkat dengan laju 4,79% per kapita per tahun, 2,26% di antaranya cabai merah dan 2,89% cabai rawit, sementara konsumsi cabai hijau turun 0,35% per kapita per tahun. Di sisi lain, produksi cabai pada tahun 2014 sudah mencapai 1.875 ton yang terdiri atas 1.075 ton cabai besar dan 800 ribu ton cabai rawit.

Hingga tahun 2019, target produksi cabai nasional adalah 2,29 juta ton yang terdiri atas 1,32 juta ton cabai besar dan 0,97 juta ton cabai rawit. Pada tahun 2024 produksi cabai diharapkan mencapai 2,45 juta ton yang terdiri atas 1,40 juta ton cabai besar dan 1,05 juta ton cabai rawit. Pada periode 2025-2045, produksi cabai nasional ditargetkan tumbuh dengan laju rata rata 1,4% per tahun, dengan rincian cabai besar meningkat 1,2% per tahun dan cabai rawit tumbuh dengan laju 1,5% per tahun. Pada tahun 2045, produksi cabai ditargetkan sudah mencapai 3,23 juta ton (cabai besar 1,80 juta ton dan cabai rawit 1,43 juta ton). Dengan demikian Indonesia diharapkan akan menjadi salah satu negara eksportir utama cabai di kawasan ASEAN.

Bawang putih

Konsumsi nasional bawang putih pada tahun 2016 mencapai 504.466 ton yang terdiri atas konsumsi rumah tangga 408.754 ton dan nonrumah tangga (benih, industri, horeka) 95.712 ton. Sementara produksi bawang putih lokal pada tahun yang sama sekitar 213.000 ton, sehingga 95,8% kebutuhan konsumsi nasional dipenuhi dari impor yang sebagian besar berasal dari China dan India.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada tahun 2017, produksi bawang putih diproyeksikan 70.000 ton dari luas panen 6.200 ha. Penambahan luas tanam menjadi 54.000 ha pada tahun 2034, produksi bawang putih ditargetkan 914.425 ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan 725.942 ton, sehingga volume impor bawang putih dapat ditekan menjadi 37.000 ton atau 5% dari kebutuhan nasional. Pada tahun 2045 produksi bawang putih dalam negeri ditargetkan 1,5 juta ton, sementara kebutuhan sekitar 467.000 ton untuk konsumsi rumah tangga (38%), dan 746.000 ton untuk konsumsi nonrumah tangga (62%).

Untuk mencapai target produksi dan ekspor delapan komoditas pangan strategis seperti diuraikan di atas, pemerintah telah memiliki rancangan kerja jangka pendek dan persiapan jangka panjang. Rencana kerja jangka pendek adalah mempercepat luas tambah tanam dan peningkatan produksi. Sementara rencana jangka panjang melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, pembangunan waduk dan irigasi, penyiapan benih unggul dan teknologi alat mesin pertanian. Di samping itu, Kementerian Pertanian juga menerapkan standar kebijakan yang ketat bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencapai target produksi setiap komoditas strategis. Khusus pengembangan pertanian di wilayah perbatasan, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, meminta setiap kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga untuk memaksimalkan pembangunan lumbung pangan agar ekspor komoditas pangan unggulan Indonesia ke negara terdekat dapat terus ditingkatkan.

Kerja keras pemerintah dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia mulai memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2016, Indonesia berhasil mempercepat upaya peningkatan produksi padi ke angka 79 juta ton GKG, sehingga impor beras ditiadakan. Selain mampu menenuhi kebutuhan beras dalam negeri, Indonesia saat ini juga mulai merintis ekspor pangan, seperti beras ke Papua Nugini dan Srilanka, jagung ke Malaysia dan Timor Leste, dan bawang merah ke Vietnam, Filipina, dan Singapura.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Strategi Pencapaian Swasembada Pangan dan Ekspor

Indonesia memiliki beragam komoditas dengan berbagai keunggulan komparatif. Namun, dalam pengembangan Lumbung Pangan Dunia 2045 diprioritaskan delapan komoditas pangan strategis (padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, cabai, dan bawang putih). Pengembangan komoditas strategis tersebut secara nasional akan memberikan dampak nyata dan dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat konsumen. Strategi pencapaian swasembada dan ekspor komoditas pangan strategis menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun jangka panjang diuraikan secara ringkas berikut ini.

Strategi jangka pendek dan menengah diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas produksi dalam rangka mencapai swasembada pangan dengan beberapa cara, di antaranya:

a. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan perbaikan pengelolaan sumber daya air guna menyediakan air yang cukup untuk pertanian;

b. Menambah luas tanam melalui pembukaan lahan baru, artinya lahan yang benar-benar baru, yang selama ini belum pernah ditanami atau lahan yang pernah ditanami tetapi ditinggalkan, seperti kawasan hutan, lahan perkebunan BUMN, swasta, dan perkebunan rakyat, tanah adat, dan lahan milik masyarakat;

c. Meningkatkan produktivitas melalui perakitan, diseminasi, dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, penguatan penyediaan benih sumber, penyediaan kalender tanam, pengembangan teknologi budi daya pangan terbarukan, perbanyakan dan penyebarluasan materi diseminasi teknologi, perakitan dan perbanyakan benih varietas unggul baru;

d. Percepatan peningkatan populasi ternak sapi melalui inseminasi buatan (IB) atau kawin alam dengan menerapkan manajemen reproduksi, seperti pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku

dan N2 cair, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, dan penyediaan hijauan pakan ternak dan konsentrat;

e. Menjamin ketersediaan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, termasuk pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi yang adil, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan jadwal musim tanam petani;

f. Membangun rumah pupuk kompos di setiap desa dengan memadukan kegiatan usaha ternak sebagai salah satu komponen pendukung bahan baku produksi pupuk kompos;

g. Memberdayakan infrastruktur dan kelembagaan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan di setiap desa, termasuk merekrut minimal 1 orang tenaga penyuluh untuk setiap desa; dan

h. Membangun dan memperbaiki jalan usahatani untuk memudahkan kegiatan produksi di pedesaan.

Strategi jangka panjang lebih diarahkan pada pencapaian swasembada berkelanjutan dan ekspor komoditas pangan strategis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan investasi fisik maupun nonfisik untuk menghasilkan inovasi melalui penelitian dan pengembangan pertanian guna membangun *sustainable practices* berbasis agroekologi yang sesuai dengan realitas di masing-masing wilayah sentra produksi. Investasi inovasi antara lain *knowledge building*, mulai dari perbaikan konstruksi genetik tanaman dan ternak sampai teknologi pascapanen untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi (*high-value revolution*).

b. Memperluas rantai pasokan (*expansion of supply chain*), jaringan perdagangan (*trading networks*), dan membangun kerja sama regional dan internasional terkait dengan masalah global seperti perubahan iklim, *sustainability*, perdagangan, dan koherensi regulasi, sehingga pasar global dapat berfungsi dengan baik.

c. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi, *value chain*, sistem transportasi domestik, aksesibilitas (aktor-

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

aktor pertanian, pelaku industri pengolahan pangan, dan konsumen), dan meningkatkan koneksi ke pasar internasional.

d. Meningkatkan koherensi kebijakan pasar pangan (*food market regulations*), sehingga tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan dan produktivitas tetapi juga mampu mengantisipasi guncangan penawaran (*supply-side shocks*) dan mengurangi dampak negatif terhadap ketahanan pangan.

e. Membangun daya tahan *(resilience*) usahatani dalam menghadapi risiko perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian pasar, antara lain melalui sistem asuransi pertanian, perbankan pertanian, dan pengelolaan gejolak harga pangan (*management of market volatility*).

f. Memperkuat kelembagaan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial guna meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha pertanian. Kelembagaan pertanian yang solid dan terkoordinasi dengan baik adalah salah satu kunci penguatan posisi petani dalam mewujudkan swasembada dan ekspor pangan.

Penerapan strategi tersebut diharapkan efektif bagi upaya pencapaian swasembada dan ekspor pangan menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Sinergisitas lintas sektoral menjadi syarat mutlak dalam merealisasikan Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Apalagi Kementerian Pertanian hanya mampu menangani 30% masalah produksi pangan, selebihnya bergantung pada Kementerian/Lembaga lain. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan dukungan perundangan/ peraturan pemerintah yang memayungi rencana strategis ini untuk dapat dijadikan pijakan dan arahan bagi para pihak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Lumbung Pangan Dunia 2045.

Selama ini landasan strategis kebijakan pangan diawali dengan Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan, antara lain menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bermanfaat, berkeadilan, merata dan berkelanjutan. Regulasi ini kemudian diikuti oleh Undang-undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta konsep Nawa cita dengan ciri utama Berdaulat, Mandiri, dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Berkepribadian. Walaupun belum diacu sepenuhnya, dokumen kebijakan dalam jangka panjang adalah Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) 2045 yang mengubah paradigma pembangunan berbasis pertanian (*agriculture led development*) ke pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*).

Pada tataran yang lebih operasional terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) Kementerian Pertanian yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung mewujudkan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Demikian juga konsep Nawa cita dalam bidang pangan yang menjadi ujung tombak dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan. Implementasi program strategis ini dimulai sejak tahun 2015 untuk mempercepat upaya peningkatan produksi menuju swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging sapi, tebu, bawang merah, dan cabai.

Penutup

Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045 bukan pencitraan, tetapi merupakan obsesi yang dapat direalisasikan. Hal ini bertitik tolak dari pengalaman dan sejarah yang menunjukkan pendekatan pembangunan pertanian selama ini belum mampu meningkatkan dan mengembangkan kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya penyediaan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri (swasembada pangan) secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing pangan nasional sehingga mampu merebut peluang ekspor ke pasar global. Oleh karena itu, upaya mewujudkan Lumbung Pangan Dunia bertitik tolak dan berbasis landasan utama sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. Kebijakan politik nasional harus berada paling depan, artinya pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan pertanian pangan, terutama dalam menyediakan dan mempermudah aksesibilitas sumber daya pertanian, terutama lahan dan sarana produksi. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang dilakukan dan direncanakan merupakan pengejawantahan keinginan pemerintah untuk menjadikan pembangunan pertanian sebagai *main stream* pembangunan nasional.

2. Peningkatan kapasitas produksi pangan harus seimbang atau diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani. Artinya, upaya peningkatan produksi yang bertumpu pada peningkatan produktivitas dan indeks tanam, harus dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan petani dan meminimalisasi pengeluaran biaya usahatani yang menyebabkan inefisiensi.

3. Aksesibilitas petani terhadap sumber daya lahan melalui reforma agraria atau pemanfaatan lahan telantar dengan dukungan permodalan dan subsidi harus menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.

4. Perlunya pemahaman yang sama antarpara pihak, terutama perencana dan pelaksana, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dukungan yang kuat dan sinergis dari Kementerian dan Lembaga terkait menjadi keniscayaan dalam mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045.

Rencana Strategis Lumbung Pangan Dunia 2045 merupakan arahan dan instrumen perencanaan yang bersifat makro. Detail program dan kegiatan perlu dijabarkan lebih lanjut, sejalan dengan napas Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Penjabaran program dan kegiatan memerlukan terobosan yang tidak seluruhnya di bawah kendali Kementerian Pertanian. Komitmen dan dukungan perundangan dan peraturan pemerintah yang memayungi rencana strategis ini menjadi pijakan dan arahan bagi para pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam merealisasikan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Badan Litbang Pertanian. 2016. 400 Teknologi Inovatif Badan Litbang Pertanian. http://www.litbang.pertanian.go.id/hasil/400/. [Diunduh pada 18 Mei 2017].

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. 2016. *Grand Design* Pengembangan Tujuh Komoditas Strategis. Bahan paparan disampaikan pada Rapat Kerja Badan Litbang Pertanian. Bogor, 26 November 2017.

BFCN (The Barilla Center for Food and Nutrition). 2017. Fixing Food: Towards a More Sustainable Food System. Economist Intelligence Unit (EIU). Published by the Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN).

Detik.com. 2017. Begini Strategi Mentan Jadikan RI Lumbung Pangan Dunia 2045. http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3563494/begini-strategi-mentan-jadikan-ri-lumbung-pangan-dunia-di-2045. [Diunduh pada 18 Juni 2017].

EIU (Economist Intelligence Unit). 2016. Global Food Security Index 2016: An annual measure of the state of global food security. The fifth edition of an Economist Intelligence Unit (EIU) study, commissioned by DuPont.

FAO (Food and Agriculture Organization). 2017. The Future of Food and Agriculture–Trends and Challenges. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.

Industri.bisnis.com. 2017. Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045, Ini Kata Mentan. [Diunduh pada 18 Mei 2017].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Tahun?). Arti kata swasembada menurut KBBI. http://kbbi.kata.web.id/swasembada. [Diunduh pada 16 Mei 2017].

Kementerian Pertanian. 2017. Dua Tahun Kerja Nyata. http://ksp.go.id/2-tahun-kerja-nyata-kementerian-pertanian. [Diunduh pada 18 Mei 2017].

Kementerian Pertanian. 2016. Grand Design Padi Tahun 2016-2045: Memantapkan Swasembada Beras Berkelanjutan dan Menjadikan Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. Grand Design Pengembangan Sapi/Kerbau Tahun 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. Grand *Design* Produksi Jagung Tahun 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. Percepatan Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2015-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. *Roadmap* Cabai 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. *Roadmap* Pengembangan Bawang Merah Tahun 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. *Roadmap* Pengembangan Bawang Putih Tahun 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2016. *Roadmap* Peningkatan Produksi Menuju Swasembada Gula 2016-2045. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Kurnia, S.I. 2011. Pengaruh Penyuluhan terhadap Keputusan Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu. Jurnal Agro Ekonomi 29(1): 1-24.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Merdeka.com. 2017. Jokowi ingin Indonesia jadi lumbung pangan dunia pada 2045. https://www.merdeka.com/uang/kementan-jokowi-ingin-indonesia-jadi-lumbung-pangan-dunia-pada-2045.html. [Diunduh pada 19 Juli 2017].

Nikos, A. and J. Bruinsma. 2012. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. Global Perspective Studies Team. FAO Agricultural Development Economics Division, Rome.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sukses swasembada pangan, utamanya beras, dalam dua tahun terakhir (2015-2016) tidak terlepas dari terobosan kebijakan Menteri Pertanian dan strategi dalam mencapai kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan menjadi komitmen dan target utama yang harus direalisasikan ke depan. Hal ini memaknai bahwa swasembada pangan harus berkelanjutan.

Dari perspektif peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak dan melindungi petani sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pembangunan pangan yang merata dan berkeadilan harus menjadi prinsip penyejahteraan petani dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan tidak memberatkan masyarakat konsumen.

Strategi operasional

1. pengembangan lahan tadah hujan (*rainfed*) 4 juta hektare untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 1 menjadi 2 atau bahkan 3,
2. modernisasi pertanian melalui mekanisasi,
3. pembangunan dan perbaikan infrastruktur,
4. penanganan pasca panen
5. pembangunan gudang (termasuk gudang berpendingin/*cold storage*) serta peningkatan pasar.

Strategi Operasional

Upaya menyejahterakan petani merupakan esensi yang harus diwujudkan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Fakta bahwa saat ini petani belum sejahtera harus dijawab dengan mentransformasikan program dan kegiatan aksi pembangunan pertanian yang digerakkan tidak lagi dengan prinsip rutinitas (*business as usual*),tetapi dengan upaya khusus sehingga memberikan ungkitan (*leverage*) dampak terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Jika program dan kegiatan pembangunan pertanian selama ini ditargetkan pada wilayah-wilayah yang sudah berkembang (*existing*), maka ungkitan peningkatan produksi komoditas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

apa pun tidak akan signifikan. Di sisi lain, pertanian konvensional masih banyak diterapkan petani menjadi ironis karena inovasi teknologi untuk memodernisasi pertanian sudah tersedia. Masalah kerusakan infrastruktur, penanganan pascapanen, dan peningkatan akses petani terhadap pasar juga masih menjadi permasalahan klasik dalam akselerasi peningkatan produksi pangan dan pertanian serta pendapatan petani.

Strategi operasional yang tepat menjadi keniscayaan agar ungkitan peningkatan produksi pangan dan pertanian sebagai instrumen pokok peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dapat diwujudkan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi operasional sebagai berikut: (1) pengembangan lahan tadah hujan (*rainfed*) 4 juta ha untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 1 menjadi 2 atau bahkan 3, (2) modernisasi pertanian melalui pengembangan mekanisasi, (3) pembangunan dan perbaikan infrastruktur, (4) penanganan pascapanen, dan (5) pembangunan gudang, termasuk gudang berpendingin (*cold storage*), dan peningkatan akses pasar (Gambar 6).

Gambar 6. Strategi operasional sebagai solusi permanen menyejahterakan petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengembangan Lahan Tadah Hujan

BPS (2016) mencatat terdapat 62,5 juta ha lahan baku pertanian di Indonesia, yang meliputi lahan sawah 8,11 juta ha (12,98%), lahan huma/ ladang 5,02 juta ha (8,03%), lahan tidur 11,68 juta ha (18,69%), ladang penggembalaan 2,19 juta ha (3,50%), lahan perkebunan 23,48 juta ha (37.57%), dan lahan tegal/kebun 12,01 juta ha (19,22%) (Gambar 7). Dari total luas lahan sawah 8,11 juta ha, 4 juta ha di antaranya merupakan lahan sawah tadah hujan (*rainfed*) yang hanya ditanami padi satu kali dalam setahun. Pengembangan embung, dam parit, *long storage*, dan bangunan penampung air lainnya menjamin penyediaan air untuk irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman dari semula 1 menjadi 2, bahkan 3 kali dalam setahun.

Prinsip bahwa air merupakan sumber kehidupan di muka bumi menjadi dasar kebijakan dan kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan dan pertanian. Fakta di lapangan menunjukkan, wilayah-wilayah di mana air menjadi faktor pembatas sangat erat kaitannya dengan kemiskinan di kawasan tersebut. Ketersediaan air yang terbatas juga menjadi pembatas upaya peningkatan produksi pangan dan pertanian. Untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah di mana air sangat langka (*water scarcity*), upaya peningkatan produksi untuk mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani harus diwujudkan melalui pengembangan dan pemaanfaatan sumber daya air seperti embung, dam parit, *long storage*, dan bangunan penampung air lainnya.

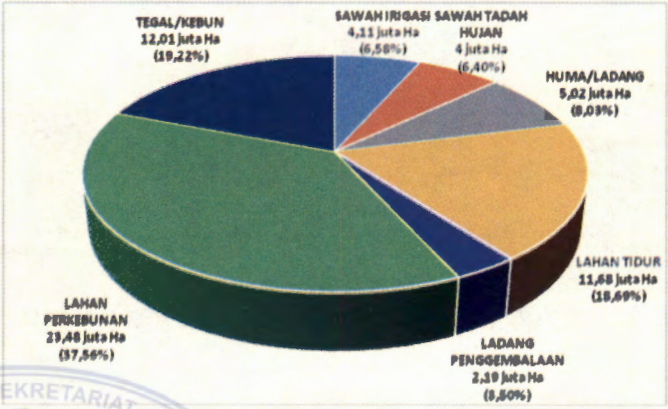

Gambar 7. Lahan baku pertanian di Indonesia.
Sumber: BPS (2016)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bangunan air tersebut dimaksudkan untuk menangkap atau memanen air hujan (*rain water harvesting*) sebelum mengalir ke laut. Indonesia kaya akan sumber daya air. Hal ini diungkapkan oleh FAO (2003) bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya air terbesar ke-4 setelah Brazil, Rusia, dan Kanada. Potensi air Indonesia adalah 2.838 km^3/tahun, Brazil 8.233 km^3/tahun, Rusia 4.507 km^3/tahun, dan Kanada 2.902 km^3/tahun. Potensi ketersediaan air permukaan di Indonesia, terutama dari sungai rata-rata 13.381 m^3/kapita/tahun. Namun keberlimpahan sumber daya air sangat bervariasi menurut ruang (spatial) dan waktu (temporal). Di Pulau Jawa yang berpenduduk 65% dari total penduduk Indonesia, misalnya, hanya tersedia 4,5% air tawar. Faktanya, ketersediaan air di Pulau Jawa yang mencapai 30.569,2 juta m^3/tahun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Artinya, pulau yang padat penduduk ini selalu mengalami defisit air jika tidak ada upaya konservasi dan efisiensi pemanfaatan. Demikian juga di wilayah lain di Indonesia, walaupun pada tahun yang sama masih tergolong surplus, namun secara umum volume air menurun, kecuali di Papua yang relatif stabil (Gambar 8). Demikian juga ketersediaan air yang sangat berfluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau. Catatan Departemen Kimpraswil (2003) menunjukkan debit air pada musim hujan di Sungai Cimanuk, Jawa Barat, mencapai 600 m^3/dt tetapi pada musim kemarau hanya 20 m^3/dt.

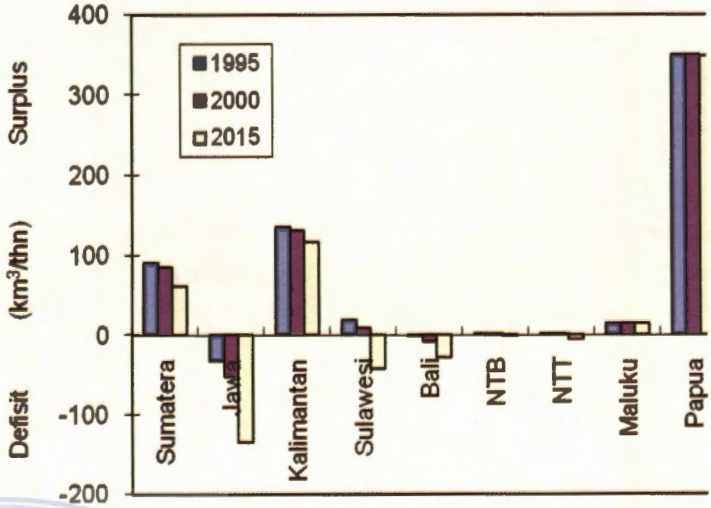

Gambar 8. Surplus dan defisit ketersediaan air di sebagian besar wilayah Indonesia.
Sumber: Departemen Kimpraswil (2003) dengan modifikasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Penampungan dan pemanfaatan air yang berlimpah adalah strategi operasional yang harus diterapkan untuk meningkatkan produksi pangan pada lahan sawah tadah hujan. Peningkatan produksi pangan pada 4 juta ha lahan tadah sawah hujan yang terdistribusi di berbagai pulau (Gambar 9) melalui peningkatan indeks pertanaman dari 1 kali menjadi 2-3 kali setahun dapat diupayakan dengan memanfaatkan air hujan dan sumber daya air lainnya semaksimal mungkin. Dalam arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017 pada 5 Januari 2017, air merupakan kunci peningkatan produksi pangan, sehingga kementerian terkait diinstruksikan untuk membangun 30.000 unit embung pada tahun 2017 di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang rawan kekeringan pada musim kemarau.

Gerakan panen dan pemanfaatan air secara efisien menjadi strategis dan urgen untuk dieksekusi sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI. Dengan dimensi embung, dam parit, dan bangunan air lainnya yang rata-rata mampu menampung air 500 m^3, maka terdapat 15 juta m^3 air tersedia untuk irigasi lahan sawah tadah hujan seluas kurang lebih 130.000 ha untuk menghasilkan 650.000 ton padi dengan nilai Rp 2,4 triliun per musim tanam atau Rp 4,8 triliun per tahun. Kementerian Desa Pambangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditugaskan membangun sebagian besar embung dan bangunan air lainnya melalui dana desa, sedangkan Kementerian Pertanian menyediakan benih, alat dan mesin pertanian serta pendampingan penyuluhan.

Jika 4 juta ha lahan sawah tadah hujan yang ada dapat dikembangkan, maka investasi untuk pembangunan embung dan bangunan air lainnya dari dana desa adalah Rp 22 triliun. Manfaat dari implementasi gerakan panen dan pemanfaatkan sumber daya air ini adalah terdapat tambahan produksi padi nasional sebesar 10 juta ton dengan nilai Rp 40 triliun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

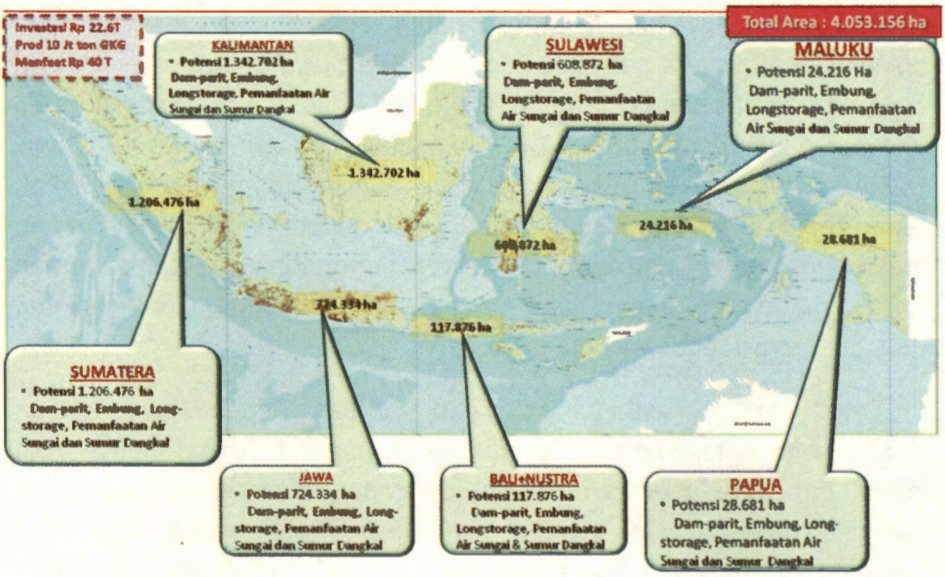

Gambar 9. Sebaran potensi pengembangan embung, dam parit, long storage, pemanfaatan air sungai dan sumur dangkal.

Modernisasi Pertanian Melalui Pengembangan Mekanisasi

Usahatani pangan secara konvensional sudah selayaknya ditinggalkan karena sektor pertanian mengadapi masalah kelangkaan tenaga kerja. Dalam periode 2003-2013, jumlah rumah tangga petani menurun dari 31 juta menjadi 26 juta (BPS 2016). Artinya, tenaga kerja pertanian menurun dari 124 juta orang pada tahun 2003 menjadi 104 juta orang pada tahun 2013. Pada sisi lain, kehilangan hasil (*losses*) padi pada saat panen mencapai 10-11% atau sekitar 0,5 ton/ha/musim tanam atau 7 juta ton/tahun dengan nilai sekitar Rp 26 triliun. Oleh karena itu, modernisasi pertanian melalui pengembangan mekanisasi menjadi suatu keniscayaan karena dapat mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja dan kehilangan hasil.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Penggunaan *transplanter* (alat-mesin tanam) padi mampu menghemat biaya tanam sebesar 30% dibandingkan dengan cara konvensional. Secara nasional, penghematan biaya tanam mencapai Rp 8,6 triliun setiap tahun. Sementara produksi padi dapat dinaikkan 10,6 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun atau senilai Rp 48 triliun. Dalam penyiangan gulma, penggunaan alat-mesin penyiang tiga kali lebih cepat dibanding cara konvensional dengan nilai penghematan biaya penyiangan mencapai Rp 7 triliun. Penggunaan traktor pengolah tanah juga mampu mengurangi penggunaan tenaga kerja konvensional dengan operasionalisasi yang lebih cepat.

Kehilangan hasil panen dapat ditekan dengan penggunaan *combined harvester*. Penggunaan alat-mesin panen ini dapat mengurangi kehilangan hasil padi dari 10-11% dengan cara konvesional menjadi 5% jika menggunakan *combined harvester*. Penggunaan alat-mesin pertanian, baik pra maupun pascapanen menjadi penggerak percepatan proses peningkatan produksi dan efisiensi usahatani sehingga petani mendapatkan manfaat yang lebih besar.

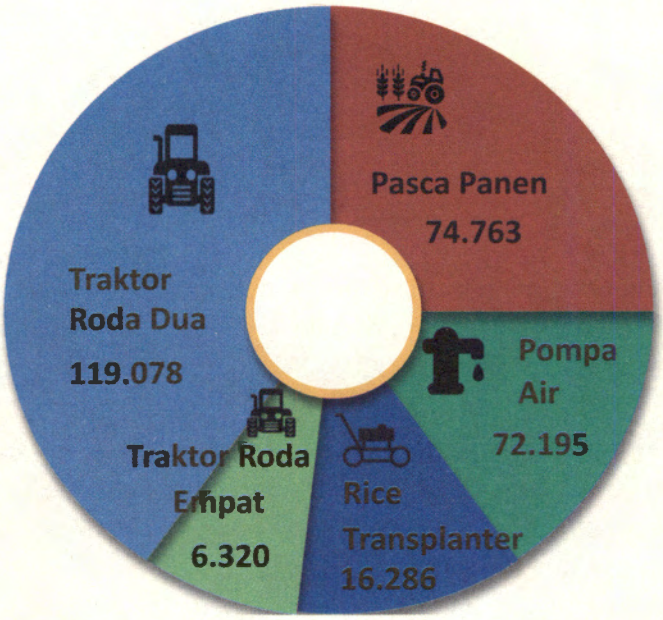

Gambar 10. Distribusi alat-mesin pertanian kepada kelompok tani dalam periode 2012-2017.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Melalui program kegiatan dan anggaran APBN, jumlah alat-mesin pertanian yang telah didistribusikan sebagai bantuan kepada petani meningkat sangat signifikan. Sebelum tahun 2015, bantuan alat-mesin pertanian kepada petani hanya 4.000-5.000 unit. Mulai tahun 2015 Menteri Pertanian melakukan terobosan kebijakan refocusing anggaran dan percepatan pengadaan bantuan alat-mesin pertanian. Dalam periode 2012-2017, jumlah alat-mesin pertanian yang telah didistribusikan kepada kelompok tani mencapai 288.642 unit yang meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, pompa air, *power thresher*, *transplanter, dryer, RMU*, dan jenis lainnya (Gambar 10).

Gambar 11. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan penguatan kemampuan industri nasional pada Agenda Nawa Cita termasuk industri mesin pertanian.

Pengembangan infrastruktur. Salah satu penyebab utama hilangnya peluang produksi pangan dan pertanian adalah buruknya kondisi infrastruktur penunjang. Sebagai ilustrasi, jika infrastruktur jaringan irigasi rusak, sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian, maka kehilangan produksi padi mencapai 20 juta ton GKG. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 3 juta ha, atau 52% dari total daerah irigasi, mampu memperluas layanan irigasi sehingga meningkatkan indeks

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanaman (IP) sebesar 0,3 atau lebih. Jika produktivitas padi nasional dewasa ini 5,1 ton/ha, rehabilitasi jaringan irigasi secara menyeluruh berdampak terhadap peningkatan produksi lebih dari 4,5 juta GKG per tahun.

Dari perspekif perancangan sistem irigasi dan pengembangan sumber daya air yang ada saat ini selalu berorientasi pada infrastruktur berdimensi besar seperti waduk, bendungan, bendung dan infrastruktur berdimensi besar lainnya yang tentu dibangun dengan biaya tinggi. Bila ditilik manfaatnya, khususnya untuk tujuan irigasi, manfaat infrastruktur berdimensi besar jauh di bawah infrastruktur berdimensi kecil.

Lahan pertanian di Indonesia terdiri atas 26,6 juta ha bertopografi datar, namun yang bertopografi berbukit dan bergelombang mencapai 33,8 juta ha. Mengacu pada kondisi topografi lahan telah dirancang pembangunan 274 unit waduk dan bendungan kecil yang mampu melayani pengairan lahan sawah seluas 1,22 juta ha. Angka ini hanya 2% dari total lahan bertopografi datar. Sisanya 98% dipenuhi dari pembangunan 17.142 unit embung, dam parit, longstorage, sumur, dan pompa yang mampu memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan seluas 61,28 juta ha. Program dan kegiatan aksi ini adalah bagian dari pembangunan embung 30.000 unit sesuai arahan Presiden RI, yang tentu saja akan terus ditambah.

Embung berdampak positif terhadap peningkatan produksi pangan dan pertanian. Dalam tempo 2 tahun setelah beroperasi, pemanfaatan air embung untuk irigasi ternyata mampu mempercepat peningkatan hasil (*quick yielding*). Berbeda dengan bendungan besar, embung dikerjakan secara padat karya dan gotong royong dengan memberdayakan petani sekitar. Dalam operasionalnya, pembangunan embung dan bendungan kecil lebih efisien dan biaya *maintenance* lebih murah, bahkan cukup dengan swadaya petani.

Secara nasional, pembangunan infrastruktur berdampak pada upaya peningkatan produksi pangan dan pertanian. Kebijakan dan program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi berdampak sangat signifikan terhadap luas jaringan irigasi dari 0,5 juta ha pada tahun 2014 menjadi 2,5 juta ha pada tahun 2015, atau naik sebesar 500%. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi juga berdampak positif

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

terhadap program pencetakan sawah baru, dari sekitar 20 ribu ha pada tahun 2014 menjadi 130 ribu ha pada tahun 2015, atau naik hampir 590% (Gambar 12).

Gambar 12. Pengembangan infrastruktur pertanian 2010-2017

Penanganan Pascapanen. Pascapanen menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian. Selama ini pembangunan pertanian lebih mengarah kepada upaya peningkatan produksi dengan pendekatan budi daya sementara aspek pascapanen terabaikan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi dari usaha pertanian belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh petani. Pada era Kabinet Kerja, penanganan pascapanen produk pertanian menjadi perhatian utama sebagaimana halnya budi daya agar petani memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar dari usahataninya.

Permentan No. 22/Permentan/Hk.140/4/2015 tentang pedoman penanganan pascapanen hasil pertanian asal tanaman yang baik *(Good Handling Practices*) telah memberikan arah sekaligus sebagai landasan pokok untuk mengambil alih nilai tambah pascapanen ke depan. Sejalan dengan itu, pada awal tahun 2016 Kementan telah mengalihkan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang memberikan nilai manfaat ekonomi yang besar dari usahatani komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, cabai dan bawang merah. Program dan kegiatan yang tidak fokus direvisi dan dialihkan untuk meningkatkan pemberian bantuan kepada kelompok

tani, di antaranya dalam bentuk alat-mesin pertanian, antara lain *dryer, power thresher, combine harvester,* dan *rice milling unit* (RMU).

Di awal tahun 2016, Kementerian Pertanian telah meneken kontrak pengadaan alat-mesin pascapanen padi senilai Rp 8,3 miliar, bersamaan dengan kontrak kerja pengadan alat-mesin prapanen dengan enam perusahaan senilai Rp 360 miliar, dan kontrak asuransi pertanian dengan PT Jasindo senilai Rp 114 miliar. Di era sebelumnya, bantuan alat-mesin pertanian kepada kelompok tani hanya berkisar antara 5.000-6.000 unit, namun dalam dua tahun pertama era Kabinet Kerja telah mencapai 90.000-100.000 unit.

Fakta yang menunjukkan efisiensi dan nilai tambah usahatani perlu diperbaiki untuk meningkatkan pendapatan petani, menjadi alasan utama Kementerian Pertanian meningkatkan pemberian bantuan alat-mesin pascapanen kepada kelompok tani. Harga gabah yang jatuh pada saat panen raya, terutama pada musim hujan, adalah akibat ketidakmampuan petani mengelola hasil panen karena keterbatasan alat-mesin pertanian, utamanya alat-mesin pengering gabah (*dryer*).

Dalam upaya peningkatan produksi padi, manajemen panen dan pascapanen mendesak untuk segera diperbaiki dan dikembangkan agar kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen dapat ditekan. Hal ini mengacu pada data tingkat kehilangan hasil padi pada saat panen rata-rata 0,53%, proses perontokan 0,83%, pengeringan 6,09%, dan penggilingan 2,98%. Secara keseluruhan, kehilangan hasil padi pada saat panen dan pascapanen rata-rata mencapai 10,43%.

Kehilangan hasil padi yang dipanen dengan cara manual rata-rata 8-15%, sedangkan jika menggunakan mesin pemanen dapat ditekan hingga 1-3%. Alat-mesin pemanen memiliki fungsi ganda, yaitu pemotongan padi dan sekaligus perontokan gabah yang baru dipanen, sehingga kehilangan hasil dapat ditekan. Dalam proses prontokan gabah tidak ada batang padi yang tidak terpotong sehingga tingkat kehilangan bulir padi menjadi lebih kecil. Penggunakan alat-mesin panen dapat menyelamatkan hasil 5-12%. Alat-mesin pascapanen yang telah didistribusikan kepada petani adalah untuk pemanen (*reaper* dan *combine harvester*), perontok (*power thresher*), dan pengering gabah (*dryer*). Pengurangan kehilangan hasil ditargetkan 1,5% per tahun.

PERPUSTAKAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

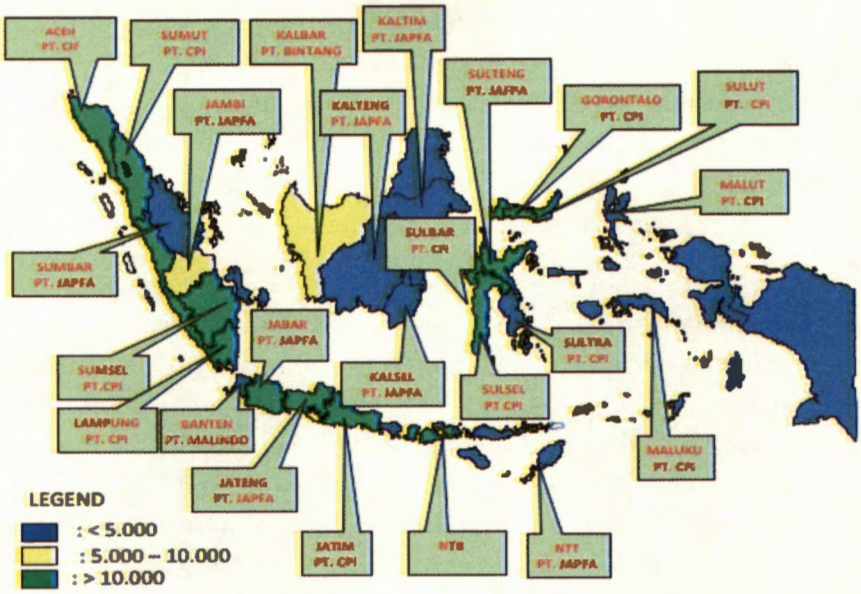

Gambar 13. Kemitraan GPMT dengan petani jagung di beberapa daerah di Indonesia.

1. Tidak ada kekhawatiran kekurangan jagung saat paceklik, justru diperkirakan terjadi over supply
2. Industri pakan berlomba meningkatkan kapasitas serap/ produksi

Penambahan Kapasitas Serap/Produksi Pabrik Pakan 2016-2017

No	Perusahaan	Gudang/Silo (ton)	Dryer (ton/hari)	Lokasi
1	PT. Charoen Pokphand Indonesia	30,000	1,500	Gorontalo, Cirebon dan Semarang
2	PT. CJ Feed Group	40,000	2,000	Tanah Laut, Semarang, Medan dan Lampung
3	PT. Japfa Comfeed Indonesia	42,000	3,000	6 lokasi
4	Vasham	24,000	1,200	Lampung dan Grobogan
5	Malindo Feed	20,000	1,000	Grobogan dan Makasar

Tabel 3.1. Dampak Perpres Harga Dasar Jagung terhadap peningkatan kapasitas serap produksi jagung.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Khusus untuk komoditas jagung, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makan Ternak (GPMT), BULOG, Kementerian Desa dan PDT, Asosiasi Peternak Layer Nasional, dan TNI telah berkomitmen dan bersinergi dalam penanganan pascapanen jagung. Pada tahun 2016, pada Gambar 13. Kemitraan GPMT dengan petani jagung di beberapa daerah di Indonesia.

Pengembangan pasar. Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan bertujuan meningkatkan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga. Dalam kaitan ini Kementerian Pertanian membentuk dan mengkaji beberapa aspek strategis: (1) usaha pangan masyarakat/toko tani Indonesia; (2) lembaga distribusi pangan masyarakat; (3) lumbung pangan masyarakat; (4) panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN; (5) pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan; (6) kajian responsif dan antisipatif distribusi pangan; dan (7) kajian distribusi pangan.

Hingga saat ini pasar pangan belum efisien, disparitas harga selalu tinggi dan dikuasai oleh pedagang menengah (*middle man*) dengan margin yang sangat besar. Sementara itu petani selalu menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan harga di pasar pun memberatkan konsumen. Pemerintah setiap tahun memberikan subsidi bagi petani, tetapi sebagian besar margin profitnya dinikmati oleh pedagang dan pengusaha. Pada tahun 2017, misalnya, total APBN dan APBD mencapai Rp 233,59 triliun, yang terbagi menjadi Rp 87,9 triliun untuk profit petani dan Rp 297 triliun untuk profit pedagang. Jumlah petani dewasa ini diperkirakan 104 juta orang, sedangkan pelaku perdagangan hanya 318 ribu orang. Angka ini menunjukkan profit per pedagang jauh lebih besar daripada profit per petani.

Disparitas harga pangan juga sangat lebar. Sebagai contoh, harga sapi impor siap potong hanya Rp.70.000-80.000/kg, namun harga sapi bakalan mencapai Rp.120.000-140.000/kg, atau terdapat disparitas harga sebesar 74%. Hal ini relatif sama dengan disparitas antara harga daging sapi Frozen (horeka) yang hanya Rp 70.000-80.000/kg dengan daging sapi segar Rp 120.000-140.000/kg. Disaparitas antara harga jeroan sapi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

impor dengan jeroan sapi bakalan mencapai lebih dari 400%, masing-masing Rp 13.000-20.000/kg untuk jeroan sapi impor dan Rp 70.000-90.000/kg untuk jeroan sapi bakalan.

Profit margin bawang merah juga lebih banyak dinikmati pedagang. Harga bawang merah di tingkat petani hanya Rp 9.000/kg, namun di tangan pedagang sudah mencapai Rp 36.000/kg, atau tiga kali lipat lebih besar. Profit margin daging sapi juga lebih banyak dinikmati pedagang. Harga daging sapi di tingkat peternak hanya Rp 60.000/kg, sementara di tingkat pedagang melonjak menjadi Rp 120.000/kg. Hal serupa juga terjadi untuk harga daging ayam dengan disparitas 230%.

Ketidakefisienan pasar juga terlihat pada saat bulan puasa (Ramadahan). Hukum *supply* dan *demand* pada saat itu menjadi tumpul. Fenomena anomali harga pada bulan puasa selalu berulang setiap tahun. Pada bulan puasa tahun 2016, misalnya, minyak goreng tersedia 1,79 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 455 ribu ton, tetapi harganya tetap tinggi. Apalagi daging ayam ras, meskipun tersedia 256 ribu ton dan konsumsi hanya 112 ribu ton, namun harganya tetap naik. Fenomena serupa juga berlaku untuk telur ayam ras dan bawang merah.

Pembangunan *cold storage* di pelabuhan. Produksi tahunan pangan cenderung fluktuatif, sedangkan konsumsi relatif tetap. Pada masa-masa tertentu ketersediaan pangan adakalanya berlebih dan adakalanya langka di pasaran. Teknologi penyimpanan yang tepat menjadi kunci stabilitas penyediaan pangan dalam jangka waktu relatif lama, minimal satu tahun. Oleh karena itu Kementerian Pertanian membangun gudang penyimpanan berpendingin (*cold storage)* untuk menjaga kesegaran produk hortikultura agar dapat bertahan lama. Produk hortikultura tidak tahan disimpan lama sehingga pasokan ke pasar tidak dapat diatur.

Pada tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan dana Rp 11,25 miliar untuk pembangunan *cold storage* di sentra-sentra produksi bawang dan cabai, antara lain di Bima, NTB, Brebes dan Temanggung, Jawa Tengah, Tuban, Jawa Timur, dan Engrekang, Sulawesi Selatan. Pembangunan gudang penyimpanan berpendingin diharapkan menjadi solusi bagi jatuhnya harga pangan pada saat panen raya. Gudang tersebut nantinya akan menyimpan hasil panen yang digelontorkan pada saat produksi defisit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Meningkatnya harga bawang merah dan cabai di pasar antara lain disebabkan oleh panjangnya rantai pasok. Selain itu, di sentra produksi kedua komoditas bahan pangan tersebut belum tersedia gudang penyimpan (*cold storage*) yang memadai. Salah satu upaya untuk menghindari impor pada saat pasokan bawang merah dan cabai menurun adalah membangun *cold storage* di sentra-sentra produksi.

Harga bawang merah dan cabai impor umumnya lebih rendah daripada produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pembangunan *cold storage* di sentra produksi menguntungkan petani karena hasil panen dapat disimpan terlebih dahulu dan baru dijual pada saat harga sudah layak dan menguntungkan. Harga satu unit *cold storage* dengan kapasitas 100 ton sekitar Rp 1 miliar. Kalau kebutuhan *cold storage* untuk menyimpan produksi bawang merah dan cabai adalah 300 unit maka dibutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar.

Penguatan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, salah satu misi pembangunan pertanian adalah "Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi". Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah menyusun target kinerja sebagai tolok ukur evaluasi capaian ketahanan pangan nasional. Realisasi kegiatan pada tahun 2016 adalah tolok ukur kinerja tahun 2015 dengan capaian sebagai berikut: (1) skor PPH ketersediaan pangan 89,71; (2) penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1%; (3) harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di atas atau sama dengan HPP; (4) koefisien variasi pangan di tingkat konsumen untuk komoditas beras di bawah atau sama dengan 10%, cabai merah di bawah atau sama dengan 28%, bawang merah di bawah atau sama dengan 18%; (5) konsumsi energi 2.040 Kkal/Kap/hari; (6) skor PPH konsumsi pangan 86,2; (7) rasio konsumsi pangan lokal ke beras 5,70%; (8) peningkatan produksi pangan segar 10%; dan (9) tingkat keamanan pangan segar di bawah atau sama dengan 80%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kinerja tahun 2016 dengan nilai pencapaian di atas 100% (sangat berhasil) adalah untuk enam indikator, nilai 80-100% (berhasil) dua indikator, yaitu PPH ketersediaan dan skor PPH konsumsi pangan, dan nilai di bawah 60% (kurang) satu indikator, yaitu penurunan angka rawan pangan. Meski pada tahun 2016 terjadi kenaikan harga pangan menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, pada tahun 2017 harga komoditas pangan sangat stabil. Hal ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Satgas Pangan yang terdiri atas unsur Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian RI.

Fakta menunjukkan bahwa pangan, terutama beras, tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan produksi padi secara signifikan di beberapa daerah. Di 257 kabupaten, produksi padi mengalami surplus sementara di beberapa kabupaten lainnya defisit (Tabel 3.2). Surplus beras terjadi di sejumlah kabupaten sentra produksi yang sebagian terdistribusi ke beberapa kabupaten defisit produksi padi untuk menutup kebutuhan.

Tabel 3.2. Kabupaten surplus dan defisit beras di Indonesia.

Pulau	Kab Surplus (Tunai)	Kab Defisit (Rastra)	Jumlah Kota (Tunai)	Penduduk (Rb Jiwa)	Penerima (Rb RTS)
Sumatera	86	34	34	56.951	2.719
Jawa	70	15	34	148.173	8.073
Bali Nustra	16	21	4	14.489	1.032
Kalimantan	31	16	9	15.924	595
Sulawesi	50	20	11	19.219	1.072
Mlku Papua	4	53	6	7.135	720
Indonesia	257	159	98	261.891	14.211

Peningkatan produksi padi yang signifikan pada tahun 2016 meningkatkan ketahanan pangan nasional. Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis oleh *The Economist Intelligent Unit* (EIU) menunjukkan Indonesia dewasa ini termasuk negara yang memiliki tingkat ketahanan pangan tertinggi, 2,7 poin di atas Inggris, Ecuador, dan Honduras. Hal ini memosisikan ketahanan pangan Indonesia berada peringkat 71 dari 133 negara, atau meningkat tiga poin dari tahun 2015 yang menempati peringkat 74. Dari aspek ketersediaan pangan, posisi tersebut sudah mencapai peringkat 66 dengan skor 54,1 (Gambar 14).

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

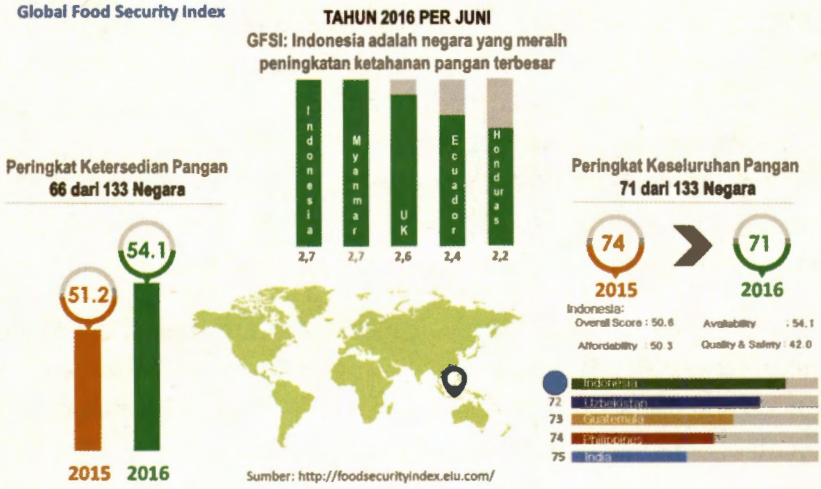

Gambar 14. Capaian ketahanan pangan Indonesia tahun 2016.

Indeks Keberlanjutan Pangan (IKP) atau *Food Sustainability Index* (FSI) yang dirilis oleh Lembaga Riset dan Analisis Ekonomi Internasional yang berpusat di Inggris, *The Economist Intelligent Unit* (EIU) dan *Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation* pada Desember 2016, menunjukkan pertanian Indonesia masuk ke dalam 25 besar dunia. Hasil evaluasi menggunakan 58 indikator yang mencakup aspek keberlanjutan pertanian (*sustainable agriculture*) secara menyeluruh (*overall*), kehilangan atau susut hasil pangan dan limbah (*food loss and waste*), serta tantangan gizi (*nutritional challenges*).

Secara keseluruhan, posisi Indonesia berada pada peringkat 21 dengan skor 50,8 setelah Brasil dan di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India. Bahkan berdasarkan aspek keberlanjutan pertanian, Indonesia berada pada peringkat 16 dengan skor 53,9 setelah Argentina dan di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. Berdasarkan aspek gizi, Indonesia berada pada peringkat 18 dengan skor 56,8 setelah Brasil dan di atas Turki, Rusia, Mesir, Meksiko, Afrika Selatan, Nigeria, dan India.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Swasembada Pangan

Dalam dua tahun (2015-2016) terakhir, produksi komoditas strategis padi, jagung, bawang merah, dan cabai berhasil ditingkatkan secara signifikan. Kondisi ini menjadikan Indonesia tidak hanya berada pada tingkat swasembada, tetapi juga mengekspor beberapa komoditas. Pada tahun 2016 produksi padi telah menyentuh angka 79,1 juta ton GKG atau meningkat 11,7% dibanding tahun 2014 yang baru mencapai 70,8 juta ton GKG. Produksi jagung meningkat signifikan, dari 19,0 juta ton pada tahun 2015 menjadi 23,2 juta ton pada tahun 2016, atau meningkat 21,9%.

Produksi bawang merah pada tahun 2016 mencapai 1,3 juta ton atau meningkat 11,3% dibanding tahun 2015 sebesar 1,2 juta ton. Meski tidak meningkat signifikan, produksi cabai pada tahun 2016 berada pada angka 1,918 juta ton atau meningkat 2,3% dibanding tahun 2015 yang sudah mencapai 1,915 juta ton (Gambar 15). Hal serupa juga terjadi pada beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, karet, kopi, dan gula, masing-masing dengan peningkatan produksi 14,42%; 13,60%; 0,14%; dan 2,47% pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata 5,3% dibanding tahun 2014 (Gambar 16). Produksi beberapa komoditas peternakan seperti daging sapi, telur ayam, daging ayam, dan daging kambing masing-masing meningkat 5,31%; 13,60%; 8,80% dan 3,10%.

Gambar 15. Peningkatan produksi beberapa komoditas pangan strategis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

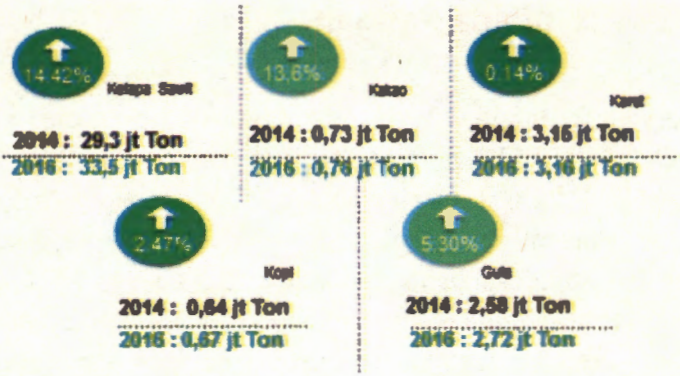

Gambar 16. Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan.

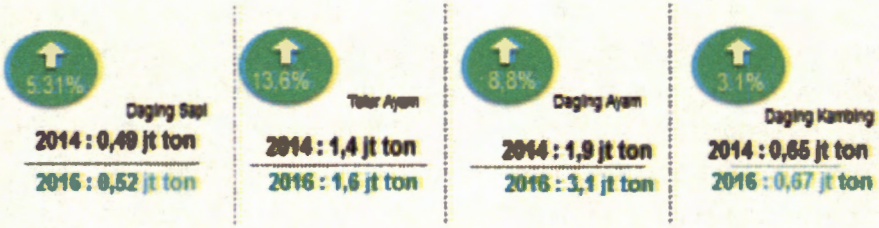

Gambar 17. Peningkatan produksi komoditas peternakan sumber protein hewani.

Peningkatan produksi beberapa komoditas strategis tersebut berdampak positif terhadap ekspor, impor, dan kesejahteraan petani. Pada tahun 2016 tidak lagi impor beras medium, sementara impor jagung menurun 62%. Pada tahun 2017 Indonesia tidak mengimpor jagung untuk pakan ternak. Impor bawang merah (benih) menurun 93% dan cabai segar juga tidak lagi diimpor. Peningkatan produksi komoditas strategis juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana ditunjukkan oleh nilai tukar petani (NTP) yang meningkat 0,18% menjadi 101,7; nilai tukar usaha petani meningkat 2,47% menjadi 109,8; jumlah penduduk miskin di perdesaan turun 1,0%, dan kesenjangan pendapatan menyempit sebagaimana ditunjukkan oleh gini rasio yang turun 0,007 poin (Gambar 18).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 18. Ekspor-Impor dan kesejahteraan petani.

Kedaulatan Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dari perspektif kebutuhan pangan, pemenuhannya bertumpu pada produksi dalam negeri (lokal). Oleh karena itu, membangun kedaulatan pangan juga berarti membangun ketahanan dan kemandirian pangan.

Berbagai kebijakan Menteri Pertanian dan upaya terobosan yang ditempuh telah berhasil meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi atau menghilangkan impor pangan sama sekali. Sebagaimana yang telah diuraikan tadi, produksi komoditas pangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

strategis meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir (2015-2016), kecuali produksi kedelai yang di tahun-tahun mendatang perlu dipacu. Dampak nyata yang dirasakan dari keberhasilan ini tidak hanya mampu menyediaan pangan bagi semua lapisan masyarakat dari produksi dalam negeri, tetapi juga mengekspor beberapa komoditas, harga pangan dapat dikendalikan, dan memberikan pemerataan keuntungan bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Upaya pemerintah yang berujung pada swasembada pangan untuk beberapa komoditas seperti padi, jagung, bawang merah, dan cabai menjadi fokus dalam pembangunan dan perkuatan kedaulatan pangan. Potensi sumber daya lahan, air, agroklimat, kapasitas petani, pelaku perdagangan, dan konsumen menjadi modal dasar dalam mewujudkan swasembada pangan. Modal dasar ini sangat ampuh bagi Indonesia untuk mengatur sendiri sistem pangan nasional tanpa intervensi pihak luar. Pemerintah tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Gambar 19. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan kepada tokoh-tokoh yang berprestasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Indonesia memiliki variabilitas wilayah yang cukup tinggi, wilayah tertentu memiliki potensi besar dalam penyediaan pangan, namun di wilayah lain masih dijumpai rawan pangan. Oleh karena itu, pengelolaan produksi pangan di Indonesia tidak dapat digeneralisasi dengan pendekatan yang sama. Penyediaan pangan dan penanganan rawan pangan diupayakan antara lain melalui (1) peningkatan ketersediaan pangan yang beragam, (2) menekan jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun; dan (3) peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pengembangan model pemberdayaan masyarakat.

Penguatan pangan menjadi keniscayaan dalam memperkuat kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa kedaulatan pangan nasional diwujudkan melalui berbagai aspek, antara lain penguatan perencanaan penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan kebutuhan gizi, keamanan, label dan iklan, pengawasan, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, dan kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

Kesejahteraan Keluarga Petani

Swasembada pangan telah berhasil diwujudkan, yang berdampak terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Kondisi ini berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan keluarga petani, sebagaimana tercermin dari peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) pada tahun 2015-2016. NTUP konsisten meningkat dari 106,04 pada tahun 2014 menjadi 107,44 pada tahun 2015, dan 109,65 pada tahun 2016 (Tabel 4.3).

Berbagai terobosan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan keluarga petani telah dilakukan. Upaya khusus peningkatan produksi, nilai tambah, kualitas dan pasar produk pangan dan pertanian telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Upaya diversifikasi pangan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga telah dilakukan, di antaranya melalui program

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), lumbung pangan masyarakat, pengembangan industri pangan rumah tangga, dan pengembangan komoditas pangan strategis.

Tabel 3.3. Indikator kesejahteraan petani pada tahun 2014-2016.

	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Januari-Agustus)
NTP			
Nasional	102,03	101,59	101,66
Petani tanaman pangan	98,89	100,37	100,03
Petani hortikultura	102,55	101,63	102,73
Petani perkebunan	101,30	97,18	97,44
Peternak	106,65		107,27
NTUP			
Nasional	106,04	107,44	109,65
Petani tanaman pangan	102,12	105,03	106,50
Petani hortikultura	107,00	108,35	112,16
Petani perkebunan	105,85	103,71	106,20
Peternak	111,00	113,03	115,29

Upaya strategis yang mencakup peningkatan dan penguatan swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan penyejahteraan keluarga petani melalui strategi operasionalisasi sebagaimana diuraikan di atas merupakan solusi permanen bagi peningkatan kesejahteraan petani. Dari perspektif pemerataan manfaat yang berkeadilan, negara harus hadir dengan kebijakan harga yang tepat dan mampu mengurangi dampak buruk disparitas harga pangan agar petani dan pedagang mendapatkan margin keuntungan yang berkeadilan dan tidak memberatkan konsumen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Penutup

Kesuksesan swasembada (2015-2016) ditempuh dengan terobosan kebijakan Menteri Pertanian dan strategi dalam mencapai kedaulatan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian mengimplementasikan strategi operasional sebagai berikut: *pertama,* pengembangan lahan tadah hujan (*rainfed*) 4 juta ha untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 1 menjadi 2 atau bahkan 3. *Kedua,* modernisasi pertanian melalui pengembangan mekanisasi. *Ketiga,* pembangunan dan perbaikan infrastruktur. *Keempat*, penanganan pascapanen. *Kelima,* pembangunan gudang, termasuk gudang berpendingin (*cold storage*), dan peningkatan akses pasar.

Swasembada pangan telah berhasil diwujudkan, yang berdampak terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Produksi komoditas pangan strategis meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir (2015-2016), kecuali produksi kedelai yang di tahun-tahun mendatang perlu dipacu. Kesejahteraan petani juga meningkat, terbukti dengan peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) pada tahun 2015-2016. NTUP konsisten meningkat dari 106,04 pada tahun 2014 menjadi 107,44 pada tahun 2015, dan 109,65 pada tahun 2016.

Keberhasilan ini perlu didukung oleh *stakeholder* lain terutama dalam stabilitas harga dan distribusi produk pertanian. Oleh karena itu, kebijakan terintegrasi di bidang pertanian dan upaya-upaya khusus (Upsus) haruslah dilanjutkan guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Potensi sumber daya lahan, air, agroklimat, kapasitas petani, pelaku perdagangan, dan konsumen menjadi modal dasar dalam mewujudkan swasembada pangan. Potensi-potensi tersebut perlu terus disinergikan dalam kesatuan arah kebijakan pembangunan pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

Daftar Bacaan

Ahmad Mun'im. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Ketersediaan, Akses, dan Penyerapan Pangan Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Surplus Pangan: Pendekatan Partial Least Square Path Modeling. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 30 No. 1: 41-58.

Arlia Renaswari Nirmala, Nuhfil Hanani, Abdul Wahib Muhaimin. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. Jurnal Habitat. Volume 27, No. 2 : 66-71

BPS. 2016. Lahan Baku Pertanian. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

FAO. 2003. Review of World Water Resources by Country. FAO Corporate Document Repository. Water Reports 23. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.

I Ketut Kariyasa. 2011. Impact of Infrastructure and Government Support on Corn Production in Indonesia: A Case on Integrated Crop Management Farmer Field School. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 29 No. 2: 147-168.

Reny Mardiana, Zainal Abidin, Achdiansyah Soelaiman. 2014. Pendapatan dan Kesejahteraan Petani Karet Rakyat di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Jurnal Ilmu-Ilmu Agronomi, Volume 2 No. 3: 239-245.

Sumaryanto. 2009. Analisis Volatilitas Harga Eceran Beberapa Komoditas Pangan Utama Dengan Model Arch/Garch. Jurnal Agro Ekonomi. Vol. 27 No. 2: 135-163.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN PANGAN

Tujuan utama pengembangan kawasan pertanian, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pertanian berbasis inovasi ramah lingkungan, kemandirian pangan, perluasan kesempatan kerja di perdesaan, dan kesejahteraan petani. Pengembangan kawasan pertanian mendapat perhatian serius pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana tercermin dari kebijakan pengalokasian anggaran, penyusunan pedoman dan penetapan lokasi pengembangan kawasan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Selama bertahun-tahun masalah utama yang seringkali mengemuka dalam pembangunan pertanian di Indonesia adalah produktivitas usahatani yang masih rendah, sistem pemasaran yang kurang efisien sehingga tidak menguntungkan petani, dan harga produk pertanian yang fluktuatif. Berbagai hasil kajian dan penelitian yang mengungkap isu tersebut telah menjadi pengetahuan umum, tidak hanya di kalangan akademisi, peneliti, dan pengambil kebijakan, tetapi juga pengusaha, politisi, dan masyarakat umum.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan memacu pertumbuhan produksi pangan serta meningkatkan pendapatan petani, pemerintah telah meluncurkan berbagai paket kebijakan. Kebijakan subsidi sarana produksi, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), tataniaga dan perdagangan, pengembangan infrastruktur pertanian, penguatan stok pangan, dan penciptaan kelembagaan penunjang pembangunan pertanian telah diinisiasi dan diluncurkan pemerintah. Implementasi berbagai kebijakan tersebut telah membuahkan hasil positif. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi juga makin berat. Penyebabnya antara lain terkait dengan hal-hal berikut: (1) iklim ekstrem, kapasitas adaptasi mayoritas petani pangan tergolong rendah-sedang (Sumaryanto, 2013); (2) sumber daya terutama lahan dan air yang tersedia semakin langka dengan mutu yang semakin rendah; (3) tenaga kerja pertanian semakin langka; dan (4) akses petani terhadap sumber permodalan sangat terbatas.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi dari berbagai kajian empiris, salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pengembangan kawasan pertanian, dalam konteks pangan adalah kawasan pangan. Sasaran umum kebijakan ini adalah untuk: (1) mendukung terwujudnya perencanaan program pembangunan pertanian terpadu; (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam implementasi paket kebijakan yang telah diluncurkan; (3) mendorong perkembangan sistem pengelolaan usahatani berbasis kawasan yang terkonsolidasi; (4) meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan pemasaran input maupun output pertanian; (5) memperkuat kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah; (6) stabilisasi harga komoditas pertanian; dan (7) meningkatkan pendapatan petani.

Tulisan ini membahas pengembangan kawasan pertanian, utamanya pangan. Pembahasan mencakup permasalahan dan sasaran

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang akan dicapai dalam pengembangan kawasan pangan, keunggulan komparatif kawasan pangan, pendekatan kawasan mendukung peningkatan keunggulan komparatif, upaya yang ditempuh dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengembangan kawasan pangan, dan kebijakan pengembangan kawasan pangan.

Keunggulan Komparatif Wilayah Pangan

Berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan sarana dan prasarana komunikasi dan telekomunikasi yang memungkinkan peningkatan konektivitas antarindividu, kelompok, dan wilayah, baik dalam maupun antarnegara. Pada saat yang sama, permintaan barang dan jasa di perdesaan maupun perkotaan telah berkembang pula, baik di negara maju maupun sedang berkembang. Bukan hanya volume permintaan yang bertambah, tetapi juga ragam dan atribut permintaan. Melalui mekanisme pasar, fenomena ini mendorong produsen mengembangkan produk barang dan jasa. Seperti halnya permintaan, penawaran produk barang dan jasa juga berkembang, tidak hanya volume tetapi juga atribut dan ragam produk. Oleh karena itu, arus barang dan jasa dalam perdagangan antarwilayah maupun antarnegara semakin besar, baik volume maupun ragam produk, dengan sistem yang semakin kompleks.

Terkait dengan itu, tantangan yang dihadapi produsen juga makin kompleks. Di satu sisi, kesempatan untuk menjual barang dan atau jasa yang diproduksi lebih banyak dan semakin terbuka. Di sisi lain, pesaing yang menjual barang atau jasa sejenis juga semakin banyak dan peluang munculnya produk substitusi semakin besar. Hal ini dirasakan pula oleh petani yang memproduksi bahan pangan. Dalam situasi seperti itu, produsen yang dapat bertahan dan berkembang adalah yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam persaingan.

Kunci sukses dalam memenangkan persaingan adalah kemampuan mengelola dan mendayagunakan sumber daya usaha sehingga produk yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar (*competitive advantage*).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam hal ini diperlukan inovasi di bidang teknologi maupun manajemen dan diaplikasikan dengan tepat, cerdas, dan sistematis. Kelemahan yang ada harus diminimalisasi, kekuatan yang dimiliki terus dikembangkan, peluang yang terbuka dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman yang dihadapi harus diatasi.

Berbeda dengan komoditas nonpangan, pasar komoditas pangan mempunyai karakter yang khas, karena pangan adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang relatif tetap dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Di sisi lain, masa simpan komoditas pangan lebih singkat dibandingkan dengan komoditas nonpangan. Volumenya pun cenderung meruah (*bulky*). Sementara itu, pasokan komoditas pangan tidak dapat sepenuhnya mengikuti dinamika volume permintaan karena produksinya berfluktuasi, sementara daya simpannya relatif terbatas.

Sifat produksi pangan yang fluktuatif merupakan implikasi logis proses produksi. Produksi pangan atau pertanian dalam arti luas adalah proses biologi tanaman, ternak, dan ikan sehingga dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem. Komponen agroekosistem yang terpenting adalah sumber daya lahan, iklim, dan air. Terkait iklim, aspek yang paling menentukan adalah curah hujan dan suhu. Curah hujan menentukan ketersediaan air yang diperlukan tanaman, ternak, dan ikan. Suhu menentukan tingkat kesesuaian tanaman dan ternak yang akan dikembangkan. Lahan, selain luasan, aspek terpenting adalah kesuburan dan keasaman tanah (pH) yang dipengaruhi oleh jenis batuan asal dan proses pelapukan, serta vegetasi dan iklim.

Secara umum, produktivitas tanaman, ternak, dan ikan lebih tinggi jika diusahakan pada agroekosistem yang paling cocok. Jika kurang cocok diperlukan perlakuan tambahan untuk mengondisikan agar lingkungan tumbuh optimal bagi komoditas yang diusahakan. Dengan demikian, secara umum basis keunggulan kompetitif produsen pangan terletak pada keunggulan komparatif yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi agroekosistem. Akan tetapi, mengandalkan kondisi agroekosistem semata juga tidak cukup untuk memberikan keunggulan komparatif yang tinggi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk komoditas pangan dengan jenis dan mutu yang sama, faktor penentu keunggulan komparatif dan kompetitif adalah harga jual. Komponen pembentuk harga komoditas adalah biaya produksi dan pemasaran. Biaya usahatani terdiri atas biaya tenaga kerja dan sarana produksi, dan biaya lainnya yang bersifat kondisional. Biaya-biaya lainnya yang bersifat kondisional misalnya biaya irigasi, biaya untuk kegiatan adat yang terkait dengan usahatani, dan bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri adalah biaya sewa lahan (jika menyewa) atau nilai hasil panen yang diserahkan kepada pemilik lahan (untuk sistem bagi hasil). Biaya pemasaran terdiri atas biaya penanganan pascapanen, transportasi, sortasi dan *grading*, penyimpanan, pajak, dan sebagainya.

Secara empiris, kelemahan sistem usahatani pangan yang terkait dengan struktur pengusahaan didominasi oleh skala usaha kecil dan terfragmentasi. Hal ini merupakan implikasi dari kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare yang dewasa ini 56% dari rumah tangga petani. Apakah kondisi tersebut memengaruhi produktivitas usahatani? Jawabannya ternyata beragam. Sebagian kajian menunjukkan peningkatan skala usaha diikuti oleh peningkatan produktivitas. Sebagian lainnya menyatakan peningkatan skala usaha tidak nyata meningkatkan produktivitas, bahkan ditemukan pula kasus-kasus yang justru sebaliknya. Dari data survei rumah tangga petani oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2013 di 18 provinsi utama penghasil padi di Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa usahatani padi berada pada *constant returns to scale* meskipun ada indikasi *increasing returns to scale*. Artinya, peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan skala usaha, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas. Sebagai contoh, jika luas lahan garapan 0,5 hektare memberikan hasil 3 ton gabah kering panen (GKP), maka peningkatan luas garapan menjadi 1 hektare memberikan hasil 6 ton GKP.

Meskipun peningkatan luas garapan tidak selalu berpengaruh terhadap produktivitas tetapi memengaruhi keunggulan komparatif. Hal ini terkait dengan fenomena empiris bahwa keunggulan komparatif tidak hanya bergantung pada produktivitas. Terdapat beberapa aspek penting lain, di antaranya biaya pokok produksi, volume, dan jaminan kontinuitas pasokan.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Terkait dengan usahatani skala kecil terfragmentasi, pengambilan keputusan oleh petani beraneka ragam. Hal ini dapat terjadi dalam pengadaan dan pengalokasian input maupun pemasaran produksi atau yang lebih mendasar menyangkut pilihan pola tanam. Implikasi dari kondisi ini adalah biaya pengadaan per unit volume input atau biaya pemasaran per unit volume output menjadi lebih mahal dan dibebankan kepada petani karena lemahnya posisi tawar mereka di pasar input maupun pasar output.

Lemahnya posisi tawar petani di pasar sarana produksi disebabkan oleh struktur pasar yang oligopolistik. Artinya, jumlah petani (pembeli sarana produksi) lebih banyak dan yang sarana produksi yang dibeli relatif sedikit dan tidak terkoordinasi, sementara jumlah penjual (pedagang sarana produksi) lebih sedikit. Petani tidak dapat leluasa mengatur jadwal pengadaan sarana produksi karena kebutuhan benih, pupuk, pestisida, dan sebagainya terkait dengan jadwal tanam dan fase pertumbuhan tanaman.

Sebaliknya, di pasar produksi pertanian, struktur pasar bersifat oligopsonistik. Artinya, jumlah penjual (petani) lebih banyak dan tidak terkoordinasi, sementara jumlah pembeli (pedagang pengumpul) lebih sedikit. Dalam konteks ini, sebagian besar petani tidak leluasa mengatur waktu pemasaran. Waktu panen jelas dipengaruhi oleh jadwal tanam. Jika ingin menunda penjualan dengan cara menyimpan hasil panen sebelum dipasarkan berarti petani harus menanggung biaya penyimpanan. Sementara itu mereka seringkali terdesak kebutuhan rumah tangga dan modal usahatani musim berikutnya.

Implikasi dari fenomena di atas adalah konsolidasi sistem pengelolaan usahatani pangan berperan positif dalam mewujudkan keunggulan komparatif. Dengan sistem pengelolaan yang terkonsolidasi diperoleh beberapa manfaat berikut. *Pertama,* dimungkinkan tercapainya skala usaha yang optimal. *Kedua,* memperbaiki posisi tawar petani di pasar input maupun output. *Ketiga,* terjaminnya kesinambungan pasokan dengan volume yang sesuai dengan permintaan pasar.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Produksi Pangan

Pada pertanian pangan, sumber karbohidrat adalah sistem produksi berbasis lahan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas produksi pangan dipengaruhi oleh luas lahan. Selain lahan, faktor penentu pengembangan kapasitas produksi pangan adalah ketersediaan air. Di sisi lain, sumber daya lahan dan air semakin langka dan secara umum mengalami degradasi mutu. Lahan-lahan subur dengan ketersediaan air yang cukup sudah sangat terbatas. Upaya perluasan lahan pertanian melalui pembukaan hutan tidak mudah karena luas hutan dengan status yang dapat dikonversi menjadi lahan pertanian juga sangat terbatas. Saat ini peluang yang masih terbuka untuk perluasan lahan pertanian adalah memanfaatkan lahan marginal, seperti lahan rawa (rawa lebak maupun pasang surut) yang secara umum tingkat kesuburannya lebih rendah dibandingkan dengan tanah mineral. Tingkat kelangkaan tersebut semakin tinggi karena lahan-lahan pertanian yang telah ada juga banyak yang dialihfungsikan ke penggunaan lain, seperti kawasan pemukiman, industri, jalan raya, bandara, dan fasilitas publik lainnya.

Masalah kelangkaan sumber daya dapat dipecahkan antara lain melalui peningkatan efisiensi. Secara teoritis, efisiensi dapat ditempuh melalui dua pendekatan. Pertama, efisiensi penggunaan input, dalam pengertian untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu diupayakan agar input yang digunakan sesedikit mungkin. Kedua, dengan input tertentu yang tersedia diupayakan dapat menghasilkan output semaksimal mungkin. Dengan demikian, peningkatan efisiensi dapat pula dipandang sebagai peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang ekonomi produksi, upaya peningkatan efisiensi melalui kedua cara tersebut dikenal dengan istilah peningkatan efisiensi teknis.

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan tingkat efisiensi teknis usahatani padi rata-rata 0,76 dengan kisaran 0,31-0,97. Hal ini mengindikasikan upaya peningkatan efisiensi teknis masih cukup terbuka. Melalui peningkatan efisiensi teknis berorientasi maksimilisasi output, terdapat peluang peningkatan produktivitas padi sampai 20%. Jika saat ini produktivitas padi rata-rata 6 ton per hektare, terdapat peluang untuk

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

ditingkatkan menjadi 7,2 ton per hektare. Pengamatan menunjukkan cukup banyak petani yang mampu menghasilkan padi di atas 7,5 ton per hektare, meskipun jumlahnya kurang dari 25%.

Peningkatan efisiensi teknis saja tidak cukup karena peningkatan produksi tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani. Agar petani memperoleh pendapatan yang maksimal diperlukan peningkatan efisiensi ekonomis. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efisiensi teknis yang lebih tinggi perlu dibarengi dengan upaya peningkatan efisiensi alokatif agar biaya yang dikeluarkan per unit input dalam proses produksi seimbang dengan pertambahan nilai per unit output.

Mengingat terbatasnya luas baku lahan pangan maka peningkatan kapasitas produksi ditempuh melalui peningkatan luas fungsional. Praktiknya adalah meningkatkan intensitas tanam. Untuk itu diperlukan pemanfaatan varietas unggul berumur pendek (genjah) dan percepatan jadwal tanam agar pertanaman pada musim kemarau tidak mengalami kekurangan air (kekeringan). Bersamaan dengan pemanfaatan varietas genjah tersebut, diterapkan pula teknik pengolahan tanah yang tepat, pemupukan yang efisien, dan sistem pemeliharan yang kondusif bagi pertumbuhan vegetatif dan produktif tanaman. Khusus untuk usahatani padi sawah, pemanfaatan air irigasi perlu dilakukan secara efisien. Selain itu, perlu pula diterapkan teknologi prapanen, panen, dan pascapanen yang tepat agar mutu hasil panen lebih baik dan kehilangan hasil dapat ditekan. Dengan demikian, upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas perlu dilakukan secara intensif dan komprehensif, mulai dari prapanen sampai pascapanen.

Dalam usahatani komoditas pangan, lahan dan air merupakan faktor produksi penting dan langka. Melalui intensifikasi, produksi per unit luas lahan dapat dilipatgandakan dengan memanfaatkan air yang tersedia. Secara historis, jika dibandingkan dengan empat dasawarsa yang lalu, produktivitas usahatani pangan saat ini lebih tinggi 3-4 kali lipat.

Keberhasilan peningkatan produktivitas merupakan hasil jerih payah petani dengan dukungan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri petani adalah aktor utama dalam pembangunan pertanian. Namun, pemerintah berkontribusi besar dalam peningkatan produksi. Secara normatif, petani perlu terus didorong dan difasilitasi karena mereka adalah pilar utama

PERPUSTAKAAN BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

ketahanan pangan. Peranan pemerintah yang menonjol dalam hal ini adalah penyediaan benih/bibit unggul berdaya hasil tinggi dan bimbingan teknis budi daya, kebijakan harga (subsidi sarana produksi dan penetapan harga pembelian produksi), pengembangan infrastruktur irigasi dan jalan usahatani, bantuan alat mesin pertanian, dan perlindungan petani dari risiko kerugian yang besar akibat gagal panen, pengembangan kelembagaan yang kondusif dalam penerapan teknologi yang lebih produktif, dan sistem pemasaran yang memihak petani.

Berbagai kebijakan dan program yang diinisiasi pemerintah telah berkontribusi nyata dalam pengembangan produksi pangan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dalam implementasinya di lapangan, beberapa kebijakan seringkali menghadapi masalah dan kendala karena struktur pertanian didomisasi oleh usahatani skala kecil yang terfragmentasi dan karakteristik rumah tangga petani yang beraneka ragam.

Terkait dengan luas garapan yang sempit, petani tidak memperoleh pendapatan yang memadai dari usahatani sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, mereka dituntut untuk bekerja tambahan pada kegiatan di luar usahatani, antara lain sebagai buruh (buruh tani maupun buruh nonpertanian), pedagang kecil, tukang ojeg, pengrajin, dan sebagainya. Semakin sempit luas garapan, semakin besar ketergantungan petani pada pekerjaan di luar usahatani, sehingga banyak di antara mereka yang memposisikan usahatani sebagai usaha sampingan. Bagi petani yang banyak terlibat pada kegiatan di luar usahatani, motivasi menerapkan inovasi pada usahatani rendah. Hal ini memengaruhi efektivitas penyuluhan dan program bantuan yang diluncurkan pemerintah.

Upaya meminimalisasi dampak negatif struktur penguasaan aset pertanian seperti dikemukakan di atas dapat ditempuh melalui konsolidasi sistem pengelolaan usahatani, konkretnya melalui "rasionalisasi" luas garapan. Evolusi ke arah itu dapat dipercepat jika tersedia kesempatan kerja nonpertanian produktif di perdesaan yang dibarengi dengan sistem kelembagaan yang mampu mendorong perkembangan transaksi sewa-menyewa dan atau bagi hasil. Dalam hal ini, petani dengan luas garapan sempit beralih profesi dan menyewakan lahannya untuk digarap oleh

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

petani lain dengan garapan yang cukup luas dan sistem pengelolaan yang lebih maju. Strategi yang lain adalah melalui pengembangan sistem kelembagaan yang memungkinkan petani kecil terkoordinasikan dengan baik, sehingga pengadaan sarana produksi, penerapan teknologi, dan pemasaran dapat terkonsolidasikan. Peluang penerapan strategi ini lebih terbuka pada pertanian pangan berbasis kawasan.

Pengembangan Kawasan Pangan

Mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, pola konsumsi pangan, struktur perekonomian, potensi sumber daya, dan peran strategis pangan bagi ketahanan nasional, salah satu strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah melalui swasembada pangan, terutama beras. Setelah swasembada tercapai, rata-rata pertumbuhan produksi pangan diupayakan lebih besar dari pertumbuhan penduduk, karena respon permintaan pangan terhadap pendapatan per kapita mayoritas penduduk masih positif.

Peran sektor pertanian dalam perekonomian mencakup penyediaan pangan dan input bagi industri pengolahan, peningkatan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, dan ekspor. Kegiatan utama (*core business)* sektor pertanian adalah usahatani (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan). Pada dasarnya, sistem produksi usahatani berbasis proses biologi sehingga produktivitas dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem. Faktor lain yang ikut menentukan kinerja pertanian adalah kondisi infrastruktur, struktur-perilaku-kinerja pasar input dan output, dan keterkaitan dengan sektor hulu dan hilir. Oleh karena itu, salah satu strategi peningkatan efisiensi produksi pertanian kawasan adalah melalui konsolidasi pengelolaan berbasis agroekosistem yang dipadukan dengan potensinya sebagai salah satu *prime-mover* pertumbuhan ekonomi wilayah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan konsep pengembangan Kawasan Pertanian (Setiyanto, 2013; Biro Perencanaan Kemtan, 2015[2]; Kementerian Pertanian, 2016)[3].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Mengingat ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas maka upaya yang layak ditempuh untuk memaksimalkan produksi dan pendapatan adalah optimalisasi sumber daya melalui penerapan inovasi. Mengacu pada prinsip tersebut, strategi pengembangan Kawasan Pertanian dapat ditempuh dengan kombinasi pendekatan berikut. *Pertama,* peningkatan efisiensi pendayagunaan infrastruktur sistem produksi dan distribusi melalui konsolidasi sistem pengelolaan berbasis potensi kawasan. *Kedua,* dalam sistem pengelolaan yang terkonsolidasi dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Untuk mengondisikan terjadinya konsolidasi pengelolaan sumber daya Kawasan Pangan diperlukan transformasi sistem perencanaan. Selama ini pendekatan yang diterapkan dalam perencanaan pengembangan pertanian pangan adalah berbasis wilayah administratif. Di sisi lain, pengembangan Kawasan Pangan berbasis agroekosistem dipadukan dengan potensinya sebagai salah satu *prime-mover* pertumbuhan ekonomi kawasan. Transformasi berbasis pendekatan tersebut harus tetap berada dalam bingkai kelembagaan dari struktur organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengarusutamaan *(mainstreaming)* pendekatan berbasis kawasan layak diterapkan dalam perencanaan pengembangan kawasan pangan. Dengan demikian, faktor penentunya adalah koordinasi (vertikal dan horizontal), baik antarinstansi atau antarlembaga terkait maupun antara pemerntah dengan petani. Melalui koordinasi yang tepat, heterogenitas latar belakang dan perbedaan persepsi, orientasi, kepentingan, dan sikap dapat diselaraskan. Aspek koordinasi juga kondusif mendukung terbentuknya mekanisme kerja sama di tingkat pelaksanaan kegiatan (Havinal, 2009).

Berbekal pengarusutamaan pendekatan berbasis kawasan, substansi pokok yang dibutuhkan dalam perencanaan pengembangan produksi pangan di Kawasan Pangan adalah mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian di wilayah yang bersangkutan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Optimalisasi Sumber Daya dalam Kegiatan Inti *(Core Business)*

Prinsip dasar optimalisasi sumber daya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Oleh karena itu, unsurnya terdiri atas variabel keputusan, tujuan, dan kendala sumber daya. Variabel keputusan ditentukan oleh ruang lingkup dan konteks permasalahan yang ingin dipecahkan serta instrumen yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut. Penentuan tujuan berpijak pada aspirasi yang didasarkan atas realitas yang dihadapi dalam ruang lingkup dan konteks permasalahan. Kendala sumber daya mencakup karakteritik dan kuantitas sumber daya yang dapat diakses. Pengertian "dapat diakses" mengacu pada penguasaan teknologi pemanfaatan sumber daya tersebut.

Pemerintah adalah penggerak, fasilitator, pembuat regulasi, dan dalam batas-batas tertentu (terutama dalam pengembangan usaha pertanian rakyat) merupakan inovator dan inisiator pembangunan pertanian. Meskipun demikian, aktor utama pembangunan pertanian tetap petani. Petani adalah pelaku pengambilan keputusan dalam setiap tahapan/proses pengelolaan usahatani yang setiap saat berhadapan langsung dengan risiko yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penentu optimalisasi sumber daya dalam pengembangan Kawasan Pangan di lapangan terletak pada partisipasi petani.

Petani akan berpartisipasi aktif dalam implementasi rancangan alokasi optimal sumber daya jika dua persyaratan berikut terpenuhi. *Pertama,* rancangan pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan aspirasi seluruh atau setidaknya sebagian besar petani (*first order condition*). *Kedua,* tersedia kelembagaan pendukung yang efektif mengimplementasikan rancangan (*second order condition*), yakni: (1) mendukung terbentuknya konsolidasi pengelolaan usahatani kawasan berbasis pendekatan agroekosistem yang diinterintegrasikan dengan potensi pertanian sebagai salah satu komponen utama pembangunan ekonomi wilayah; dan (2) memfasilitasi proses penerapan rancangan alokasi optimal sumber daya di kawasan yang bersangkutan.

Sasaran utama pengembangan Kawasan Pangan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah dalam rangka

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mendukung kemandirian pangan berkelanjutan. Rancangan dasar Kawasan Pangan berbasis pada karakteristik agroekosistem, infrastruktur penunjang, dan kebijakan pembangunan pertanian dalam arti luas. Kebijakan yang diambil dalam pengembangan Kawasan Pangan perlu memperhitungkan dengan cermat dinamika lingkungan strategis (Gambar 20).

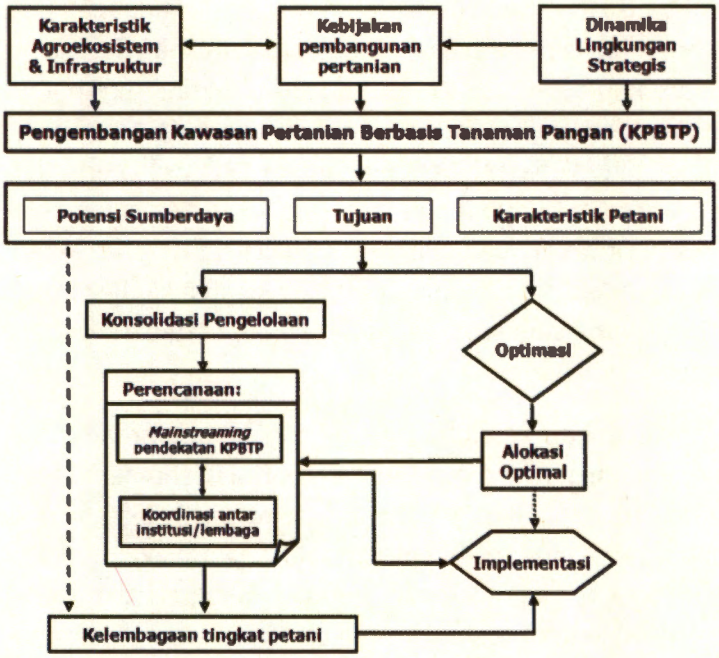

Gambar 20. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan sebagai salah satu strategi optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan pertanian.

Mengacu pada ketersediaan sumber daya, karakteristik komunitas petani, prospek pengembangan komoditas pangan, dan tujuan yang ingin dicapai, optimalisasi sumber daya Kawasan Pangan membutuhkan kombinasi pendekatan berikut:

(1) Konsolidasi sistem pengelolaan. Idealnya, sistem perencanaan Kawasan Pangan berada dalam satu wadah organisasi formal. Akan tetapi, cakupan wilayah kerja Kawasan Pangan umumnya lintas wilayah administratif, sedangkan sektor pertanian adalah subsistem dari sistem perekonomian, sehingga sistem perencanaannya harus

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

berbasis wilayah administratif. Dengan kondisi seperti itu maka yang dapat ditempuh adalah transformasi sistem perencanaan yang intinya menerapkan pengarusutamaan pendekatan kawasan sebagai basis perencanaan. Kunci suksesnya terletak pada koordinasi (vertikal dan horizontal) antarlembaga yang tercakup dalam pengembangan Kawasan Pangan.

(2) Optimalisasi sumber daya Kawasan Pangan. Optimalisasi sumber daya merupakan substansi pokok perencanaan dan acuan implementasinya di lapangan. Model optimalisasi perlu mempertimbangkan bahwa sasaran pemerintah maupun aspirasi/ tujuan petani dalam pengembangan produksi pertanian pangan bersifat jamak, hubungan antartujuan tidak selalu searah, dan skala prioritas kedua belah pihak tidak selalu sama. Selain itu, pada kawasan pertanian pangan berbasis klaster, kebijakan pemerintah perlu memfasilitasi terciptanya sinergi tujuan petani dengan industri terkait.

(3) Pengembangan kelembagaan di tingkat petani yang mendukung implementasi rancangan alokasi optimal sumber daya Kawasan Pangan di lapangan. Idealnya, kelembagaan sistem pengelolaan usahatani yang terkonsolidasi terorganisasikan secara formal. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan karakteristik usahatani dan eksistensi kelembagaan di tingkat petani yang selama ini berlaku, organisasi tersebut tidak dapat dibentuk dalam jangka pendek–menengah. Oleh karena itu, perlu didorong pembentukan jaringan informasi dan sistem koordinasi antar-Gabungan Kelompok Tani dengan sasaran mengondisikan konsolidasi pengelolaan usahatani Kawasan Pangan dan sinergis dengan industri hulu maupun industri hilir usaha pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Pangan

Pengembangan kawasan dalam pembangunan pertanian bukan merupakan pendekatan baru. Penentu utama terbentuknya kawasan pertanian adalah pengembangan sistem irigasi skala besar. Sebagai contoh, sentra usaha padi di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang memanjang dari Subang hingga Karawang dan Indramayu yang merupakan kawasan pangan berbasis komoditas padi sawah tidak lepas dari sistem Irigasi Jatiluhur. Demikian pula dengan Kawasan Pertanian Pangan yang meliputi sawah-sawah irigasi teknis di Daerah Irigasi Brantas, mulai dari Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang hingga Mojokerto dan Sidoarjo.

Eksistensi kawasan pertanian tersebut terjaga dengan baik, setidaknya sampai pertengahan dekade 80-an dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil meraih swasembada beras. Akan tetapi, dalam periode 1985-1998, berkurangnya dukungan pengembangan infrastruktur pertanian pangan (terutama irigasi) dan prioritas pembangunan lebih diarahkan pada pengembangan industri nonpertanian, maka secara gradual kawasan pertanian mengalami degradasi. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya kebijakan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi sentra-sentra usaha komoditas pangan berbasis pendekatan kawasan secara komprehensif.

Degradasi produksi pangan semakin serius sejak era reformasi. Di satu sisi, desentralisasi pembangunan dalam era Otonomi Daerah memungkinkan terjadinya akselerasi pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pembangunan pertanian pangan berbasis pendekatan kawasan makin terpinggirkan. Kondisi tersebut makin memprihatinkan dengan masifya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, jalan raya, dan sebagainya. Lahan-lahan pertanian yang terkonversi bukan hanya lahan kering, tetapi mencakup pula lahan sawah produktif berpengairan teknis dengan indeks pertanaman padi (IP Padi) lebih dari 2. Pertanian pangan pada dasarnya merupakan sistem produksi berbasis sumber daya lahan dan air, sehingga alih fungsi lahan pertanian mendorong fragmentasi sistem pengelolaan sistem usahatani di tingkat wilayah.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah menyadari perlindungan bagi lahan pertanian dan kawasan pengembangan produksi pangan menjadi suatu keniscayaan. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Walaupun demikian, implementasi UU tersebut sampai saat ini belum efektif karena sebagian besar kabupaten/kota belum berhasil menerjemahkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dioperasionalkan dengan baik.

Dalam hal pengembangan kawasan pangan, pemerintah mulai serius menggarap sejak tahun 2012. Salah satu indikatornya diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 50 tahun 2012. Meskipun demikian, Permentan ini dirasa belum lengkap sehingga implementasinya di lapangan masih mengalami banyak kendala. Terkait dengan dinamika perencanaan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah di bidang pertanian telah dilakukan penyempurnaan secara komprehensif. Selain pemetaan dan beberapa perbaikan konsep operasional, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian juga menerbitkan Manajemen Pengembangan Kawasan Pertanian (Biro Perencanaan Kementan, 2015). Kemudian diterbitkan Permentan No. 56 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian No. 830 tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

Pedoman dan lokasi pengembangan kawasan pangan

Mengacu pada arahan kebijakan ekonomi makro dan sektor unggulan pembangunan nasional, Kementerian Pertanian telah menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang mencakup: (1) perkuatan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan; (2) pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan pengembangan kerja sama internasional; dan (3) perkuatan faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri,

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

dan penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu menyejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat secara berkeadilan. Di samping itu, pengembangan kawasan pertanian juga mendukung upaya pengembangan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pembangunan keterkaitan desa dan kota.

Dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dinyatakan maksud dan tujuan pengembangan kawasan pertanian. Maksudnya adalah memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan pertanian di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan berdimensi kewilayahan agar dapat menjamin ketahanan pangan nasional, mengembangkan dan menyediakan bahan baku bioindustri dan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu menyejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat secara berkeadilan. Tujuan pengembangan kawasan pertanian adalah melanjutkan keberhasilan dan meningkatkan kinerja pembangunan pertanian sebelumnya di daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antarkawasan, dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian secara keseluruhan pada saat ini dan ke depan.

Berbeda dengan pengembangan kawasan di masa lalu yang berorientasi output, pengembangan kawasan ke depan berorientasi *outcome* berbasis kinerja. Indikator *outcome* mencakup aspek manajemen dan teknis. Dari segi manajemen, indikator *outcome* meliputi: (1) tersusunnya *masterplan* pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi dan *action plan* pengembangan kawasan pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; (2) te-*review*-nya *masterplan dan action plan* oleh Direktorat Jenderal yang melaksanakan fungsi pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan lingkup Kementerian Pertanian; (3) terbangunnya sinergitas rencana kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat pusat dengan rencana dan implementasi pengembangan kawasan pertanian di daerah; (4) terbangunnya komitmen kerja sama dalam perumusan rencana dan implementasi kebijakan,

PERPUSTAKAAN SENJAT KEMENTERIAN PERTANIAN

program, dan kegiatan pengembangan kawasan pertanian di daerah; dan (5) tersedianya dukungan alokasi anggaran non-APBN Kementerian Pertanian yang mendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai tahapan pengembangan kawasan pertanian.

Dari segi teknis, indikator *outcome* meliputi: (1) meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di kawasan pertanian; (2) meningkatnya aktivitas pascapanen, mutu, pengolahan dan nilai tambah produk serta berkembangnya jaringan pemasaran komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah di kawasan pertanian; (3) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku agribisnis komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah di kawasan pertanian; dan (4) meningkatnya peran komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah di kawasan pertanian dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian juga dijelaskan pengertian dari kawasan pertanian, sentra pertanian, kawasan pertanian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, *masterplan, action plan, roadmap*, dan sebagainya. Di dalamnya juga termasuk pengertian tim pengarah, tim pembina, tim teknis, pilot proyek, dan sistem informasi kawasan pertanian.

Kawasan pertanian dapat bersifat lintas daerah administrasi, sehingga pengembangannya merupakan upaya untuk mendorong pengembangan sentra-sentra produksi dalam kawasan pertanian secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut basis fungsional, komoditas pertanian dapat dikelompokkan ke dalam bahan makanan pokok nasional dan lokal, produk pertanian penting pengendali inflasi, bahan baku industri konvensional dan nonkonvensional, produk industri pertanian prospektif, produk energi pertanian prospektif, dan produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor.

PERPUSTAKAAN SEKJEN DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Menurut karakteristik budi daya dan agribisnis, komoditas pertanian dibagi menjadi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Mengacu pada karakteristik tersebut, kawasan tanaman pangan merupakan kawasan usahatani tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, dan dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tersebut dapat berupa kawasan yang telah ada atau calon kawasan baru berupa hamparan luas atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan yang memadai.

Lokasi Kawasan Pangan Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmen No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 adalah untuk pengembangan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Untuk tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Hortikultura meliputi bawang merah, cabai, dan jeruk. Untuk komoditas perkebunan meliputi tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, pala, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Untuk komoditas peternakan meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, dan itik.

Kriteria khusus kawasan tanaman pangan ditentukan oleh total luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan. Di samping aspek luas agregat, kriteria khusus kawasan tanaman pangan juga mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesisik komoditas. Untuk padi, jagung, dan ubi kayu adalah: (a) memperhatikan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Nasional skala 1:250000 dan atau Atlas Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu kabupaten skala 1:50.000; (b) memperhatikan luasan untuk mencapai skala ekonomi di satu kawasan kabupaten/kota, yaitu untuk padi, jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektare dan untuk kedelai minimal 2.000 hektare; (c) memperhatikan luasan gabungan lintas kabupaten/kota untuk mencapai skala ekonomi yaitu: (1) untuk kawasan padi, jagung, dan ubi kayu dapat berbentuk gabungan dua kabupaten/kota dengan luasan minimal 5.000 hektare dan luas minimal per kabupaten/kota 2.000 hektare; (2) untuk kawasan padi, jagung, dan ubi kayu dapat berbentuk gabungan tiga kabupaten/kota dengan luasan minimal 6.000 hektare dan luas minimal per kabupaten/

PERPUSTAKAAN BADAN KEMENTERIAN PERTANIAN

kota 2.000 hektare; (3) untuk kawasan kedelai dapat berbentuk gabungan dua kabupaten/kota dengan luasan minimal 2.000 hektare dan minimal per kabupaten/kota 1.000 hektare.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. 830 tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, untuk padi mencakup 284 Kabupaten/Kota di 31 Provinsi, untuk jagung di 166 kabuaten/kota pada 30 provinsi, untuk kedelai di 107 kabupaten/kota pada 21 provinsi, sedangkan untuk ubi kayu mencakup 70 kabupaten/kota di 18 provinsi.

Kawasan hortikultura merupakan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, dan dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha. Lokasinya dapat berupa satu kesatuan hamparan dan atau hamparan parsial dari sentra-sentra usaha dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan secara memadai. Kawasan hortikultura dapat berupa gabungan dari sentra-sentra usaha yang secara historis telah eksis (sentra utama) dan sentra yang baru berkembang atau sentra yang baru tumbuh (sentra penyangga).

Jumlah kabupaten/kota untuk pengembangan kawasan komoditas hortikultura prioritas adalah sebagai berikut: bawang merah di 79 kabupaten/kota pada 28 provinsi, cabai di 191 kabupaten/kota pada 33 provinsi, jeruk di 57 kabupaten/kota pada 27 provinsi.

Kawasan perkebunan merupakan wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan disatukan oleh kesamaan tipologi agroekosistem, kegiatan ekonomi, sosial busaya dan berbagai infrastruktur pertanian untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Lokasi kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai dengan tipologi agroekosistem dan persyaratan budi daya bagi masing-masing komoditas.

Pengembangan kawasan tebu mencakup 51 kabupaten/kota di 9 provinsi. Dengan demikian sebaran pengembangan kawasan tebu relatif lebih terbatas dibandingkan dengan kawasan tanaman pangan lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kawasan peternakan merupakan gabungan usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan agroekosistem untuk budi daya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu kesatuan hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak – perkebunan, ternak – tanaman pangan, dan atau ternak – hortikultura.

Cakupan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas peternakan adalah sebagai berikut: Sapi potong di 153 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Sapi perah di 17 kabupaten/kota pada 7 provinsi, sedangkan kerbau di 27 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Kawasan pengembangan ternak kambing mencakup 26 kabupaten/kota di 14 provinsi, sedangkan domba di 8 kabupaten/kota pada 3 provinsi. Kawasan peternakan babi mencakup 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi di luar Jawa, sedangkan ayam buras mencakup 10 kabupaten/kota pada 9 provinsi, dan itik di 11 kabupaten/kota pada 7 provinsi.

Manajemen pengembangan kawasan pangan

Pengembangan kawasan pertanian ke depannya membutuhkan reorientasi manajemen dari yang berlaku di masa yang lalu. Reorientasi tersebut mencakup aspek perencanaan, keterpaduan sistem dan usaha, skala/luasan, tata pemerintahan, dan pembiayaan (Tabel 5.1).

Dapat disimpulkan bahwa simpul kritis pengembangan kawasan pertanian adalah masalah kelembagaan dalam sistem perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Ke depan, sistem perencanaan pengembangan kawasan pertanian harus lebih menekankan pada koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah administratif.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 4.1. Reorientasi manajemen pengembangan kawasan pertanian.

Aspek	Kawasan masa lalu	Kawasan ke depan
1. Perencanaan	• Bersifat keproyekan (orientasi output) • Sifat tahunan/kurang berkelanjutan • Lebih bersifat top down • Belum didukung dengan roadmap • Pendekatan lokal, belum selaras dengan tata ruang • Dukungan data dan informasi belum optimal	• Berbasis kinerja (orientasi outcome) • Berkerangka jangka menengah/berkelanjutan • Keterpaduan *top down policy* dan *bottom up planning/* partisipatif • Didukung dengan Master Plan yang didasari dengan analisis teknokratik; analisis situasi wilayah, tata ruang dan permasalahan • Pendekatan kewilayahan; selaras dengan tata ruang wilayah • Berbasis informasi dan data statistik dan spasial
2. Keterpaduan sistem & usaha	• Parsial (terlalu fokus pada on farm) • Keterpaduan horizontal antar komoditas unggulan belum berkembang	• Holistik; keterpaduan vertikal hulu–hilir • Keterpaduan horizontal lebih kuat (integrasi komoditas dengan ternak dan tanaman lain)
3. Skala/luasan	• Hamparan; perdesaan/ kecamatan/kabupaten	• Agregat ekonomi wilayah; lintas kawasan, skala regional (lintas kabupaten/ kota, provinsi
4. Tata Pemerintahan	• Kerja sama antar wilayah administratif kurang berfungsi • Kewenangan/urusan lintas sektor maupun pusat – daerah belum terpetakan dengan baik • Koordinasi lintas sektor belum intensif • Partisipasi Pemda belum optimal	• Kerja sama antarwilayah administratif lebih intensif • Disiplin kewenangan/ urusan sesuai pemetaan kewenangan pusat dan daerah • Diharapkan koordinasi lintas sektor lebih intensif • Komitmen Pemda diutamakan (kesepakatan/ dukungan pewilayahan komoditas)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Aspek	Kawasan masa lalu	Kawasan ke depan
5. Pembiayaan	• Pembiayaan lebih mengutamakan APBN, sementara APBD dan partisipasi masyarakat belum optimal	• Diarahkan mewujudkan keterpaduan APBN/APBD provinsi/APBD kabupaten/ kota, swasta, dan masyarakat

Sumber: Permentan Nomor 50 Tahun 2012.

Selain mendayagunakan sinergisitas antarwilayah dan antarsektor dalam mengoptimalkan sumber daya, pengembangan kawasan pertanian umumnya atau kawasan pangan khususnya juga dimaksudkan agar pembiayaan pemerintah menjadi lebih efisien dan program dalam memfasilitasi maupun menstimulasi pembangunan pertanian menjadi lebih efektif. Sebagai gambaran, dengan pengembangan pangan berbasis kawasan maka bantuan teknis, permodalan, peralatan dan mesin pertanian, dan bantuan bagi perlindungan petani menjadi lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

Penutup

Secara *de facto*, status pengembangan kawasan pangan saat ini masih dalam tahap awal mengingat program dan kebijakannya baru diluncurkan pada akhir tahun 2016. Meskipun demikian, keseriusan implementasi sudah terlihat dari sistem pengalokasian anggaran yang sejak tahun 2017 sebagian telah mengacu pada pedoman pengembangan kawasan pertanian.

Implementasi kebijakan pengembangan kawasan pangan atau kawasan pertanian tidak dapat berlangsung cepat, namun mempunyai *wisdom* tersendiri. Aspek ini terkait dengan argumen berikut:

Pertama, pengembangan kawasan pangan tidak bergerak di ruang kosong. Dengan segala keterbatasannya, selama ini telah terbentuk kawasan sentra usaha komoditas pangan. Melalui fasilitasi dari

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah dan sosialisasi Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, "kawasan" tersebut merupakan modal menuju terbentuknya Kawasan Pertanian Pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Kedua, mengingat simpul kritisnya terletak pada sistem perencanaan berbasis pendekatan wilayah, maka kuncinya adalah koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Hal ini membutuhkan kesediaan setiap stakeholder untuk menyelaraskan persepsi, orientasi, kepentingan, dan sikap.

Ketiga, mengingat pengembangan kawasan pangan juga diorientasikan untuk memperkuat hubungan fungsional hulu-hilir, maka dapat dikembangkan berdasarkan pendekatan klaster. Dalam jangka menengah-panjang, penguatan hubungan hulu-hilir sangat kondusif meningkatkan nilai tambah, kesempatan kerja, dan perkembangan ekonomi wilayah.

Keempat, reorientasi manajemen dalam pembangunan pertanian pada tingkat kawasan atau tingkat individu membutuhkan sistem kelembagaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat pada kawasan tersebut. Perkembangan kawasan pertanian akan lebih cepat manakala didukung oleh sistem kelembagaan yang kondusif untuk mewujudkan sistem pengelolaan usaha pertanian yang terkonsolidasi dan terkoordinasi secara vertikal maupun horizontal. Modelnya dapat dirumuskan dalam jangka pendek, namun karena latar belakang, persepsi, dan kepentingan petani sangat beragam maka implementasinya tentu membutuhkan jangka waktu yang tidak pendek.

Kelima, pengembangan kawasan pertanian (termasuk kawasan pangan) adalah bagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Di sisi lain, kecepatan, status perkembangan, dan arah perkembangan perekonomian wilayah di tiap daerah pada dasarnya beragam. Implikasinya, operasionalisasi Pengembangan Kawasan Pertanian bukan hanya ditentukan oleh dinamika internal pertanian tetapi juga dinamika lingkungan strategis yang heterogen, sehingga model pengembangan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Keenam, adanya urbanisasi yakni dominasi penduduk dan sistem sosial ekonomi perkotaan yang cenderung mengalami percepatan. Di satu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

sisi, urbanisasi memperbesar peluang pasar komoditas pertanian. Di sisi lain, urbanisasi cenderung diikuti oleh degradasi sumber daya pertanian, terutama lahan dan air. Implikasinya, pengembangan kawasan pertanian juga perlu mengantisipasi kecenderungan tersebut.

Ketujuh, tantangan yang dihadapi sektor pertanian terkait dengan perubahan iklim dan globalisasi ekonomi, maka petani pada kawasan pertanian pangan harus responsif terhadap inovasi yang adaptif terhadap perubahan iklim dan mempunyai daya saing yang memadai dalam menghadapi serbuan produk pertanian dari pasar internasional. Untuk menyiapkan petani dengan kompetensi yang memadai dibutuhkan suatu proses yang tentu saja memerlukan waktu yang tidak pendek.

Kedelapan, pengembangan kawasan pertanian pangan membutuhkan konsistensi kebijakan. Hal ini terkait dengan fakta bahwa implikasi dari implementasi pendekatan kawasan dalam pengembangan pertanian akan melibatkan berbagai aspek kehidupan petani, pedagang hasil pertanian, industri hulu dan industri hilir pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Biro Perencanaan Kemtan. 2015. Manajemen Pengembangan Kawasan Pertanian. Sekretariat Jenderal Pertanian, Kementerian Pertanian.

Havinal, V. 2009. *Management and Entrepreneurship*. New Age International (P) Ltd., Publishers. 182 p.

Kementerian Pertanian. 2012. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/ CT.140/8/2012. Kementerian Pertanian. Jakarta. 91 halaman.

Kementerian Pertanian. 2016. Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta. 68 halaman.

Kementerian Pertanian. 2016. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional. Kementerian Pertanian. Jakarta. 44 halaman.

Miller, R.E., and P.D. Blair. 2009. *Input–Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd Eds, Cambridge University Press. 750 p.

Raa, T. 2005. *The Economics of Input-Output Analysis*. Cambridge University Press, New York. 197 p.

Setiyanto, A. 2013. Pendekatan dan Implementasi Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi 31(2):171 -195.

Stimson, R.J., R.R. Stough, and B.H. Roberts. 2006. *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. 2nd Eds, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 452 p.

Sumaryanto. 2013. Estimasi Kapasitas Adaptasi Petani Padi terhadap Cekaman Lingkungan Usahatani Akibat Perubahan Iklim. Jurnal Agro Ekonomi 31(2): 115-141.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB V

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR DI WILAYAH PERBATASAN

"Kita harus memanfaatkan daerah perbatasan kota yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur, untuk menyangga kebutuhan pangan masyarakat di kota besar", ungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis: Detik.com, Rabu (24/5/2017)

Semua menyadari dan sepakat bahwa wilayah perbatasan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI merupakan wilayah sasaran utama pembangunan yang sangat strategis dan mendesak, namun kenyataannya hingga saat ini sebagian besar wilayah tersebut masih tetap tertinggal (FKPR, 2012)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Upaya penyediaan pangan ke depan menghadapi masalah yang semakin komplek dan rumit, apalagi di negara dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia, misalnya, tahun 2017 berpenduduk sekitar 263 juta orang, keempat terbesar di dunia. Meskipun demikian, potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia diyakini mampu menyediakan dan berkontribusi mengatasi masalah pangan dunia melalui pembangunan lumbung pangan di berbagai wilayah, termasuk di daerah perbatasan. Potensi sumber daya yang dimiliki untuk penyediaan pangan tidak hanya dalam bentuk biofisik sumber daya lahan, tetapi juga kemampuan mengembangkan inovasi dan keanekaragamanan sumber daya genetik komoditas pangan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian pada Kabinet Kerja-Kerja-Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala mencetuskan konsep dan gagasan pengembangan lumbung pangan dunia yang diyakini dapat terealisasi sebelum tahun 2045, bertepatan dengan usia seabad Indonesia merdeka.

Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP) sebagai pengejewantahan konsep "Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045" (LPD-45) merupakan gagasan, cita-cita, obsesi dan keinginan kuat yang optimistis dan rasional, berpeluang besar untuk diwujudkan, bahkan dalam taraf tertentu sudah menjadi kenyataan dan diharapkan sebagai pemicu dan cikal bakalnya. Pengembangan Lumbung Pangan Berorinetasi Ekpsor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP) bertujuan untuk: (a) memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berawal dari kawasan perbatasan; (b) mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani in-situ (wilayah perbatasan) dan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan melalui pemanfaatan dan dampak utama dan pertama dari LPBE-WP; (c) berkontribusi dalam pengadaan dan penyediaan pangan masyarakat dunia; dan (d) meningkatkan devisa melalui ekspor komoditas pangan, khususnya dari lumbung pangan yang dikembangkan.

Wilayah perbatasan sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan nasional yang dijadikan sebagai lokalita pertama pengembangan lumbung pangan dunia, perlu dilihat dari tiga sudut padang, yaitu: (a) sebagai salah satu misi pemerintah, pembangunan harus dimulai dari wilayah perbatasan dan/atau daerah tertinggal; (b) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan "beranda terdepan" Negara

PERPUSTAKAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kesatuan Republik Idonesia (NKRI); dan (c) memiliki posisi strategis, baik secara sosial maupun ekonomi dan geopolitik, terutama terhadap negara tetangga. Walaupun pencanangan pembangunan wilayah perbatasan sudah lama dan oleh berbagai pihak, namun hingga saat ini sebagian besar wilayah tersebut masih tetap ketinggalan, terutama dari aspek sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya mewujudkan LPBE tidak dapat hanya mengandalkan peningkatan produktivitas melalui inovasi pertanian, tetapi harus didukung oleh perluasan areal tanam melalui pembukaan lahan atau pengembangan kawasan pertanian baru dan khusus (ekstensifikasi) berbasis inovasi pertanian. Dua alasan utamanya adalah seperti diuraikan berikut. **Pertama,** karena kapasitas sumber daya dan kemampuan inovasi pada suatu saat akan mendekati jenuh dan *stagnant*, apalagi wilayah perbatasan dihadapkan pada masalah terbatasnya ketersediaan SDM. **Kedua,** berbagai tantangan dan ancaman terhadap sistem produksi pangan, seperti konversi dan degradasi lahan, serta perubahan iklim yang membatasi peningkatan produktivitas tanaman. Berbagai studi Badan Litbang Pertanian menunjukkan sebagian besar lahan cadangan dan tersedia terdapat di kawasan hutan dan bersifat suboptimal serta terdegrasi. Sebagian besar lahan tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pihak tertentu, baik perorangan maupun badan usaha.

Penataan lahan di wilayah perbatasan diharapkan relatif tidak serumit di wilayah lain, terutama ditinjau dari segi kepemilikan karena sebagian besar lahan milik negara. Berdasarkan kajian Kementerian Pertanian, sebagian besar dari 41 kabupaten di wilayah perbatasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pangan dengan posisi geopolitis sangat strategis. Oleh sebab itu, pilihan terhadap lahan perbatasan sebagai langkah awal pengembangan lumbung pangan dunia menjadi lebih tepat dan strategis.

Konsep dan gagasan tersebut bukan hanya sekadar wacana, tetapi merupakan pemikiran yang brilian dan berani, karena telah melalui berbagai kajian dan bahkan persiapan menuju tahap implementasi, berupa perancangan *grand design* dan penyusunan rencana aksi. Dalam waktu dekat gagasan tersebut segera diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis, seperti kajian komprehensif ke berbagai wilayah

prioritas dan penandatanganan *Join Investment Agreement in Indonesia-Malaysia Border Area* dengan negara tetangga Malaysia dalam rangka ekspor komoditas pangan, terutama jagung dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ke Sabah, negara bagian Malaysia.

Esensi dan uraian pada Bab ini memberikan gambaran obyektif yang didukung data dan informasi faktual serta langkah konkret dalam mewujudkan konsep dan gagasan pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Espor di Wilayah Perbatasan. Selain sebagai dokumen gagasan inovatif, buku ini juga menjadi acuan upaya pemantapan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Buku ini juga berperan penting dalam mendukung konsep pembangunan dan pengembangan wilayah dan kawasan, baik di perbatasan dan daerah tertinggal maupun daerah pinggiran penyangga (*hinterland*).

Paradigma Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Menyadari wilayah perbatasan suatu negara merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo telah memiliki visi baru yang melibatkan tiga pendekatan sekaligus dalam mengelola perbatasan, yakni keamanan (*security*), kesejahteraan (*prosperity*), dan lingkungan (*environment*). Visi ini secara umum menyentuh persoalan-persoalan mendasar di wilayah perbatasan dan memposisikan kawasan ini sebagai beranda negara.

Berbagai kalangan melihat bahwa visi Presiden Joko Widodoini telah menandai sebuah perubahan cara pandang (*paradigm shift*) yang signifikan, dari yang sebelumnya memandang perbatasan sebagai wilayah yang penuh ancaman, menjadi wilayah yang penuh peluang yang harus diurus dengan lebih bertanggung jawab dan berperikemanusian. Dengan visi seperti ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memiliki sebuah pemahaman yang lebih komprehensif, di mana unsur keamanan bukan lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang harus terus dikedepankan. Lebih dari itu pendekatan baru yang menekankan aspek lingkungan telah pula mereduksi sebuah pengelolaan terpusat yang kerap tidak

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

saja mengabaikan aspek-aspek pluralisme dan kekhasan etnik, tapi juga mengorbankan eksistensi lingkungan hidup.

Persoalan kesejahteraan kemudian menjadi hal lain yang dipandang relevan dalam mengelola perbatasan. Beberapa kalangan meyakini bahwa salah satu terobosan yang saat ini dilakukan Presiden Joko Widodo di wilayah perbatasan adalah membangun lumbung pangan berorientasi ekspor. Upaya ini dimaksudkan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan daya saing pangan di wilayah perbatasan. Terobosan ini akan dirasakan manfaatnya untuk meredam erosi kedaulatan yang ditandai oleh berkurangnya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan terhadap pangan yang berasal dari negara tetangga. Bahkan setelah kebutuhan pangan wilayah perbatasan terpenuhi, selebihnya dapat menjadi target ekspor dengan melakukan pengembangan pangsa pasar ke negara tetangga.

Perubahan paradigma dalam mengelola daerah perbatasan mendapat sambutan cukup hangat oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat di perbatasan itu sendiri, sebagai jawaban jitu atas berbagai problematika mendasar di kawasan tersebut. Paradigma itu telah menumbuhkan gairah baru di masyarakat perbatasan. Apalagi perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan perbatasan telah diperlihatkan pemerintah Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk membangun daerah perbatasan, termasuk di pulau-pulau kecil terluar. Upaya ini diharapkan akan memperkuat posisi wilayah perbatasan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, yang pada gilirannya memberikan efek positif bagi peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan sekaligus pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Konsep dan Landasan Strategis LPBE-WP

Membangun dari pinggiran

Wilayah perbatasan memiliki berbagai keunikan dan permasalahan, baik ekonomi maupun sosial politik dan keamanan, antara lain: (a) keterbelakangan infrastruktur dan aksesibilitas informasi; (b) strategis secara teritorial dan sensitif secara geopolitik, kedaulatan dan keutuhan NKRI; (c) pada umumnya merupakan daerah *remote* atau terpencil tetapi potensial dari segi biofisik (luas dan keragaman agroekosistem),; dan (d) membutuhkan inovasi (teknologi) dan dukungan kebijakan "khusus" dan "tematik" (FKPR, 2012-2015).

Secara geopolitik, wilayah perbatasan dinilai sangat strategis karena di satu sisi sebagai wilayah "pinggir" dan di sisi lain merupakan beranda NKRI yang berbatasan langgsung dengan negara tetangga. "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" adalah salah satu filosofi Nawa Cita yang tepat dan bermakna. Secara fisik, kekuatan dan resistensi suatu kawasan perbatasan ditentukan dan diindikasikan oleh letaknya di pinggir (tepi), dan sebaliknya menjadi kebanggaan dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, wilayah perbatasan memerlukan sentuhan pembangunan dari berbagai aspek, terutama sosial dan ekonomi, guna mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya.

Konsep dasar

Terdapat empat kata kunci yang mendasari konsepsi program LPBE-WP, yakni lumbung, pangan, ekspor, dan perbatasan. Lumbung memberikan makna sebagai penyedia dan penyimpanan atau *buffer stock* pangan utama (hasil panen sendiri) untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau komunitas di wilayah sekitar lumbung, terutama pada musim paceklik. Saat ini konsep lumbung pangan semakin berkembang sejalan dengan dinamika sosial-ekonomi, sehingga lumbung pangan lebih diartikan sebagai hamparan atau kawasan yang memproduksi pangan secara lebih intensif untuk menjamin swasembada pangan berkelanjutan.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Konsep LPBE-WP mengacu kepada gagasan Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD-45) dalam upaya penyediaan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi, dengan ciri utama berada di wilayah perbatasan dan sejak awal pengembangannya diarahkan bagi pengembangan komoditas pangan yang juga potensial sebagai komoditas ekspor. Oleh sebab itu, jenis dan daya saing komoditas pangan yang dikembangkan menjadi fokus pengembangan LPBE-WP selain aspek produktivitas. Daya saing dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan, yaitu efisiensi produksi, pemilihan jenis komoditas, dan peningkatan mutu hasil melalui pengembangan sistem pertanian intensif, bahkan modern, yang didukung hilirisasi inovasi unggul. Namun untuk komoditas pangan ekslusif yang bersifat unik dan mencirikan kearifan lokal dapat dipertahankan, tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan produktivitas.

Arah dan pendekatan

LPBE-WP, sebagai salah satu strategi utama dan langkah awal menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, merupakan konsep dan gagasan yang kemudian dikembangkan menjadi program pengembangan dan peningkatan produksi komoditas pangan strategis dan potensial ekspor di wilayah perbatasan, berkelanjutan, dan menyeluruh dengan tujuan akhir dan tujuan antara yang jelas dan konkrit. Program tersebut diimplementasikan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta investor.

Fokus utama Pengembangan LPBE-WP adalah pengembangan dan pemantapan sistem produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut (dan sekitarnya). Oleh karena itu, sasaran awal pengembangan LPBE-WP adalah mewujudkan sistem produksi pangan eksisting yang handal. Sasaran jangka menegah dan jangka panjangnya adalah mewujudkan sistem produksi pertanian (utamanya pangan) modern, inklusif berkelanjutan, adaptif perubahan iklim, dan tidak mengganggu lingkungan. Ekspor pangan di wilayah perbatasan adalah implikasi dari terbangunnya sistem produksi pangan yang tangguh, produktif, efisien, berkualitas, dan berdaya saing.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Perdagangan lintas batas (*cross-border trade*) antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia dari Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara atau Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan Timor Leste dari Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, NTT, telah berlangsung sejak puluhan tahun secara tradisional. Perdagangan tersebut tidak resmi sebagaimana layaknya perdagangan antarnegara melalui mekanisme ekspor-impor. Meskipun demikian, perdagangan tersebut berperan penting, strategis, dan prospektif walaupun keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Volume dan intensitas perdagangan lintas batas merupakan salah satu indikator potensi komoditas tertentu yang dikembangkan melalui ekspor.

Kajian Tim Teknis Kementerian Pertanian pada tahun 2017 menunjukkan terdapat sekitar 20 komoditas pangan yang biasa diperdagangkan dari lima provinsi prioritas melalui mekanisme perdagangan lintas batas, termasuk beberapa komoditas ekslusif (unik), seperti beras varietas lokal Adan, beras merah, dan beras hitam. Berdasarkan potensinya terdapat sekitar 35 komoditas pangan yang potensial dan prospektif sebagai komoditas ekspor di masa yang akan datang (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Komoditas ekspor eksisting dan potensial/prospektif dari lima provinsi prioritas Pengembangan LPBE-WP.

Kabupaten/ provinsi	Negara tujuan	Eksisting	Prospektif
Sanggau (Kalbar)	Malaysia	Beras (merah & hitam), pisang kepok, lada, lateks, TBS, CPO.	Beras, jagung, pisang kepok, lada, TBS, CPO, lateks.
Nunukan (Kaltara)	Malaysia	Beras Adan, TBS, biji kakao, pisang segar, lateks.	Beras Adan, jagung, pisang segar, biji kakao, lateks, TBS.
Malaka dan Belu (NTT)	Timor Leste	Babi potong, daging babi olahan, kacang hijau, kacang tanah, daging sapi, pakan.	Kambing, babi, sapi, itik, mete, cabai, bawang merah, mangga, kacang tanah, kacang hijau, pisang, pakan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Merauke (Papua)	Papua Nugini	Beras, telur, sayuran, tepung sagu, ubi, vanili, babi.	Beras, jagung, gula, kelapa, telur, sayuran, tepung sagu, ubi, vanili, babi.
Lingga, Natuna (Kepulauan Riau)	Singapura, Malaysia	Sayuran segar	Beras, sayuran, lada, buah lokal.

Sumber: Tim Teknis Kementan (2017)

Dalam jangka panjang, perbaikan dan penyempurnaan sistem dan keseimbangan perdagangan di wilayah perbatasan diharapkan memberikan keuntungan optimal bagi kedua belah pihak berdekatan yang berlainan negara. Keuntungan yang dapat diraih antara lain: (1) konsumen mendapatkan pangan berkualitas, aman, dan berkelanjutan; (2) merangsang investasi bagi pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan; (3) peningkatan efisiensi dan daya saing produk; (4) terbangunnya statistik ekspor dan impor yang lebih akurat; (5) peningkatan penerimaan negara dari tarif; dan (6) penerapan *good governance.*

Implementasi program lumbung pangan di wilayah perbatasan menjadi tugas bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berusaha mencukupi kebutuhan pangan di daerah masing-masing. Keberhasilan wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan berdampak terhadap pemenuhan pangan masyarakat di kota-kota besar. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah, program lumbung pangan di wilayah perbatasan seyogianya dirancang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dan diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, pendekatan kerja sama dan harmonisasi pelaksanaan program di lapangan memegang peranan penting.

Berdasarkan potensi peningkatan produksi pangan di wilayah perbatasan, pengembangan lumbung pangan juga bertujuan memanfaatkan peluang ekspor pangan, tidak hanya ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste, tetapi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

juga ke negara-negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi, dan negara-negara Afrika.

Tantangan dan peluang

Permintaan komoditas pangan ke depan berlangsung dinamis dan mengalami pergeseran, baik kuantitas maupun jenis, terkait dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, dan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Permintaan pangan tidak hanya dalam bentuk karbohidrat dan protein hewani, tetapi juga gula, sayuran, dan buah-buahan. Upaya peningkatan produksi pangan nasional juga dihadapkan pada terbatasnya sumber daya lahan, konversi lahan yang sulit dikendalikan, dan degradasi lahan akibat pengelolaan yang tidak tepat, terutama di sentra produksi pangan di Jawa.

Hasil penelitian menunjukkan produktivitas pangan dan efisiensi sistem produksi di sebagian besar wilayah perbatasan cenderung lebih rendah dibanding wilayah lain karena lambatnya penerapan inovasi pertanian dan terbatasnya SDM. Meskipun demikian, beberapa wilayah perbatasan justru memiliki sumber daya pangan yang unik dan ekslusif. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, misalnya, terdapat padi lokal Adan, kerbau lokal Krayan, dan pisang kepok lokal Sebatik, atau beras merah dan beras hitam di Sanggau yang bernilai ekonomi tinggi.

Peluang lain yang diperkirakan mampu mendorong pengembangan LPBE-WP adalah potensi sumber daya genetik (*mega-biodiversity*) komoditas pangan dan keragaman jenis tanah, agroekosistem, dan iklim yang memberikan peluang bagi pengembangan berbagai jenis komoditas pangan. Inovasi dan teknologi yang telah dihasilkan melalui penelitian selama ini berpeluang dikembangkan pada agroekosistem yang sesuai di wilayah perbatasan.

Tujuan utama Pengembangan LPBE-WP adalah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan sekitarnya dalam rangka swasembada dan ekspor produk pangan guna mendukung pengembangan ekonomi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala. Arah dan sasaran

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengembangan LPBE-WP telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, seperti berikut:

a. Stabilisasi ketahanan pangan dan ekonomi wilayah;
b. Peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur;
c. Pertumbuhan investasi pangan berorientasi eskpor;
d. Peningkatan ekspor pangan; dan
e. Stabilitas sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan di wilayah perbatasan.

Oleh sebab itu, pengembangan komoditas pangan harus sesuai dengan kebutuhan lokal dan ekspor menurut persyaratan negara tujuan. Orientasi ekspor komoditas pangan dari wilayah perbatasan seyogianya dapat direalisasikan sebagai *outcome* pengembangan lumbung pangan. Sehubungan dengan itu, ekspor pangan dari wilayah perbatasan dapat ditempuh melalui beberapa strategi dan skenario, yaitu:

a. Peningkatan volume ekspor pangan dari wilayah perbatasan yang selama ini sudah berjalan secara tradisional;
b. Peningkatan produksi dan perdagangan komoditas potensial baru atau pengembangan untuk ekspor; dan
c. Pengembangan wilayah katalisator ekspor (kabupaten atau provinsi tetangga wilayah perbatasan) yang potensial.

Walaupun tidak secara langsung mengekspor, beberapa kabupaten tetangga wilayah perbatasan dapat mendukung ekspor melalui penyediaan sarana produksi dan dukungan lainnya.

Rancangan dan Prospek Pengembangan

Rancangan (*grand design*)

Konsep dan gagasan LPBE-WP diawali dengan kajian dan pencermatan mendalam terhadap potensi berbagai sumber daya, seperti lahan, air, serta ketersediaaan dan potensi pengembangan inovasi

pertanian, termasuk teknologi rekayasa genetik dan keberagaman plasma nutfah pangan nasional. Pola pengembangan LPBE-WP dicirikan oleh kategori-kategori sebagai berikut: (a) berbasis kawasan dan pengembangan wilayah berdasarkan kebutuhan (dalam negeri) dan permintaan pasar (luar negeri); (b) pemberdayaan petani dan kemitraan dengan swasta/pengusaha; (c) penerapan pertanian modern dengan dukungan inovasi dan mekanisasi pertanian; dan (d) pengembangan kelembagaan sarana-prasarana produksi, permodalan, pengolahan dan pamasaran hasil. Kajian dan telaahan mendalam tentang potensi sumberdaya lahan dan ketersediaan SDM, peluang ekspor dan *market intelligence* di negara tetangga dan harus menjadi rujukan dalam perancangan program Pengembangan LPBE-WP.

Pengembangan LPBE-WP diarahkan pada sistem pertanian modern berbasis kawasan dan inovasi dengan pendekatan holistik. Sasaran utamanya adalah peningkatan produksi, kualitas, dan daya saing komoditas pangan dengan mengutamakan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan. Sistem pertanian modern harus bertitik tolak dari hasil telaah mendalam tentang kondisi eksisting, baik sumber daya pertanian, sistem usahatani, sarana dan infrastruktur maupun kelembagaan dan *state of the art* inovasi yang sudah diterapkan dan yang potensial dikembangkan. Permintaan pasar dan investor juga menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan rancangan LPBE-WP (Gambar 21). Pola Pengembangan LPBE-WP berbasis kawasan dan inovasi harus melalui kerja sama antara pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), swasta (investor dan eksportir), dan perbankan dengan dukungan Kementerian/Lembaga terkait.

Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengembangan infrastruktur, penyediaan sarana pertanian modern, pengaturan tata niaga, diplomasi/komunikasi bilateral dan multilateral, serta intervensi kebijakan yang bersifat khusus. Para pihak yang terlibat dalam Pengembangan LPBE-WP adalah kelompok tani, swasta, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, serta melibatkan TNI/Polri sebagai institusi yang berperan penting dalam mempercepat dan mengamankan pembangunan di wilayah perbatasan.

PERPUSTAKAAN SEKJEN DERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 21. Konsepsi rancangan umum pengembangan LPBE-WP.

Target produksi komoditas pangan didasarkan pada perkiraan neraca pangan yang mencakup kebutuhan untuk pangan, industri dan benih setempat (lumbung pangan) serta pangan untuk ekspor melalui perbaikan sistem usahatani eksisting, baik peningkatan produktivitas maupun indeks pertanaman dan perbaikan mutu produksi dan jika diperlukan melakukan diversifikasi komoditas. Volume pengembangan komoditas pangan didasarkan pada perkiraan produktivitas komoditas dengan asumsi penerapan inovasi pertanian, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan sesuai dengan *Roadmap* dan Rencana Aksi Nasional.

Sebagai langkah awal, strategi jangka pendek dan jangka menengah pada tahun 2017 adalah: (1) aktualisasi dan percepatan program Kementan tahun 2017 di wilayah perbatasan sesuai dengan *grand design* masing-masing lokasi; (2) pembenahan dan penyesuaian sistem produksi melalui *insert inovasi* yang diikuti dengan pembenahan tataniaga komoditas ekspor eksisting; (3) penyusunan *Grand Design* LPBE-WP dan rencana aksi lanjutan spesifik lokasi/wilayah, serta revisi atau penyempurnaan rencana program Kementan tahun 2018; dan (4)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

peningkatan komunikasi dalam rangka perintisan ekspor ke negara tetangga. Strategi jangka menengah dan jangka panjang (2018-2019) adalah: (1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung; (2) peningkatan produksi (produktivitas dan kualitas) komoditas pangan; (3) perluasan dan keberlanjutan produksi komoditas eksisting dan prospektif; (4) pengembangan sistem dan regulasi ekspor-impor; dan (5) pembangunan kawasan dan sistem produksi pangan modern sesuai dengan potensi wilayah dan peluang ekspor.

Potensi dan prospek pengembangan

Wilayah perbatasan Indonesia terdiri atas darat dan laut. Wilayah perbatasan darat terdapat di Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, masing-masing berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Wilayah perbatasan laut meliputi pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan 10 negara tetangga (India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini).

Wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga terdapat di 41 kabupaten/kota. Kabupaten potensial yang dapat diprioritaskan pengembangannya sebagai lumbung pangan antara lain Natuna, Bintan, dan Lingga di Kepulauan Riau; Sanggau di Kalimantan Barat; Nunukan di Kalimantan Utara; Barito Selatan, Pulang Pisau, dan Kapuas di Kalimantan Tengah; Belu dan Malaka di NTT; Keerom, Jaya Pura, dan Merauke di Papua.

Di wilayah perbatasan, lahan yang sesuai untuk tanaman pangantelah dikaji dari aspek topografi, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dari segi teknis-agronomis, sebagian lahan yang tersedia sesuai untuk pengembangan tanaman pangan. Meski demikian belum dipertimbangkan aspek sosial dan hukum (status kepemilikan dan peruntukan lahan).

Prioritas pengembangan awal ditujukan pada lahan APL, yaitu lahan-lahan yang statusnya sudah bukan kawasan hutan. Lahan HPK merupakan kawasan hutan yang dicadangkan untuk dikonversi jika diperlukan. Dalam UU No.41/2009, lahan HPK adalah lahan cadangan bagi pengembangan pertanian. Lahan HP adalah kawasan hutan produksi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang masih mungkin dikonversi jika diperlukan dan ada lahan pengganti. Di beberapa provinsi di Kalimantan dan Papua, lahan HPK tidak luas sehingga untuk pengembangan pertanian dicadangkan lahan HP.

Peningkatan produktivitas komoditas pangan mendukung LPBE-WP diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi menempati lahan pertanian eksisting, baik lahan sawah dan tegalan maupun kebun dalam upaya peningkatan produktivitas. Selain itu juga dilakukan peningkatan indeks pertanaman dan nilai tambah komoditas melalui diversifikasi usahatani.

Lahan-lahan yang belum dimanfaatkan untuk pertanian atau penggunaan lainnya, saat ini masih berupa padang rumput, semak, belukar, hutan sekunder dan hutan. Melalui tumpang-tepat (*overlay*) peta tanah dengan peta penggunaan lahan dari BPN tahun 2012 terdapat lahan potensial di 13 Kabupaten seluas 3,74 juta ha untuk tanaman padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan cabai, termasuk 120 ribu ha untuk pengembangan tanaman tebu di Merauke dan Malaka. Lahan tersebut terdiri atas 645 ribu ha untuk intensifikasi dan 3,10 juta ha untuk perluasan areal tanam, baik di sekitar lahan eksiting maupun di kawasan lain. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan tersebut terdapat sumber daya air melalui pengembangan infrastrukur irigasi yang sudah teridentifikasi sebanyak 288 unit bangunan air dengan luas layanan irigasi 18.574 ha.

Intensifikasi pada lahan pertanian eksisting dilakukan di lahan basah (lahan sawah) dan lahan kering (tegalan dan kebun campuran). Hasil analisis menunjukkan luas lahan sawah potensial untuk pengembangan komoditas pangan di wilayah perbatasan adalah 164.801 ha. Lahan-lahan sawah tersebut sebagian besar berada di lahan APL, yaitu 153.303 ha, sekitar 9.987 ha di kawasan HP, dan sisanya 1.511 ha di kawasan HPK. Luas lahan sawah terluas terdapat di Kabupaten Sambas (70.756 ha), diikuti oleh Merauke (18.525 ha) dan Sintang (17.471 ha). Secara rinci, luas lahan intensifikasi pangan, khususnya pada lahan sawah di wilayah perbatasan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 5.2. Luas lahan potensial untuk intensifikasi di 13 kabupaten wilayah perbatasan.

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Intensifikasi								Total
		Lahan sawah			Sub-Total	Tegalan dan Kebun Campuran			Sub-Total	
		APL	HPK	HP		APL	HPK	HP		
	Kalimantan Barat									
1	Bengkayang	13.579	-	969	14.548	71.225	-	23.080	94.305	108.853
2	Sambas	69.741	-	1.015	70.756	7.860	-	457	8.317	79.073
3	Sanggau	11.126	25	3.649	14.800	53.254	823	30.920	84.997	99.797
4	Sintang	16.555	16	900	17.471	51.862	11.459	13.297	76.618	94.089
5	Kapuas Hulu	9.510	23	682	10.215	69.274	7.199	21.689	98.162	108.377
	Kalimantan Utara				-				-	-
6	Malinau	1.254	336	1.868	3.458	13.675	360	7.033	21.068	24.526
7	Nunukan	2.519	-	501	3.020	18.525	-	313	18.838	21.858
	Papua				-				-	-
8	Keroom	3.786	76	143	4.005	6.781	1.482	260	8.523	12.528
9	Merauke	17.122	973	92	18.187	13.317	9.684	15.037	38.038	56.225
	Nusa Tenggara Timur				-				-	-
10	Belu	4.363	-	90	4.453	8.654	-	677	9.331	13.784
11	Malaka	3.341	33	18	3.392	1.172	583	-	1.755	5.147
	Kepulauan Riau				-				-	-
12	Bintan	-	-	60	60	2.248	5.451	1.645	9.344	9.404
13	Natuna	407	29	-	436	7.720	3.194	274	11.188	11.624
	Jumlah	***153.303***	***1.511***	***9.987***	***164.801***	***325.567***	***40.235***	***114.682***	***480.484***	***645.285***

Luas lahan yang sesuai untuk perluasan areal tanam komoditas pangan (ekstensifikasi) di wilayah perbatasan mencapai 3,10 juta ha. Lahan-lahan tersebut sebagian besar berada di kawasan HPK, sekitar 1,16 juta ha, sedangkan di lahan APL dan kawasan HP masing-masing seluas 0,94 juta dan 0,99 juta ha. Secara rinci luas lahan ekstensifikasi di wilayah perbatasan disajikan pada Tabel 6.3. Sebagian besar (56,9%) lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas pangan di wilayah perbatasan terdapat di Merauke dan umumnya di kawasan hutan (HPK dan HP). Selain itu terdapat 296.268 ha lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman pangan di Nunukan dan 245.361 ha di Kapuas Hulu, sebagian besar berada di lahan APL.

Pemanfaatan lahan tersebut untuk peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam berpotensi meningkatkan produksi padi sebesar 744.887 ton, jagung 6.394.775 ton, bawang merah 91.478 ton, cabai 105.147 ton, dan tebu 6.224.400 ton/tahun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Ekstensifikasi			
		APL	HPK	HP	Sub-Total
	Kalimantan Barat				
1	Bengkayang	97.735	16.317	20.797	134.849
2	Sambas	-	-	-	-
3	Sanggau	19.967	70	50.702	70.739
4	Sintang	69.745	3.284	4.880	77.909
5	Kapuas Hulu	168.607	3.675	73.079	245.361
	Kalimantan Utara				-
6	Malinau	84.041	15.928	44.224	144.193
7	Nunukan	195.463	13.672	87.133	296.268
	Papua				-
8	Keroom	42.425	32.014	90.920	165.359
9	Merauke	174.267	980.455	609.412	1.764.134
	Nusa Tenggara Timur				-
10	Belu	7.104	-	-	7.104
11	Malaka	36.769	36.769	25	73.563
	Kepulauan Riau				-
12	Bintan	15.425	7.322	2.612	25.359
13	Natuna	32.798	51.067	10.441	94.306
	Jumlah	***944.346***	***1.160.573***	***994.225***	***3.099.144***

Tabel 5.3. Luas lahan potensial untuk ekstensifikasi produksi pangan di wilayah perbatasan.

Peta jalan pengembangan LPBE-WP

Berdasarkan Peta Jalan (*Road Map*) LPD-45, pengembangan masing-masing komoditas pangan mempuyai target swasembada dan awal pelaksanaan ekspor, seperti beras (2016 dan 2017), jagung (2017 dan 2019), bawang merah dan cabai (2017 dan 2020), kedelai (2019 dan 2040), gula (2025 dan 2035), dan daging (2026 dan 2042). Strategi pengembangan masing-masing komoditas cukup beragam (lihat Bab III). Selain mengacu pada Peta Jalan LPD-45, pengembangan LPBE-WP juga disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing lokasi pengembangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan pendalaman potensi wilayah dan analisis peluang pengembangan komoditas ekspor, dicontohkan *grand design* yang digambarkan oleh kerangka kerja, strategi, dan pola kelembagaan pengembangan LPBE-WP Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Gambar 22-24).

Gambar 22. Peta potensi pengembangan ekspor pangan ke negara tetangga.

Gambar 23. Kerangka pengembangan LPBE-WP di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

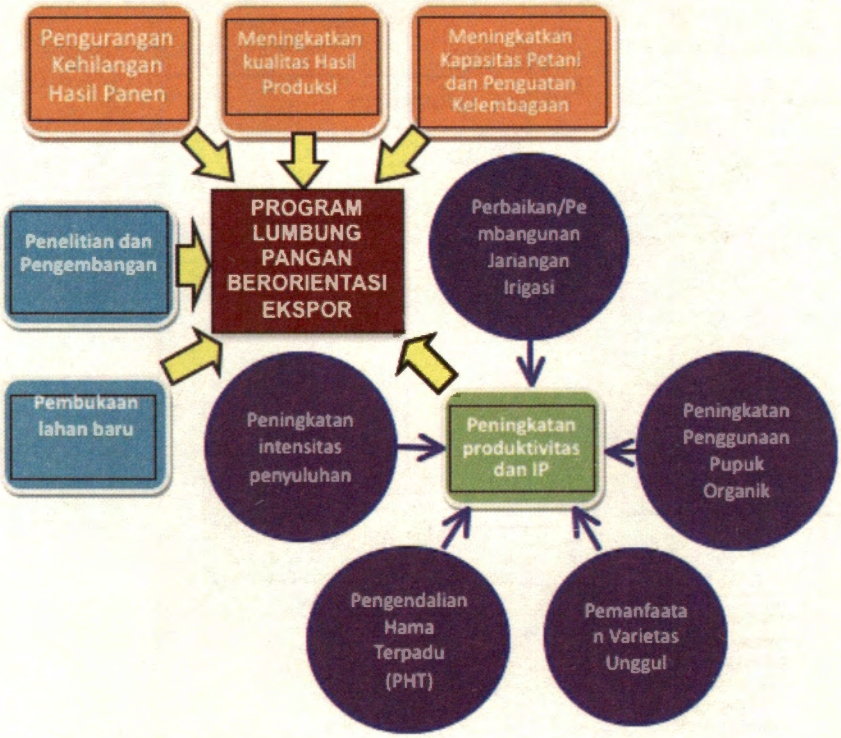

Gambar 24. Strategi pengembangan LPBE-WP di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Rencana aksi

Pengembangan LPBE-WP pada tahap awal difokuskan pada 10 Kabupetan di lima provinsi prioritas, yaitu Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga, Karimun, Natuna), Kalimantan Barat (Kabupaten Sanggau, Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu), Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan), Papua (Kabupaten Merauke), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Malaka dan Belu). Pada tahun 2017, komoditas yang dikembangkan di kabupaten prioritas adalah padi, jagung, bawang merah, cabai merah, sayuran daun, dan sapi. Pengembangan LPBE-WP didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengembangan SDM dan kelembagaan, areal percontohan dan pendampingan penerapan inovasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

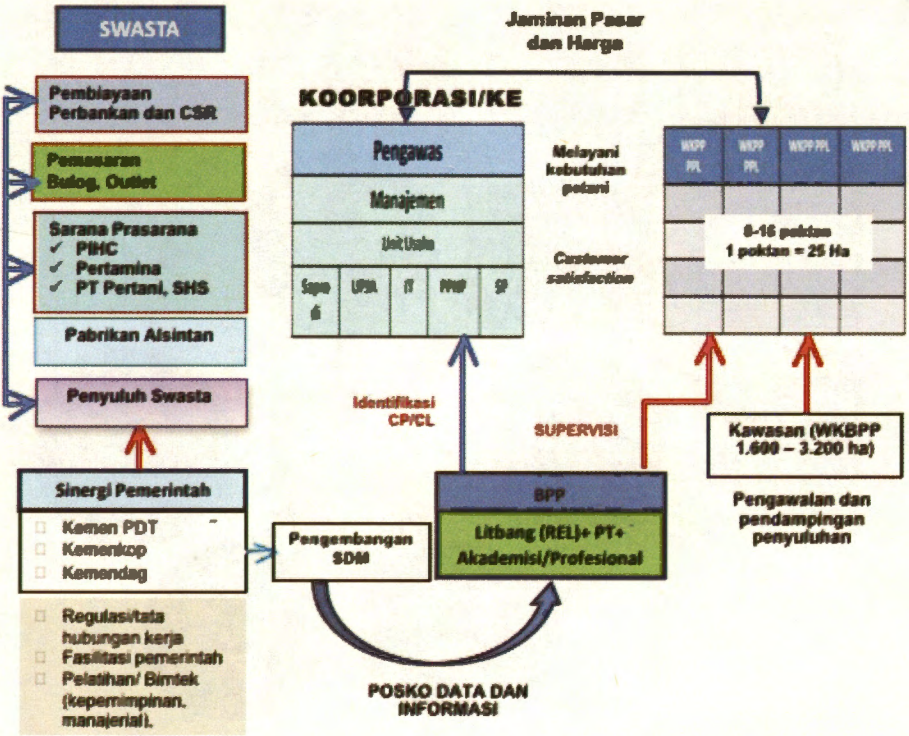

Gambar 25. Pola penguatan kelembagaan ekonomi dalam rancangan Pengembangan LPBE-WP di Kabuaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Kegiatan ekspor komoditas pangan dari wilayah perbatasan sudah mulai dirintis, antara lain: (1) pengembangan tanaman padi dan jagung di wilayah perbatasan Kalimantan Barat serta persiapan pencanangan ekspor beras oleh Presiden RI sebanyak 1.000 ton ke Malaysia melalui PLBN Entikong. Kegiatan ini dikaitkan dengan panen raya pada peringatan Hari Pangan se-Dunia tahun 2017; (2) penjaringan eksportir dan pengembangan komoditas sayuran di Lingga; dan (3) pengembangan bawang merah dan persiapan rintisan atau pencanangan ekspor ke Timor Leste. Komoditas "ekspor" (perdagangan lintas batas) eksisting seperti beras padi Adan (Krayan), kelapa sawit, pisang kepok, kakao, dan nanas dari Kalimantan Utara tetap dipertahankan dan dipantau untuk merancang sistem tata niaga ekspor yang lebih tepat dan mampu meningkatkan volume dan nilai tambah bagi petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk mendukung pengembangan lumbung pangan terdapat peluang investasi sebesar Rp 54,74 triliun, yang terdiri atas Rp 47,46 triliun (88,5%) dari swasta dan Rp 6,27 triliun (11,5%) dari pemerintah. Investasi tersebut terutama untuk sarana produksi, infrastruktur irigasi dan alsintan dengan kelayakan investasi (R/C ratio) 1,8. Peluang penyerapan tenaga kerja di bidang pangan adalah 165 juta HOK per tahun. Pendapatan usahatani (*on-farm*) berpeluang meningkat sebesar 24,64%, dari Rp.4,98 triliun menjadi Rp 6,27 triliun.

Dukungan Kebijakan

Untuk merealisasikan program Pengembagan LPBE-WP diperlukan beberapa dukungan kebijakan, antara lain: (a) penetapan kawasan khusus investasi pangan di wilayah perbatasan, minimal melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; (b) percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan dan waduk; dan (c) kepastian usaha dan kelanggengan investasi, terutama terkait dengan jaminan keamanan dan masalah sosial.

Pengembangan LPBE-WP memerlukan beberapa prasyaratan dan dukungan kebijakan, antara lain: (a) regulasi dan kebijakan terkait dengan ketersediaan sumber daya lahan potensial, baik secara fisik berupa kesesuaian lahan, maupun nonfisik berupa legalitas dan status penguasaan lahan; (b) infrastruktur, terutama jalan dan sarana irigasi yang memadai; (c) investasi, baik dari pemerintah maupun swasta; dan (d) inovasi teknologi dan kelembagaan.

Dalam konteks ekspor, beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas adalah:

a. Pengembangan infrastruktur pasar dan sistem logistik pertanian, seperti jalan dan pelabuhan, pergudangan, penyimpanan, kemitraan petani dengan pengusaha. Pasar dan sistem logistik produk pertanian merupakan prasyarat keberhasilan program Pengembangan LPBE-WP.
b. Pengembangan kerangka regulasi dan insentif ekspor yang terdiri atas kemudahan perizinan usaha, insentif, dan investasi, serta pemberdayaan usaha pertanian rakyat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

c. Penguatan diplomasi perdagangan dengan negara tetangga tujuan ekspor, baik oleh pemerintah maupun pelaku ekspor yang didukung oleh advokasi dan pendekatan bilateral dan multilateral dalam membangun kesepakatan dari berbagai aspek dalam konteks pergadangan antarnegara atau eskpor-impor.

Dalam jangka panjang, Pengembangan LPBE-WP memerlukan legalitas sebagai kawasan pengembangan khusus dan legalitas penggunaan lahan berupa hak pinjam pakai dalam bentuk Perpres. Sementara pengembangan daerah penyangga LPBE-WP memerlukan legalitas dalam bentuk Permentan. Percepatan pengembangan infrastruktur dan kelembagaan penunjang serta pengaturan tata niaga dan percepatan pengembangan prasarana dan kelembagaan ekspor di wilayah perbatasan memerlukan legialitas dalam bentuk MoU dengan kementerian terkait.

Penutup

Perspektif wilayah perbatasan sebagai moda dan lokalita prioritas dalam mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD-45) sangat menjanjikan, baik dari sisi potensi sumber daya dan posisi geografis, maupun geopolitik dan geliat serta euforia (positif) yang mencuat sejak beberapa bulan terakhir dalam hal kedaulatan pangan berkelanjutan. Wilayah perbatasan yang tadinya merupakan "momok" dan permasalahan tersendiri dalam sistem pembangunan nasional yang tak kunjung berkembang, justru Pengembangan LPBE-WP menjadi wilayah harapan dan strategis di masa yang akan datang.

Sesuai dengan masalah dan tantanganya, arah dan strategi umum Pengembangan LPBE-WP akan dilakukan melalui penahapan yang terencana, terstruktur yang mendahulukan perwujudan ketahanan pangan wilayah perbatasan sebelum pengembangan ekspor. Kunci keberhasilan program tersebut adalah dukungan kebijakan khusus dalam berbagai aspek terkait pengembangan kawasan khusus dan sistem pertanian modern. Koordinasi dan sinergi program dari para

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pihak juga menjadi faktor penentu berikutnya dalam menentukan keberhasilan pengembangan LPBE-WP, baik antarkementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah maupun pengusaha (BUMN dan swasta).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

Bahan Bacaan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2015. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. BNPP, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap ST 2013. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014a. Hasil Pencacahan Survey Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2016. Kalimantan Barat dalam Angka. Kerja Sama Bappeda dengan BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. 2011. Kajian Kelayakan Potensi Sumber daya Lahan untuk Pengembangan Pertanian di Provinsi Kepuluan Riau. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian-Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BPKPK. 2008. Renstra Tahun 2008-2013. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat.

Burhansyah, R., Darsono, L.M. Gufroni, Dwi P., dan Melia P. 2011. Laporan Akhir Pengkajian Analisis Kebijakan Pertanian di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. BPTP Kalimantan Barat.

Esada Putri Consultant. 2011. Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama.

Firman Noor. 2016. Negara dan Kedaulatan Politik: Evaluasi Atas Pemeliharaanm Rasa Kebangsaan oleh Negara. Ed. Mita Noveria dalam Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) dan Badan Litbang Pertanian. 2012-2015. Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Perbatasan (Laporan dan Rumusan Hasil Kunjungan Kerja Tematik P3WP). FKPR Kementan.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Hardiyanti, F.S. 2003. Perencanaan Wilayah dengan Pendekatan Spasial dan Analisis Ambang Batas (Studi Kasus Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas). Prosiding Lokakarya Nasional. Menuju Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Berbasis Ekosistem untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar-Daerah. UGM.

Husnadi, 2006. Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Daratan Antar-Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat). Tesis. Proram Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro.

Ikhwanuddin. 2011. Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2512/, retrived on 3.5.2012

Kementerian Pertanian. 2017. Peta Jalan (*Road Map)* Pengembangan Komoditas Pertanian Strategis Menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

Pasandaran, E. 2014. Reformasi Kebijakan dalam Perspektif Sejarah Politik Pertanian Indonesia. *Dalam* Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian, Editor: Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Saliem dan A. Hendriadi. Balitbangtan. Jakarta.

Sekretariat Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah. 2011. Profil Kabupaten Sambas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas.

Suradisastra, K. 2012. Proposal Kegiatan Kunjungan Kerja Tematik dan Penyusunan Model Percepatan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi di Wilayah Perbatasan Kab. Sambas Kalimantan Barat. Puslitbang Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian

Tjondronegoro, S.M.P. dan G. Wiradi. 2008. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, edisi revisi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Wahana Visi Indonesia. 2011. Pemetaan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar. Jaringan Kerja Sama Wahanan Visi Indonesia, Pembangunan Parsipatif dan Pemerintah Kab. Sambas.

Winoto, J. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. Orasi 1 September 2007 Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dies Natalis ke-44 Institut Pertanian Bogor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

BAB VI

PENGELOLAAN IMPOR DAN PROMOSI EKSPOR PANGAN

Mengapa Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, lantang berbicara impor-ekspor pangan? Apakah urusan ini termasuk tugas dan kewenangan Menteri Pertanian? Pertanyaan itu wajar menurut logika sederhana, karena impor-ekspor pangan merupakan tugas dan kewenangan Menteri Perdagangan. Tugas utama Menteri Pertanian ialah mengurus produksi pertanian, termasuk bahan pangan, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lalu apa esensi Dr. Andi Amran Sulaiman berbicara impor-ekspor pangan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertanian?

Produk pangan adalah komoditas pertanian yang diperdagangkan (*tradeable goods*), sehingga impor-ekspornya memengaruhi pasokan dan harga dalam negeri, termasuk produksi, pendapatan petani, dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu Menteri Pertanian berkewajiban memperjuangkan kebijakan perdagangan yang merupakan bagian dari pilar pembangunan pangan dan pertanian.

Pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan lebih lugas ialah apakah kewenangan Menteri Pertanian berkaitan dengan kebijakan impor-ekspor berdasarkan aturan perundangan? Pada prinsipnya, Menteri Pertanian memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan impor-ekspor pangan sebagai bagian dari instrumen pendukung Program Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Dunia berbasis memuliakan petani.

Salah satu isu yang mengemuka dan menjadi pertanyaan masyarakat akhir-akhir ini adalah apa benar Indonesia tidak lagi mengimpor beras atau bahkan dikabarkan mengekspor beras? Bagaimana status impor-ekspor jagung? Apa tanggapan masyarakat atas kinerja impor-ekspor dalam dua tahun terakhir?

Kewenangan Menteri Pertanian Menurut Aturan Perundangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur impor pangan sebagai berikut:

1. Dalam hal penyediaan belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dari impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri (Pasal 14 ayat 2).
2. Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan konsumsi (Pasal 14).
3. Impor pangan hanya dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri (Pasal 36 ayat 1).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4. Impor pangan pokok hanya dilakukan apabila produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi (Pasal 36 ayat 2).
5. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usahatani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil (Pasal 39).

Pesan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan seperti diuraikan di atas, termuat pula dalam beberapa undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dari ketentuan undang-undang itu jelas bahwa impor pangan hanya dilakukan untuk menutupi defisit produksi dalam negeri. Impor pangan pokok harus dikendalikan pemerintah. Undang-undang juga mengamanatkan kebijakan dan peraturan impor pangan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Hal ini jelas menunjukkan impor pangan adalah ancaman bagi keberlanjutan usahatani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Pengendalian impor merupakan bagian dari kebijakan perlindungan petani. Selain itu, impor juga bagian dari penanda swasembada.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan ekspor pangan diatur oleh pemerintah dengan ketentuan berikut:
1. Ekspor pangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi dalam negeri dan kepentingan nasional.
2. Ekspor pangan pokok hanya dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah mengendalikan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga terjangkau. Sesuai

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEMENTERIAN PERTANIAN

dengan amanat undang-undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan narang penting, produk dan/atau olahan hasil pertanian yang termasuk barang kebutuhan pokok ialah beras, jagung, kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, cabai, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, dan minyak goreng, sedangkan benih padi, jagung, dan kedelai ditetapkan sebagai barang penting. Ditetapkan pula bahwa pemerintah bertugas mengelola ekspor dan impor untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan amanat undang-undang. Pengelolaan ekspor-impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan dengan cara:

1. Memberikan persetujuan ekspor jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan tersedia alokasi cadangan stok paling sedikit untuk 6 bulan ke depan.

2. Memberikan persetujuan impor jika terjadi kekurangan pasokan di dalam negeri yang mengakibatkan gejolak harga.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2015 tentang ketentuan ekspor dan impor beras mengatur ketentuan umum ekspor beras sebagai berikut:

1. Beras yang dapat diekspor hanya jenis tertentu (Pasal 2, Lampiran 1).
2. Penetapan jumlah beras yang dapat diekspor ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar-Kementerian/Lembaga non-Kementerian (Pasal 3).
3. Ekspor beras hanya dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri melebihi kebutuhan (Pasal 4 Ayat 1).
4. Ekspor beras dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perdagangan dengan memperhatikan rekomendasi Menteri Pertanian untuk beras ketan, beras organik dengan tingkat kepecahan kurang dari 25%, beras nonorganik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, dan berdasarkan kesepakatan pada rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian untuk beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2015 tentang ketentuan ekspor dan impor beras membedakan impor beras menurut keperluannya, yaitu untuk stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan, keperluan tertentu terkait dengan kesehatan/*dietary*, konsumsi khusus atau segmen tertentu, kebutuhan bahan baku/penolong yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, dan impor beras yang bersumber dari hibah.

Pasal 9 dan 10 Permendag Nomor 103/2015 selanjutnya mengatur impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Beras yang diimpor hanya dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%.
2. Hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Umum Bulog setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perdagangan.
3. Impor beras berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian dengan mempertimbangkan persediaan beras di Bulog, perbedaan harga rata-rata beras terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan/atau perkiraan surplus produksi beras nasional.
4. Impor beras hanya dilakukan di luar masa 1 bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 bulan setelah panen raya sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pertanian.
5. Ketentuan pada butir 4 dapat dikecualikan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.
6. Menteri Perdagangan menerbitkan persetujuan impor berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.

Impor beras untuk keperluan industri diatur berdasarkan Pasal 12-13 Permendag Nomor 103/2015 sebagai berikut:

1. Beras yang diimpor hanya dengan tingkat kepecahan 100%, beras ketan dengan tingkat kepecahan 100%, dan beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Impor beras hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.
3. API-P dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan beras yang diimpor kepada pihak lain (Pasal 32).

Impor beras untuk keperluan kesehatan/*dietary* dan konsumsi khusus/segmen tertentu diatur dengan ketentuan, antara lain Pasal 19-20 Permendag Nomor 103/2015:

1. Beras yang diimpor hanya beras ketan utuh, Thai Hom Mali dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, beras kukus, beras Japonica dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%, dan beras Basmati dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%.
2. Impor beras hanya dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.
3. Permohonan persetujuan impor beras harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Menteri Pertanian yang memuat nama dan alamat importir, jenis beras, volume beras per pelabuhan tujuan, pos tarif/HS, tingkat kepecahan beras, merk, bobot kemasan, negara asal, dan masa berlaku rekomendasi.

Dari tinjauan regulasi di atas jelas Menteri Pertanian memiliki kewenangan dalam proses pembuatan kebijakan impor dan ekspor pangan. Kewenangan itu termasuk hak suara dalam rapat koordinasi tingkat menteri dalam penetapan kebijakan impor-ekspor pangan, apakah pemerintah akan mengeluarkan izin impor-ekspor, berapa banyak, kapan, dan oleh siapa. Pada rapat koordinasi, Menteri Pertanian dapat menyampaikan pandangannya yang tentunya dapat memengaruhi keputusan akhir pemerintah.

Kewenangan kedua Menteri Pertanian ialah dalam pemberian rekomendasi yang menjadi prasyarat pengeluaran izin impor-ekspor oleh Menteri Perdagangan. Jika Menteri Pertanian tidak mengeluarkan rekomendasi maka Menteri Perdagangan tidak mengeluarkan izin impor-ekspor. Berarti Menteri Pertanian memiliki kewenangan yang kuat dalam penetapan kebijakan impor-ekspor pangan. Dengan kata lain, Menteri Pertanian berwenang menghentikan atau membolehkan impor-ekspor pangan.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kewenangan ketiga Menteri Pertanian ialah dalam penetapan kebijakan karantina. Sebagaimana diketahi, produk pangan dan pertanian yang masuk ke dalam negeri dan luar negari harus memenuhi peraturan karantina. Regulasi karantina secara teoretis dimaksudkan untuk menjamin keamanan pangan, hayati, dan lingkungan hidup (peraturan sanitari dan fitosanitari). Namun dalam praktiknya, regulasi karantina dapat pula digunakan sebagai instrumen kebijakan perdagangan. Peraturan sanitari dan fitosanitari dapat dinuat sedemikian rupa untuk menghambat pemasukan produk pangan dan pertanian dalam rangka melindungi usaha pertanian dan petani dalam negeri.

Dengan demikian jelas Menteri Pertanian memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan impor-ekspor pangan, sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan itu cukup kuat, dapat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya impor-ekspor pangan dan pertanian. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana Menteri Pertanian menggunakan kewenangannya dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis memuliakan petani?

Penghentian Impor

Mengapa menghentikan impor? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri untuk pemenuhan konsumsi pangan. Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usahatani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Sejalan dengan itu, pada saat kampanye calon Presiden-Wakil Presiden di Cianjur pada 2 Juli 2014, Jokowi mengatakan:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

> "***Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya.Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras. Ini karena semua ada mafianya, ada yang ingin dapat uang, dapat komisi, sehingga kita impor-impor, lalu bocor-bocor. Bayangkan, kita sudah berproduksi susah payah, pas panen impor datang, harga jatuh, kan bikin malas produksi. Kalau semua pangan impor, petani stop produksi, mati semua kita, maka petani harus dimuliakan*** (Antaranews.com., 2 Juli 2014).

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bagaimana pandangan Presiden Jokowi tentang impor pangan. Bagi Presiden Jokowi, penghentian impor adalah bagian dari kebijakan yang memuliakan petani. Hal ini adalah kebijakan yang sudah semestinya dilaksanakan oleh Menteri Pertanian. Jokowi juga berpandangan impor pangan adalah kegiatan melawan hukum, merugikan petani, dan tidak menggairahkan produksi dalam negeri, sehingga harus dihentikan. Penghentian impor pangan adalah tugas Menteri Pertanian. Terkaitan dengan pelarangan impor pangan, Presiden Jokowi bahkan membuat kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian, sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu: "***Sudah hitung-hitungan, 3 tahun nggak swasembada, saya ganti menterinya, (pengganti) dari fakultas pertanian bisa antre***" (Detik.com., 9 Desember 2014). Oleh karena itu dapat dimaklumi mengapa Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, demikian gigih berupaya menghentikan impor pangan.

Tekad Menteri Pertanian untuk menghentikan impor pangan tentu bukan semata-mata didorong oleh keinginan mematuhi perintah Presiden Jokowi, atau "Asal Bapak Senang" untuk mempertahankan jabatan. Sebagaimana tersirat dari pernyataan Presiden Jokowi, menghentikan impor pangan memang penting dan urgen. Presiden bahkan menyebutkan bahwa menghentikan impor pangan adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan memuliakan petani. Mengapa demikian? Bukankah impor pangan juga dapat memberikan keuntungan?

PERPUSTAKAAN SEKJEN DEPARTEMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Menghentikan impor pada dasarnya menginsulasi pasar domestik dari pengaruh pasar dunia. Pangan dari pasar luar negeri tidak boleh masuk ke dalam negeri. Dengan demikian, dinamika pasar pangan international tidak dapat memengaruhi pasar pangan dalam negeri. Hal ini jelas menguntungkan petani ditinjau dari dua hal.

Pertama, perlindungan harga bagi petani. Dengan menghentikan impor maka harga pangan yang relatif lebih lebih murah dicegah tidak berpengaruh terhadap harga pangan di dalam negeri, sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi, efektivitas dan efisiensi kebijakan Harga Pembelian Pemertintah (HPP) juga dapat lebih tinggi. Penghentian impor juga meningkatkan harga minimum dan harga rata-rata, yang berarti stabilitas harga pangan di tingkat petani terjamin.

Kedua, penyediaan jaminan pasar dengan harga yang stabil dan lebih tinggi bagi petani. Dengan menghentikan impor maka pasar pangan domestik diperuntukan sepenuhnya bagi petani negeri. Petani negeri dapat terus meningkatkan produksi hingga swasembada pangan terwujud tanpa mengkhawatirkan pemasaran. Penyediaan pasar dalam negeri dengan harga yang stabil dan lebih tinggi sepenuhnya bagi petani negeri tentu merupakan bagian dari upaya memuliaan petani.

Selain dampaknya terhadap kesejahteraan petani, penghentian impor juga berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan nasional. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri penghentian impor meningkatkan harga yang diterima petani, namun di sisi lain berarti meningkatkan harga yang dibayar konsumen. Penghentian impor pangan dapat mengurangi kemampuan konsumen mengakses pangan yang dibutuhkan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kemiskinan dan inflasi. Di satu sisi, impor pangan diperlukan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan dalam negeri. Di sisi lain, penghentian impor pangan pada kondisi defisit yang cukup besar dapat menimbulkan kelangkaan dan lonjakan harga pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, impor pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga harga wajar di tingkat petani dan terjangkau oleh konsumen.

Manfaat lain dari penghentian impor ialah sebagai penanda pencapaian swasembada pangan. Bila impor tidak ada, atau dihentikan, berarti swasembada pangan telah terwujud. Data impor cukup untuk

PERPUSTAKAAN SEKJENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

membuktikan apakah swasembada pangan telah tercapai. Jika impor didasarkan pada izin pemerintah, berarti impor nihil, yang juga berarti swasembada pangan telah terwujud secara administratif. Swasembada administratif tidak berarti impor tidak ada sama sekali karena dua hal. *Pertama*, istilah swasembada hanya berlaku untuk bahan pangan yang dihasilkan di dalam negeri. Beras beras untuk kesehatan (*dietary*), misalnya varietas Thai Hom Mali dan Indian Basmati tidak termasuk kategori beras yang dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga tetap perlu diimpor. *Kedua*, tidak semua impor memerlukan izin. Impor melalui perdagangan lintas batas tidak memerlukan izin khusus dari Menteri Perdagangan. Penghentian pemberian izin impor beras adalah salah satu deklarasi perwujudan swasembada administratif.

Dengan demikian dapat dimaklumi pengelolaan impor dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Impor bukan semata-mata refleksi dari kegiatan ekonomi perdagangan bebas. Dalam perspektif kedaulatan pangan, importasi pangan justru harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, berani menghentikan impor beras dan jagung sebagai instrumen dan sekaligus membuktikan swasembada pangan telah tercapai.

Drama Penghentian Impor Beras

Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, mengklaim Indonesia telah mecapai swasembada beras pada tahun 2016. "*Ini prestasi besar, setelah 32 tahun kita bisa meraih kembali prestasi yang pernah dicapai tahun 1984. Tahun ini tidak ada rekomendasi dan izin impor, termasuk beras premium*" (Rakyat Merdeka Online, 28 Desember 2016).

Perlu dicatat klaim Menteri Pertanian di atas adalah "*swasembada administratif*", bukan swasembada absolut. Hal ini jelas dari ucapan "*Tahun ini tidak ada rekomendasi dan izin impor, termasuk beras premium*". Landasan swasembada yang dimaksud ialah pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras sepanjang tahun 2016. Sebagaimana diketahui, impor

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

beras hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pertanian. Dengan demikian, secara administratif, impor tidak ada jika selama tahun berjalan (2016) Menteri Pertanian tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras.

Pencapaian swasembada beras pada tahun 2016 mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk Presiden Jokowi, "***Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton***" (Presidenri.go.id., 31 Oktober 2016).

Asisten Direktur Jenderal FAO untuk Asia dan Pasifik, Kundhavi Kadiresan, setelah bertemu Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, untuk bertukar pandangan guna meningkatkan kerja sama FAO dan Pemerintah Indonesia mengatakan, "***FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 2016. Capaian ini merupakan investasi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur. Langkah selanjutnya adalah membangun sektor pertanian yang berdaya saing dan mendorong diversifikasi pertanian untuk meningkatkan kehidupan petani dan memperbaiki gizi rakyat Indonesia***" (Antaranews.com., 13 Maret 2017).

Penghentian impor beras harus didasarkan pada perhitungan pasokan di dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat harga yang wajar. Dengan demikian, penghentian impor beras merupakan keberhasilan dalam percepatan produksi padi dalam negeri. Data menunjukkan, produksi padi meningkat luar biasa dalam dua tahun terakhir, dari 70,8 juta ton pada tahun 2014 menjadi 79,1 juta ton pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata 5,86% per tahun. Sudah menjadi patokan umum peningkatan produksi beras sebesar 5% per tahun cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor tidak diperlukan. Peningkatan produksi padi yang cukup tinggi memungkinkan stok beras Bulog meningkat dari hanya 545 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 1,761 juta ton pada tahun 2016. Stok Bulog mencapai puncaknya sebesar 2,107 juta ton pada bulan Juni 2017.

Patut diduga, atas dasar perhitungan stok beras Bulog yang cukup besar Menteri Pertanian berani bersikukuh untuk menghentikan impor beras. Sebab, bila pasokan dalam negeri tidak mencukupi maka

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

penghentian impor beras menyebabkan lonjakan harga yang biresiko menimbulkan krisis pangan dan berujung pada krisis politik dan ekonomi. Penghentian impor beras juga harus didasarkan pada situasi pasar yang sebenarnya.

Di sisi lain, kalau pun mencukupi, impor beras tetap berlangsung bila tidak dihentikan. Alasannya sederhana, beras impor lebih murah sehingga impor menguntungkan bagi para pelakunya. Lagi pula, impor beras dilaksanakan berdasarkan izin pemerintah. Dengan demikian, impor beras dihentikan secara politik-administratif oleh Pemerintah. Izin impor adalah kewenangan Menteri Perdagangan yang mengacu pada rekomendasi Menteri Pertanian. Ruang kewenangan kebijakan itu digunakan Dr. Andi Amran Sulaiman untuk menghentikan impor beras dengan cara tidak mengeluarkan rekomendasi impor.

Penghentian impor beras tentu tidak mudah, diperlukan perjuangan untuk mengatasi rintangan yang berat dengan godaan yang merangsang. Perjuangan pertama ialah meyakinkan jajaran pengambil kebijakan, terutama Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri di jajaran bidang perekonomian. Dalam hal ini, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman berani berbeda pendapat dan bersikukuh mempertahankan pendapatnya bahwa produksi padi Indonesia melonjak luar biasa pada tahun 2015 dan 2016. Artinya pasokan beras dalam negeri mencukupi sehingga impor beras tidak diperlukan. Kesimpulan Menteri Pertanian bertentangan dengan pandangan sejumlah ilmuwan, pengamat, dan menteri yang termasuk dalam perumusan kebijakan impor beras. Optimisme Menteri Pertanian untuk menghentikan impor beras tidak sepenuhnya direspons oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sikap tegas menghentikan impor beras secara tidak langsung merefleksikan Dr. Andi Amran Sulaiman tidak hanya berani berbeda pendapat dengan rekan Menteri sejawat atau bahkan dengan Wakil Presiden, tetapi juga berani menghadapi "mafia pangan" yang selama ini menjadi sosok yang sulit tergoyahkan walau tidak terlihat secara kasat mata. Mafia impor pangan juga disebut dalam visi dan misi Calon Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla pada masa kampanye.

Otoritas yang memperjuangkan penghentian impor beras tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga harus memiliki integritas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tinggi. Importasi beras memberikan keuntungan besar yang dapat digunakan sebagai modal untuk menggoda para pembuat kebijakan. Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman mengaku pernah ditawari uang dalam jumlah besar. "Saya berungkali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 ton dengan harga Rp 4.000/kg, sementara harga di dalam negeri Rp 8.000-12.000/kg. Kalau impor 1,5 juta ton beras untungnya Rp 6 triliun. Kami katakan maaf tidak impor", pengakuan Sang Menteri Pertanian (Antaranews, 31 Maret 2015).

Terlepas dari semua itu, barangkali yang membuat Dr. Andi Amran Sulaiman bersikukuh menghentikan impor beras ialah kepercayaan dan dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari pernyataan Dr. Andi Amran Sulaiman pada masa krisis beras awal tahun 2015, "***Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi***" (Antaranews, 31 Maret 2015).

"Drama" penghentian impor beras pada tahun 2015 dan 2016 cerminan integritas dan keteguhan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman. Keteguhan hati Dr. Andi Amran Sulaiman bermula setelah dipercaya memangku jabatan Menteri Pertanian pada bulan Oktober 2014. Beberapa bulan kemudian, Pemerintahan Jokowi-JK diuji oleh krisis lonjakan harga beras pada bulan Januari-Februari 2015. Harga beras di Jakarta pada Februari 2015 melonjak sekitar 26% dibanding bulan yang sama pada tahun 2014. Lonjakan harga beras terutama disebabkan oleh penurunan produksi padi sebesar 0,94% pada tahun 2014. Menghadapi persoalan ini, otoritas kebijakan impor pangan tingkat Menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalal harus membuat keputusan cepat mengenai impor beras yang didukung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perbedaan pendapat mengenai impor beras jelas terlihat dari pemberitaan media massa. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, terkesan mengambil sikap hati-hati atau menunggu. Di tengah krisis beras itu, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, menyatakan dengan tegas, "Pemerintah tidak akan impor beras" (Antaranews, 31 Maret 2015).

Pemerintah akhirnya memutuskan mengimpor beras 1,5 juta ton dari Vietnam dan Thailand. Keputusan itu diumumkan oleh Wakil Presiden Jusuf kalla pada bulan September 2015 dan realisasinya pada

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

bulan Oktober 2015-Maret 2016. Berita realisasi impor ini pertama kali diketahui publik melalui Surat Kabar Vietnam, *Saigon Times*, pada 8 Oktober 2015 (Republika.co.id., 13 Oktober 2015).

Terlepas dari berita itu, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, mengklaim Indonesia tidak mengimpor beras selama satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK, periode 20 Oktober 2014-20 Oktober2015. Impor beras pada akhir tahun 2015 benar-benar di luar kemampuan Sang Menteri Pertanian.

Pada awal Januari 2016, isu impor beras kembali muncul. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Pemerintah merencanakan impor beras dari India dan Pakistan. "***Bukan soal impor dari mana, ini soal jaga stabilitas harga beras. Kalau tidak stabil atau naik, maka kemiskinan naik. Swasembada tetap jalan, mudah-mudahan bisa kita capai. Tapi dalam hal yang sama tidak boleh kekurangan persediaan***", ujar Jusuf Kalla pada saat itu. Terkait dengan itu, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, mengatakan, "***Saat ini Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah Pakistan untuk pengadaan beras dari negara itu. Selain Pakistan, pemerintah juga mendorong kesepakatan dengan pemerintah India untuk menjadi pemasok beras ke Indonesia***" (Bisnis.com., 8 Januari 2016).

Perdebatan di antara anggota kabinet memuncak menjelang lebaran bulan Juni 2016. Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mendorong untuk segera memutuskan impor beras, sementara Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman menolak dengan tegas. Bahkan pada sidang kabinet, Menko Perekonomian sempat bersitegang dengan Menteri Pertanian. Kekukuhannya menolak impor beras dan bawang merah, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman diminta oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, untuk membuat surat jaminan tertulis dalam hal pengendalian lonjakan harga kebutuhan pokok pada masa Idul Fitri tahun 2016. Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, mengaku siap dipecat jika pasokan bahan pokok kurang. Sang Menteri bahkan menjelaskan pihaknya bisa mengatasi "mafia beras" yang telah mengakar di Indonesia (Tempo.co., 17 Mei 2016).

Kerja keras, idealisme, keteguhan, keberanian, dan integritas Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, berbuah manis. Indonesia kembali berhasil mewujudkan swasembada beras, yang antara lain

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

ditandai oleh tidak adanya rekomendasi Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan izin impor beras sepanjang tahun 2016. Secara empiris impor beras masih ada namun merupakan realisasi fisik kontrak impor pada akhir tahun 2015. Pencapaian swasembada beras secara administratif pada tahun 2016 adalah prestasi luar biasa, paling tidak dalam kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir.

Pada tahun 2007 tidak ada lagi isu importasi beras. Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 di Jakarta, 5 Januari 2017, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian, "***Saya sangat bersyukur dalam dua tahun ini kaya beras. Soal beras itu kalau sudah masuk September biasanya ada rapat terbatas, kita mau impor berapa. Ini September kemarin kok tidak ada permintaan ratas. Saya juga tenang-tenang saja, senang saya***" (Media Indonesia.com., 5 Januari 2017).

Tidak mengimpor, Menteri Pertanian juga bertekad memulai promosi ekspor beras. Itu berarti target Presiden Jokowi untuk mewujudkan swasembada beras paling lambat pada tahun 2017 dapat dipastikan mampu diwujudkan oleh Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman.

Kisah Penghentian Impor Jagung

Prestasi lainnya dari Menteri Pertanian terkait program swasembada pangan adalah peningkatan produksi jagung nasional. Hal ini tercermin dari penurunan impor jagung untuk pakan ternak dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 1,1 juta ton pada tahun 2016, atau menurun 67%. Selain meningkatan produksi, penurunan impor jagung juga tidak terlepas dari keberanian Menteri Pertanian untuk tidak merekomendasikan impor jagung. Dalam hal ini, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, kembali menunjukkan ketegasan dan intergritasnya dalam memanfaatkan kewenangan dalam menghentikan impor jagung. Keberanian Sang Menteri menghentikan impor tentu sejalan dengan upaya pencapaian swasembada jagung sebagaimana yang ditargetkan Presiden Jokowi paling lambat pada tahun 2018.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan impor jagung pada periode Oktober 2015-Agustus 2016 berbeda dengan kebijakan impor beras yang sudah sejak awal dibatasi, baik volume, waktu, pelabuhan masuk, maupun pelaku impor. Sementara impor jagung bebas dengan persyaratan hanya Surat Pemberitahuan Pemasukan (SPP) dari Menteri Pertanian.Jagung impor terutama digunakan untuk bahan baku pakan ternak, sehingga importirnya terutama industri pakan yang terkoneksi dalam organisasi Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT). Industri pakan lebih memilih jagung impor daripada jagung produksi dalam negeri karena harganya lebih murah. Hal ini memicu rendahnya harga jagung di tingkat petani sehingga mereka tidak bergairah meningkatkan produksi.

Kisah penghentian impor jagung pada bulan Agustus 2015 bermula dari dialog Presiden Jokowi dengan petani jagung di Desa Suku, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada 6 Maret 2015. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menegaskan, "***Yang penting harus tetap semangat, dan tidak akan ada impor pangan. Kita harus swasembada. Harga gabah mau kita naikkan yang akan dibeli oleh Bulog. Jagung coba kita rapatkan dengan Menteri Pertanian. nanti kita berikan informasi agar (produksi) juga terus naik***" (Humas Sekretariat Kabinet, 6 Maret 2015).

Gambar 26. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian menghadiri panen jagung di Ponorogo, Jawa Timur.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada saat menghadiri panen raya jagung di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada t11 April 2015, Presiden Jokowi bertanya kepada petani "***Anda tahu mengapa saya berada di sini, karena saya mendapat laporan harga jagung turun. Pasti itu kan yang mau ditanyakan***? (Humas Sekretariat Kabinet, 11 April 2015).

"***Dibeli berapa sama PT?***", tanya Presiden. Pertanyaan ini dijawab petani dengan nada mengeluh karena jagung mereka dihargai terlampau rendah, "***Kalau basah Rp 1.700/kg, kalau kering Rp 2.000/kg***". Kemudian Presiden Jokowi bertanya kepada Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman dan Bulog mengenai kemampuan membeli jagung hasil panen petani. Setelah bertanya ke sejumlah pihak, termasuk kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan Wakil Bupati Dompu, Presiden Jokowi kembali melanjutkan pembicaraan. "***Ini keputusan di lapangan. Jadi, harganya yang basah kurang lebih Rp 2.000/kg, yang kering Rp 2.700/kg***" ujar Pak Presiden yang disambut tepuk tangan oleh para hadirin.`"***Tapi ingat, HPP ini bukan berarti harus segitu, bisa jadi lebih tinggi Rp 50 atau bisa lebih rendah Rp 50 per kilonya. Karena sudah diputuskan, nanti nagihnya jangan ke saya lagi, tapi ke Pak Menteri Pertanian ya***," kata Jokowi (Kompas.com, 13 April 2015).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, menegaskan segera melaksanakan arahan Presiden setelah tiba di Jakarta. "***Mulai saat ini para petani jagung sudah tidak perlu khawatir lagi, karena solusinya sudah diputuskan hanya dalam waktu lima menit oleh Pak Presiden langsung di lapangan. Tidak perlu menunggu lama-lama, ini yang tercepat sepanjang sejarah***" ujar Menteri Pertanian meyakinkan petani (Kompas.com, 13 April 2015). Instruksi Presiden itu ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2016 yang menetapkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani untuk berbagai kualitas adalah Rp 3.150/kg untuk yang berkadar air kurang dari 15%, Rp 3.000/kg untuk berkadar air 15-20%, Rp 2.850/kg untuk ber kadar air 20-25%, Rp 2.750/kg untuk berkadar air 25-30%, dan Rp 2.500/kg untuk berkadar air lebih dari 30-35%. Harga acuan pembelian jagung ini berlaku sejak 1 April 2016.

Artinya, dalam tempo satu tahun sejak Presiden Jokowi mengistruksikan kenaikan harga jagung petani pada April 2015 hingga

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pelaksanaannya pada April 2016, harga jagung petani naik dari Rp 2.000-2.700/kg menjadi Rp 2.500-3.150/kg. Hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan bagi Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam menjalankan instruksi Presiden terkait dengan meningkatkan harga jual jagung petani.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menghentikan penerbitan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) jagung. Keputusan itu tentu mengejutkan para importir jagung pakan ternak, karena sebelumnya mereka terbiasa mengapalkan jagung impor lebih dahulu, sementara SPP jagung diurus setelah barang sampai di pelabuhan. Akibatnya, ratusan ribu ton jagung impor yang sedang dalam perjalanan maupun yang sudah sampai di pelabuhan menjadi terkatung katung karena belum memiliki dokumen SPP, sehingga dilarang masuk ke pelabuhan wilahan NKRI.

Para importir berusaha berunding, namun Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, tetap menolak menerbitkan SPP. Jagung yang tertahan di pelabuhan berada di bawah pengawasan Bulog. Solusi yang diberikan Menteri Pertanian bagi industri pakan adalah menjalin kemitraan dengan petani dalam pengadaan jagung untuk pakan.

Menteri Pertanian pun memberikan klarifikasi terkait penghentian SPP jagung, "***Bukan dihentikan, melainkan dikelola sesuai dengan kebutuhan. Impor itu tidak berdasarkan keingingan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kalau kebutuhan jagung kurang, impor akan dibuka lagi. Namun, selama harga jagung dalam negeri rendah, ada baiknya industri pakan membeli jagung petani sendiri dulu***". Sang Menteri pun tegas menyatakan keberpihakannya kepada petani, "***Manusia lebih penting daripada ternak***" (Kompas.com., 30 Juli 2015).

Tindakan itu dipicu oleh kegagalan inisiasi Kementerian Pertanian dalam membangun kemitraan antara Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) dengan 100 Bupati agar perusahaan pakan ternak anggota GPMT bersedia membeli jagung petani. Menteri Pertanian menegaskan, "***Petani tidak pernah mendapatkan harga jual jagung yang wajar. Ketika panen, harga jagung selalu rendah. Kalau harga jagung terus rendah, minat petani menanam jagung berkurang, sehingga produksi juga berkurang. Untuk***

PERPUSTAKAAN SEKJEN DITJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

menumbuhkan semangat petani menanam jagung harus ada insentif harga yang memadai bagi jagung petani. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menginisiasi kesepakatan antara GPMT dan 100 Bupati agar perusahaan pakan ternak mau membeli jagung petani. Namun kenyataannya, hal itu belum juga terealisasi" (Kompas.com., 30 Juli 2015).

Pada 25 November 2015 Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 yang mengatur pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan, termasuk jagung, berlaku sejak 1 Desember 2015. Intinya adalah:

1. Pemasukan bahan pakan asal tumbuhan dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri Perdagangan.
2. Menteri Perdagangan memberikan izin pemasukan setelah memperoleh Rekomendasi Pemasukan (RP-I) dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan RP-I setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Tim Analisiss Kebutuhan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.
4. BUMN dapat melakukan pemasukan untuk stabilisasi pasokan bahan pakan asal tanaman dalam negeri berdasarkan penugasan Menteri BUMN dengan usulan Menteri Pertanian.
5. Penerbitan RP-I dilakukan empat periode dalam setahun yaitu: (1) 1 Januari-30 Maret; (2) 1 April-30 Juni; (3) 1 Juli-30 September; dan (4) 1 Oktober-31 Desember.
6. Pelaku usaha yang telah memperoleh RP-I wajib merealisasikan pemasukan dan melaporkan realisasi paling lambat 5 hari kerja setelah realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara on line.

Berdasarkan Permentan Nomor 57/2015, importasi jagung untuk bahan pakan tidak lagi dapat dilakukan secara bebas. BUMN (Perum Bulog) dapat melakukan impor jagung dalam rangka stabilisasi pasokan pakan di dalam negeri berdasarkan usulan Menteri Pertanian. Dalam hal ini berarti Perum Bulog dapat diberikan hak tunggal untuk importasi jagung untuk pakan. Kewenangan pengaturan penerbitan RP-I dan pengusulan

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

importasi oleh BUMN merupakan *policy leverage* yang kuat bagi Menteri Pertanian dalam pengaturan impor jagung.

Pengaturan impor jagung kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2016 yang pada intinya menetapkan:

1. Impor jagung hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri.
2. Jumlah dan peruntukan jagung yang dapat diimpor ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian.
3. Impor jagung untuk pemenuhan bahan pakan hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog setelah mendapat penugasan dari pemerintah.
4. Impor jagung hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan.
5. Persetujuan impor jagung untuk pemenuhan kebutuhan pakan oleh Perum Bulog hanya diperbolehkan setelah mendapat rekomendasi impor dari Menteri Pertanian.

Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2016 yang menetapkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani yang berlaku sejak 1 April 2016, yang kemudian diubah dengan Permendag Nomor 27 Tahun 2017 yang menetapkan harga acuan pembelian jagung di petani dan penjualan di tingkat industri pakan berlaku sejak 16 Mei 2017. Harga jagung di tingkat petani ditetapkan untuk berbagai kualitas: Rp 3.150/kg untuk biji jagung berkadar air kurang dari 15%, Rp 3.050/kg untuk berkadar air 15-20%, Rp 2.850/kg untuk berkadar air 20-25%, Rp.2.750/kg untuk berkadar air 25-30%, dan Rp 2.500/kg untuk berkadar air 30-35%.

Harga jagung di tingkat industri pakan adalah Rp 4.000/kg. Jika harga jagung di tingkat petani berada di bawah harga acuan dan harga di tingkat industri di atas harga acuan maka Menteri Perdaganagn dapat menugaskan BUMN untuk melakukan operasi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian lengkap sudah kerangka regulasi impor yang diintegrasikan dengan kebijakan dukungan harga bagi petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Hal yang menarik adalah pembentukan kerangka regulasi itu terjadi secara bertahap dan parsial, diawali oleh inisiatif Menteri Pertanian menghentikan penerbitan SPP.

Penghentian pemasukan jagung impor berhasil mengangkat harga jagung di tingkat petani hingga mencapai Rp 2.700/kg sebagimana dijanjikan Presiden Jokowi. Peningkatan harga ini memberikan rangsangan bagi petani untuk bekerja keras meningkatkan produksi jagung dan pendapatan keluarganya. Dalam kerangka kerja kebijakan, penghentian impor menjadi penopang harga acuan jagung yang ditetapkan pemerintah. Harga acuan jagung dapat diefektifkan tanpa membebani anggaran pemerintah. Volume impor jagung juga berhasil diturunkan secara drastis dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 1,1 ton pada tahun 2016, selanjutnya nihil pada pertengahan tahun 2017.

Promosi Ekspor Pangan

Mengapa promosi ekspor?

Dari ketentuan undang-undang yang ada jelas ekspor pangan pokok (beras, jagung, kedelai) harus dikelola pemerintah sebagai bagian dari instrumen kedaulatan pangan. Ekspor dikelola sedemikian rupa agar pasokan pangan dalam negeri cukup dan stabil dengan harga terjangkau dan stabil pula. Ekspor pangan dilakukan bila pasokan dalam negeri surplus (*vent of surplus*). Beberapa hal penting yang menyangkut dengan ekspor adalah sebagai berikut:

Pertama, ekspor dipandang sebagai instrumen pengelolaan pasokan pangan dalam negeri. Ekspor dilarang bilamana swasembada pangan belum terwujud agar tidak menimbulkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga di dalam negeri. Eksportasi merupakan keharusan bila swasembada pangan telah terwujud. Ekspor merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan pasar dalam negeri pascaswasembada pangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kedua, ekspor adalah instrumen pendukung harga di tingkat petani dan stabilisasi harga di tingkat konsumen. Bila swasembada telah terwujud, eksportasi harus dilakukan untuk mencegah penurunan harga. Ekspor dilakukan jika harga di pasar internasional lebih tinggi atau sama dengan harga di dalam negeri. Dalam hal ini, eksportasi bermanfaat untuk meningkatkan harga yang diterima petani. Di sisi lain, eksportasi perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kelangkaan pasokan pangan di tingkat konsumen. Ekspor adalah residual atau surplus pasokan dalam negari. Dalam hal ini, eksportasi bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Ketiga, eksportasi adalah jalan untuk ekspansi ke pasar dunia yang memiliki daya serap yang tinggi. Eksportasi juga merupakan penciri lumbung pangan dunia. Pasar dunia adalah ajang persaingan antarbangsa dengan azas: "hanya negara yang paling kuat yang dapat bertahan dan yang lemah tergusur keluar arena". Dalam hal ini, pandangan yang mengatakan "***Ekspor beras jadi bukti kita bisa menaklukkan negara lain***" menjadi keniscayaan (8). Salah satu strategi memasuki pasar dunia ialah secara bertahap melalui proses belajar. Dengan demikian, promosi ekspor pangan adalah bagian dari langkah awal yang menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Keempat, ekspor dapat menguntungkan petani dan pengusaha melalui peningkatan harga dan volume penjualan. Bagi Indonesia, ekspor adalah sumber devisa yang bermanfaat untuk menjaga neraca pembayaran luar negeri dan nilai kurs rupiah. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mendorong ekspor. Produk yang berdaya saing tinggi cenderung perlu diekspor. Eksportasi dapat mengurangi pasokan dan meningkatkan harga di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan mengelola ekspor pangan demi menjaga ketahanan pangan rakyat.

Perlu pula dicatat bahwa ekspor pangan adalah bukti validitas klaim terwujudnya swasembada pangan. Apabila Indonesia sudah menjadi negara ekportir neto maka sudah pasti swasembada terwujud. Selain itu, menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir adalah bagian dari janji politik Presiden Jokowi. Pada masa kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden di Cianjur pada 2 Juli 2014, Joko Widodo mengatakan, "***Indonesia bisa menjadi negara pengekspor beras***" (Antaranews.com., 2 Juli 2014).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kontrak kinerja Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dengan Presiden Joko Widodo ialah mewujudkan swasembada, bukan ekspor pangan. Kemampuan mengekpor pangan dapat dipandang sebagai keberhasilan melampaui target kinerja yang perlu diapresiasi. Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi secara berseloroh melontarkan pertanyaan kepada Menteri Pertanian, "***Kalau begitu sekarang pertanyaannya kapan kita ekspor beras?***" (Detik.com., 3 Oktober 2015).

Pertanyaan Presiden yang secara tersirat memberikan arahan promosi ekspor pangan, memberikan semangat tersendiri bagi Menteri Pertanian untuk berupaya melakukan promosi ekspor pangan, kususnya beras dan jagung. "***Swasembada dan surplus, bahkan ekspor beras harus dilakukan Indonesia, dan untuk itu, semua daerah harus mengejar target swasembada. Dengan ekspor beras, Indonesia akan makin dikenal dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia***", obsesi Sang Menteri (Antaranews.com., 9 Februari 2017).

Strategi Dr. Andi Amran Sulaiman

Mungkinkah Indonesia dalam waktu yang tidak lama dapat menjadi eksportir beras dan jagung? Bukankah Indonesia sudah cukup lama berstatus sebagai negara importir kedua komoditas pangan penting ini dalam jumlah yang cukup besar. Lagi pula, harga beras dan jagung di pasar domestik masih lebih tinggi daripada pasar internasional, sehingga tidak mungkin melakukan ekspor. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman.

Arah kebijakan pemerintah ialah mendahulukan penguatan fondasi penyediaan pangan di dalam negeri. Presiden Jokowi menyatakan sekalipun produksi pangan melimpah, swasembada tercapai atau bahkan surplus, pemerintah tidak lantas melakukan ekspor besar-besaran. Untuk beras, misalnya, Presiden Jokowi menyatakan "***Pemerintah tidak akan melakukan ekspor beras untuk saat ini. Saya kira kita lebih baik memperbesar stok dulu baru kita berbicara masalah ekspor***" (Kompas.com., 1 September 2016). Arahan kebijakan mengamanatkan pemanfaatan produksi pangan dalam negeri diprioritaskan untuk penguatan fondasi penyediaan

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pasokan pangan domestik, bukan ekspor. Dalam hal ini, surplus produksi digunakan untuk memperkuat stok pangan.

Menteri Pertanian memiliki pandangan sendiri tentang peran dan kebijakan strategis ekspor pangan. Selain strategis untuk ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, ekspor pangan juga penting artinya membangun kepercayaab diri bangsa dan merupakan cara untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Hal ini jelas terlihat dari beberapa pernyataan Menteri Pertanian. "***Ekspor beras jadi bukti kita bisa menaklukkan negara lain***" (Kompas.com., 8 Maret 2017). ***Dengan mengekspor beras, Indonesia akan makin dikenal dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia***" (Antaranews.com., 9 Februari 2017). Dengan demikian program promosi ekspor Kementerian Pertanian dalam tiga tahun terakhir tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang untung-rugi ekonomi jangka pendek semata.

Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, memahami betul Indonesia sudah sejak lama mengekspor beras premium, beras organik, dan beras khusus dalam jumlah yang tidak begitu besar. Indonesia juga rutin mengekspor jagung untuk pakan. Oleh karena itu, program ekspor beras diprioritaskan pada beras premium, organik, dan/atau beras khusus. Menurut Menteri Pertanian,"***Beras organik ini masa depan ekspor Indonesia untuk padi. Nilai jual beras organik per kilogram bisa mencapai Rp 90.000 atau enam euro di Eropa. Artinya 15-20 kali lipat harga beras biasa***" (Kompas.com., 1 September 2016).

Hal ini adalah keputusan jitu Sang Menteri karena beras organik dan atau beras khusus memiliki segmen pasar yang khusus pula, sehingga ekspor beras tidak bersaing dengan beras konsumsi biasa di dalam negeri. Selain itu, beras organik dan/atau varietas khusus menciptakan nilai premium tersendiri yang dapat dijadikan sebagai *leverage* daya saing dengan harga tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara jagung ekspor adalah jenis pakan ternak yang selama ini sudah cukup banyak diekspor. Tantangan selanjutnya ialah bagaimana meningkatkan efisiensi dan daya saing komoditas tersebut di pasar global.

Ekspor beras dan jagung yang berasal dari sentra-sentra utama produksi di Jawa sementara ini tidak mungkin dilakukan tanpa subsidi karena alasan daya saing ongkos dan harga. Strategi jitu Menteri Pertanian

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

untuk meningkatkan daya saing ekspor pangan ialah membangun lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.

Dari segi argumentasi teori ekonomi, pendekatan ini sungguh tepat karena mengeksploitasi keunggulan kedekatan lokasi dan sosial, sehingga biaya trasportasi lebih rendah dan selera konsumen lebih sesuai. Untuk itu, produk yang dikembangkan disesuaikan dengan wilayah produksi dan sasaran pasar ekspor. Pengembangan beras organik dipusatkan di Kepulauan Riau dengan sasaran pasar ekspor ke Singapura dan Malaysia. Pengembangan beras varietas khusus untuk pasar ekspor ke Sarawak, Malaysia, difokuskan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sementara pengembangan beras premium biasa untuk pasar ekspor Papua Nugini dipusatkan di Merauke.

Pengembangan jagung berorientasi ekspor juga disesuaikan dengan sasaran pasar. Produksi jagung dari kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur diarahkan untuk diekspor ke Sarawak Malaysia, dari kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur diarahkan ke Timor Leste, sedangkan dari Sulawesi diarahkan ke Filipina. Sentra produksi utama di Jawa dan Nusa Tenggara Barat dapat pula mengisi pasar ekspor ke Malaysia dan Filipina.

Selain rasional dari segi pemikiran ekonomi, strategi Menteri Pertanian juga sejalan dengan kerangka ekonomi politik *Nawa Cita* Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kala. Program Pembangunan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Kawasan Perbatasan adalah bagian dari pelaksanaan janji *Nawa Cita* "Membangun Indonesia dari Pinggiran". Sementara itu, promosi ekspor beras organik sebagai bagian dari Program Pembangunan 1.000 Desa Pertanian Organik. Dengan demikian program promosi ekspor pangan tidak semata-mata implementasi dari program kedaulatan pangan, tetapi juga bagian dari pemenuhan janji politik Presiden Jokowi.

Selain upaya khusus dari segi produksi, upaya penting lainnya yang gencar dipromosikan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, ialah diplomasi. Untuk merealisasikan ekspor pangan ke Malaysia, Dr. Andi Amran Sulaiman melakukan pendekatan dengan Menteri Pertanian Malaysia. Jajaran Kementerian Pertanian juga berperan aktif membicarakan tindak lanjut ekspor pangan dengan pihak Malaysia.

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pembicaraan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dengan Duta Besar Filipina pada 14 Juni 2017 bertujuan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan memanfaatkan kapal *fery roll on-roll of* (Ro-Ro) Bitung-Davao-Santos-General Santos yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Presiden Filipina Rodrigo Roa Duarte di Davao pada 30 April 2017. Kapal *fery* dengan kapasitas besar dan ongkos murah ini potensial meningkatkan ekspor jagung, khususnya dari Sulawesi yang pada tahun lalu sudah mencapai 250 ribu ton (CNN.Indonesia.com., 2 September 2016). Hal ini menunjukkan kejelian dan kecepatan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam mengambil peluang yang pada intinya ialah implementasi dari berbagai program, termasuk di luar Kementerian Pertanian.

Kinerja awal

Ekspor pangan bukan prioritas utama yang harus diwujudkan dalam jumlah besar untuk beberapa tahun ini. Seperti dikatakan Menteri Pertanian, program promosi ekspor terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan membuktikan Indonesia mampu "menaklukkan dunia" (Detik.com., 3 Oktober 2015). Program ini memang baru terlaksana dalam beberapa bulan sehingga realisasi ekspor masih sedikit ditinjau dari volumenya.

Dalam kurun waktu relatif pendek tercatat sudah tiga kali acara pelepasan ekspor beras. Pertama, beras organik ke Belgia sebanyak 40 ton pada 2 September 2016. Kedua, beras premium ke Sri Lanka sebanyak 5.000 ton pada 14 Februari 2017 (Media Indonesia.com., 14 Juni 2017); dan 3) beras premium sebanyak satu truk ke Papua Nugini pada 13 Februari 2017. Ekspor beras organik ke Belgia merupakan inisiatif swasta, *business to business*, namun kelompok tani produsennya memperoleh fasilitasi dari pemerintah. Ekspor ke Sri Lanka merupakan bantuan pemerintah untuk mengatasi krisis pangan akibat kekeringan. Ekspor ke Papua Nugini difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan promosi ekspor memang dicirikan oleh dukungan nyata fasilitasi pemerintah.

Walaupun masih belum menjadi negara importir neto, Indonesia sudah mengekspor jagung secara rutin. Daerah asal ekspor terbesar

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

jagung ialah Gorontalo dengan negara tujuan utama Filipina. Menurut Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, ekspor jagung Indonesia meningkat 1.800% dari 37 ribu ton pada tahun 2014 menjadi 252 ribu ton pada tahun 2015, 109 ribu ton di antaranya berasal dari Gorontalo (Netralnews.com., 17 Maret 2016). Sejak tahun 2016, Thailand menjadi salah satu tujuan negara utama ekspor jagung. Selain Gorontalo, daerah pengekspor jagung lainnya ialah Nusa Tenggara Barat dengan tujuan utama juga Filipina.

Ekspor jagung dipengaruhi oleh harga di pasar dunia. Volume ekspor jagung tinggi bila harga di pasar dunia cukup tinggi dan menurun bahkan hingga terhenti jika harga di pasar dunia rendah. Oleh karena itu, Menteri Pertanian mengarahkan pasar ekspor sebagai mekanisme penyangga pasar jagung di dalam negeri. Prioritas kebijakan ialah stabilisasi pasokan jagung sebagai pakan di dalam negeri pada tingkat harga yang menguntungkan petani dan wajar bagi industri pakan dan peternak.

Pada saat harga di dalam negeri rendah, ekspor jagung perlu didorong. Sebagai contoh, ketika harga jagung anjlok pada masa panen raya, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, melepas ekspor jagung dari Sumbawa ke Filipina pada 31 Juli 2015. Pada saat ekspor tidak dapat dilakukan karena harga di pasar dunia rendah, pemasaran surplus produksi jagung dari Gorontalo diarahkan ke pasar dalam negeri. Pada 21 April 2017, Menteri Pertanian melepas pengiriman jagung dari Gorontalo ke Jawa Timur dan Banten. Harga jagung di pasar dunia yang dinamis, dapat dimaklumi jika ekspor jagung juga dinamis.

Tanggapan Khalayak

Tidak dapat dipungkiri, salah satu prestasi fenomenal pemeritahan Jokowi-JK dalam dua setengah tahun ialah keberhasilan menghentikan impor beras medium yang umum dikonsumsi masyarakat dan menurunkan drastis impor jagung sebagai pakan ternak. Keberhasilan menghentikan impor beras dikonfirmasi dan diapresiasi oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, "***Salah satu prestasi pemerintah tahun 2016 lalu***

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

adalah tidak adanya importasi beras. Keberhasilan kita adalah keberhasilan dari Kementerian Pertanian yang mampu meningkatkan produksi petani sehingga pada tahun 2016 tidak ada kekurangan, maka dengan demikian kita tidak impor beras. Tidak ada rekomendasi impor beras jenis medium atau beras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat" (Kompas.com., 4 Januari 2017).

Banyak pihak mengakui dan mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertanian menurunkan impor dan mendorong ekspor pangan, khususnya beras dan jagung, tidak hanya dari kalangan pemerintah tetapi juga dari pihak legislatif, ilmuwan, dan pengamat.

1. Ketua MPR, Zulkifli Hasan: "***Ini harus diakui, saya berterima kasih atas kinerja baik Pak Amran ini yang telah memberikan bukti nyata produksi kita naik, dan ini kenyataan kita tahun ini tidak melakukan impor beras setelah 32 tahun***" (Rakyat Merdeka Online, 29 Desember 2016).
2. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, "***Dua tahun masa pemerintahan Jokowi membawa pertanian ke arah positif. Salah satunya adalah Indonesia mampu tidak mengimpor beras***" (Nusakini.com., 21 Oktober 2016).
3. Anggota Komisi IV, Dr. Herman Khaeron, "***Pada tahun 2016 Indonesia mampu memenuhi pasokan pangan, utamanya beras, cabai, bawang merah dari produksi lokal, tanpa impor. Bahkan impor jagung sudah mampu ditekan hingga 60%. Saya ini paling keras kritik sektor pertanian, tapi kali ini harus diakui positif***" (Nusakini.com., 21 Oktober 2016, Nusakini.com., 9 November 2016).
4. Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah, "***Pemerintah berhasil menekan mafia pangan dengan menjaga pasokan bahan pokok, melakukan pengawasan, dan menegakkan hukum dengan baik***" (JPNN.com., 10 Juni 2017).
5. Mantan Menteri, ekonom senior, dan pengamat, Dr. Rizal Ramli, "***Hanya Mentan Amran yang berani menyatakan perang dan sikat praktik kartel***" (JPNN.com., 10 Juni 2017).

Klaim capaian swasembada beras juga mendapatkan sanggahan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama pengamat yang meng-*counter*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

swasembada beras tidak benar. Mereka mengacu kepada data BPS yang menunjukkan impor beras pada tahun 2016 masih cukup besar. Kritikan tersebut ada benarnya kalau swasembada berarti semua kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi dalam negeri, atau tidak ada impor. Namun konsep swasembada demikian tidak sesuai dengan aturan perundangan maupun realitas. Aturan perundangan menyatakan bahwa impor pangan dibolehkan bila tidak dihasilkan di dalam negeri. Secara realitas, impor pangan selalu ada, walau tidak banyak, antara lain melalui perdagangan lintas batas.

Kritikan lain dilontarkan oleh mantan Menteri Perdagangan, Dr. Marie Pangestu, yang menganggap pemerintah saat ini salah kaprah memandang swasembada pangan. "***Saat ini Pemerintah Indonesia memandang swasembada pangan sebatas menghilangkan impor bahan pangan. Pemerintah hanya memfokuskan agenda swasembada pangan dengan target meniadakan impor. Swasembada pangan itu bukan hanya tidak impor, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen pangan di Indonesia***" (Kompas.com., 14 Mei 2016). Pandangan ini jelas mencampuradukkan beberapa konsep. Dr. Marie Pangestu secara implisit mengakui swasembada pangan ditandai oleh tiadanya impor, tetapi tidak menjelaskan apakah swasembada pangan (beras) telah terwujud atau belum.

Kritikan keras, khususnya terkait dengan kebijakan penghentian impor jagung, juga dilontarkan oleh ekonom dan pengamat kondang Faisal Basri, "***Penghentian impor jangan sampai membuat harga pangan menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Harga jagung di pasar internasional turun mencapai Rp 2.279/kg pada bulan Desember 2017. Sebaliknya harga di pasar domestik merangkak naik hingga sekitar Rp 6.000/kg. Hal ini membuat konsumen, terutama peternak menjerit. Kalau benar-benar stok jagung cukup, tunjukkan di gudang mana?***" (Media Indonesia.com., 12 Juli 2016).

Pandangan Faisal Basri senada dengan Marie Pangestu. Poin penting dari kedua ilmuwan ini ialah mengingatkan pemerintah agar tidak semata-mata berorientasi mewujudkan swasembada pangan atau menghentikan impor, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen pangan di Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Peringatan Marie Pangestu dan Faisal Basri itu benar adanya dan Pemerintahan Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan masalah itu. Sejak semula Presiden Jokowi menyatakan kebijakan swasembada pangan ibertujuan untuk memuliakan petani. Sebagian mungkin mengatakan Presiden Jokowi maupun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tidak sering menegaskan pentingnya meningkatkan kesejahteraan konsumen. Perhatian pemerintah terhadap konsumen pangan juga sudah jelas sebagaimana hal perhatian terhadap petani produsen. Presiden Jokowi berulang-ulang mengarahkan kabinetnya untuk terus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Tidak hanya menetapkan arahan kebijakan, Presiden Jokowi juga berulang-ulang melakukan blusukan ke pasar-pasar pangan. Menteri Pertanian bahkan lebih sibuk mengupayakan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.

Berbeda dengan Marie Pangestu dan Faisal Basri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tampaknya sepandangan dengan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, yang tercermin dari pernyataannya, "***Kalau hanya jaga harga itu mudah, kalau kurang kami impor. Tapi apakah tidak ada keberanian kita untuk tidak impor. Saya bersama Mentan sepakat tidak impor. Karena impor itu dampak sesaat, tapi selebihnya sulit atur arus impor dan petani Indonesia yang terkena dampak***" (Detik.com., 21 Maret 2017).

Pengaturan impor bukan sekadar untuk mengendalikan stok dan harga di dalam negeri. Penghentian impor bertujuan untuk menyejahterakan petani dan mendorong produksi pangan. Tampaknya, Menteri Perdagangan, Enggartiarto Lukita, menjadi mitra kerja yang sepaham dengan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam mengelola impor dan ekspor pangan, sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia 2045.

Penutup

Menteri Pertanian memiliki kewenangan yang cukup kuat dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan impor-ekspor berdasarkan

PERPUSTAKAAN SEKJEN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

aturan perundangan yang berlaku. Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, memahami betul arti dan manfaat impor-ekspor dalam pembangunan pertanian sehingga kebijakan impor-ekspor pangan merupakan bagian dari instrumen strategis untuk memuliakan petani dalam rangka mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia, sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Memiliki keberanian dan integritas yang tinggi, Dr. Andi Amran Sulaiman tegas untuk tidak mengeluarkan rekomendasi impor beras sejak diangkat menjadi Menteri Pertanian. Secara administratif Indonesia telah berhasil mewujudkan swasembada beras pada tahun 2016, dua tahun sejak Dr. Andi Amran Sulaiman dilantik sebagai Menteri Pertanian di Era Kebinet Kerja.

Secara *de facto*, data menunjukkan Indonesia memang masih mengimpor beras, namun beras jenis khusus, seperti beras premium Basmati dari India dan Hom Mali dari Thailand, beras untuk kesehatan *(dietary)* yang belum dihasilkan di dalam negeri, dan beras pecah 100% untuk keperluan industri. Impor jagung juga turun drastis dan diharapkan Indonesia sudah berswasembada pada tahun 2018. Tidak ada impor adalah bukti untuk mengonfirmasi swasembada pangan, prasyarat kedaulatan pangan. Berbagai tokoh mengakui keberhasilan itu, termasuk Presiden Jokowi, Ketua MPR, pejabat FAO, dan sejumlah pengamat. Tantangan ke depan ialah bagaimana mempertahankan keberlanjutan swasembada pangan tersebut.

Indonesia sudah cukup lama mengekspor beras premium, utamanya beras organik. Prestasi Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, ialah keberhasilan memfasilitasi ekspor beras biasa. Hal ini pertama kali dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 32 tahun terakhir, bersamaan dengan meningkatkan ekspor beras organik. Sang Menteri optimistik Indonesia yang selama ini termasuk salah satu negara importir jagung terbesar di dunia akan mencapai swasembada paling lambat pada tahun 2018. Bagi Dr. Andi Amran Sulaiman, ekspor pangan adalah bagian dari langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Keberhasilan yang telah dicapai ditentukan oleh konsistensi dalam melaksanakan peta jalan pembangunan pertanian yang sudah disusun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Antaranews.com., 2 Juli 2014. Joko Widodo: kita harus berani setop impor pangan. http://www.antaranews.com/berita/442137/Joko Widodo--kita-harus-berani-setop-impor-pangan,. Diunduh pada [Diunduh 26 Mei 2017].

Antaranews, 31 Maret 2015. Mentan: Pemerintah tidak akan impor beras. http://www.antaranews.com/berita/488306/mentan--pemerintah-tidak-akan-impor-beras. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

Antaranews.com., 9 Februari 2017. Indonesia akan segera ekspor beras. http://www.antaranews.com/berita/611584/indonesia-akan-segera-ekspor-beras. [Diunduh pada 11 Juni 2017].

Antaranews.com., 13 Maret 2017. FAO apresiasi upaya Indonesia wujudkan swasembada beras. http://www.antaranews.com/berita/617821/fao-apresiasi-upaya-indonesia-wujudkan-swasembada-beras. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Bisnis.com., 8 Januari 2016. JK: Impor beras agar harga stabil, kemiskinan tak naik. http://industri.bisnis.com/read/20160108/12/508162/jk-impor-beras-agar-harga-stabil-kemiskinan-tak-naik. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

CNN.Indonesia.com., 2 September 2016. Indonesia Ekspor 40 Ton Beras Organik ke Belgia.http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160902174748-92-155758/ indonesia-ekspor-40-ton-beras-organik-ke-belgia/. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Detik.com., 9 Desember 2014. 3 Tahun tak Capai Swasembada Pangan, Joko Widodo: Saya Ganti Menterinya. https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2772295/3-tahun-tak-capai-swasembada-pangan-Joko Widodo-saya-ganti-menterinya. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Detik.com., 3 Oktober 2015. Jokowi ke Mentan: Kapan Kita Bisa Ekspor Beras? https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3034965/jokowi-ke-mentan-kapan-kita-bisa-ekspor-beras?f9911023. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Detik.com., 21 Maret 2017. Cerita Mendag dapat tiga tugas dari Jokowi. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3452648/cerita-mendag-dapat-tiga-tugas-dari-jokowi. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Humas Sekretariat Kabinet, 6 Maret 2015. Jajaki Naikkan Harga Jagung, Presiden Jokowi Minta Petani Semangat Hadapi Kompetisi. http://setkab.go.id/jajaki-naikkan-harga-jagung-presiden-jokowi-minta-petani-semangat-hadapi-kompetisi/; [Diunduh pada 21 Juni 2017].

Humas Sekretariat Kabinet, 11 April 2015. Panen Raya di Dompu, Presiden Jokowi Naikkan Harga Beli Jagung Oleh Pemerintah. http://setkab.go.id/panen-raya-di-dompu-presiden-jokowi-naikkah-harga-beli-jagung-oleh-pemerintah/. [Diunduh pada 21 Juni2017].

JPNN.com., 10 Juni 2017. Rizal Ramli: Hanya Mentan Amran yang berani. http://www.jpnn.com/news/rizal-ramli-hanya-mentan-amran-yang-berani; [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Kompas.com, 13 April 2015. Mentan Siap Laksanakan Instruksi Jokowi Tetapkan HPP Jagung. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/13/142618326/Mentan. Siap.Laksanakan.Instruksi. Jokowi.Tetapkan.HPPJagung. [Diunduh pada 21 Juni2017].

Kompas.com., 30 Juli 2015. Pabrik pakan cari bahan alternatif. http://print.kompas. com/baca/ekonomi/sektor-riil/2015/07/30/Pabrik-Pakan-Cari-Bahan-Alternatif. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

Kompas.com., 14 Mei 2016. Memandang Swasembada Pangan. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/14/134500626/Pemerintah.Dinilai.Salah.Kaprah.Memandang.Swasembada. Pangan. [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Kompas.com., 1 September 2016. Mentan: Ekspor beras organik masa depan pertanian Indonesia. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/01/ 171432026/mentan.beras.organik.masa.depan. pertanian.indonesia. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Kompas.com., 4 Januari 2017. Mendag Sebut Prestasi 2016 adalah Tidak Ada Impor Beras. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/04/220000326/mendag. sebut.prestasi.2016.adalah. tidak.ada.impor.beras. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kompas.com., 8 Maret 2017. Ekspor Beras, Cara Indonesia Taklukkan Negara Lain. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/08/145600826/ekspor.beras.cara.indonesia.taklukkan.negara.lain; [Diunduh pada 11 Juni 2017].

Media Indonesia.com., 12 Juli 2016. Ekonom: Penghentian impor jangan menjadikan harga pangan mahal. http://mediaindonesia.com/news/read/55705/ekonom-penghentian-impor-jangan-menjadikan-harga-pangan-mahal/2016-07-12; [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Media Indonesia.com., 5 Januari 2017. Jokowi: Saya senang tidak ada lagi impor beras. http://www.mediaindonesia.com/news/read/86190/jokowi-saya-senang-tidak-ada-lagi-impor-beras/2017-01-05. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

Media Indonesia.com., 14 Juni 2017. Ekspor Jagung ke Filipina diperbesar. http://mediaindonesia.com/news/read/109064/ekspor-jagung-ke-filipina-diperbesar/2017-06-14. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Netralnews.com., 17 Maret 2016. Ekspor jagung Indonesia melonjak 1.800%. http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/1826/ekspor.jagung.indonesia.melonjak.1800. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Nusakini.com., 21 Oktober 2016. Dua tahun Jokowi-JK: DPR puji kinerja Kementan, tidak ada impor beras. http://nusakini.com/news/dua-tahun-jokowi-jk-dpr-puji-kinerja-kementan-tidak-ada-impor-beras. [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Nusakini.com., 9 November 2016.DPR: Pembangunan pertanian 2014-2016 on the track. http://nusakini.com/news/dpr-pembangunan-pertanian-2014-2016-on-the-track; [Diunduh pada 2 Juli 2017].

Presid.enri.go.id., 31 Oktober 2016. Presiden Joko Widodo: Kita Tidak Akan Impor Beras. http://presid,enri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-Joko Widodo-kita-tidak-akan-impor-beras.html; [Diunduh pada 26 Mei 2017].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Rakyat Merdeka Online, 28 Desember 2016. Setelah 32 Tahun Merdeka, Indonesia Kembali Swasembada Beras. http://ekbis.rmol.co/read/2016/12/28/274258/ Setelah-32-Tahun,-Indonesia-Kembali-Swasembada-Beras- [Diunduh pada 26 Mei 2017].

Rakyat Merdeka Online, 29 Desember 2016. Ketua MPR Puji Kinerja Menteri Amran Jaga Stabilitas Produksi Pangan. http://m.rmol.co/read/2016/12/29/274413/Ketua-MPR-Puji-Kinerja-Menteri-Amran-Jaga-Stabilitas-Produksi-Pangan- [Diunduh pada 9 Juni 2017].

Republika.co.id., 13 Oktober 2015. Akhirnya impor beras. Republika. http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/10/13/nw5a074-akhirnya-impor-beras. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

Tempo.co., 17 Mei 2016. Tolak Impor Bawang dan Beras, Menteri Amran Siap Dipecat. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/17/090771649/tolak-impor-bawang-dan-beras-menteri-amran-siap-dipecat. [Diunduh pada 21 Juni 2017].

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VII

MENYEJAHTERAKAN KELUARGA PETANI

Kementerian Pertanian sudah mengambil langkah yang tepat dan berbagai terobosan, baik dari segi kebijakan maupun program, dalam pembangunan pertanian, antara lain program pertanian modern, asuransi pertanian, kebijakan subsidi pupuk, jaminan harga dan pasar produk pertanian, dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Terobosan-terobosan ini sejalan dengan visi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang menempatkan pembangunan pertanian sebagai wadah untuk menyejahterakan dan memuliakan petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pembangunan pangan dan pertanian hanya akan berhasil jika program yang dikembangkan dan diimplementasikan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, tercapainya kesejahteraan petani merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan pangan dan pertanian secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadikan pembangunan pertanian sebagai wahana untuk menyejahterakan dan memuliakan petani.

Kebijakan untuk menyejahterakan dan memuliakan petani tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana program pembangunan pertanian mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani, seperti peningkatan pendapatan, membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NUTP), yang selama ini "luput" dari perhatian publik, tetapi juga harus mampu menjadikan petani merasa terhormat, diperhatikan, dilindungi, dan dibutuhkan sehingga menimbulkan rasa bangga dan bermartabat sebagai petani. Perpaduan dari semua unsur ini akan mendorong semangat petani untuk berinovasi dan bekerja keras dalam berproduksi dan menyukseskan pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Semua program pembangunan pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian sejak akhir tahun 2014 di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Dr.Andi Amran Sulaiman, sejalan dengan tujuan tersebut, yaitu menyejahterakan dan memuliakan petani. Beberapa contoh program pembangunan yang dimaksud adalah program pengembangan pertanian modern, asuransi pertanian, terobosan perbaikan program subsidi pupuk, jaminan harga dan pasar bagi produk pertanian, dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Selain berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan juga menyentuh isu gender yang mendorong peran wanita untuk semakin terlibat dalam pembangunan pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Pengembangan Pertanian Modern

Salah satu terobosan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani adalah meluncurkan "Program Pengembangan Pertanian Modern". Program ini berbasis pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian secara penuh, mulai dari tahap pengolahan tanah sampai panen dan pascapanen. Program ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang menyebabkan biaya produksi semakin tinggi, mempercepat proses produksi, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan petani, sehingga menarik generasi muda untuk terlibat pada sektor pertanian. Terkait dengan program ini, Kementerian Pertanian sejak 2015 telah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2014 pemerintah hanya mampu menyediakan alat dan mesin pertanian sebanyak 12.086 unit. Sejak tahun 2015, Kementerian Pertanian memberikan dan mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian dalam jumlah yang cukup besar kepada petani, antara lain berupa *Transplanter, Combined Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit* (RMU), traktor dan pompa air sebanyak 65.431 unit. Pada tahun 2016 dan 2017, bantuan tersebut meningkat masing-masing menjadi 80.000 unit alat dan mesin pertanian.

Terobosan Kementerian Pertanian dalam pengembangan program pertanian modern yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani sejak tahun 2015, tidak mengherankan kalau Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sualiman, dikukuhkan sebagai Bapak Modernisasi Pertanian sebagaimana dilontarkan oleh Bupati Tulangbawang, Lampung, Hanan Rozak pada saat berdialog dengan petani di Desa Medasari, Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung, pada 21 April 2015. Sebagai tindak lanjut dari program tersebut, Menteri Pertanian telah meresmikan pengembangan pertanian modern pada 20 Oktober 2015, tepat satu tahun Kabinet Kerja, di Desa Gardumukti, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bersamaan dengan acara Gelar Teknologi Pertanian Modern. Dalam kesempatan itu Menteri Pertanian menekankan bahwa tahun 2015 adalah tonggak baru pengembangan pertanian modern di Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 27. Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian mencoba alat transplanter yang akan diberikan kepada petani.

Dari aspek sosial dan ekonomi, pengembangan pertanian modern potensial meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga petani, karena penggunaan alat dan mesin pertanian pada setiap tahap kegiatan produksi, panen, dan pascapanen dapat menghemat biaya pengolahan tanah, tanam, penyiangan, dan panen karena sebagian besar tenaga kerja sudah digantikan oleh penggunaan alat dan mesin pertanian yang jauh lebih efisien. Pengunaan alat dan mesin pertanian juga mampu meningkatkan produktivitas lahan melalui pengurangan kehilangan hasil. Penghematan biaya produksi dan perbaikan produktivitas berdampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani. Sebagai contoh dapat dilihat dari fakta berikut: (a) penggunaan traktor roda-2 dan roda-4 mampu menghemat penggunaan tenaga kerja dari 20 orang menjadi 3 orang/ha, dan biaya pengolahan tanah menurun sekitar 28%; (b) penggunaan *rice transplanter* menghemat tenaga tanam dari 19 orang menjadi 7 orang/ha, atau menurun hingga 35%, dan mempercepat waktu tanam menjadi 6 jam/ha; (c) penggunaan *Combined harvester* menghemat tenaga kerja dari 40 orang menjadi 7,5 orang/ha dan menekan biaya panen hingga

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

30%, menekan kehilangan hasil dari 10,2% menjadi 2%, dan menghemat waktu panen menjadi 4-6 jam/ha.

Dari sisi ekonomi, program pengembangan pertanian modern mampu menurunkan biaya produksi padi 6,5%, meningkatan produksi 33,8% (dari 6,0 ton menjadi 8,1 ton GKP/ha) yang masing-masing bersumber dari penurunan kehilangan hasil 10,9% sebagai dampak positif penggunaan *combine harvester*, meningkatkan produktivitas 11,0% dengan penggunaan *transplanter* yang mendorong petani menerapkan sistem tanam jajar legowo (jarwo), meningkatkan produktivitas 11,9% akibat membaiknya penggunaan input lainnya, dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani hingga mencapai 80%, dari Rp 10,2 juta/ha/musim menjadi Rp 18,6 juta/ha/musim (PSEKP, 2015).

Selain mendapat manfaat dari sisi ekonomi, program pengembangan pertanian modern juga mendorong generasi muda dan keluarga petani untuk bekerja lebih baik, produktif, dan terhormat. Pertanian modern juga mengubah pandangan masyarakat bahwa petani itu tidak lagi sebagai warga yang kurang pendidikan dan miskin, bergulat dengan tanah dan lumpur di bawah terpaan sinar matahari, lebih banyak mengandalkan kerja otot sehingga melelahkan, dan profesi yang lebih rendah dibandingkan dengan profesi pada sektor nonpertanian. Sebaliknya, petani modern berusaha secara lebih profesional, tidak mengandalkan otot, tidak banyak bersentuhan dengan lumpur dan terpaan sinar matahari, dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik daripada rekan mereka yang bekerja di sektor nonpertanian.

Oleh karena itu, program pengembangan pertanian modern yang ditandai oleh pemberian bantuan alat dan mesin pertanian dalam jumlah yang cukup besar kepada petani dan diikuti oleh penerapan inovasi teknologi terkini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi petani, tetapi juga mendulang rasa bangga dan bermartabat. Pada kondisi seperti ini, tanpa dorongan pun petani dengan sendirinya bersemangat untuk berproduksi. Namun demikian, agar program ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan rasa bangga bagi petani, maka desain dan mekanisme pendistribusian alat dan mesin pertanian yang dikembangkan melalui program pertanian masih perlu disempurnakan.

PERPUSTAKAAN SEKJEN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Asuransi Pertanian

Dalam kondisi modal yang terbatas dalam berproduksi, khususnya bagi komoditas pangan, perubahan iklim global yang berdampak terhadap banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit pada tanaman yang tidak jarang berujung pada kegagalan panen menurunkan semangat petani untuk berproduksi.

Dalam mengantisipasi kerugian akibat gagal panen sekaligus memberikan perlindungan bagi petani, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman sejak tahun 2016 melakukan gebrakan baru melalui program asuransi pertanian, khususnya untuk usahatani padi (asuransi usahatani padi-AUTP). Program asuransi pertanian yang diluncurkan bertujuan melindungi petani dari kerugian ekonomi usahatani padi akibat gagal panen. Dengan demikian petani tidak perlu khawatir akan keberlanjutan usahanya karena program asuransi pertanian memberikan jaminan modal bagi usahatani pada musim tanam berikutnya. Pada tahun 2017 asuransi pertanian diperluas cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada peternak sapi (asuransi usaha ternak sapi-AUTS). Program ini sejalan dengan upaya perlindungan bagi usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian.

Asuransi pertanian diperlukan oleh petani untuk melindungi usahataninya. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko dengan memberikan ganti rugi akibat kegagalan sehingga keberlangsungan usahatani menjadi terjamin. Asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Mereka akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja bagi keberlangsungan usahataninya. Ganti rugi hanya diberikan kepada peserta AUTP apabila terjadi banjir, kekeringan, dan serangan OPT yang merusak tanaman padi dengan persyaratan: (1) umur tanaman padi pada saat kejadian yang merugikan sudah melewati 10 hari (10 hari setelah tanam/HST), (2) umur tanaman padi pada saat terjadi bencana sudah melewati 30 hari (teknologi tabela),

PERPUSTAKAAN SEKJEN PERTANIAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan (3) intensitas kerusakan pertanaman ≥75% dan luas kerusakan yang mencapai ≥75% pada setiap luas petak alami (Ditjen PSP, 2016).

Dalam program asuransi pertanian, total premi yang ditanggung petani adalah Rp 180.000/ha/musim. Agar tidak memberatkan petani, sebagimana yang diungkapkan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan, petani cukup membayar Rp 36 ribu/ha, atau nilainya sama dengan harga dua bungkus rokok, sementara sisanya Rp 144 ribu dibantu oleh pemerintah. Besaran ganti rugi yang akan diperoleh petani dari asuransi pertanian kalau terjadi gagal panen adalah Rp 6 juta/ha, cukup untuk modal kerja budi daya padi pada musim tanam berikutnya.

Terobosan program asuransi pertanian yang dikembangkan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, sejak tahun 2016 relevan dan penting dalam memberikan perlindungan kepada petani akibat kegagalan panen. Selain memberikan manfaat ekonomi, terutama dalam bentuk pengurangan biaya produksi, asuransi pertanian yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada petani sehingga tidak ada lagi keraguan untuk terus berproduksi sekalipun dalam kondisi iklim yang kurang mendukung.

Kebijakan Subsidi Pupuk

Selain air dan benih, pupuk merupakan input produksi yang berperan penting dalam usahatani. Menyadari pentingnya ketersediaan input dalam berproduksi, pemerintah terus memberlakukan subsidi pupuk untuk meringankan beban petani. Pemberian subsidi pupuk diharapkan meransang petani untuk terus berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi guna mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Kebijakan subsidi pupuk telah berlangsung sejak awal tahun 1970an. Jumlah subsidi per kg pupuk yang diberikan kepada petani merupakan selisih harga eceran tertinggi (HET) yang wajib dibayar

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dengan harga komersial pupuk tersebut. HET yang masih berlaku pada saat ini (tahun 2017), wajib dibayar petani atau kelompok tani pada Penyalur Lini IV, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, yaitu Rp 1.800/kg untuk pupuk Urea, Rp 2.000/kg untuk SP36, Rp 1.400/kg untuk ZA , Rp 2.300/kg untuk NPK, dan Rp 500/kg untuk pupuk organik.

Dalam kurun waktu 2012-2017, anggaran subsidi pupuk cenderung meningkat, rata-rata 18,96% per tahun (Gambar 28). Pada tahun 2012, anggaran subsidi pupuk Rp 13,96 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 17,62 triliun pada tahun 2013, dan kemudian menjadi Rp 21,05 triliun pada tahun 2014 dan Rp 31,30 triliun pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 relatif menurun menjadi Rp 30,06 triliun karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengingat pupuk berperan penting dalam memacu produksi pangan, pemerintah pada tahun 2017 kembali menaikkan anggaran subsidi pupuk menjadi Rp 31,33 triliun (Gambar 28). Mekanisme pemberian subsidi pupuk yang masih berlangsung saat ini adalah melalui pabrik pupuk, dan selanjutnya pupuk dari pabrik disalurkan melalui distributor kepada petani dengan harga yang disubsidi.

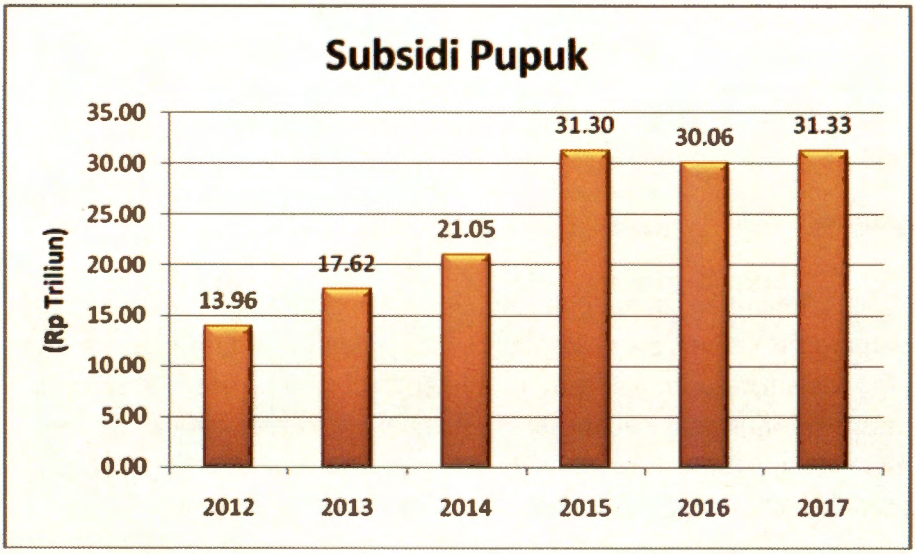

Gambar 28. Perkembangan subsidi pupuk di Indonesia, periode 2012-2017.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Walaupun kebijakan subsidi pupuk sudah berjalan sejak lama, namun pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan pemanfaatannya, baik melalui penyempurnaan proses penyaluran kepada petani maupun mekanisme pengalokasian pupuk itu sendiri agar faktor produksi utama ini dapat sampai ke petani dengan prinsip enam tepat, yaitu tepat jumlah, tepat dosis, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu. Dalam pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman mengeluarkan terobosan mekanisme alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana diamanatkan melalui Permentan Nomor 69/2016. Permentan tersebut mengisyaratkan keputusan pengalokasian pupuk di tingkat provinsi didasarkan atas Surat Keputusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi, bukan lagi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Demikian juga di tingkat Kabupaten/Kota, alokasi pupuk didasarkan atas keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota. Perubahan mekanisme ini diharapkan pengaturan alokasi pupuk lebih cepat. sehingga penyediaan pupuk di tingkat petani sesuai dengan prinsip "enam tepat".

Selain subsidi pupuk, program bantuan pupuk yang sudah sejak lama berjalan, baru kali ini manajemen pengalokasiannya di tingkat provinsi mendapat perbaikan dari Menteri Pertanian. Bantuan tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya biaya produksi yang ditanggung petani, tetapi juga mempercepat ketersediaan pupuk di tingkat petani. Selain itu, program subsidi pupuk membuktikan pemerintah serius memperhatikan petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di perdesaan. Hal ini relevan dengan beberapa hasil kajian yang menunjukkan banyak petani yang memperoleh subsidi pupuk tidak khawatir jika terjadi kelangkaan pupuk di pasar yang tidak jarang dijual dengan harga yang lebih mahal, sama dengan harga pupuk nonsubsidi. Sebenarnya, kondisi yang lebih dibutuhkan petani adanya jaminan ketersediaan pupuk dalam jumlah yang memadai di lapangan, bukan mahal-murahnya harga pupuk. Dengan demikian, perbaikan manajemen alokasi pupuk oleh Menteri Pertanian Dr. Andi Amran Sulaiman dalam program bantuan subsidi sejalan dan mendukung upaya menyejahterakan keluarga petani, baik dari aspek manfaat ekonomi maupun aspek lain, sehingga menjadikan mereka bangga dan mulia sebagai warga petani Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Jaminan Harga dan Pasar bagi Produk Pertanian

Tidak jarang terjadi, pada saat produksi melimpah, petani kesulitan memasarkan hasil usahataninya. Dalam kondisi demikian, kalaupun hasil usahatani dapat dijual tetapi harganya tidak memberikan keuntungan yang wajar bagi petani. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga petani selain melalui peningkatan produktivitas dan produksi, juga diupayakan pemerintah dengan memberikan jaminan harga dan pasar pada saat produksi melimpah. Jaminan pasar dan harga yang layak justru memberikan insentif bagi petani dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan. Program jaminan pasar dan harga yang diinisiasi pemerintah memberikan kenyamanan bagi petani dalam berproduksi. Meski dalam kondisi produksi melimpah, program jaminan harga dan pasar memberikan keleluasaan bagi petani untuk tetap bisa menjual hasil usahataninya dengan mudah pada tingkat harga yang menguntungkan.

Sejak tahun 2012 harga gabah dan beras petani tidak mengalami penyesuaian. Sejalan dengan program jaminan pasar dan harga produk pertanian, pemerintah melalui Inpres No. 5/2015 menyesuaikan harga gabah dan beras di tingkat petani menjadi Rp 3.700-4.600/kg GKG dan Rp 7.300/kg beras di gudang Bulog. Kebijakan pengamanan harga gabah petani ini juga diikuti oleh kebijakan jaminan pasar dengan menugaskan Bulog untuk menyerap gabah petani, yang dikenal dengan program sergap (serap gabah petani). Sergap merupakan program terobosan Kabinet Kerja yang belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya.

Upaya pemerintah memberikan rasa nyaman dan aman bagi petani tidak hanya berlaku pada petani padi, tetapi juga bagi yang mengusahakan komoditas pertanian lainnya melalui penetapan harga bawah dalam bentuk Harga Acuan di tingkat petani, yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016 tentang harga acuan. Agar harga acuan dapat memberikan insentif bagi petani, Kementerian Pertanian bersama dengan instansi terkait terlibat intensif dalam proses penyusunan besaran harga acuan. Dalam Permendag tersebut ditegaskan harga acuan di tingkat petani untuk komoditas jagung dengan kadar air

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

15% adalah Rp 3.150/kg, kedelai lokal Rp 8.500/kg, gula dasar Rp 9.100/kg, dan gula lelang Rp 11.000/kg, bawang merah konde basah Rp 15.000, dan aneka cabai berkisar antara Rp 15.000-17.000/kg. Komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan pasar untuk komoditas pangan penting ini dapat dilihat dari penugasan kepada Bulog untuk berperan aktif membeli produk pangan petani kalau harganya di pasar lebih rendah dari harga acuan. Khusus untuk jagung, selain menetapkan harga acuan, pemerintah juga memberikan jaminan pasar dengan mengisiasi kemitraan petani dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT).

Kementerian Pertanian di bawah komando Dr. Andi Amran Sulaiman, sudah menelisik penyebab rendahnya harga di tingkat petani dan mahalnya harga produk pertanian di tingkat konsumen, antara lain panjangnya rantai tata niaga, mulai di tingkat petani hingga tingkat konsumen. Untuk memperpendek tata niaga produk pertanian, Menteri Pertanian membuat terobasan pembenahan tata niaga produk pertanian yang sudah berjalan hampir 70 tahun, dengan memotong rantai yang tidak perlu dan hanya bertujuan mencari keuntungan semata sehingga harga produk petani menjadi rendah dan di tingkat konsumen menjadi mahal. Tataniaga produk pangan yang berlaku sebelumnya melalui 7-8 titik transaksi. Setelah dilakukan pembenahan, rantai tataniaga produk pangan diperpendek menjadi 3-4 titik transaksi. Dampak dari terobosan adalah stabilnya harga pangan dan perbedaan harga antara produsen dan konsumen lebih kecil. Kondisi ini adalah cerminan keberpihakan pemerintah kepada petani dan konsumen produk pangan.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani (*family welfare*) adalah melalui peningkatan ketersediaan pangan dari produksi sendiri dalam jumlah yang cukup dan beragam dengan kualitas yang baik dan aman dikonsumsi agar terhindar dari gejolak harga di pasar. Melalui program ini, ketersediaan pangan di tingkat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

rumah tangga petani menjadi lebih terjamin. Mereka tidak khawatir jika terjadi masalah di luar perkiraan, terutama naiknya harga pangan di pasar. Program ini juga dapat mendorong wanita untuk berperan lebih banyak dalam pembangunan pertanian. Kenyataannya, pertanian di lahan pekarangan memang lebih banyak ditangani oleh ibu-ibu rumah tangga.

Menurut Sajogyo (1994), pekarangan mempunyai sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi rumah tangga petani. Pertanian pekarangan juga dikenal sebagai lumbung hidup, warung hidup, atau apotik hidup. Disebut lumbung hidup karena pertanian pekarangan umumnya mengusahakan komoditas pangan seperti jagung, umbi-umbian, dan lainnya yang sewaktu waktu dapat dipanen untuk keperluan keluarga sendiri atau bahkan dijual jika produksinya sudah melebihi kebutuhan rumah tangga. Sebagai warung hidup, pertanian pekarangan juga mengusahakan sayuran, ikan, ayam, dan lainnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga petani. Bagi petani yang belum memanfaatkan lahan pekarangan, produk pangan tersebut tentu harus dibeli di pasar atau di warung terdekat. Sebagai apotik hidup, lahan pekarangan juga dapat dimanfaatkan untuk budi daya berbagai jenis tanaman herbal yang bermanfaat bagi penyembuhan penyakit secara tradisional.

Dalam kondisi terbatasnya lahan pertanian, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, meneruskan program peningkatan kesejahteraan keluarga petani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, dengan mengembangkan berbagai komoditas sumber karbohidrat, protein, dan vitamin melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini sudah dikembangkan sejak tahun 2013, namun replikasi dan pengembangan ke rumah tangga petani berjalan lamban. Sejak tahun 2016, Kementerian Pertanian melakukan terobosan baru dalam memassalkan program KRPL dengan menggerakkan PKK secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, Persit (Persatuan Istri TNI), dan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), khususnya dalam pelaksanaan program Gerakan Tanam (Gertam) Cabai sebagai salah satu komoditas yang dikembangkan melalui KRPL.

Dalam pencanangan "Gerakan Nasional Penanaman 50 Juta Pohon Cabai di Pekarangan" di beberapa lokasi di Jawa Barat, Menteri Pertanian pada 22 Nopember 2016 membagikan sejumlah bibit cabai

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

gratis kepada petani dan pihak lain yang berminat menanam cabai di pekarangan. Untuk keberlanjutan Gertam Cabai, BPK Kementan dan TPP PKK pada 30 November 2016 menandatangani MoU pemanfaatan lahan pekarangan untuk budi daya cabai (Gambar 29). Sebagaimana diketahui, harga cabai di pasar tidak jarang melonjak pada waktu-waktu tertentu, termasuk menjelang bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri, dan hari-hari keagamaan lainnya.

Dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan, Menteri Pertanian pada 10 April 2017 melakukan telekonferensi di Wonogiri Jawa Tengah dengan tema "Gerakan Peranserta Masyarakat dalam Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga Indonesia" (Gambar 30), serentak di 10 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantam Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Tujuan program pemanfaatan lahan pekarangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyediaan tambahan pangan pada tingkat rumah tangga dari produksi sendiri pada lahan pekarangan, mendorong konsumsi protein dan energi per kapita rumah tangga yang lebih tinggi dan beragam, mengurangi belanja pangan, sebagai tambahan tunai pendapatan rumah tangga tani, dan mengurangi fluktuasi harga pangan di pasar.

Gambar 29. Pencanangan Gertam Cabai oleh Menteri Pertanian di Depok, Jawa Barat, 22 November 2016, dan penandatanganan MoU antara BKP Kementan dengan TPP PKK, 30 Nop 2016.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 30. Telekonferensi Gerakan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Wonogiri, Jawa Tengah, 10 April 2017.

Dampak perubahaan pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal adalah meningkatnya ketersediaan pangan sumber karbohidrat di tingkat rumah tangga menjadi 127,3% (84 kg/th), dari 66 kg/th menjadi 150/kg, baik yang bersumber dari umbi-umbian lokal maupun ubi kayu dan ubi jalar, dibandingkan dengan sebelum pengembangan program optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan (Tabel 7.1). Ketersediaan pangan sumber protein pada rumah tangga juga meningkat rata-rata 223,8% (23,5 kg/th), dari 10,5 kg menjadi 34,0 kg/th. Demikian juga ketersediaan pangan sumber vitamin yang meningkat rata-rata 75% (75kg/th), dari 100 kg menjadi 175 kg/th. Dengan demikian, pengembangan program optimalisasi pemanfataan lahan pekarangan berdampak terhadap kecukupan pangan pada rumah tangga petani dari produksi sendiri.

Selain meningkatkan ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga petani, program ini juga mampu mendorong peningkatan konsumsi energi dan protein rumah tangga, masing-masing 8,01% dan 4,6%, serta meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) 6,3% dari 75,8 menjadi 80,6. Artinya, kualitas konsumsi pangan rumah tangga petani mengalami perbaikan yang cukup signifikan (Tabel 7.2).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 7.1. Dampak pengembangan komoditas sumber karbohidrat, protein, dan vitamin pada lahan pekarangan terhadap peningkatan ketersediaan pangan (Kg/RT/th).

Produk pangan	Pemanfaatan pekarangan		Perubahan
	Tidak optimal	Optimal	
A. Sumber karbohidrat	66	150	Meningkat 127,3% (84 kg)
1. Umbi-umbian lokal	40	70	Meningkat 75,0% (30 kg)
2. Ubi kayu	20	50	Meningkat 150% (30 kg)
3. Ubi jalar	6	30	Meningkat 400,0% (24 kg)
B. Sumber protein	10,5	34,0	Meningkat 223,8% (23,5 kg)
1. Telur unggas lokal	1,5	2,5	Meningkat 66,7% (1 kg)
2. Daging unggas lokal	4	15	Meningkat 275,0% (11 kg)
3. Daging kelinci	0	1,5	Meningkat 1,5 kg
4. Ikan	5	15	Meningkat 200% (10 kg)
C. Sumber vitamani	100	175	Meningkat 75% (75 kg)
1. Sayuran	50	100	Meningkat 100% (50 kg)
2. Buah	50	75	Meningkat 50% (25 kg)

Sumber: BPK (2014), PSEKP (2012), dan BBP2TP (2012), diolah.

Tabel 7.2. Dampak optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan terhadap pola konsumsi, PPH, dan pengeluaran biaya pangan rumah tangga petani, 2016.

Uraian	Pemanfaatan pekarangan		Perubahan
	Tidak optimal	Optimal	
Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2018,80	2180,49	Meningkat 8,01% (161,69 kkal/kap/hari)
Konsumsi protein (kkal/Kap/hari)	75,86	79,37	Meningkat 4,63% (3,51 kkal/kap/hari)
Pola pangan harapan	75,77	80,55	Meningkat 6,31% (4,78 poin)
Rata-rata belanja pangan (Rp/hari)	60.000	35.000	Menurun 41,67% (Rp 25.000/hari atau Rp 750.000/bln)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Uraian	Pemanfaatan pekarangan		Perubahan
	Tidak optimal	Optimal	
Tambahan tunai pendapatan (Rp/bln)	211.000	355.000	Meningkat 68,25% (Rp144.000/bln)
Tambahan pendapatan (Rp/bln)	211.000	1.105.000	Meningkat 423,7% (Rp 894.000/bln)

Sumber : BPK (2014), PSEKP (2012) dan BBP2TP (2012), diolah kembali

Pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal juga nyata menurunkan belanja pangan rumah tangga petani, dari sebelumnya Rp 60.000/hari menjadi Rp 25.000/hari (Rp 750.000/bln) atau menurun 41,7%. Selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan produksi pangan juga menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga petani yang mencapai Rp 355.000/bln atau meningkat 68,3%. Dengan memperhitungkan belanja pangan yang dapat dihemat dan tambahan penghasilan yang dapat diraih maka pemanafaatan lahan pekarangan secara optimal mampu memberikan pendapatan bagi rumah tangga petani sebesar Rp 1,1 juta/bulan.

Selain memberi manfaat ekonomi, pemanfaatan lahan pekarangan juga memberikan nilai estetika dan sosial dengan nuansa tentram dan damai bagi keluarga petani. Nilai sosial ini justru lebih bermakna dari manfaat ekonomi yang dihasilkan. Nilai estetika dan sosial dari produk pertanian pekarangan berupa sayuran yang beraneka ragam memberikan kepuasan tersendiri bagi keluarga petani (Gambar 31).

Pertanian pekarangan juga merupakan wahana bagi keluarga untuk menjalin persahabatan dengan tetangga dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat menyiram tanaman di pekarangan pada sore hari, membangun kepekaan sosial dengan menawarkan hasil panen tanaman yang diusahakan kepada tetangga, seperti sayuran, ikan, dan buah-buahan, dan sebagai media belajar bagi anak-anak sejak dini dalam memahami dan mencintai dunia pertanian (Gambar 32).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Gambar 31 Budi daya berbagai jenis sayuran dan umbi-umbian pada lahan pekarangan.

Gambar 32. Budi daya ikan, ternak kelinci, dan ayam pada lahan pekarangan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Penutup

Tercapainya kesejahteraan petani adalah tujuan utama pembangunan pangan dan pertanian. Oleh karena itu, semua program pembangunan pertanian ke depan perlu dirancang bukan hanya pada upaya peningkatan produksi dan memberikan manfaat ekonomi, tetapi pada saat yang sama juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan memuliakan petani. Berbagai program pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini lebih berorientasi pada peningkatan manfaat ekonomi dan luput dari upaya penumbuhan rasa bangga, rasa dibutuhkan, dan keinginan memuliakan petani, sehingga pengembangannya tidak berlanjut di tingkat petani.

Kementerian Pertanian sudah mengambil langkah yang tepat dan melakukan berbagai terobosan, baik dalam hal kebijakan maupun program, dalam pembangunan pertanian, antara lain program pertanian modern, asuransi pertanian, kebijakan subsidi pupuk, jaminan harga dan pasar produk pertanian, dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Terobosan-terobosan ini relevan dan sejalan dengan upaya mewujudkan visi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menempatkan pembangunan pertanian sebagai wadah untuk menyejahterakan dan memuliakan petani. Dengan demikian, petani lebih terpacu untuk berinovasi dalam berproduksi. Sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di perdesaan, petani sudah selayaknya memperoleh fasilitasi yang memadai dari pemerintah. Hal itu sudah ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian yang dikomandoi Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam upaya menyukseskan pembangunan pertanian berkelanjutan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Ashari, Saptana, dan T. Bastuti. 2012. Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Forum Agro Ekonomi 30 (1). BBP2TP. 2012. Evaluasi Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.

BKP. 2014. Kinerja Program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Badan Ketahan Pangan-Kementan. Jakarta

Direktorat Pembiayaan-Ditjen PSP. 2016. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian. Direktorat Pembiayaan Pertanian-Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian. Jakarta.

PSEKP. 2015. Prospek Pengembangan Pertanian Modern. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

Sajogyo. 1994. *Menuju Gizi Baik yang Merata di Perdesaan dan di Kota.* Gajahmada Press. Yogyakarta.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB VIII

SUKSES SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN

"Swasembada pangan ada diujung kaki, diperoleh dengan terjun ke sawah. Lahan, mesin dan petani harus dibangunkan dari tidur"

(Andi Amran Sulaiman, 2015).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kabinet Kerja pada periode 2015-2019 memiliki program kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terutama kedaulatan pangan untuk menyejahterakan petani. Dalam tempo lebih dari dua tahun menjabat sebagai Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman telah melakukan kunjungan kerja ke hampir semua sentra produksi dan optimistis Indonesia mampu membangun pertanian secara merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam bewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan pertanian adalah suatu keniscayaan yang tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini, namun juga didedikasikan bagi generasi yang akan datang. Rancangan pembangunan pertanian harus berorientasi jangka panjang tanpa melupakan penyelesaian masalah jangka pendek. Dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaeman, selalu memberikan semangat bagi para petani sebagai pejuang pangan yang perlu terus bekerja keras, berpikir cerdas, jujur, dan berdoa agar sukses meningkatkan produksi dan kesejahteraannya. Pada berbagai kesempatan Menteri Pertanian menyatakan "Jangan mewariskan impor dan kemiskinan bagi anak cucu kita". Pernyataan ini menjadi inspirasi pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Gambar 33. Program terobosan mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pangan merupakan hal pokok bagi bangsa sejak berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, pembangunan pangan dan pertanian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini tetapi sekaligus menyiapkan landasan kokoh bagi keberlanjutan produksi ke depan. Memperhatikan potensi sumber daya, keunggulan yang dimiliki Indonesia, dan pengalaman masa lalu, diperlukan terobosan strategis dalam pembangunan pertanian. Pembangunan yang cenderung linier tanpa perubahan yang berarti dari tahun ke tahun perlu diganti dengan cara "berani" berbasis inovasi dan terobosan baru.

Menyadari proses transformasi struktural ekonomi pada masa lalu belum berjalan sesuai harapan, Kabinet Kerja melakukan akselerasi melalui berbagai terobosan dengan skala prioritas yang berbeda daripada era sebelumnya. Terobosan baru yang diimplementasikan sejak tahun 2015 membuahkan hasil yang positif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Terobosan yang ditempuh meliputi: (1) merevisi regulasi yang menghambat, (2) membangun infrastruktur dan investasi secara besar-besaran guna meletakkan pondasi yang kokoh dalam jangka menengah dan panjang, (3) mengembangkan sistem produksi secara masif dan membangunkan lahan tidur, (4) menangani sistem distribusi, rantai pasok, tata niaga dan harga, (5) mengendalikan impor dan mendorong ekspor (Gambar 33).

Disadari proses pembangunan pertanian memiliki irama, respon, dan kecepatan yang tidak sama antarwilayah. Hal ini menjadi tantangan sendiri dalam implementasi kebijakan. Seluruh kebijakan teknis dapat berjalan dengan baik di lapangan jika diikuti oleh perbaikan manajemen, SDM, dan unsur pendukungnya. Implementasi kebijakan teknis dan managerial secara bersamaan akan menghasilkan dampak yang lebih luas.

Revisi Regulasi yang Menghambat

Nawa Cita sebagai landasan visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019 telah mengarahkan pembangunan pertanian untuk

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mampu mewujudkan kedaulatan pangan agar Indonesia sebagai negara yang berdaulat dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara teknis, kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan negara dalam hal: (1) pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) pengaturan kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) perlindungan dan penyejahteraan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti oleh perbaikan regulasi dan upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian secara luas yang berujung pada kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (*social welfare*).

Namun demikian, jalan menuju sukses swasembada pangan tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun manajemen pengelolaan. Hal ini semakin dirasakan di era otonomi daerah, di mana tata kelola kewenangan dan urusan Pusat-Daerah di bidang pertanian perlu diimbangi dengan penataan kuantitas dan kualitas struktur, kultur, dan postur kelembagaan serta sumber daya manusia pertanian. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memandang perlu melakukan upaya khusus (UPSUS) sebagai terobosan untuk mengurai kebuntuan (*debottlenecking*) dalam implementasi program dan kegiatan di daerah. Upaya khusus untuk mencapai swasembada pangan dilaksanakan melalui empat terobosan guna menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda (*not business as usual*).

Revisi Regulasi Tender: dari Konvensional ke e-Katalog

Penetapan dan penataan ulang aturan (regulasi) yang menghambat (deregulasi) merupakan instrumen pemerintah pusat untuk mempercepat proses pembangunan. Dari telaah di tingkat pusat dan temuan di lapangan, masalah klasik yang dihadapi di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, adalah keterlambatan benih dan keterbatasan pupuk pada saat diperlukan petani. Masalah ini berakar antara lain dari sistem pengadaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

barang dan jasa pemerintah melalui lelang yang membutuhkan waktu lama sehingga tidak seringkali tidak tersedia secara tepat waktu.

Karakteristik usahatani tanaman pangan bersifat musiman. Selama ini dikenal musim tanam Oktober-Maret (Okmar) yang bertepatan pada musim hujan dan musim tanam April-September (Asep) yang jatuh pada musim kemarau. Pada musim tanaman Okmar, puncak tanam biasanya terjadi pada bulan Oktober-Desember dan Maret-April. Panen raya padi biasanya berlangsung pada bulan Januari-Maret dan Juni-Juli.

Sistem APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tidak sinkron dengan musim tanam. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terbit pada awal Januari dan proses lelang pengadaan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya paling cepat dimulai pada Februari. Proses lelang pengadaan barang memakan waktu minimal tiga bulan, sehingga penyaluran benih, pupuk dan sarana produksi lainnya kepada petani sudah terlambat karena lewat musim. Akibatnya, sarana produksi bantuan tersebut tidak dimanfaatkan petani secara tepat waktu, sehingga tidak berdampak pada peningkatan produksi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, seminggu setelah dilantik langsung menghadap Presiden RI untuk menyampaikan masalah tersebut, dan disetujui dengan menerbitkan Perpres No. 172/ 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memungkinkan pengadaan dan penyaluran benih unggul padi, jagung, kedelai serta pupuk urea, ZA, dan NPK melalui proses penunjukan langsung.

Proses penyediaan sarana produksi dengan pola penunjukan langsung hanya membutuhkan waktu satu minggu, sehingga penyalurannya kepada petani dapat tepat waktu sesuai musim. Kini tidak ada lagi keterlambatan dan kelangkaan benih dan pupuk yang merugikan petani.

Penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa juga berlaku untuk alat-mesin pertanian. Semula proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang yang memakan waktu lama, kini menggunakan e-katalog yang hanya butuh waktu tidak lebih dari satu minggu. Pengadaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

alat-mesin pertanian seperti traktor, pompa air, *rice transplanter*, *combine harvester* dan lainnya secara *online* memberi beberapa kemudahan, yaitu bisa langsung memilih jenis barang, mengetahui harganya sesuai yang tersedia pada *e-katalog*, dan transaksi berlangsung dengan cepat.

Keuntungan utama peggunaan e-Purchasing dan e-Catalog dalam pengadaan barang dan jasa adalah: 1) memberikan kemudahan bagi institusi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan, 2) memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam, sehingga tidak perlu membuat spesifikasi sendiri karena sudah tersedia di e-Catalog, 3) dokumen pengadaan barang disediakan dalam sistem aplikasi, sehingga tidak memerlukan dokumen konvensional yang butuh tempat penyimpanan yang luas, 4) tidak ada sanggahan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sehingga mengurangi masalah hukum, 5) memudahkan monitoring dan evaluasi, 6) membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur, 7) mempercepat penyediaan fasilitas perkantoran dan pelayanan masyarakat, dan 8) mempercepat penyerapan anggaran (LKPP, 2017). Prosedur pengadaan alat-mesin pertanian melalui aplikasi e-Purchasing dan e-Katalog disajikan pada Gambar 34.

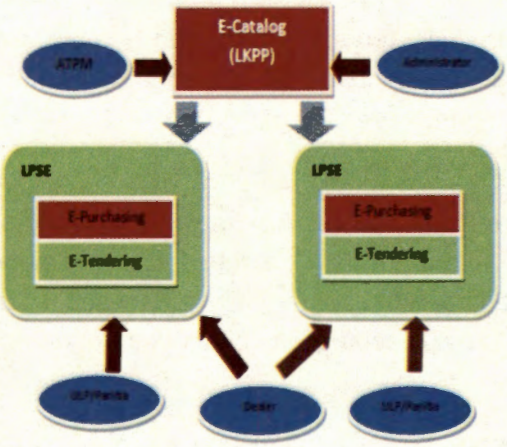

Gambar 34. Proses pengadaan alat-mesin pertanian melalui aplikasi e-Purchasing dan e-Katalog.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengadaan alat-mesin pertanian dengan e-katalog dimulai sejak tahun 2015 untuk mempercepat penyediaan secara besar-besaran, minimal 80.000 unit per tahun. Dengan cara ini, alat-mesin pertanian yang diperlukan segera dapat dimanfaatkan petani dalam berproduksi, baik kegiatan prapanen maupun pascapanen.

Kebijakan yang terkait dengan upaya mewujudkan swasembada pangan antara lain: (1) Pengurangan dan pengalihan anggaran nonprioritas kepada bantuan petani. Jika pada tahun 2014 anggaran bantuan untuk petani 35% dari pagu total anggaran, maka pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 64%, 2016 menjadi 60%, 2017 ditingkatkan lagi menjadi 70%. Pada tahun 2018, anggaran bantuan untuk petani ditingkatkan menjadi 85% dari pagu total; (2) Bantuan sarana produksi berupa benih tidak di lokasi eksisting untuk menambah luas tanam; (3) Pengawalan dan pendampingan Upaya Khusus (UPSUS) secara masif dalam upaya peningkatan produksi pangan strategis dengan melibatkan 50 ribu Babinsa TNI-AD, 46 ribu penyuluh dan THL, 8.300 mahasiswa dan dosen, 10.000 KTNA, Pemda, dan pihak terkait lainnya; (4) Pelaporan luas tanam tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi secara harian sehingga dapat diketahui dan dievaluasi perkembangan luas tanam setiap hari; (5) Penerapan *reward and punismant.* Bagi daerah yang kinerjanya rendah tidak dialokasikan anggaran pada tahun berikutnya, dan sebaliknya bagi daerah yang kinerjanya meningkat, bahkan anggaran akan ditambahkan pada tahun berikutnya.

Kebijakan ini teryata efektif dan berdampak nyata dalam menambah luas tanam dan meningkatkan produksi pada setiap daerah.

Regulasi Harga untuk Melindungi Petani

Pada musim panen raya, harga jual gabah di tingkat petani seringkali rendah. Kondisi ini diperparah lagi kalau panen raya bertepatan dengan musim hujan, sehingga kadar air gabah tinggi. Akibatnya, kualitas gabah turun sehingga harganya lebih murah lagi, hanya Rp 2.400/kg, jauh di bawah harga normal Rp 3.700-4.000/kg.

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah melalui Inpres No. 5/2015 menetapkan harga gabah di tingkat petani (Harga Pembelian Pemerintah - HPP) Rp 3.700/kg GKP atau Rp 4.600/kg GKG. Harga beras di gudang BULOG ditetapkan Rp 7.300/kg. Perbaikan HPP gabah dan beras pada tahun 2015 adalah yang pertama sejak 3 tahun terakhir, HPP sebelumnya diatur melalui Inpres No. 3/2012.

Inpres No. 5/2015 mengisyaratkan apabila harga gabah petani jatuh di bawah HPP, maka pemerintah melalui BULOG melakukan pembelian gabah dan beras petani dengan harga HPP, sesuai standar kualitasnya. Untuk mengimbangi kenaikan harga sarana produksi, konsumsi, dan lainnya yang terjadi setiap tahun, maka secara periodik dilakukan analisis usahatani dan evaluasi besaran HPP. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk merevisi harga HPP untuk menjamin petani menerima harga yang wajar dari proses produksi. HPP beras dimaksudkan untuk melindungi konsumen, sehingga apabila harga bers medium di pasaran melonjak, maka pemerintah melalui BULOG dapat melakukan operasi pasar dengan harga sesuai HPP. Kebijakan HPP juga bermanfaat dalam stabilisasi harga.

Guna melindungi petani dan konsumen juga ditetapkan harga atas dan harga bawah untuk komoditas jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi segar, daging sapi beku, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Penetapan harga bawah dalam bentuk harga acuan di tingkat petani dan harga atas dalam bentuk harga acuan di tingkat konsumen.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/2016, harga acuan jagung kadar air 15% di tingkat petani adalah Rp 3.150/kg dan di tingakt konsumen Rp 3.650/kg, kedelai lokal di tingkat petani Rp 8.500/kg dan di tingkat konsumen Rp 9.200/kg, kedelai impor di tingkat konsumen Rp 6.800/kg, gula dasar di tingkat petani Rp 9.100/kg, gula lelang di tingkat petani Rp 11.000/kg dan di tingkat konsumen Rp 13.000/kg, bawang merah konde basah Rp 15.000 dan rogol askip di tingkat konsumen Rp 32.000/kg, aneka cabai di tingkat petani Rp 15.000-17.000/kg dan di tingkat konsumen Rp 28.500-29.000/kg, daging sapi beku di tingkat konsumen Rp 80.000/kg dan daging kerbau beku Rp 65.000/kg.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Efektivitas penerapan harga acuan ini ditentukan oleh kemampuan pengendalian harga di lapangan. Pada saat harga bawang merah konde basah di tingkat petani anjlok menjadi Rp 9.000-11.000/kg, maka pemerintah menugaskan BULOG membeli dengan harga acuan Rp 15.000/kg. Pada saat harga bawang merah rogol askip melonjak di atas Rp 45.000, pemerintah melakukan operasi pasar dengan harga jual maksimal Rp 32.000/kg.

Regulasi Perlindungan Lahan

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan. Beberapa prinsip dalam memanfaatkan lahan pertanian adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Guna menjamin keberlanjutan produksi untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional telah diterbitkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan (PLP2B).

Implementasi perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) masih perlu ditingkatkan. Beberapa daerah telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelannjutan (LP2B) dalam peraturan daerah (Perda) dan sebagian dalam proses pengusulan Perda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, telah mengusulkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 360 ribu ha, padahal luas lahan pertanian di daerah ini hanya 450 ribu ha (Kompas 21 Pebruari 2014). Hal ini adalah salah satu contoh daerah yang memiliki komitmen melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan upaya-upaya revolusioner, antara lain: (1) penyusunan dan penetapan luas dan peta sebaran lahan pertanian pangan pada masing-masing kabupaten/kota pada skala 1:10.000, (2) komitmen kuat otoritas

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

pemerintahan dan jajaran (pusat dan daerah) dalam melindungi lahan pertanian melalui proses perencanaan tata ruang nasional, pulau, provinsi, dan kabupaten/kota, (3) penyusunan program sertifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan secara nasional, dan (4) sinkronisasi dan sinergitas program nasional dengan ketahananan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penetapan luas dan peta sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan pada skala 1:10.000 secara nasional melalui koordinasi BKPRN berperan penting untuk meredam alih fungsi lahan pertanian dan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi peta lahan sawah sampai ke tingkat desa dan kepemilikan per petani. Kemudian diikuti oleh sertifikasi lahan. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komitmen kuat dari otoritas pemerintahan, baik pusat maupun daerah, juga berperan penting bagi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Regulasi Investasi, Perizinan, dan Kawasan

Sektor pertanian memberikan peluang bagi usaha dan nilai tambah bagi pelakunya. Komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit, karet, kakao, tebu, dan sapi telah dikembangkan di berbagai wilayah yang memiliki keunggulan komparatif. Investasi berkembang pesat, terutama pada subsektor perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, tebu, teh, kakao dan lainnya. Bahkan industri sawit sudah memasuki tahap hilirisasi produk. Investasi pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura masih dalam tahap penumbuhan.

Sejak awal tahun 2015 pemerintah proaktif meningkatkan investasi secara besar-besaran. Pemerintah bergerak cepat dengan terobosan kebijakan dan deregulasi untuk mendorong minat investor. Berbagai kemudahan telah diberikan kepada investor untuk membangun perkebunan tebu dan pabrik gula, budi daya jagung terintegrasi industri

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pakan ternak, dan pengembangbiakan sapi. Pemerintah bahkan mengawal khusus perizinan, penyiapan lahan, dan tahapan konstruksinya.

Kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendorong investasi, termasuk dalam upaya pengembangan komoditas jagung, sapi, dan tebu antara lain melalui:

(1) Deregulasi-revisi PP No.33/2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hutan untuk penggunaan di luar kepentingan kehutanan, sehingga tarif PNBP tidak membebani usaha tebu, jagung, dan sapi yang berlokasi di areal hutan.

(2) Revisi PP No.60/2012 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sehingga kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan pertanian tertentu,

(3) Revisi PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sehingg HGU yang tidak aktif atau diterlantarkan pemiliknya akan dicabut izinnya dan dialihkan kepada investor baru.

(4) Revisi PP No. 72/2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Indonesia, sehingga sebagian kawasan hutan Perhutani dapat digunakan untuk pertanian tertentu;

(5) Pemberian kredit jangka panjang, bunga khusus, *grace period* 5 tahun, dan *tax allowance* untuk usaha integrasi sawit-sapi agar diberi keringanan pajak ekspor, PPh bahan baku dll, termasuk asuransi ternak.

(6) Penurunan bea masuk sapi indukan dari 5% menjadi 0% dan biaya karantina Rp 2,5 juta/ekor ditanggung pemerintah;

(7) Pemberian perlindungan dan jaminan keamanan bagi lahan dan ternak dari penyerobotan maupun pencurian;

(8) Penyederhanaan persyaratan perizinan pendaftaran benih, pupuk, dan pestisida melalui satu pintu;

(9) *Debottlenecking* dalam rekomendasi perizinan investasi.

Pada tahun 2015 telah dimulai penanaman investasi untuk pengembangan agribisnis tebu/gula, jagung, dan sapi pada lahan seluas 2,2 juta ha dengan nilai Rp 113,1 triliun. Investasi dari 47 perusahaan ini diperkirakan akan menampung tenaga kerja langsung dan tidak langsung

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

sebanyak 3,56 juta orang. Penanaman investasi ini akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi gula, jagung, dan sapi pada beberapa tahun mendatang guna memenuhi kebutuhan domestik dan bahkan diekspor.

Gambar 35. Kunjungan Wakil PResiden Jusuf Kalla dan Menteri Pertanian ke PTPN X yang menghasilkan gula.

Tabel 8.1. Rencana investasi tebu, sapi dan jagung hingga tahun 2019 dan perkiraan realisasi tahun 2015.

NO	KOMODITAS	Kebutuhan Lahan (ha)	Investor Perusahaan	Investasi (Rp.M)		Tenaga Keja (orang)		Produksi (ton)	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Gula/Tebu	700.000	34	95.000	14.294	2.700.000	189.650	4.000.000	2.728.392
2	Sapi	1.000.000	9	14.000	1.235	50.000	1.200	150.000	1.200
3	Jagung	500.000	4	4.100	90	816.750	900	5.000.000	8.050
	JUMLAH	2.200.000	47	113.100	15.619	3.566.750	191.750		

Ket: Produksi Gula 2015 ungkin estimasi dari [illegible] PG yang ada [illegible]

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengembangan Investasi

Investasi perkebunan tebu dan pabrik gula

Masalah utama industri gula di Indonesia antara lain: (1) kebutuhan konsumsi domestik tinggi sehingga impor gula mencapai 3 juta ton per tahun, (2) sebagian besar Pabrik Gula (PG) telah berusia tua (63,9%), (3) pembangunan PG baru membutuhkan modal besar, (4) kesulitan mengakses lahan untuk pengembangan perkebunan tebu, dan (5) produktivitas tebu rendah (kurang 80 ton/ha) dengan rendemen yang juga rendah.

Pemerintah proaktif menarik investor, untuk sementara ini 15 PG *existing* berkomitmen mengembangkan perkebunan tebu seluas 200 ribu ha dan 19 PG baru 500 ribu hektare. Salah satu investor industri gula bersifat jangka panjang dengan modal Rp 95,0 triliun akan beroperasi di sembilan provinsi di Indonesia. Industri gula ini nantinya diperkirakan membuka lapangan kerja baru bagi 3,87 juta tenaga kerja. Saat ini PG tersebut sudah memasuki tahap konstruksi dengan target produksi sebesar 4 juta ton pada tahun 2019.

Gambar 36. PG di Lamongan, Jawa Timur, tes giling pada 28 September 2015.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Hingga saat ini terdapat dua PG baru yang sudah mulai beroperasi, yaitu (1) PG Tambora *Sugar Estate* dan giling pertama pada April 2016 dengan kapasitas 5.000-10.000 TCD; dan (2) PG di Lamongan dan tes giling pada 28 September 2015 (Gambar 36) dengan mengintegrasikan perkebunan tebu rakyat seluas 18 ribu ha di Jawa Timur.

Realisasi investasi PG dan perkebunan tebu hingga Mei 2017 meliputi 23 perusahaan dalam proses perizinan, pembangunan pabrik, dan beberapa di antaranya sudah beroperasi dengan luas lahan perkebunan tebu 659 ribu ha dan total investasi Rp 40,8 triliun. Perusahaan ini diperkirakan menyerap 1,3 juta tenaga kerja.

Investasi pengembangbiakan sapi

indonesia memiliki padang penggembalaan sapi yang potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Budi daya sapi baru mampu menghasilkan daging karkas 409 ribu ton pada tahun 2015, atau meningkat 5,23% dibanding tahun 2014. Angka ini belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi domestik sehingga dipenuhi melalui impor dengan tren yang semakin menurun.

Dalam upaya mempercepat peningkatan produksi daging telah dikembangkan pola integrasi sapi-sawit, di samping pengembangan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 3 juta ekor pada tahun 2015. Pengembangan pola integrasi sapi-sawit bertujuan untuk mendapatkan manfaat optimal dari sapi sebagai sumber pupuk (kompos) dan sawit sebagai sumber pakan ternak dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi peternak dan pekebun serta pelestarian lingkungan.

Pemerintah berupaya keras menjaring investor untuk menanamkan modal pada usaha ternak skala komersial. Pada tahun 2015 terdapat sembilan investor yang siap mengembangkan ternak sapi pada lahan seluas 1,0 juta ha dengan target 650 ribu indukan. Beberapa investor dari perusahaan patungan asal Brasil dan Australia dengan nilai investasi sebesar Rp 14,0 triliun dan akan melibatkan 50 ribu tenaga kerja. Beberapa perusahaan ternak sapi di NTT dan Sulawesi Selatan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

sudah memasuki tahap konstruksi dan sebagian telah beroperasi dengan target produksi 150 ribu ton daging pada tahun 2019.

Gambar 37. Usaha ternak sapi skala komersial

Pemerintah juga telah menyiapkan pulau karantina sapi dan infrastruktur pendukungnya berupa jalan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dramaga, kapal ternak, RPH, dan lainnya. Bangka-Belitung dipilih sebagai pulau karantina sapi karena letaknya yang strategis. Penetapan dasar hukum Bangka-Belitung sebagai pulau karantina sapi dalam proses penyelesaian dan operasionalisasi di tingkat lapangan dalam proses konstruksi.

Kebijakan dan langkah yang ditempuh dalam mewujudkan swasembada daging meliputi: (1) regulasi impor sapi dengan komposisi 70% sapi bakalan dan 30% sapi betina indukan; (2) kemudahan impor bibit sapi bagi pengusaha pembibitan (bukan *trader*); (3) perluasan IB untuk 3,5 juta akseptor dan total pembibitan (IB dan kawin alam) minimal 5 juta ekor/tahun; (4) pengembangan 300 lokasi pembiakan sapi di luar Jawa dalam pola integrasi sapi-sawit, dan (5) penyediaan pakan ternak serta penyuluhan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Realisasi investasi perusahaan peternakan sapi hingga Mei 2017 adalah proses perizinan bagi tujuh perusahaan dan sebagian sudah beroperasi pada lahan seluas 88 ribu ha. Total investasi yang

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

digelontorkan adalah Rp 9,4 triliun dan diperkirakan mampu menyerap 100 ribu tenaga kerja.

Investasi agribisnis jagung terintegrasi industri pakan ternak

Produksi jagung sebagian besar digunakan untuk pakan ternak, terutama unggas. Pada tahun 2014 impor jagung untuk pakan mencapai 3,29 juta ton dengan nilai 857 juta dolar Serikat (AS). Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengendalian impor jagung dan mendorong ekspor. Kebijakan ini membuahkan hasil sebagaimana tercermin dari ekspor jagung, terutama dari Sumbawa dan Gorontalo, ke beberapa negara tetangga. Secara tidak langsung, kebijakan pengendalian impor jagung menuntut industri pakan ternak untuk menyerap jagung lokal dari petani. Hal ini mempertimbangan bahwa stok jagung lokal cukup untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak.

Gambar 38. Usahatani jagung skala luas (corn estate).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Seiring dengan perkembangan industri ternak yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku pakan, pemerintah mendorong industri pakan mengembangkan budi daya jagung dalam skala luas (*corn estate*). Dalam hal ini, pola pengembangan jagung dapat bermitra dengan petani dan terintegrasi dengan industri pakan ternak.

Pengembangan perkebunan jagung (*corn estate*) dapat memanfaatkan lahan konversi hutan atau melalui pengembangan pola tumpangsari di areal Perhutani. Pada tahun 2015 terdapat empat investor yang siap mengembangkan jagung pada lahan hutan seluas 500 ribu ha dan lahan Perhutani 265 ribu ha, dengan nilai investasi Rp 4,1 triliun dan akan menyerap 817 ribu tenaga kerja. Target produksi jagung dari investasi ini adalah 5 juta ton pada tahun 2019. Pada November 2015 terdapat investasi terpadu sapi-jagung seluas 5,0 ribu ha di Maros, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2017 dikembangkan 3 juta ha lahan untuk pengembangan jagung dengan bantuan benih dan pupuk dari Pemerintah. Pemasaran produksi jagung melalui kemitraan GPMT dan petani dengan harga sesuai HPP, Rp 3.150/kg biji kadar air 15%. Selain menjamin pasokan jagung sebagai bahan baku industri pakan, pola kemitraan ini juga memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani, sehingga pada tahun 2017 tidak ada lagi impor jagung.

Investasi pembangunan kawasan pertanian

investasi tidak terbatas pada pengembangan tebu, jagung, dan sapi, tetapi juga didorong untuk hilirisasi kelapa sawit dan *bio-diesel* berbahan baku CPO, industri kakao, tepung tapioka, dan produk hortikultura. Kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, dan kopi merupakan sumber devisa negara yang penting. Sebagian besar perkebunan tebu, sawit, karet, kopi, dan kakao adalah milik rakyat dengan pengelolaan yang belum optimal. Oleh karena itu pemerintah dituntut membantu pengembangan dan pemberdayaan perkebunan rakyat. Dalam hal ini, beberapa langkah yang akan dilakukan dengan dukungan investasi BUMN dan swasta, adalah: (1) membangun perkebunan tebu rakyat 500 ribu ha di luar Jawa, (2) membangun 10 unit PG baru dengan investasi swasta; (2)

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

mengembangkan integrasi komoditas perkebunan-tanaman pangan dan tanaman perkebunan-ternak sapi, (3) membangun perkebunan kepala sawit dengan pola PIR seluas 1,0 juta ha di wilayah perbatasan NKRI, dan (4) hilirisasi produk turunan dari kelapa sawit, kakao, pala, dan sagu.

Untuk menjaga kontinuitas pasokan dan stabilisasi harga cabai dan bawang, pemerintah mendorong pengembangan kawasan komoditas sayuran dalam skala luas, pengaturan pola dan jadwal tanam, penanganan pascapanen, dan pergudangan. Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dan Bima, NTB, potensial dijadikan sebagai kawasan pengembangan bawang merah, selain sentra-sentra produksi yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya.

Pengembangan Infrastruktur

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya tata kelola infrastruktur irigasi, "Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan". Infrastruktur pertanian dalam areal luas adalah: (1) *input based infrastructure* mencakup benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-mesin pertanian; (2) *resource based infrastructure* berupa irigasi, (3) *physical infrastructure* yang mencakup jalan, transportasi, pergudangan, *processing* dan *preservation*; dan (4) *institutional infrastructure* yaitu penelitian, penyuluhan, pelatihan teknologi, pelayanan informasi, pelayanan finansial, dan pemasaran.

Presiden Joko Widodo menjadikan infrastuktur sebagai basis pembangunan nasional, baik di darat, laut, maupun udara. Sejalan dengan kebijakan kedaulatan pangan dalam periode 2015-2019, target utama pembangunan infrastruktur pertanian adalah: (1) perluasan 1 juta ha lahan sawah baru, (2) perluasan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa, (3) perbaikan dan pembangunan irigasi untuk kebutuhan pengairan 3 juta ha lahan sawah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Mekanisasi Pertanian

Di era pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan pertanian dicirikan antara lain oleh pengembangan mekanisasi. Mengacu pada data Kementerian Pertanian, realisasi bantuan alat-mesin pertanian dalam periode 2010-2014 masing-masing 8.220 unit, 3.087 unit, 21.145 unit, 6.292 unit, dan 12.086 unit, sedangkan pada tahun 2015 meningkat fantastis menjadi 65.431 unit. Hal ini menunjukkan bantuan alat-mesin pertanian bagi petani di awal era Kabinet Kerja meningkat 617%. Bahkan pada tahun 2016 dan 2017 bantuan alat-mesin pertanian meningkat lagi masing-masing 80.000 unit. Alat-mesin pertanian bantuan tersebut berupa *rice transplanter*, *combine harvester*, *dryer*, *power thresher*, *corn sheller*, dan *Rice Milling Unit* (RMU), traktor, dan pompa air.

Penerapan mekanisasi pertanian mampu menghemat pemakaian tenaga kerja konvensional 70-80%, biaya produksi 30-40%, dan menekan tingkat kehilangan hasil padi pada saat panen dari 20% menjadi 10% sehingga meningkatkan produksi 10-20%. Jika diasumsikan penurunan hasil pada saat panen 20% maka produksi padi yang dapat diselamatkan dengan penerapan mekanisasi pertanian pada lahan sawah seluas 14 juta ha di Indonesia dengan rata-rata hasil 5 ton/ha diperkirakan 14 juta ton gabah kering panen (GKP). Jika harga gabah diperhitungkan Rp 3.700/kg, penerapan mekanisasi pertanian secara menyeluruh akan menyelamatkan modal usahatani padi sebesar Rp 5,18 triliun per tahun.

Gambar 39. Traktor roda dua (kiri) dan mesin tanam padi (kanan).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Introduksi traktor pengolah tanah menghemat penggunaan tenaga kerja 85%, dari 20 hari orang kerja (HOK) secara manual menjadi 3 HOK per musim. Penggunaan alat semai dan tanam menghemat tenaga kerja 61% dari 19 HOK secara manual menjadi 7,7 HOK. Implementasi alat penyiang menghemat tenaga kerja 86%, dari 15 HOK secara manual menjadi 2 HOK. Demikian juga penggunaan alat-mesin panen yang mampu menghemat 81% tenaga kerja dari 40 HOK secara manual menjadi 8 HOK. Secara keseluruhan introduksi teknologi mekanisasi menghemat 89% tenaga kerja (Badan Litbang Pertanian, 2015).

Dari segi finansial, penerapan teknologi mekanisasi menghemat biaya pengolahan tanah, tanam, dan panen dari Rp 7,3 huta/ha secara manual menjadi Rp 2,2 juta/ha. Mengacu pada produksi nasional padi pada tahun 2014 sebesar 70,8 juta ton, kehilangan hasil yang dapat diselamatkan melalui introduksi ketiga alat-mesin pertanian ini mencapai 7 juta ton atau setara Rp 24,5 triliun. Nilai penyelamatan hasil padi dengan penerapan *combine harvester* mencapai Rp 17 triliun/tahun.

Penerapan teknologi mekanisasi menjadi lebih efisien dalam skala luas. Untuk pengelolaan 100 ha lahan sawah, alat-mesin pertanian yang diperlukan masing-masing empat unit traktor roda dua, indo jarwo *transplanter, power weeder*, dan mini *combine harvester*. Nilai satu paket alat-mesin pertanian ini adalah Rp 878 juta dan apabila disewa Rp 509 juta per musim.

Analisis menunjukkan bahwa pengelolaan 100 ha lahan sawah dengan introduksi mekanisasi secara penuh memerlukan biaya sewa traktor Rp 120 juta/musim, *rice transplanter* Rp 110 juta/musim, alat penyiang (*power weeder*) Rp 51 juta/musim, dan alat-mesin panen (*combine harvester*) Rp 229 juta/musim. Jika biaya input lainnya dan sewa lahan diperhitungkan maka total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan 100 ha usahatani padi pada lahan sawah adalah Rp 1,20 miliar/musim. Jika hasil padi dengan penerapan teknologi mekanisasi 8 ton GKP/ha maka penerimaan mencapai Rp 3,06 miliar dengan keuntungan Rp 1,86 miliar atau Return-Cost Ratio 2,25. Penerapan mekanisasi pertanian dalam skala yang lebih luas (estate), misalnya pada lahan seluas 5.000-10.000 ha, akan lebih meningkatan efisiensi sistem produksi dan profit.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Perbaikan infrastruktur, penerapan mekanisasi dan sarana produksi yang tepat telah menambah areal tanam seluas 630 ribu ha pada tahun 2015. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan produksi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi nasional padi pada tahun 2016 mencapai 8,4 juta ton, meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 70,9 juta ton gabah kering giling (GKG). Produksi jagung pada tahun 2016 tercatat 23,6 juta ton pipilan kering, atau naik 4,60 juta ton dibanding tahun 2014 sebanyak 19,0 juta ton. Sementara produksi kedelai pada tahun 2016 adalah 963,18 ribu ton biji kering, meningkat 0,86% dibanding tahun 2014.

Peningkatan produksi berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani. Hal ini terbukti dari naiknya nilai tukar usaha pertanian (NTUP) dari 106,04 pada tahun 2014 menjadi 107,44 pada tahun 2015. Pada bulan Juni 2016, NTUP sudah menyentuh angka 101,47. Artinya, petani mengalami surplus karena indeks yang diterima lebih besar daripada indeks yang dibayarkan untuk seluruh pengeluaran rumah tangga. NTUP pada bulan Juni 2016 lebih tinggi 0,95% dibandingkan dengan bulan sama pada tahun 2015 yang hanya 100,52. Artinya, daya beli petani saat ini lebih baik daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pengembangan mekanisasi menuju modernisasi pertanian terbukti mampu meningkatkan efisiensi sistem produksi, lebih produktif, berdaya saing, meningkatkan pendapatan dan nilai tambah. Jumlah tenaga kerja konvesional pertanian pada tahun 2015 adalah 35,3 juta orang atau turun dari 36,4 juta orang pada tahun 2014. Hal ini merupakan dampak positif penerapan inovasi mekanisasi pertanian dan perkembangan industrialisasi.

Program mekanisasi sepanjang tahun 2015 mampu memberikan kepuasan kepada petani sebagai pelaku utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Hasil survei lembaga independen, *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*, menunjukkan sebagian besar petani sangat puas dengan kinerja mekanisasi bantuan. Tingkat kepuasan petani dengan bantuan traktor mencapai 79,0%, pompa air 78,1%, dan *combine harvester* 82,6%. Untuk pompa air bantuan, kepuasan petani cukup tinggi, yaitu 80%, *rice transplanter* 75,5%, dan *dyer* 58,8%.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Optimalisasi Penyaluran Sarana Produksi

Kementerian Pertanian setiap tahun menyalurkan bantuan pupuk bersubsidi kepada petani dengan sasaran diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani guna mendukung upaya peningkatan produktivitas, produksi, dan memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2015 dialokasikan bantuan pupuk bersubsidi urea, SP36, ZA, NPK, dan pupuk organik sebanyak 9,55 juta ton dan terealisasi 8,57 ton (89,7%) dengan anggaran sebesar Rp 28,56 triliun dan terealisasi Rp 20,40 triliun. Pemenuhan kebutuhan pupuk organik bagi petani juga diupayakan melalui pembangunan unit pengolah pupuk organik (UPPO). Pada tahun 2015 dibangun 897 unit UPPO. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas terpadu pengolahan jerami, sisa tanaman, limbah ternak, dan sampah organik menjadi kompos. Aplikasi pupuk organik berperan penting memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan dan melestarikan lingkungan.

Integrasi tanaman-ternak

dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, Kementerian Pertanian menetapkan kembali kebijakan integrasi tanaman-ternak dengan strategi:

1 Mendorong pengembangan budi daya dan pembibitan sapi potong di perkebunan sawit rakyat dan plasma melalui fasilitasi dana APBN dan APBD.

2 Bekerja sama dengan BUMN perkebunan mendorong pemeliharaan sawit-sapi potong berorientasi pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman kelapa sawit.

3 Mendorong perkebunan sawit swasta mengembangkan (a) diversifikasi usaha budi daya sapi potong; (b) kerja sama usaha integrasi sapi-sawit; (c) pemanfaatan dana CSR untuk usaha budi daya sapi potong di tingkat kelompok plasma.

4 Mendorong perusahaan swasta nonsawit, seperti Perbankan dan Pertamina, mengalokasikan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada kegiatan produktif usaha budi daya sapi potong di perkebunan sawit.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Ketersediaan pakan menjadi salah satu permasalahan dalam peningkatan produksi daging sapi. Di lain pihak, hasil samping perkebunan sawit sebagai sumber pakan yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal. Dewasa ini luas areal perkebunan perkebunan sawit di Indonesia mencapai 10,9 juta hektare (Ditjenbun, 2014). Selain menghasilkan berbagai produk pangan dan bioenergi, perkebunan kelapa sawit juga berperan penting sebagai sumber pakan murah yang potensial dalam bentuk solid, bungkil, pelepah, dan daun sawit. Ketersediaan limbah industri sawit tersebut cukup melimpah dari waktu ke waktu dan pemanfaatannya sebagai pakan ternak tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia.

Pengembangan bioindustri berbasis sawit-sapi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh *success story* pengembangan ternak sapi berbasis sawit. Integrasi ternak-tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) juga telah berkembang di sejumlah kawasan perkebunan dalam upaya optimalisasi peningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Pola integrasi antara tanaman hutan dengan jagung juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan potensi lahan perhutanan. Lahan PT Perhutani di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur seluas 73.726 telah terbiasa ditanami padi, jagung, dan kedelai. Pada areal PT Inhutani-I seluas 17.500 ha di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, PT Inhutani III seluas 27.500 ha di Tanah Laut Kalimantan Selatan serta PT Inhutani V di Sumatera Selatan dan Lampung seluas 56.000 ha dikembangkan tanaman jagung dengan pola tumpangsari dan dikelola oleh petani.

Selain itu Kementerian Pertanian juga mendorong perusahaan swasta nonsawit, seperti perbankan dan Pertamina, mengalokasikan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada kegiatan produktif usaha budi daya sapi potong di kawasan perkebunan kelapa sawit.

Hilirisasi dan Industrialisasi Perdesaan

Pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian secara berkelanjutan merupakan salah satu titik ungkit pengembangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

industrialisasi berbasis agroindustri di perdesaan. Hal ini menjadi pilihan strategis dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan sekaligus membuka lapangan kerja. Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan agroindustri di perdesaan adalah melalui pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Pertanian skala kecil dan rumah tangga berbasis sumber daya lokal. Program UPH Pertanian merupakan terobosan dalam mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat peetanian dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Pada tahun 2015 Kemnterian Pertanian telah merealisasikan pembangunan 783 UPH.

Indonesia merupakan negara produsen utama minyak sawit dan pengekspor kedua terbesar dengan peluang peningkatan ekspor 6,5% per tahun, menguasai sekitar 40% pasar dunia dengan devisa yang dihasilkan mencapai 15,41 miliar dolar AS. Kajian INDEF (2007) menunjukkan:

1 Serapan CPO oleh industri domestik masih rendah karena industri hilir kelapa sawit belum berkembang.
2 Nilai tambah tertinggi diperoleh dari produksi CPO, bukan dari produk turunannya. Pengusaha lebih tertarik pada industri primer (CPO) yang cenderung padat tenaga kerja, bukan padat modal, karena untuk memproduksi produk turunan diperlukan investasi yang tinggi.
3 Tersedianya pangsa pasar dunia atas minyak sawit dengan pengembangan industri hilir dan sumber energi alternalif (biodiesel)

Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan (*tree crops*) yang berperan menyerap gas rumah kaca, seperti CO2, dan menghasilkan O2 atau jasa lingkungan lainnya,seperti konservasi *biodiversity* atau ekowisata (Kementan, 2007). Oleh karena itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit berperan penting meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian linhkungan.

Di Indonesia terdapat tujuh sentra produksi kelapa sawit yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan pangsa produksi 82%. Potensi ketersediaan lahan untuk perluasan kelapa sawit mencapai 2,96 juta ha yang sebagian besar di kawasan timur, yaitu Papua Barat 2,0 juta ha, Kalimantan Timur 370 ribu ha, Kalimantan Tengah 310 ribu ha, Sulawesi Tengah 200 ribu ha, dan Sulawesi Selatan 130 ribu ha (Taher *et al.*, 2000).

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemerintah terus berusaha mendorong hilirisasi produk turunan CPO, baik untuk bahan baku industri pangan maupun nonpangan. Produk pangan yang dapat dihasilkan dari CPO dan CPKO antara lain *emulsifier*, margarin, minyak goreng, *shortening*, susu full krim, konfeksioneri, dan yogurt. Produk nonpangan yang dihasilkan dari CPO dan CPKO antara lain epoxy compound, ester compound, lilin, kosmetik, pelumas, fatty alcohol, dan biodiesel. Selain itu, limbah kelapa sawit seperti tandan kosong dapat dimanfaatkan untuk bahan baku kertas (pulp), pupuk hijau (kompos), karbon, dan rayon; cangkang biji untuk bahan bakar dan karbon; serat untuk fibre board dan bahan bakar; batang dan pelepah untuk mebel pulp paper dan pakan ternak; serta limbah kernel dan *sludge* untuk pakan ternak.

Hasil kajian membuktikan produk sawit dapat diolah lebih lanjut menjadi 43 jenis produk turunan. Komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit sebagian besar dikembangkan di luar Jawa. Apabila seluruh produk mentah dari hasil panen dan limbah pertanian diolah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir, maka hilirisasi produk pertanian di perdesaan akan tumbuh cepat yang tentu saja berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kinerja produksi pangan strategis

kebijakan yang dijalankan Kementerian Pertanian era Kabinet Kerja telah membuahkan hasil. Produksi padi yang merupakan komoditas pangan strategis, misalnya, meningkat sejak 2015 dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar Rp 23,18 triliun pada tahun yang sama dan Rp 26,92 triliun pada tahun 2016. Produksi padi pada tahun 2016 tercatat 79,1 juta ton GKG atau naik 4,96% dibanding tahun 2015 pada posisi 75,4 juta ton GKG. Dibanding tahun 2014, produksi padi pada tahun 2015 naik 6,42%. Angka ini merupakan produksi tertinggi selama dua tahun berturut-turut.

Peningkatan produksi 2016 sebesar 3,74 juta ton berasal dari tambahan luas panen 919 ribu ha dan memberi nilai tambah ekonomi sebesar Rp 15,7 triliun. Provinsi dengan peningkatan produksi padi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tertinggi berturut-turut adalah Sumatera Selatan meningkat 927 ribu ton, Jawa Barat 776 ribu ton, Sulawesi Selatan 419 ribu ton, Lampung 405 ribu ton, dan Jawa Timur 385 ribu ton. Pada tahun 2016, produksi padi setara beras mencapai 44,3 juta ton. Jika kebutuhan konsumsi beras pada tahun 2016 diperhitungkan 33,3 juta ton, maka terdapat surplus produksi sebesar 11,0 juta ton yang tersimpan di petani, gudang penggilingan, pedagang, industri, BULOG, dan konsumen.

Produksi jagung juga meningkat. Pada tahun 2016 produksi jagung menyentuh angka 23,2 juta ton pipilan kering atau naik 18,1%. Pada tahun 2015 produksi tercatat 19,6 juta ton atau naik 3,18% dibanding tahun 2014. Tingginya kenaikan produksi jagung pada tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan luas panen, masing-masing 5,28 ton/ha atau naik 2,03% dan luas panen naik 597 ribu ha (15,77%) dibandingkan 2015. Produksi jagung pada tahun 2016 adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir dan memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 11,91 triliun. Setelah produksi dikurangi dengan kebutuhan sebesar 21,44 juta ton (industri pakan 9,18 juta ton, pakan ternak lokal 6.34 juta ton, industri pangan, konsumsi rumah tangga, benih dan lainnya), maka posisi neraca jagung pada tahun 2016 surplus 1,72 juta ton.

Produksi kedelai pada tahun 2015 adalah 963 ribu ton biji kering atau naik 0,86% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi berasal dari kontribusi kenaikan produktivitas 1,1%. Pada tahun 2016 produksi kedelai turun menjadi 885 ribu ton. Angka ini belum dapat memenuhi kebutuhan domestik yang sudah menyentuh 2,59 juta ton/tahun. Rendahnya produksi kedelai pada tahun 2016 disebabkan antara lain oleh jumlah benih unggul yang didistribusikan ke lapangan tidak memadai dan petani belum bersemangat mengembangkan komoditas sumber protein nabati ini karena harga jualnya belum memberikan keuntungan yang layak.

Produksi tebu pada tahun 2016 adalah 3,43 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi, industri rumah tangga, dan lainnya sudah mencapai 3,05 juta ton. Artinya, neraca gula masih mengalami defisit 380 ribu ton.

Produksi daging karkas sapi/kerbau pada tahun 2016 diperkirakan 561 ribu ton, meningkat 3,51% dibandingkan tahun 2015. Sementara kebutuhan konsumsi 662 ribu ton, sehingga defisit 101 ribu ton.

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Produksi cabai pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,1 juta ton atau 9,66% lebih tinggi dibanding tahun 2015, sementara konsumsi 1,68 juta ton, yang berarti surplus 535 ribu ton. Oleh karena itu impor cabai dapat dikendalikan dan bahkan meningkatkan ekspor 1.000 ton pada Januari-Agustus 2016. Sentra produksi cabai besar antara lain Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), Majalengka, Garut, dan Cianjur (Jawa Barat), Kerinci (Jambi), Rejanglebong (Bengkulu), dan Solok (Sumatera Barat). Sentra produksi cabai rawit antara lain Kabupaten Garut (Jawa Barat), Banjarnegara, Magelang (Jawa Tengah), Banyuwangi dan Blitar (Jawa Timur), dan Lombok Barat (NTB).

Produksi bawang merah pada tahun 2016 menyentuh 1,29 juta ton atau naik 3,75% dinading tahun lalu, sementara konsumsi domestik 1,10 ribu ton, sehingga surplus 303 ribu ton. Kondisi ini meniadakan impor bawang merah dan bahkan sebagian diekspor ke negera tetangga. Sentra produksi bawang merah adalah Kabupaten Brebes, Nganjuk, Majalengka, Probolinggo, Pemalang, Kulonprogo, Cirebon, Bima, dan Solok.

Pembenahan tata niaga, harga, dan pasar

Sistem tata niaga pangan yang sudah berjalan selama ini turut memberikan andil dalam perekonomian nasional. Produk pangan strategis padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula, dan daging sapi mengalir setiap hari dari sentra produksi ke pusat-pusat perdagangan. Kelancaran distribusi pangan dari produsen ke konsumen menjadi indikator efisiensi sistem tata niaga. Dalam tata niaga, pedagang menjembati antara produsen (petani) dengan konsumen yang disebut sebagai *middle-man*. Kenyataan di lapangan menjukkan pedagang antara lain terdiri atas pedagang pengumpul, skala kecil, skala besar, grosir, eceran dan lainnya.

Posisi tawar (*bargaining position*) pedagang lebih kuat dibandingkan dengan produsen dan konsumen sehingga rwlatif lebih leluasa mengatur dan menentukan harga (*price maker*). Sementara posisi tawar produsen/konsumen relatif lemah (*price taker*). Konsekuensinya, profit margin yang dinikmati pedagang lebih tinggi daripada produsen.

Ketidakseimbangan dalam tata niaga pangan ditunjukkan oleh total margin tujuh komoditas pangan strategis tersebut yang mencapai

PERPUSTAKAAN DITJEN PT KEMENTERIAN PERTANIAN

Rp 384 triliun, 77,3% di antaranya (Rp 297 triliun) dinikmati oleh 318 ribu pedagang dan 22% (Rp 87,9 triliun) oleh 104 juta produsen. Dalam hal ini perbandingan margin yang diterima produsen dan pedagang adalah 1: 1.116. Kondisi tidakseimbang ini telah berlangsung lama dan berkontribusi sangat nyata terhadap tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum kondisi tata niaga pangan strategis relatif sama, yaitu aksesibilitas dan transportasi belum lancar, sistem logistik dan distribusi belum memadai, kualitas penanganan produk belum standar, kontinuitas pasokan bergantung musim, rantai pasok tata nilai terlalu panjang hingga 7-8 titik, disparitas harga produsen-konsumen tinggi, struktur dan perilaku pasar belum adil, profit margin antarpelaku pasar tidak seimbang, dan sebagainya. Dalam tata niaga pangan, BULOG yang berperan sebagai penyangga dan stabilisator harga baru mampu menyerap beras petani 6-7%, sedangkan untuk jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula, dan daging sapi belum signifikan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian melakukan terobosan dengan membangun format baru tata niaga pangan.

Gambar 40. Aksesibilitas dan transportasi yang belum lancar sering menjadi kendala bagi petani.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Desain baru tata niaga

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menjaga stock dan menjamin stabilitas harga produk pertanian. Sistem tata niaga produk pertanian yang baru diluncurkan bertujuan memperkuat Bulog dalam memperluas cakupan penanganan komoditas pangan strategis, penyangga pangan, dan stabilisasi harga. Wilayah kerja BULOG mencakup sentra produksi pangan, terutama gabah/beras, tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Divre BULOG pada setiap wilayah ditransformasikan menjadi unit bisnis untuk menangani pangan di kawasan tersebut.

Untuk memperoleh *bargaining power* dalam tata niaga, setiap unit bisnis BULOG idealnya menyerap minimal 20% produksi petani. Unit bisnis BULOG melakukan pembelian gabah langsung ke petani dan menjual ke pasar dan konsumen dengan harga dan profit yang wajar dengan memperpendek rantai pasok, sehingga margin petani lebih tinggi dan konsumen menikmati harga yang lebih murah. Manfaat desain baru tata niaga ini adalah: (1) rantai pasok tata niaga pangan dipangkas dari 7-8 titik menjadi 3-4 titik; (2) harga pangan stabil dan stok cukup memadai; (3) disparitas harga produsen dan konsumen rendah; (4) petani mendapat jaminan harga dan keuntungan yang wajar, pedagang tetap eksis, dan konsumen menikmati harga murah; (5) terjadi keseimbangan margin yang wajar antara produsen-pedagang-konsumen.

Solusi permanen mengatasi gejolak harga pangan, selain menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan intervensi pasar, juga dibangun Toko Tani Indonesia (TTI). Pada tahun 2015 telah dibangun 30 TTI, tahun 2016 dibangun 1.000 TTI, dan tahun 2017 direncanakan akan dibangung 2.000 TTI. Pengembangan TTI dinilai dapat meminimalisasi disparitas harga dan mengurangi distorsi pasar.

Guna memberikan jaminan pasar dan kepastian harga terhadap produk jagung, kini 41 industri pakan ternak sudah bermitra dengan petani jagung di 29 provinsi. Pada tahun 2017 seluruh produksi jagung petani telah terserap oleh pabrik pakan sehingga tidak perlu mengimpor bahan baku pakan ini.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Berbagai pola pemasaran produk seperti pameran, bursa, sistem lelang, tunda jual, penjualan *online*, dan lainnya gencar dikembangkan. Guna memudahkan petani dalam bertransaksi, pemerintah mengembangkan Kartu Tani. Kartu ini digunakan petani untuk seluruh transaksi dalam membeli input, akses kredit, penyaluran bantuan pemerintah, dan pemasaran produk. Dengan demikian, ke depan, seluruh aktivitas ekonomi lebih praktis, efisien, aman, dan mudah dimonitor.

Peningkatan Kapasitas Serap Gabah Petani

Pengalaman selama ini menunjukkan harga gabah pada musim panen raya seringkali rendah dan BULOG tidak berdaya menyerap dalam jumlah yang besar. Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, pada panen raya Februari-April 2017 melanjutkan tugas Tim Serap Gabah Petani (Sergap).

Pertemuan Tim gabungan BULOG, TNI, Dinas Pertanian, KTNA, dan unsur terkait lainnya yang digelar di Kementerian Pertanian pada 23 Februari 2017 menargetkan menyerap beras petani minimal 4 juta ton pada enam bulan ke depan. Target sergap harian dan bulanan telah ditetapkan untuk setiap subdivre BULOG dan realisasinya dilaporkan secara harian dan dievaluasi secara rutin yang disertai dengan *reward and punishment*.

Program Sergap gabah/beras petani dimplementasikan untuk pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat, pada 12 Maret 2016 guna melindungi petani dari jatuhnya harga pada saat panen raya, memperkuat cadangan beras pemerintah, dan stabilisasi harga. Pada tahun 2016, program ini berhasil menyerap gabah petani sebesar 2,96 juta ton setara beras, lebih tinggi 1 juta ton dibanding tanpa program Sergap pada tahun 2015 yang hanya menyerap 1,96 juta ton beras.

Implementasi program Sergap pada tahun 2016 telah memperkuat stok beras, yang pada Februari 2017 tercatat sebesar 1,6 juta ton, cukup aman sampai enam bulan ke depan. Stok beras BULOG

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

bertambah setelah panen raya, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium pada tahun 2016. Bahkan pada Februari 2017 Indonesia mengekspor beras premium dari Kabupaten Merauke ke Papua Nugini. Selain itu, Indonesia juga mengekspor beras 5.000 ton ke Srilangka sebagai bantuan kemanusiaan.

Pengendalian Perilaku Pasar

Sistem tata niaga input dan produk pertanian sudah lama mengalami masalah yang belum terpecahkan. Mafia, kartel, penyelundup, dan lainnya dibiarkan beraksi yang merugikan petani dan perilaku pasar komoditas pangan dan pertanian tidak transparan dan tidak fair. Beberapa oknum mengendalikan harga dan pasar, sehingga mereka menikmati margin yang besar. Sebaliknya, sebagian besar pedagang menengah dan petani hanya memperoleh margin yang tipis dan bahkan adakalanya merugi.

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Polri dan KPPU membentuk Satgas Pangan dengan tugas mengawal sistem distribusi, memonitor stok, dan memantau pergerakan harga. Hasilnya, lebih dari 30 kasus pengoplos beras dan pupuk ilegal yang diproses hukum. Sebagian kartel daging sapi dan unggas yang selama ini mengendalikan pasokan dan harga sudah diproses di KPPU. Regulasi impor yang ketat dan terkontrol dapat meredam mafia impor pangan. Menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2017, Satgas Pangan proaktif bekerja guna menjamin pasar dan stabilitas harga. Hasilnya, pada bulan Mei-Juni 2017 telah dijalakan proses hukum bagi 81 kasus penimbunan pangan, peredaran pangan ilegal, dan mempermainkan harga.

Ke depan, perilaku pasar akan semakin berkeadilan jika masing-masing pelaku bersaing secara sehat, baik dalam jangka menengah dan jangka panjang.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan Pengendalian Impor dan Mendorong Ekspor

Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengendalian impor. Dalam hal ini, importasi hanya dilakukan sesuai kebutuhan. Kebijakan ekspor produk pertanian juga telah membuahkan hasil, sebagaimana tercermin dari meningkatnya volume ekspor kelapa sawit, karet, kakao, kopi, sayur, buah-buahan, dan lainnya. Dewasa ini *trend* impor pangan seperti bawang merah, jagung dan lainnya menurun drastis dan ekspor meningkat.

Kebijakan pengendalian impor dan ekspor berdampak pada surplus neraca perdagangan sektor pertanian pada bulan Januari-November 2016 sebesar 9,50 miliar dolar Serikat, yang berasal dari kontribusi surplus necara perdagangan subsektor perkebunan sebesar 18,75 miliar dolar AS.

Pada tahun 2016 impor beras juga berhasil dikendalikan, bahkan tidak ada lagi impor beras medium. Impor beras medium pada Januari-Maret 2016 merupakan kontrak impor BULOG yang telah disetujui pada November 2015.

Peningkatan produksi jagung berdampak terhadap penurunan impor jagung pada Januari-November 2016 sebesar 66,7%. Demikian pula impor nanas,jeruk,dan beras ketan menurun drastis dan tidak ada lagi impor bawang merah konsumsi. Kebijakan ekspor telah berhasil mendongkrak ekspor beberapa komoditas strategis pada Januari-November 2016, seperti beras meningkat 43,7% dan ubi kayu 114%. Ekspor daging ayam dan telur pada tahun 2016 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2015.

Di samping menghemat devisa, kebijakan pengendalian impor berdampak pada peningkatan harga di tingkat petani. Jika harga jagung di petani semula Rp.1.500/kg naik menjadi Rp.3.150/kg, dengan nilai total sebesar Rp 30,1 triliun secara nasional. Kebijakan pengendalian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

impor telah mendorong peningkatan harga gabah di petani menjadi Rp 5.300/kg dan secara nasional menyentuh angka Rp 43,3 triliun. Secara keseluruhan, pengendalian impor dan ekspor berdampak terhadap surplus neraca perdagangan sektor pertanian sebesar Rp 69,6 triliun yang berkontribusi menggerakkan perekonomian di pedesaan.

Penutup

Agenda prioritas Kementerian Pertanian dalam Nawa Cita Kabinet Kerja 2015-2019 adalah kemandirian pangan melalui berbagai program. Implementasi dari program tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahterakan petani.

Capaian yang telah diraih Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam tempo dua setengah periode masa jabatannya merupakan buah pengabdian kerja nyata. Hal ini tidak terlepas dari terobosan yang dijalankan sesuai kewenangan. Revisi regulasi yang menghambat, pembangunan infrastruktur, dan investasi secara besar-besaran guna memperkuat pondasi pembangunan pertanian dalam jangka menengah dan panjang telah mulai dirasakan hasilnya.

Pengembangan sistem produksi secara masif dengan membangunkan lahan tidur, penanganan sistem distribusi, memperpendek rantai pasok dan mendesain struktur tata niaga baru, stabilisasi harga, serta pengendalian impor dan mendorong ekspor telah berkontribusi nyata terhadap pembangunan pertanian. Tujuan akhir dari semua program yang dirancang adalah untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bahan Bacaan

Badan Litbang Pertanian. 2016. Laporan Tahunan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Tahun 2015. Tangerang: Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

David, C.C. dan Otsuka, K. 1994. *Modern Rice Technology and Income Distribution in Asia.* Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Departemen Pertanian. 2007. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Depperin. 2009. Roadmap Industri Pengolahan CPO. Jakarta: Ditjen Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

Didu, M.S. 2003. Kinerja Agroindustri Indonesia. *Agrimedia*, 8 (2): 16-25.

Gumbira-Sa'id, E. 2010.Review Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional: Kelapa Sawit, Kakao dan Gambir. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 19 (1): 45-55.

ICN. 2009. Laporan Market Intelligence Industri Palm Oil di Indonesia, November 2009. Jakarta: Indonesian Commercial Newsletter.

INDEF. 2007. Strategi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit. Jakarta: The Institute for Development of Economics and Finance.

LKPP. 2017. https://www.lkpp.go.id.

Michael Warner and David Kahan. Market-Oriented Agricultural Infrastructure: Appraisal of Public–Private Partnerships. Briefing papers. January 2008. https://www.odi.org/publications/586-market-oriented-agricultural-infrastructure-appraisal-public-private-partnerships.

Rai, S. 2010. Agribusiness Development and Palm Oil Sector in Indonesia. *Economia*, 61 (1): 45-59.

Taher, *et. al.* 2000. *Hand Book of Indonesian Estate Crops Business.* Jakarta: Media Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Wharton, C. R. Jr. 1967. "The Infrastructure for Agricultural Growth", in Herman J. Southworth and Bruce F. Johnston (Eds) (1967). New York: Agricultural Development and Economic Growth, Cornell University Press, Ithaca.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

EPILOG

LANGKAH AWAL MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045

Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045, melalui kerja keras dengan dukungan dari berbagai pihak. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah mengawalinya dengan memperkokoh fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan dari berbagai aspek, baik inovasi dan infrastruktur maupun kelembagaan dan menyusun strategi untuk mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045, obsesi yang realistis dikaitkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045, kurang dari 30 tahun dari sekarang. Berbeda dengan "lumbung desa" yang umumnya sudah dikenal masyarakat di perdesaan, lumbung pangan dunia merupakan sesuatu yang baru. Mengapa pada tahun 2045 dan bagaimana gambaran tahun 2045 tentang lumbung pangan dunia?

Delapan bab di depan memaparkan mengapa, apa, dan bagaimana capaian paruh waktu Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan sebagai prioritas utama pembangunan pertanian dalam periode 2015-2019. Selama 2,5 tahun terakhir, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan dalam memperkokoh landasan pembangunan pangan dan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2016, pada saat menghadiri pembukaan Pameran Hari Pangan se-Dunia ke-36 di Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah), *FAO Representative* untuk Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders, memuji kesigapan Kementerian Pertanian menyikapi iklim ekstrem El Nino dan investasi insfrastruktur irigasi yang berkontribusi membantu memitigasi dampak kekeringan pada pertanian padi yang merupakan pangan utama dan sumber perekonomian sebagian besar petani di perdesaan Indonesia.

Tantangan Penyediaan Pangan bagi Penduduk Dunia

Tahun 2045 bertepatan dengan seabad kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai pihak mengusulkan "tahun 2050" dijadikan target waktu bagi Indonesia mewujudkan lumbung pangan dunia, hanya berbeda 5 tahun yang kondisinya mungkin tidak banyak berbeda. Apa yang akan dihadapi masyarakat dunia pada tahun 2050 dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dikaitkan dengan ledakan jumlah penduduk?

Menurut perhitungan PBB, jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 sekitar 7,3 miliar dan pada tahun 2050 diperkirakan meningkat menjadi 9,7 miliar, 50 tahun kemudian (tahun 2100) akan menjadi 11,2 miliar orang. Peningkatan tertinggi populasi penduduk terjadi di negara-

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

negara Afrika, disusul oleh Asia pada posisi kedua. Total pertambahan penduduk dunia pada tahun 2050 adalah 2,38 miliar jiwa, dan Indonesia menyumbang 64,67 juta jiwa (Gambar 41).

Jumlah penduduk dunia terus bertambah, sementara ketersediaan sumber daya lahan terus menyusut. Artinya, bencana kelaparan mengintai penduduk dunia. Saat ini saja, setiap 3 detik satu orang tewas akibat kelaparan. Menurut laporan FAO, rata-rata setiap individu mengonsumsi sekitar 1,4 kg bahan pangan/hari, dan 400 g di antaranya adalah produk sereal seperti roti.

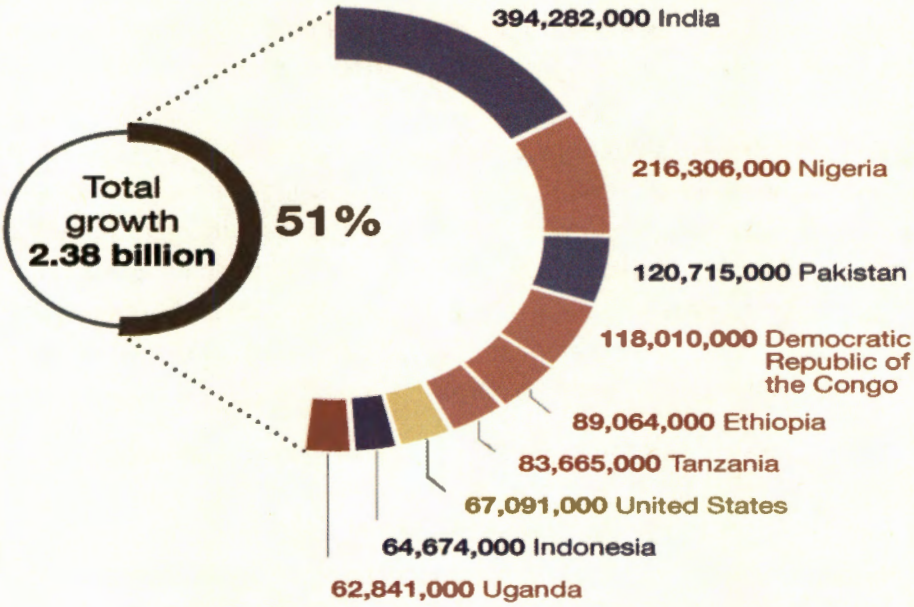

Gambar 41. Total pertambahan penduduk dunia pada tahun 2050 diperkirakan 2,38 miliar jiwa, dan di Indonesia 64,67 juta jiwa (Becker et al., 2015).

Pada tahun 2050 penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,15 miliar jiwa (sebagian menyebut 9,3 miliar dan sebagian lagi 9,7 miliar). Konsumsi pangan juga diperkirakan meningkat menjadi 3.130 kcal/hari/jiwa, yang saat ini masih sekitar 2.750 kkal/jiwa/hari. Mengapa? Karena pendapatan per kapita diduga juga akan naik dari 7.029 dolar AS menjadi 12.652 dolar AS/kapita/tahun. Jumlah penduduk dunia tumbuh

cepat yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi global, sehingga memiliki lebih banyak kesempatan memperoleh pangan.

Menurut FAO, pada tahun 2050, setiap individu akan mengonsumsi sekitar 14% lebih banyak kalori. Berarti permintaan pangan juga akan meningkat drastis. Proporsi penduduk perkotaan semakin meningkat. Pada tahun 1999 saja, misalnya, 61% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Masalahnya, penduduk kota cenderung mengonsumsi pangan lebih banyak, lebih dari 2.700 kkal/hari/jiwa.

Selain digunakan untuk konsumsi manusia, bahan pangan juga diolah menjadi energi. Kenaikan permintaan bahan bakar nabati (BBN) dapat memperburuk situasi. Infrastruktur transportasi semakin banyak digerakkan oleh bahan bakar nabati yang diekstrak dari tebu dan komoditas pangan lainnya. Konsekuensinya, semakin banyak lahan subur yang akan digunakan untuk memproduksi bahan bakar nabati ketimbang bahan pangan. Hal ini berdampak terhadap persaingan penggunaan lahan untuk pengembangan sumber bahan bakar nabati dengan komoditas pangan. Di sisi lain, wilayah yang cocok untuk pengembangan pertanian pangan akan semakin terbatas. Akibat perubahan iklim global, gurun pasir akan semakin meluas di sejumlah wilayah dan lahan subur akan berubah menjadi lahan salin atau lahan berpasir.

Kondisi akan lebih parah di negara-negara berkembang karena lebih tingginya laju pertambahan jumlah penduduk (FAO: *How to Feed the World in 2050*). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi pangan harus ditingkatan minimal 70% dari sekarang. Produksi serealia harus ditingkatkan sekitar 3 triliun ton dari 2,1 triliun ton saat ini. Produksi daging juga perlu ditingkatkan lebih dari 200 miliar ton untuk mencapai 470 miliar ton pada tahun 2050. FAO optimistis semua negara di dunia mampu menyediakan pangan bagi penduduknya pada tahun 2050 dengan berbagai tantangan yang tentu harus dipecahkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pembangunan Fondasi Pertanian Berkelanjutan

Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak berisiko tinggi bila kebutuhan pangan nasional bergantung pada pasokan dari pasar dunia. Tidak hanya mengancam ketahanan pangan, ketergantungan pada pangan impor meyebabkan Indonesia akan kehilangan kedaulatan ekonomi maupun politik di dunia internasional.

Pemerintah telah memberi dukungan politik, kebijakan, dan program bagi upaya peningkatan produksi pangan dan pertanian di dalam negeri. Penanda kesungguhan komitmen politik dalam menjalankan visi dan misi swasembada dan lumbung pangan dunia ialah penyediaan anggaran pembangunan. Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pertanian sekitar 100% dibanding tahun sebelumnya, anggaran tertinggi sepanjang sejarah pembangunan pertanian nasional. Selain di di Kementerian Pertanian, Presiden Joko Widodo juga mengalokasikan anggaran pendukung pembangunan pangan dan pertanian yang cukup besar di Kementerian PUPR dan Kementerian Desa.

Presiden Joko Widodo juga meminta seluruh Kementerian/ Lembaga terkait untuk bersatu padu mendukung Kementerian Pertanian mewujudkan swasembada dan lumbung pangan. Kementerian PUPR dan Kementerian Desa membantu pembangunan jaringan irigasi dan pembukaan lahan pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup membantu perluasan lahan pertanian dan memfasilitasi perluasan pengembangan komoditas pangan dan pemeliharaan ternak di lahan perhutanan (Sistem Wanasari), dan Kementerian Perdagangan membantu penetapan harga produk pertanian yang menguntungkan petani dan stabilisasi harga di tingkat konsumen, serta pengendalian impor dan promosi ekspor bahan pangan. Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal operasionalisasi program di lapangan, dan menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam hal supervisi dan pengawasan pelaksanaan program.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Program aksi dilaksanakan berdasarkan kerangka kerja logis yang disusun menurut konsep teoritis yang andal. Secara konseptual, keseluruhan program aksi Kementerian Pertanian bermuara pada pembangunan faktor-faktor kunci penopang atau *Pilar 7* pembangunan pangan dan pertanian, yakni infrastruktur, investasi, inovasi, input, insentif, inklusi, dan institusi.

Gambar 42. Panen raya padi hibrida di lahan rawa Kalimantan Selatan.

Kerangka kerja strategi pembangunan pangan dan pertanian untuk mewujudkan visi kedaulatan pangan dan lumbung pangan dunia berbasis kemuliaan petani pun telah dirumuskan. Keempat pilar tersebut menjadi prasyarat dalam mewujudkan kenyamanan kerja dan pendapatan petani, serta ketahanan pangan dan gizi. Perpaduan keempat pilar dalam pembangunan pangan dan pertanian diyakini mampu menyejahterakan dan memuliakan petani. Pilar-pilar tersebut dibangun melalui kebijakan dan program strategis yang dimungkinkan untuk mendapat dukungan politik.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan dan program inti swasembada pangan dan lumbung pangan adalah *Upaya Khusus Percepatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai* (UPSUS Pajale). Pendekatan makro berupa upaya peningkatan produktivitas melalui peningkatan intensitas penggunaan input,perluasan areal panen melalui peningkatan intensitas tanam, dan perluasan lahan baku (ekstensifikasi). Program aksi dan tata kelola UPSUS Pajale telai diuraikan pada bab terdahulu.

Selain mengintegarsikan berbagai terobosan dalam paket kegiatan dan implementasi program UPSUS Pajale, Kementerian Pertanian juga melakukan sejumlah inisiatif kebijakan dan program sebagai komplemen berupa Pembangunan Kawasan, Pembangunan Lumbung Pangan di Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Ekspor-Impor Pangan, dan Program Khusus Kesejahteraan Keluarga Petani.

Prestasi yang perlu dicatat adalah Indonesia tidak lagi mengimpor beras sejak tahun 2016. Prestasi ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, Ketua MPR, beberapa tokoh, pengamat, dan pejabat tinggi FAO. Asisten Direktur Jenderal FAO untuk Asia dan Pasifik, Kundhavi Kadiresan, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada beras.

Kinerja Kementerian Pertanian dalam 2,5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK adalah awal (*baseline*) pengembangan komoditas pertanian strategis menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, yang mencakup delapan komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, cabai, dan bawang putih. Dari segi kebijakan, pemerintah telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung pembangunan pangan dan pertanian, antara lain merevisi Perpres No. 172 tahun 2014 tentang tender penyediaan benih dan pupuk dari mekanisme berbasis birokrasi menjadi penunjukkan langsung atau e-katalog, sehingga pelaksanaannya di lapangan lebih cepat dan tepat waktu, *refocusing* anggaran tahun 2015 hingga 2017 sebesar Rp 12,2 triliun, bantuan benih yang disalurkan langsung kepada petani yang berdampak pada luas tambah tanam, pengawalan program UPSUS Pajale dan evaluasi harian, kebijakan pengendalian impor dan mendorong ekspor, deregulasi perizinan dan investasi, dan penyaluran asuransi usaha pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Realisasi program pembangunan pangan dan pertanian yang telah dijalankan di antaranya adalah perbaikan jaringan irigasi seluas 3,05 juta ha, penyediaan alat dan mesin pertanian lebih dari 180 ribu unit, asuransi pertanian bagi pertanaman petani seluas 674.650 ha, dan pembangunan embung, *longstorage*, dan dam-parit sebanyak 3.771 unit sebagai sumber pengairan pertanaman. Kementerian Pertanian juga telah menginisiasi pembangunan lumbung pangan di wilayah perbatasan NKRI, integrasi jagung-sawit seluas 233 ribu ha, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan lahan rawa lebak, program sapi indukan wajib bunting (SIWAB). Pembangunan Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.218 unit di berbagai daerah bertujuan untuk memangkas mata rantai tata niaga sarana produksi guna membantu mempercepat penyediaannya di tingkat petani dengan harga yang wajar.

Semua ini merupakan terobosan untuk memperkuat fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan menuju Lumbung Pangan Dunia 2045. Dengan fondasi pembangunan pertanian yang semakin kuat, Indonesia mampu mengatasi ancaman anomali iklim El Nino pada tahun 2015 dan La Nina pada tahun 2016, sehingga produksi pangan terus meningkat dan tidak ada lagi masa paceklik. Kenaikan produksi padi pada tahun 2015-2016 mencapai 11%, jagung 21,8%, cabai 2,3%, dan bawang merah 11,3%. Produksi komoditas unggulan peternakan berupa daging sapi meningkat 5,31%, telur ayam 13,6%, daging ayam 9,4%, dan daging kambing 2,47%. Demikian juga komoditas perkebunan, produksi tebu meningkat 14,42%, kopi 2,47%, karet 0,14%, dan kakao 13,6%.

Pada saat bersamaan, Kementerian Pertanian menghentikan impor beras dan meningkatkan volume ekspor pangan 43,7%. Sementara itu, impor jagung dan bawang merah masing-masing turun 66,6% dan 93%. Capaian lainnya adalah peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dari penurunan angka kemiskinan di perdesaan 0,01%, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) 101,7 dan peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 109,8. Data *Global Food Security Index* (GFSI) yang dirilis *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2016 juga menunjukkan peringkat ketahanan pangan Indonesia meningkat secara signifikan. Di antara negara yang diobservasi, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan peningkatan ketahanan pangan terbesar.

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk memperkuat fondasi pembangunan pertanian berkelanjutan ke depan, Kementerian Pertanian telah merumuskan konsep pengembangan kawasan pangan dengan pendekatan peningkatan efisiensi, pendayagunaan infrastruktur sistem produksi dan distribusi melalui konsolidasi pengelolaan berbasis potensi kawasan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Mengacu pada "pembangunan dari wilayah pinggiran" sebagaimana tertuang dalam Nawa cita, Kementerian Pertanian juga telah mengimplementasikan Program Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan (LPBE-WP), sebagai pengejewantahan konsep "Menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045" (LPD-45). Kegiatan ini dilakukan pada lima lokasi prioritas, yaitu Kabupaten Sanggau (Kalbar), Nunukan (Kaltara), Malaka dan Belu (NTT), Merauke (Papua), serta Lingga dan Natuna (Kepulauan Riau).

Posisi Pangan Indonesia pada Tahun 2045

Beberapa waktu yang lalu, isu "Indonesia Emas 2045" mewarnai sejumlah media massa nasional. Ini adalah impian besar Indonesia untuk lebih tegas dan dewasa menyikapi persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, disintegrasi, dan kemiskinan. Kunci utama untuk mewujudkan impian besar tersebut bukan hanya terletak pada kekuatan ekonomi, politik, dan militer, melainkan keunggulan sumber daya manusia karena kemajuan suatu negara berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya manusianya. Formulanya sederhana, yaitu membangun pendidikan Indonesia untuk menghasilkan kader-kader bangsa terbaik.

Bagaimana dengan pembangunan pangan? *World Resources Institute (WRI)* bekerja sama dengan Bank Dunia, UNDP, dan UNEP melaporkan dunia akan mengalami krisis pangan pada tahun 2050. Penyebabnya antara lain ledakan penduduk, kesenjangan dan ketidakcukupan pangan, perubahan iklim dan kelangkaan air yang mengancam keberlanjutan sistem produksi, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia di muka bumi. Pertanian di dunia menempati 37%

PERPUSTAKAAN BADAN KEMENTERIAN PERTANIAN

daratan (kecuali Antartika) yang membutuhkan 70% air yang bersumber dari sungai, danau, dan sumber lainnya dilaporkan menyumbang hampir seperempat emisi gas rumah kaca di atmosfer. Masalah besar lainnya adalah persaingan penggunaan lahan untuk produksi bahan bakar nabati (*biofuel*) dan pangan. Untuk menghasilkan 10% *biofuel* dibutuhkan 32% produk pertanian yang hanya menghasilkan 2% energi global.

FAO memperkirakan sekitar 1,02 miliar penduduk dunia saat ini sedang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan. Kondisi terparah terjadi di negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Bahkan, menurut *UN Population Fund* (2000), pada tahun 2050 akan ada tambahan penduduk dunia sekitar 2,32 miliar jiwa yang akan terancam kekurangan pangan.

Meski banyak kalangan yang merasa pesimistis, namun Kementerian Pertanian optimistis Indonesia siap menjadi Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Pada saat membuka Munas VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan obsesinya untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Hal ini mengacu pada letak geografis Indonesia yang berpotensi mendukung upaya mewujudkan obsesi itu. *"Masa depan dunia ada di sekitar garis khatulistiwa karena sinar matahari yang terus-menerus akan membuat produksi pangan dan energi akan tetap melimpah,"* kata Presiden (VIVA.co.id, 2015).

Dewasa ini pemerintah terus berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan industri. Presiden meyakini Indonesia akan menjadi negara yang memiliki ekonomi yang kuat di masa yang akan datang. *"Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi empat besar dunia tahun 2045. Saya percaya hitungan itu, siapa yang meragukan Bu Sri Mulyani, Pak Darmin? Yg hitung bukan saya, ini pakar-pakar kelas internasional semua,"* ujar Presiden Joko Widodo (Michael Agustinus. 2017).

Selain itu, pada tahun 2045 Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 9,1 triliun dolar AS dengan pendapatan 29.000 dolar AS/kapita. Proyeksi ini setelah mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 309 juta pada tahun 3045 dan pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk memperkuat daya saing, Indonesia memerlukan biaya logistik yang lebih efisien karena berkaitan dengan penggunaan listrik, jalan tol, bandara, jalur kereta api, dan pelabuhan. Ke depan diharapkan tidak ada lagi ekspor barang mentah. Produk yang dihasilkan dari sektor pertanian harus diolah terlebih dahulu agar memiliki nilai tambah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia. Pada saat itu, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 300 juta jiwa dengan usia produktif 52% dan dominasi oleh penduduk kelas menengah 82%. *"Ini adalah perekonomian besar yang sangat potensial. Kita juga akan merupakan negara dengan perekonomian ke-5 terbesar di dunia dengan income per kapita mendekati US$ 30.000"* kata Sri Mulyani.

Di depan ratusan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, pada 3 Maret 2017, Menteri Keuangan memperkirakan hampir 90% masyarakat Indonesia sudah menjadi kaum urban, atau tinggal di kota-kota besar. *"Jumlah penduduk kita tahun 2045 itu bisa 310 juta orang. Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan, adalah kota-kota. Ini akan semakin terkoneksi satu sama lain"* jelas Sri Mulyani (RJ Akbar, CG Asmara, 2017).

Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, juga optimistis menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Menurut Menteri Pertanian, Indonesia saat ini telah berada dijalur yang tepat mengarah ke lumbung pangan dunia. *"Ada 11 komoditas strategis. Alhamdulillah sudah selesai empat (beras, jagung, cabai, bawang). Kami selesaikan lagi tahun ini jagung, tahun depan bawang putih, tahun berikutnya apa?" "Setiap tahun, satu per satu kita gugurkan persoalan pertanian di Indonesia, kita mimpi tahun 2045 Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Insyaallah kami bisa capai karena hari ini kita sudah buktikan pada dunia bahwa kita bisa makan beras, jagung, bawang, cabai tanpa impor," ujar Dr. Andi Amran Sulaiman.*

Namun, Indonesia harus bersaing dengan Tiongkok yang akan mewujudkan impian lumbung pangan dunia. Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk 1,4 miliar orang, terbesar di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya, Pemerintah Tiongkok gencar membeli atau menyewa lahan pertanian di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Mereka mengembangkan teknologi pertanian dan peternakan

PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

karena juga ingin menjadi lumbung pangan dunia yang akan memberi makan 9 miliar manusia di muka bumi.

Belum lama ini muncul konsep "Chindinesia", singkatan dari China-India-Indonesia, tiga negara di Asia yang diprediksi akan menjadi pengendali ekonomi dunia pada tahun 2045. Pada saat bersamaan, Tiongkok menjadi negara terbesar yang menguasai ekonomi dunia dan diikuti oleh India, sementara Amerika Serikat dan Indonesia berada pada posisi ketiga dan keempat.

Salah satu cara untuk mengukur kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah menggunakan variabel PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan metode GDP PPP, omzet bisnis Indonesia saat ini sudah menembus Rp 40 ribu triliun, atau terbesar ke-8 dunia. Pada tahun 2045, omzet bisnis Indonesia diprediksi menembus Rp 120 ribu triliun, atau meningkat tiga kali lipat dari sekarang. Dalam posisi demikian, kekuatan ekonomi Indonesia akan menjadi terbesar ke-4 dunia. Sementara Tiongkok pada peringkat ke-1 dengan GDP Rp 600 ribu triliun, India peringkat ke-2 dengan GDP Rp 500 ribu triliun, dan Amerika Serikat peringkat ke-3 dengan GDP Rp 400 ribu triliun. Kemudian di belakangnya adalah Jepang, Jerman, dan Inggris. Dengan pendapatan Rp 375 juta/kapita/tahun atau setara dengan 28 ribu dolar AS per tahun, maka Indonesia pada saat itu sudah masuk katagori negara maju atau menengah maju.

Jika prediksi kekuatan ekonomi Indonesia pada tahun 2045 menjadi kenyataan maka persoalan pangan nasional diharapkan sudah selesai. Namun, sebelumnya Indonesia masih akan menghadapi tantangan dalam pembangunan nasional pada lima periode ke depan. Akhir tahun 2019 adalah penetapan capaian pembangunan nasional dalam periode 2015-2019 yang menjadi patokan target pada periode berikutnya. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2015-2019, sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) perluasan diversifikasi pangan, (3) pengembangan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, dan (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada tahun 2019 produksi padi nasional diperkirakan mencapai 82,1 juta ton, jagung 24,7 juta ton, kedelai 3 juta ton, dan gula tebu 3,82 juta ton (hablur). Demikian pula produksi daging sapi dan kerbau ditargetkan 755 ribu ton (berupa karkas dan daging). Dalam 2,5 tahun ke depan, skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditargetkan meningkat menjadi 92,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan 81,8% pada tahun 2014. Dalam periode yang sama, konsumsi kalori ditergetkan meningkat menjadi 2.150 kkal dari 1.967 kkal pada tahun 2014.

Menjelang tahun 2045, Indonesia paling tidak masih menjalankan empat tahapan pembangunan nasional, yaitu pada periode 2019-2024, 2025-2029, 2030-2034, dan 2035-2039. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dijabarkan dan diwujudkan melalui visi, misi, dan arah pembangunan yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai bangsa Indonesia dan strategi pencapaiannya. Visi tersebut adalah terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan. Rencana jangka panjang tersebut dibagi atas empat periode. Pada RPJM ke empat (2020-2025), masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk sektor pertanian, rencana jangka panjang bahkan hingga tahun 2045, termaktub dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045, yaitu Pembangunan Pertanian dan Bioindustri Berkelanjutan (Biro Perencanaan Kementan, 2014). Mengacu pada visi pembangunan nasional, maka visi pembangunan pertanian adalah mewujudkan masyarakat pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Hal ini sesuai dengan "Paradigma Pembangunan untuk Pertanian". Dalam paradigma ini, pembangunan sektor-sektor lain pada awalnya diarahkan mendukung atau bersinergi dengan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian itu sendiri merupakan *the leading sector* ketahanan pangan, bersifat multifungsi, termasuk menyelesaikan persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain-lain).

PERPUSTAKAAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

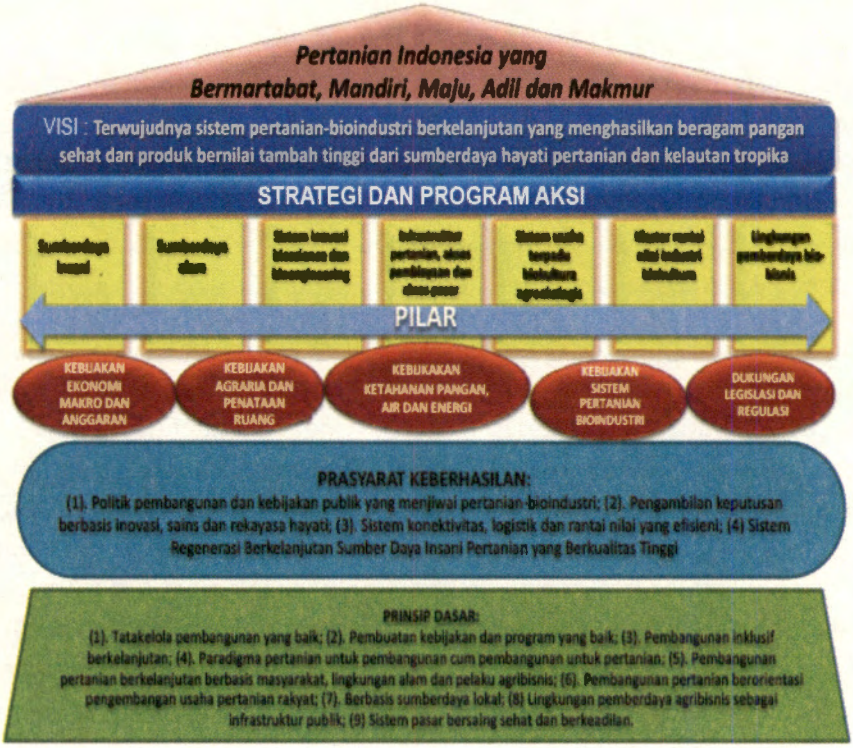

Gambar 43. Kerangka desain Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045.

Gambar 44. Target waktu swasembada komoditas pangan strategis.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pada tataran mikrosektoral, pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan paradigma biokultura yang mencakup Sistem Usaha Pertanian Ekologis Terpadu pada tingkat mikro, Sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat industri atau rantai pasok dan Sistem Pertanian-Bioindustri Terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem ini berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi, seperti sistem integrasi tanaman-ternak-ikan dan sistem integrasi usaha pertanian-bioenergi (biogas, bioelektrik, *biochar*, dan sebagainya), atau sistem integrasi usaha pertanian-*biorefinery* yang termasuk ke dalam sistem pertanian berkelanjutan. Pemikiran tersebut dirangkum pada Gambar 43.

Dalam bentuk yang lebih riil, Kementerian Pertanian menargetkan capaian pembangunan pangan (Gambar 44). Capaian swasembada setiap komoditas pangan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya dan dinamika sosial ekonomi dan politik nasional dan internasional.

Apa yang Dibutuhkan ke Depan?

Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Jakarta pada 31 Juli 2015 mengatakan, "*Indonesia mampu berswasembada atau bahkan menjadi eksportir (lumbung pangan dunia) pangan. Itu bukanlah impian hampa. Oleh karena itu, pembangunan pertanian dan pangan diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia secara bertahap. Prioritas pertama ialah mewujudkan swasembada pangan, utamanya swasembada beras, sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Namun tidak berhenti pada memenuhi kebutuhan pangan. Indonesia harus bisa menjadi negara eksportir pangan, atau lumbung pangan dunia, karena memang mampu untuk itu*".

Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan potensi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia karena memiliki sumber

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

daya lahan yang luas dan terletak di kawasan khatulistiwa. Presiden menambahkan, *"Masa depan dunia ada di sekitar khatulistiwa karena sinar matahari yang terus-menerus akan membuat produksi pangan dan energi tetap melimpah. Jika perbaikan manajemen pangan bisa dipercepat, Indonesia akan menjadi pemasok pangan dunia"*.

Swasembada dan lumbung pangan dapat diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah untuk memberikan perhatian dan bantuan bagi petani. Komitmen kuat direfleksikan oleh besaran dan kesinambungan perhatian dan bantuan yang diberikan untuk memuliakan petani. Termasuk dalam hal ini adalah subsidi, dukungan harga, menghentikan impor, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, pembangunan infrastruktur, dan perluasan areal pertanian.

Menurut FAO, peningkatan produksi saja tidak cukup dan ketahanan pangan mensyaratkan pentingnya akses yang memadai bagi petani dalam berproduksi. Oleh sebab itu diperlukan keberpihakan politik untuk memerangi kemiskinan, terutama di perdesaan. Selain itu diperlukan program jaring pengaman yang efektif. Beberapa aspek penting lainnya yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Pertama, kebijakan dan politik dalam arti luas. Komitmen dan keseriusan pemimpin merupakan hal yang utama, yang menentukan tujuan, target, dan implementasi kebijakan itu sendiri. Pemerintah sudah menggulirkan beragam paket deregulasi untuk mempercepat proses pembangunan. Selain pangan, kebutuhan BBN juga semakin meningkat dari periode ke periode. Pada periode 2007-2008 saja, sekitar 10% produksi pangan global digunakan sebagai bahan baku BBN. Oleh karena itu perlu ketegasan dukungan untuk mengatasi masalah ini. Pihak otoritas pangan perlu memformulasi ulang (*reconsidered*) dan memisahkan antara bahan pangan untuk konsumsi dan BBN.

Kedua, investasi. Negara berkembang memerlukan investasi sebesar 83 miliar dolar AS untuk meningkatkan produksi pangan. Dalam hal ini diperlukan dukungan investasi publik dan swasta, termasuk petani. Untuk meningkatkan investasi swasta dibutuhkan ketegasan pengaturan hak kepemilikan intelektual (*intellectual property rights).*

Ketiga, lahan pertanian baru. Saat ini di negara berkembang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

80% produksi pertanian mengandalkan produktivitas, dan hanya 20% mengandalkan perluasan areal tanam. Artinya, dibutuhkan lahan-lahan baru karena teknologi untuk meningkatkan produktivitas sudah mengalami gejala kemandegan *(levelling off)*. Kementerian Pertanian dalam 2,5 tahun ini memang mengalami kesulitan mendapatkan lahan untuk pengembangan tebu dan kedelai masing-masing seluas 500 ribu ha. FAO (2009) memperkirakan luas lahan subur di negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Amerika Latin dewasa ini sekitar 120 juta hektare, sementara di negara-negara maju diperkirakan sekitar 50 juta hektare. Secara global, masih ada lahan yang cukup potensial dimanfaatkan untuk produksi pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk dunia di masa depan, tetapi sebagian besar hanya cocok untuk beberapa komoditas pangan. FAO juga memperingatkan kendala kimia dan fisika pada lahan pertanian, endemik hama penyakit tanaman, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Keempat, perdagangan yang adil. Beberapa negara mengandalkan perdagangan dunia untuk memenuhi pangan warganya. *"It is estimated that by 2050 developing countries' net imports of cereals will more than double from 135 million metric tonnes in 2008/09 to 300 m illion in 2050. That is why there is a need to move towards a global trading system that is fair and competitive; and that contributes to a dependable market for food"*. Kebijakan yang mendukung, keberpihakan kepada petani, dan pasar yang adil adalah kunci pembangunan pertanian berkelanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi.

Kelima, peningkatan kemampuan SDM petani. Perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan BBN yang diperkirakan terus meningkat akan mengancam ketahanan pangan dalam jangka panjang. Studi di Afrika menunjukkan dampak perubahan iklim telah menurunkan 15-30% produksi pangan. Oleh karena itu, petani secara individual maupun kelembagaan dituntut mampu melakukan mitigasi dan adaptasi iklim.

Keenam, infrastruktur. FAO memperkirakan penggunaan air untuk irigasi pertanian meningkat hingga 11% pada tahun 2050. Meskipun hingga saat ini dunia masih memiliki sumber daya air tawar yang memadai, tetapi beberapa tahun ke depan akan terjadi kelangkaan air untuk berbagai keperluan, termasuk untuk konsumsi manusia dan irigasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian, khususnya di Timur dan Utara Afrika Utara dan Selatan Asia. Hal ini tentu berdampak terhadap upaya penyediaan produksi pangan. Salah satu solusi untuk mencegah krisis pangan adalah menyelamatkan produksi sejak di areal pertanaman hingga pada saat pengolahan. Cara ini dapat menekan kehilangan produksi sekitar 20%.

Masyarakat dunia juga perlu mengubah pola konsumsi pangan ke arah yang lebih efisien. Daging sapi adalah sumber kalori dan protein yang paling tidak efisien, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca enam kali lebih banyak daripada emisi gas serupa dari daging ayam dan telor. Bila 20% konsumsi daging sapi diganti dengan daging unggas, ikan atau susu dapat menyelamatkan ratusan juta hektare hutan dari pencemaran dan degradasi akibat eksploitasi pakan ternak ruminansia besar sepanjang tahun.

Peningkatan produksi adalah target umum pembangunan pertanian. Selain melalui program intensifikasi, peningkatan produksi juga dapat diupayakan melalui penambahan areal tanam. Afrika Sub-Sahara memiliki luas panen komoditas pangan biji-bijian paling rendah di dunia, namun akan menyumbang sepertiga kalori tambahan yang dibutuhkan pada tahun 2050. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan efektivitas manajemen lahan dan air. Pertanian konservasi, misalnya dengan cara mengurangi intensitas pengolahan tanah, melakukan tanam gilir, dan penggunaan mulsa jerami tanaman dapat meningkatkan hasil panen. Mengintegrasikan teknik ini dengan sistem wanatani atau tumpangsari juga dapat meningkatkan produksi dan mencegah kerusakan lingkungan.

Memanfaatkan lahan terdegradasi untuk pertanian dapat menekan intensitas penggundulan hutan, melindungi sumber daya alam, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Lebih dari 14 juta hektare lahan terdegradasi rendah karbon di Kalimantan potensial dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Sejalan dengan pembangunan pertanian, produktivitas perikanan juga perlu ditingkatkan melalui usaha budi daya. Keberlanjutan budi daya perikanan akan mengurangi ketergantungan pangan pada ikan nonbudi daya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Dukungan Politik dan Integritas

Penyediaan pangan bagi masyarakat selalu menjadi perhatian utama seluruh Presiden RI. Pencapaian kinerja pembangunan pangan dan pertanian bervariasi antarera pemerintahan. Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, di era pemerintahan Jokowi-JK juga menjadikan pangan sebagai titik sentral pembangunan pertanian sebagaimana yang di manatkan Presiden Joko Widodo.

Dalam mewujudkan lumbung pangan dunia pada tahun 2045 diperlukan dukungan politik yang kuat dari pihak kompeten. Hal ini tentu tidak terlepas dari visi presiden serta integritas dan kemampuan manajerial pejabat di bawahnya yang mampu menerjemahkan visi tersebut ke tingkat operasionalisasi. Dengan kata lain, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia memerlukan manajemen dan pemimpin yang andal, tegas, berani, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditunjukkan Menteri Pertanian, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam 2,5 tahun awal kepemimpinannya di Kementerian Pertanian Era Kabinet Kerja Jokowi-JK.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Daftar Bacaan

Agustinus, M. 2017. Jokowi: RI akan Masuk 4 Besar Ekonomi Dunia di 2045. DetikFinance. 27 Mar 2017. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/ 3458166/jokowi-ri-akan-masuk-4-besar-ekonomi-dunia-di-2045

Akbar, RJ dan CG Asmara. 2017. Ekonomi Indonesia Tahun 2045 Versi Sri Mulyani: Penduduk RI akan tinggal di kota-kota maju. 3 Maret 2017. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/889755-ekonomi-indonesia-tahun-2045-versi-sri-mulyani

Alexandratos N. and L. Bruinsma. 2012. World Agriculture Towards 2030/2050 The 2012 Revision. Global Perspective Studies Team. ESA Working Paper No. 12-03 June 2012. Agricultural Development Economics Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations. www.fao.org/economic/esa

Antaranews.com., 24 September 2009. FAO: Dunia Butuh Lebih 70 Persen Pangan Pada 2050. http://www.antaranews.com/berita/155356/fao-dunia-butuh-lebih-70-persen-pangan-pada-2050

Becker R, Emily M. Eng, M. Khan. 2015. World Population Expected to Reach 9.7 Billion by 2050. National Geographic. Published July 31, 2015. http://news.nationalgeographic.com/2015/07/world-population-expected-to-reach-9-7-billion-by-2050/

Detik.com., 15 Maret 2017. Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomi Terbesar ke-5 di 2045. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3447049/indonesia-jadi-negara-dengan-ekonomi-terbesar-ke-5-di-2045

DW.com. (Tahun?). Siapa Penyedia Pangan Dunia Tahun 2050? http://www.dw.com/ id/siapa-penyedia-pangan-dunia-tahun-2050/a-16766706

FAO.org. (Year?). How to Feed the World in 2050. http://www.fao.org/fileadmin/ templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf)

PERPUSTAKAAN JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

FAO.org. (Year?). Long-term Perspectives: The outlook for agriculture. http://www.fao.org/docrep/004/y3557e/y3557e06.htm

Inputbali.com., 13 Maret 2015. Diperkirakan Tahun 2050 Bumi Mengalami Krisis Makanan. http://inputbali.com/berita-bali/diperkirakan-tahun-2050-bumi-mengalami-krisis-makanan.

Jitunews.com (Tahun?). FAO: Kita Tingkatkan Produksi Pangan Dunia untuk 9 Miliar Manusia pada Tahun 2050. http://www.jitunews.com/read/46793/fao-kita-tingkatkan-produksi-pangan-dunia-untuk-9-miliar-manusia-pada-tahun-2050

Julianto, PA. 2017. Mentan Target Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia di 2045. Kompas.com 5 Juni 2017. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/ 06/05/173433426/mentan.target.indonesia.jadi.lumbung.pangan.dunia.di.2045

Raihankalla.id., 17 September 2016. Visi Indonesia Emas 2045. http://raihankalla. id/indonesia-emas-2045/#.WWGmE1GLm1s.

Strategimanajemen.net. (Tahun?). Chindianesia: 3 Raksasa Ekonomi yang akan Menguasai Dunia. http://strategimanajemen.net/2017/04/17/chindianesia-3-raksasa-ekonomi-yang-akan-menguasai-dunia/

UGM.ac.id., 03 November 2011. Krisis Pangan dan Bahaya Kelaparan Ancam Dunia. https://www.ugm.ac.id/id/berita/3805-krisis.pangan.dan.bahaya.kelaparan. ancam.dunia

VIVA.co.id., 31 Juli 2015. Jokowi Kepada Petani: RI Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia. http://m.viva.co.id/berita/bisnis/655607-jokowi-kepada-petani-ri-bisa-jadi-lumbung-pangan-dunia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

SUKSES SWASEMBADA

Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM No.3, Ragunan
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7811545
www.pertanian.go.id

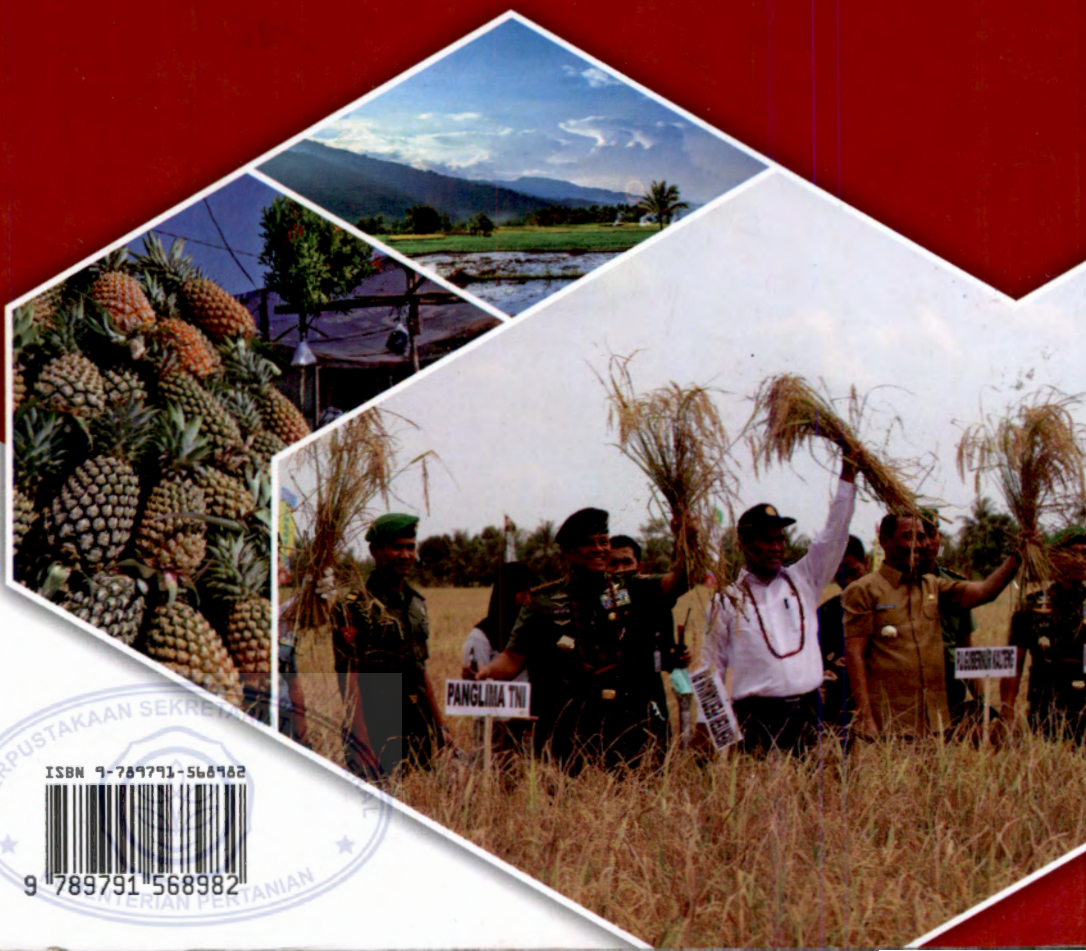

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

ISBN 9-789791-568982
9 789791 568982